



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023 *AUDITED*



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023 *AUDITED*



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL



BUPATI GUNUNGKIDUL

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gunungkidul berbasis akrual untuk Tahun Anggaran 2023 dapat kami selesaikan tepat waktu.

LKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Tujuan umum dari pembuatan LKPD menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 15 adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber dana.

LKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023 disusun dengan cara menggabungkan 47 (empat puluh tujuh) Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi LKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

LKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023, secara ringkas dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara APBD Tahun Anggaran 2023 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut.

- a. Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp1.985.328.493.903,00 dengan realisasi mencapai Rp1.992.172.404.395,86 atau sebesar 100,34%.
- b. Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp2.070.651.923.803,00 dengan realisasi mencapai Rp2.000.900.739.750,10 atau sebesar 96,63%.
- c. Surplus/Defisit Anggaran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Tahun Anggaran 2023 ditetapkan defisit sebesar Rp85.323.429.900,00 dengan realisasi defisit sebesar Rp8.728.335.354,24.
- d. Pembiayaan Netto Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp85.323.429.900,00 dengan realisasi sebesar Rp85.323.429.900,00.
- e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp76.595.094.545,76.

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

Laporan Perubahan SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan SAL merupakan akumulasi SILPA periode berjalan dan tahun-tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut.

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp100.323.429.900,58.
- b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp100.323.429.900,00.
- c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp76.595.094.545,76.
- d. Tidak ada koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya.
- e. Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp76.595.094.545,76.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan, yang terdiri dari Pendapatan, Beban Operasi dan Beban Transfer serta Pos Luar Biasa dengan rincian sebagai berikut.

- a. Pendapatan – LO sebesar Rp2.048.021.394.661,57 terdiri dari :
 - 1) Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp288.542.911.808,57;
 - 2) Pendapatan Transfer sebesar Rp1.707.957.439.873,00; dan
 - 3) Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp51.521.042.980,00.
- b. Beban – LO sebesar Rp2.083.843.680.211,82 terdiri dari :
 - 1) Beban Operasi sebesar Rp1.522.266.675.235,37;
 - 2) Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp196.444.885.285,12;
 - 3) Beban Transfer sebesar Rp364.427.807.944,71; dan
 - 4) Beban Tak Terduga sebesar Rp704.311.746,62.
- c. Defisit dari Kegiatan Operasi sebesar Rp35.822.285.550,25.
- d. Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp304.484.220,00).
- e. Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00
- f. Defisit LO sebesar Rp35.517.801.330,25.

4. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Tahun Anggaran 2023 mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada 31 Desember 2023.

- a. Jumlah Aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.246.936.502.946,67 yang terdiri dari :
 - 1) Aset Lancar sebesar Rp143.949.029.597,72;
 - 2) Investasi Jangka Panjang sebesar Rp379.775.308.326,84;
 - 3) Aset Tetap sebesar Rp2.658.374.752.174,31;
 - 4) Dana Cadangan sebesar Rp 0,00; dan
 - 5) Aset Lainnya sebesar Rp64.837.412.847,80.
- b. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp48.795.136.209,98 yang terdiri dari :
 - 1) Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp48.795.136.209,98; dan
 - 2) Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0,00.
- c. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.199.079.813.219,53

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas serta saldo kas dan setara kas selama Tahun Anggaran 2023. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp77.361.580.000,34 dan saldo kas akhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp100.323.429.900,58.

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Akhir tahun 2023 sebesar Rp3.199.079.813.219,53, sedangkan ekuitas akhir tahun 2022 sebesar Rp3.329.713.227.045,77.

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

CaLK berisi maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan, kebijakan akuntansi, penjelasan atas pos-pos keuangan dan informasi non keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai serta peristiwa penting setelah tanggal pelaporan.

CaLK meliputi penjelasan atau rincian angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas.

Demikian, LKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023 berbasis akrual ini disusun, agar dapat memberikan penjelasan yang memadai serta dapat lebih meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Gunungkidul pada umumnya.

Wonosari, Maret 2024



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	x
PERNYATAAN TELAH DI REVIU	xi
OPINI BPK	
LAPORAN KEUANGAN POKOK	
1. Laporan Realisasi Anggaran	1
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	3
3. Neraca	4
4. Laporan Operasional	6
5. Laporan Arus Kas	7
6. Laporan Perubahan Ekuitas	8
7. Catatan atas Laporan Keuangan	10
- Bab I Pendahuluan	10
- Bab II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan APBD	17
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	46
- Bab IV Kebijakan Akuntansi	53
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	95
A. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	95
B. Penjelasan Pos-Pos Laporan Saldo Anggaran Lebih	138
C. Penjelasan Pos-Pos Neraca	139
D. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	193
E. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas	220
F. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	223
- Bab VI Informasi Tambahan Atas Laporan Keuangan	233
- Bab VII Penutup	277
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Rekening Koran
 - a. Rekening Koran KASDA dan Kas Lainnya
 - b. Rekening Koran BLUD
 - c. Rekening Koran BOK
2. Daftar Saldo KASDA dan Kas Lainnya
3. Laporan Keuangan PERUSDA
 - a. PD BPR Bank Daerah Gunungkidul
 - b. PDAM Tirta Handayani
4. Ikhtisar Laporan APBKal
5. Daftar Saldo Piutang Ekstrakomtabel
6. Daftar Penyertaan Modal Kepada BUMD
7. Daftar Aset Lainnya
8. Daftar Kewajiban Jangka Pendek
9. Aset Tak Berwujud
10. SK Penghapusan Piutang
Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 319/KTPS/2023

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 - 2022	20
Tabel 2.2	PDRB Kabupaten Gunungkidul Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022	21
Tabel 2.3	PDRB Kabupaten Gunungkidul Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022	23
Tabel 2.4	Kontribusi Lapangan Usaha PDRB ADHB Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2022	24
Tabel 2.5	Tingkat Inflasi D.I. Yogyakarta dan Nasional, 2010-2023 (persen)	25
Tabel 2.6	Perkembangan ICOR Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2022	26
Tabel 2.7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	29
Tabel 2.8	Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	31
Tabel 2.9	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	31
Tabel 2.10	Garis Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	32
Tabel 2.11	Proporsi PAD dibandingkan Pendapatan Daerah	34
Tabel 2.12	Proyeksi Perubahan Pendapatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023	37
Tabel 2.13	Proyeksi Belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	40
Tabel 2.14	Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023	41
Tabel 2.15	Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023	43
Tabel 2.16	Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2023	44
Tabel 4.1	Kebijakan Persentase Penyisihan Piutang Berdasarkan Kualitas Piutang	66
Tabel 4.2	Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap	72
Tabel 4.3	Masa Manfaat Aset Tetap	77
Tabel 6.1	Anggaran dan Realisasi Dana Keistimewaan TA 2019 - 2023	233
Tabel 6.2	Tabel Rekapitulasi Realisasi Capaian Keuangan dan Fisik Pelaksanaan Dana Keistimewaan TA 2023	235
Tabel 6.3	Capaian Keuangan Dana Keistimewaan TA 2023	238
Tabel 6.4	Anggaran dan Realisasi Belanja Fungsi Pendidikan TA 2023	240
Tabel 6.5	Anggaran dan Realisasi Belanja Fungsi Kesehatan TA 2023	242
Tabel 6.6	Anggaran dan Realisasi Belanja Infrastruktur	244
Tabel 6.7	Capaian Keuangan dan Fisik DAK Fisik dan DAK Non Fisik	247

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 2.1	Rasio Gini Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	27
Gambar 2.2	PDRB Per Kapita Kab. Gunungkidul Tahun 2018-2022	28
Gambar 2.3	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunungkidul di DI Yogyakarta Tahun 2019-2023	30



BUPATI GUNUNGKIDUL

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023 telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.



Wonosari, Maret 2024

Bupati Gunungkidul

Sunaryanta

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul, 55812
Telepon: (0274) 391006, Faksimile: (0274) 391038, 391006



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Neraca per tanggal 31 Desember 2023, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Semua informasi yang termuat dalam laporan keuangan adalah penyajian dan menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Reviu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Reviu terutama mencakup penelusuran angka, permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan/pejabat pengelola keuangan daerah, dan prosedur analitis yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat penyebab yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas, tidak disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

INSPEKTUR, 

SARTOYO, S.Sos, M.Si ✓
Pembina Utama Muda, Gol.IV/c
NIP. 19710325 199101 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 5 Februari 2023

Kepada

Yth. Bupati Gunungkidul

di-

WONOSARI

Nomor : 700.1.2.8/LKPD/007

Sifat : Rahasia

Lampiran : 1 bendel

Hal : Hasil Reviu atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun
2023

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 02/Rev-ITDA/LKPD/2024 tanggal 17 Januari 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023. Reviu dilaksanakan atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

A. Dasar Reviu

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 900.1.8.4/2/2024 perihal Reviu LKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023;
9. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 02/Rev-ITDA/LKPD/2024 untuk melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023.

B. Tujuan dan Sasaran Reviu

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dan LKPD telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Sasaran reviu meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

C. Waktu Pelaksanaan Reviu

Reviu atas LKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 dilaksanakan mulai tanggal 22 Januari sampai dengan 2 Februari 2024.

D. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu meliputi penilaian terbatas terhadap keandalan Sistem Pengendalian Internal atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan dan kesesuaian dengan SAP.

E. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu LKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah. Semua informasi yang termuat dalam laporan keuangan merupakan penyajian dan menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Reviu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Reviu terutama mencakup penelusuran angka, permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan/pejabat pengelola keuangan daerah, dan prosedur analitis yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait, dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat penyebab yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas, tidak disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

F. Simpulan dan Rekomendasi

Simpulan dan rekomendasi atas penyajian LKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 dituangkan dalam Catatan Hasil Reviu sebagaimana terlampir.

Demikian Laporan Hasil Reviu terhadap LKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 mohon menjadikan periksa.

INSPEKTUR, 

SAPTOYO, S.Sos, M.Si ✕
Pembina Utama Muda, Gol.IV/c
NIP. 19710325 199101 1 001



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemkab Gunungkidul untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemkab Gunungkidul. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemkab Gunungkidul, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemkab Gunungkidul tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 6B/LHP/XVIII.YOG/03/2024 tanggal 27 Maret 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Yogyakarta, 27 Maret 2024
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta
Penanggung Jawab Pemeriksaan,


Widhi Widayat, S.E., M.Si., CA, CSFA, Ak, CFrA
Register Negara Akuntan Nomor 18933



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Ref	Anggaran 2023	Realisasi 2023 Audited	%	Realisasi 2022 Audited
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Pajak Daerah	5.1.1.1.a	76.056.035.000,00	80.211.846.865,00	105,46	77.069.733.200,50
Retribusi Daerah	5.1.1.1.b	34.276.784.905,00	35.520.370.106,00	103,63	30.236.710.833,65
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.c	16.354.127.008,00	16.354.134.672,07	100,00	16.569.133.085,04
Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.d	140.553.240.239,00	145.232.498.946,79	103,33	189.640.744.871,67
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		267.240.187.152,00	277.318.850.589,86	103,77	313.516.321.990,86
PENDAPATAN TRANSFER					
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.a.1	20.812.199.365,00	20.812.199.365,00	100,00	26.798.133.902,00
Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.a.2	898.397.959.000,00	912.903.769.190,00	101,61	865.880.327.665,00
Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.1.1.2.a.3	82.185.659.000,00	74.024.339.759,00	90,07	141.410.401.807,00
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.1.1.2.a.4	317.325.875.000,00	309.405.479.537,00	97,50	283.497.310.009,00
Jumlah Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan		1.318.721.692.365,00	1.317.145.787.851,00	99,88	1.317.586.173.383,00
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
Dana Insentif Daerah	5.1.1.2.b.1	0,00	0,00	0,00	12.428.629.000,00
Dana Desa	5.1.1.2.b.4	179.933.551.000,00	179.933.551.000,00	100,00	144.366.117.000,00
Insentif Fiskal	5.1.1.2.b.5	5.952.497.000,00	5.952.497.000,00	100,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya		185.886.048.000,00	185.886.048.000,00		156.794.746.000,00
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH					
Pendapatan Bagi Hasil		126.340.246.831,00	127.194.303.115,00	100,68	123.106.178.070,00
Bantuan Keuangan		81.160.319.555,00	78.485.930.549,00	96,70	72.072.803.728,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		207.500.566.386,00	205.680.233.664,00	99,12	195.178.981.798,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		1.712.108.306.751,00	1.708.712.069.515,00	99,80	1.669.559.901.181,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.a	5.980.000.000,00	6.141.484.291,00	102,70	5.599.601.000,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		5.980.000.000,00	6.141.484.291,00	102,70	5.599.601.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.985.328.493.903,00	1.992.172.404.395,86	100,34	1.988.675.824.171,86
BELANJA					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	853.443.622.697,00	839.785.150.907,00	98,40	826.287.498.713,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.b	563.480.576.709,00	531.453.185.475,10	94,32	500.452.445.773,56
Belanja Subsidi	5.1.2.1.c	270.000.000,00	269.872.500,00	99,95	1.437.202.577,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.d	73.157.751.628,00	71.692.177.954,00	98,00	57.152.607.491,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.e	16.675.450.000,00	16.631.362.268,00	99,74	18.710.519.387,00
Jumlah Belanja Operasi		1.507.027.401.034,00	1.459.831.749.104,10	96,87	1.404.040.273.941,56
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.a	5.415.827.500,00	4.510.814.335,00	83,29	5.366.354.820,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.b	45.585.234.753,00	42.951.484.642,00	94,22	109.055.394.711,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.c	93.986.597.141,00	80.119.934.255,00	85,25	69.278.521.126,45
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.d	42.806.483.233,00	40.332.789.870,00	94,22	79.328.069.800,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.e	10.161.726.919,00	10.001.111.569,00	98,42	6.114.846.943,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.f	-	-	-	55.942.100,00
Jumlah Belanja Modal		197.955.869.546,00	177.916.134.671,00	89,88	269.199.129.500,45

Uraian	Ref	Anggaran 2023	Realisasi 2023 Audited	%	Realisasi 2022 Audited
1	2	3	4	5	6
BELANJA TIDAK TERDUGA					
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3	1.048.541.123,00	235.998.075,00	22,51	10.131.998.741,62
Jumlah Belanja Tidak Terduga		1.048.541.123,00	235.998.075,00	22,51	10.131.998.741,62
BELANJA TRANSFER					
Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.a	16.416.635.450,00	14.768.381.250,00	89,96	14.194.807.550,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.b	348.203.476.650,00	348.148.476.650,00	99,98	308.885.310.880,00
Jumlah Belanja Transfer		364.620.112.100,00	362.916.857.900,00	99,53	323.080.118.430,00
JUMLAH BELANJA		2.070.651.923.803,00	2.000.900.739.750,10	96,63	2.006.451.520.613,63
SURPLUS/(DEFISIT)	5.1.2.5	(85.323.429.900,00)	(8.728.335.354,24)	10,23	(17.775.696.441,77)
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.3.1	100.323.429.900,00	100.323.429.900,00	100,00	144.266.126.342,35
JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN		100.323.429.900,00	100.323.429.900,00	100,00	144.266.126.342,35
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Penyertaan Modal Daerah	5.1.3.2	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	26.167.000.000,00
JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN		15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	26.167.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO		85.323.429.900,00	85.323.429.900,00	100,00	118.099.126.342,35
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.4	-	76.595.094.545,76		100.323.429.900,58

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



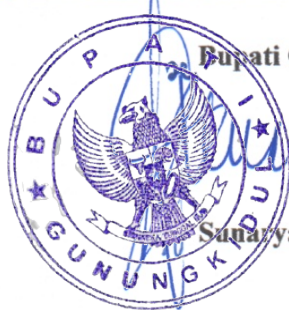


PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Ref	2023 Audited	2022 Audited
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1.	100.323.429.900,58	144.266.126.342,35
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2.	100.323.429.900,00	144.266.126.342,35
	Sub Total		0,58	0,00
3	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	5.2.3	76.595.094.545,76	100.323.429.900,58
	Sub Total		76.595.094.545,76	100.323.429.900,58
	Saldo Anggaran Lebih Akhir		76.595.094.546,34	100.323.429.900,58

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.


Bupati Gunungkidul
[Signature]
Sunaryanta



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	31 Desember 2023 <i>Audited</i>	31 Desember 2022 <i>Audited</i>
ASET			
ASET LANCAR	5.3.1.		
Kas dan Setara Kas	5.3.1.1	77.361.579.999,76	100.490.701.270,58
Kas di Kas Daerah		36.099.151.937,04	45.813.217.053,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		38.665.083,00	4.125.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan		682.402.274,00	269.647.792,00
Kas di BLUD		35.210.068.789,72	53.259.201.093,58
Kas Dana BOS		1.047.147.692,00	967.296.835,00
Kas Lainnya		123.746.160,00	177.213.497,00
Kas Dana BOK Puskesmas		4.160.398.064,00	0,00
Piutang Daerah	5.3.1.2		
Piutang Pajak		25.621.993.891,00	21.671.019.864,00
Penyisihan Piutang Pajak Daerah		(12.135.735.722,42)	(10.375.733.403,37)
Piutang Pajak Netto		13.486.258.168,58	11.295.286.460,63
Piutang Retribusi		449.626.877,00	757.880.647,00
Penyisihan Piutang Retribusi		(340.878.530,00)	(219.908.149,30)
Piutang Retribusi Netto		108.748.347,00	537.972.497,70
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		18.352.612.613,65	16.354.621.112,79
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		(91.763.063,07)	(81.773.105,56)
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto		18.260.849.550,58	16.272.848.007,23
Piutang Lain-lain PAD yang sah		1.149.980.061,00	868.655.228,38
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah		(5.749.900,31)	(4.382.399,04)
Piutang Lain-lain PAD yang sah Netto		1.144.230.160,69	864.272.829,34
Piutang Transfer Antar Daerah		184.898.665,00	833.114.942,00
Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah		(924.493,32)	(4.165.574,71)
Piutang Transfer Netto		183.974.171,68	828.949.367,29
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.3	10.000.000,00	70.000.000,00
Persediaan	5.3.1.4	33.252.947.204,43	33.591.592.074,65
Jumlah Aset Lancar		143.808.587.602,72	163.951.622.507,42
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.2		
Investasi Permanen	5.3.2.1		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		379.775.308.326,84	361.200.530.096,11
Jumlah Investasi Permanen		379.775.308.326,84	361.200.530.096,11
Jumlah Investasi Jangka Panjang		379.775.308.326,84	361.200.530.096,11
ASET TETAP	5.3.3		
Tanah	5.3.3.1	671.154.626.363,00	665.588.681.028,00
Peralatan dan Mesin	5.3.3.2	872.387.805.319,56	820.522.778.515,77
Gedung dan Bangunan	5.3.3.3	1.344.658.133.138,91	1.278.057.874.047,65
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.3.4	1.476.558.644.314,03	1.421.641.563.712,03
Aset Tetap Lainnya	5.3.3.5	143.486.353.059,01	127.616.801.314,52
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.3.6	7.466.767.449,00	19.663.967.169,00
Akumulasi Penyusutan	5.3.3.7	(1.856.399.130.986,36)	(1.667.219.178.788,16)
Jumlah Aset Tetap		2.659.313.198.657,15	2.665.872.486.998,81

(Dalam Rupiah)

Uraian	Reff	31 Desember 2023 <i>Audited</i>	31 Desember 2022 <i>Audited</i>
ASET LAINNYA	5.3.4		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	188.750.000,00
Aset Tak Berwujud		55.560.198.442,08	53.304.574.284,08
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(32.629.551.495,50)	(27.621.160.070,96)
Aset Tidak Berwujud Netto		22.930.646.946,58	25.683.414.213,12
Aset Lain-lain		135.005.487.411,19	134.706.247.556,44
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(95.871.074.509,97)	(218.289.284,64)
Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)		2.772.353.000,00	0,00
Jumlah Aset Lainnya		64.837.412.847,80	160.360.122.484,92
JUMLAH ASET		3.247.734.507.434,51	3.351.384.762.087,26
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.5		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		436.120.053,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka		1.749.270.787,98	1.265.810.873,40
Utang Belanja		46.279.379.968,00	20.405.664.168,09
Utang Jangka Pendek Lainnya		330.365.401,00	60.000,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		48.795.136.209,98	21.671.535.041,49
JUMLAH KEWAJIBAN		48.795.136.209,98	21.671.535.041,49
EKUITAS	5.3.6		
Ekuitas		3.198.939.371.224,53	3.329.713.227.045,77
JUMLAH EKUITAS		3.198.939.371.224,53	3.329.713.227.045,77
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.247.734.507.434,51	3.351.384.762.087,26

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



 Bupati Gunungkidul



 Sunaryanta



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Ref	2023 Audited	2022 Audited	Kenaikan/ Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.1	84.098.352.561,00	78.896.130.814,50	5.202.221.746,50	6,59
Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.1.2	35.224.925.990,86	30.096.131.540,59	5.128.794.450,27	17,04
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.3	24.010.287.897,30	16.524.205.416,02	7.486.082.481,28	45,30
Lain-lain PAD yang Sah	5.4.1.1.4	145.209.345.359,41	148.041.571.384,05	(2.832.226.024,64)	(1,91)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		288.542.911.808,57	273.558.039.155,16	14.984.872.653,41	5,48
PENDAPATAN TRANSFER					
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN					
Dana Bagi Hasil	5.4.1.2.1.1	20.705.786.000,00	29.676.900.267,00	(8.971.114.267,00)	(30,23)
Dana Alokasi Umum	5.4.1.2.1.2	912.903.769.190,00	865.880.327.665,00	47.023.441.525,00	5,43
Dana Alokasi Khusus-Fisik	5.4.1.2.1.3	74.024.339.759,00	141.410.401.807,00	(67.386.062.048,00)	(47,65)
Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	5.4.1.2.1.4	309.405.479.537,00	283.497.310.009,00	25.908.169.528,00	9,14
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.317.039.374.486,00	1.320.464.939.748,00	(3.425.565.262,00)	(0,26)
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
Dana Insentif Daerah	5.4.1.2.2.1	0,00	12.428.629.000,00	(12.428.629.000,00)	(100,00)
Dana Desa	5.4.1.2.2.2	179.933.551.000,00	144.366.117.000,00	35.567.434.000,00	24,64
Insentif Fiskal	5.4.1.2.2.3	5.952.497.000,00	0,00	5.952.497.000,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		185.886.048.000,00	156.794.746.000,00	29.091.302.000,00	18,55
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH					
Pendapatan Bagi Hasil	5.4.1.2.3.1	126.546.086.838,00	119.737.599.672,00	6.808.487.166,00	5,69
Bantuan Keuangan	5.4.1.2.3.2	78.485.930.549,00	72.072.803.728,00	6.413.126.821,00	8,90
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		205.032.017.387,00	191.810.403.400,00	13.221.613.987,00	6,89
Total Pendapatan Transfer		1.707.957.439.873,00	1.669.070.089.148,00	38.887.350.725,00	2,33
LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
Pendapatan Hibah	5.4.1.3.1	51.428.189.935,00	50.728.498.931,85	699.691.003,15	1,38
Pendapatan Lainnya	5.4.1.3.2	92.853.045,00	80.631.912,00	12.221.133,00	15,16
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		51.521.042.980,00	50.809.130.843,85	711.912.136,15	1,40
JUMLAH PENDAPATAN		2.048.021.394.661,57	1.993.437.259.147,01	54.584.135.514,56	2,74
BEBAN					
BEBAN OPERASI					
Beban Pegawai	5.4.2.1.1	864.370.681.629,00	821.459.464.164,00	42.911.217.465,00	5,22
Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	565.894.679.492,26	514.703.718.622,70	51.190.960.869,56	9,95
Beban Subsidi	5.4.2.1.3	269.872.500,00	1.437.202.577,00	(1.167.330.077,00)	(81,22)
Beban Hibah	5.4.2.1.4	72.492.986.935,00	58.885.331.885,34	13.607.655.049,66	23,11
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.5	16.650.562.268,00	18.710.519.387,00	(2.059.957.119,00)	(11,01)
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.6	2.719.502.411,11	2.656.989.171,11	62.513.240,00	2,35
Jumlah Beban Operasi		1.522.398.285.235,37	1.417.853.225.807,15	104.545.059.428,22	7,37
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI					
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.2.2.1	80.627.328.270,33	73.826.153.754,23	6.801.174.516,10	9,21
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.2.2.2	26.981.358.430,06	26.220.562.619,89	760.795.810,17	2,90
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.4.2.2.3	82.443.953.268,31	80.502.092.990,79	1.941.860.277,52	2,41
Beban Penyusutan Aset Lainnya	5.4.2.2.4	1.383.853.891,88	47.596.428,48	1.336.257.463,40	2.807,47
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.4.2.2.5	5.008.391.424,54	4.203.807.719,92	804.583.704,62	19,14
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi		196.444.885.285,12	184.800.213.513,31	11.644.671.771,81	6,30
BEBAN TRANSFER					
Beban Bagi Hasil	5.4.2.3.1	16.279.331.294,71	14.328.084.450,00	1.951.246.844,71	13,62
Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.3.2	348.148.476.650,00	308.885.310.880,00	39.263.165.770,00	12,71
Jumlah Beban Transfer		364.427.807.944,71	323.213.395.330,00	41.214.412.614,71	12,75
BEBAN TAK TERDUGA					
Beban Tak Terduga	5.4.2.4.1	704.311.746,62	7.402.380.018,45	(6.698.068.271,83)	(90,49)
Jumlah Tak Terduga		704.311.746,62	7.402.380.018,45	(6.698.068.271,83)	(90,49)
JUMLAH BEBAN		2.083.975.290.211,82	1.933.269.214.668,91	150.706.075.542,91	7,80
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		(35.953.895.550,25)	60.168.044.478,10	(96.121.940.028,35)	(159,76)

Uraian	Ref	2023 Audited	2022 Audited	Kenaikan/ Penurunan	%
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
SURPLUS NON OPERASIONAL					
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar.	5.4.4.1.1	304.484.220,00	1.202.608.667,00	(898.124.447,00)	(74,68)
Jumlah Surplus Non Operasional		304.484.220,00	1.202.608.667,00	(898.124.447,00)	(74,68)
DEFISIT NON OPERASIONAL					
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.4.2.1	0,00	1.528.658.585,47	(1.528.658.585,47)	(100,00)
Jumlah Defisit Non Operasional		0,00	1.528.658.585,47	(1.528.658.585,47)	(100,00)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		304.484.220,00	(326.049.918,47)	630.534.138,47	(193,39)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(35.649.411.330,25)	59.841.994.559,63	(95.491.405.889,88)	(159,57)
SURPLUS/DEFISIT LO		(35.649.411.330,25)	59.841.994.559,63	(95.491.405.889,88)	(159,57)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



 Bupati Gunungkidul



 Sunaryanta



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
METODE LANGSUNG

(dalam rupiah)

Uraian	Ref	2023 Audited	2022 Audited
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1.		
Arus Kas Masuk	5.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1.a	80.211.846.865,00	77.069.733.200,50
Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.1.b	35.520.370.106,00	30.236.710.833,65
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.c	16.354.134.672,07	16.569.133.085,04
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.1.d	144.928.014.726,79	188.438.136.204,67
Penerimaan Dana Bagi Hasil	5.5.1.1.e	20.812.199.365,00	26.798.133.902,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.1.f	912.903.769.190,00	865.880.327.665,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.5.1.1.g	74.024.339.759,00	141.410.401.807,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.5.1.1.h	309.405.479.537,00	283.497.310.009,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah	5.5.1.1.i	0,00	12.428.629.000,00
Penerimaan Dana Desa	5.5.1.1.j	179.933.551.000,00	144.366.117.000,00
Penerimaan Insentif Fiskal	5.5.1.1.k	5.952.497.000,00	0,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	5.5.1.1.l	127.194.303.115,00	123.106.178.070,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	5.5.1.1.m	78.485.930.549,00	72.072.803.728,00
Penerimaan Hibah	5.5.1.1.n	6.141.484.291,00	5.599.601.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.991.867.920.175,86	1.987.473.215.504,86
Arus Kas Keluar	5.5.1.2		
Pembayaran Pegawai	5.5.1.2.a	839.785.150.907,00	826.287.498.713,00
Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.1.2.b	531.453.185.475,10	500.452.445.773,56
Pembayaran Subsidi	5.5.1.2.c	269.872.500,00	1.437.202.577,00
Pembayaran Belanja Hibah	5.5.1.2.d	71.692.177.954,00	57.152.607.491,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	5.5.1.2.e	16.631.362.268,00	18.710.519.387,00
Pembayaran Tidak Terduga	5.5.1.2.f	235.998.075,00	10.131.998.741,62
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	5.5.1.2.g	362.916.857.900,00	323.080.118.430,00
Jumlah Arus Keluar Kas		1.822.984.605.079,10	1.737.252.391.113,18
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		168.883.315.096,76	250.220.824.391,68
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
Arus Kas Masuk	5.5.2.1		
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.2.1.a	289.156.020,00	1.202.608.667,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.1.b	15.328.200,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		304.484.220,00	1.202.608.667,00
Arus Kas Keluar	5.5.2.2		
Perolehan Tanah	5.5.2.2.a	4.510.814.335,00	5.366.354.820,00
Perolehan Peralatan dan mesin	5.5.2.2.b	42.951.484.642,00	109.055.394.711,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.c	80.119.934.255,00	69.278.521.126,45
Perolehan Jalan, irigasi dan jaringan	5.5.2.2.d	40.332.789.870,00	79.328.069.800,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.e	10.001.111.569,00	6.114.846.943,00
Perolehan Aset Lainnya	5.5.2.2.f	0,00	55.942.100,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2.2.g	15.000.000.000,00	26.167.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		192.916.134.671,00	295.366.129.500,45
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		(192.611.650.451,00)	(294.163.520.833,45)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.3		
Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.3.1.a	136.181.908.214,00	142.911.953.575,00
Jumlah Arus Kas Masuk		136.181.908.214,00	142.911.953.575,00
Arus Kas Keluar	5.5.3.2		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.3.2.a	135.415.422.760,00	142.911.953.575,00
Jumlah Arus Kas Keluar		135.415.422.760,00	142.911.953.575,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	5.5.3.3	766.485.454,00	-
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		(22.961.849.900,24)	(43.942.696.441,77)
Saldo Awal Kas		100.323.429.900,58	144.266.126.342,35
Saldo Akhir Kas		77.361.580.000,34	100.323.429.900,58

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan


 Bupati Gunungkidul
 Sunaryanta



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	Ref	2023 Audited	2022 Audited
EKUITAS AWAL	5.6.1	3.329.713.227.045,77	3.277.700.859.221,22
Surplus/Defisit - LO	5.6.2	(35.649.411.330,25)	59.841.994.559,63
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	5.6.3	(95.124.444.490,99)	(7.829.626.735,08)
-Penyesuaian Kas dan Setara Kas		(0,58)	0,00
-Penyesuaian Piutang dan Penyisihan Piutang		306.801.379,25	1.291.588.979,11
-Penyesuaian Persediaan		6.539.213,56	(477.589.760,15)
-Penyesuaian Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		964.084.351,58	(22.317.650.440,48)
-Penyesuaian Aset Lainnya dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(94.325.325.132,53)	(4.646.960.126,14)
-Penyesuaian Pendapatan Diterima		(1.534.569,44)	0,00
-Penyesuaian Utang Belanja		7.614.399,09	245.400,00
-Penyesuaian Penyertaan Modal		(2.082.897.052,92)	19.982.318.712,03
-Penyesuaian Pendapatan		347.402,00	0,00
-Penyesuaian Beban		(74.481,00)	(1.661.579.499,45)
JUMLAH EKUITAS AKHIR	5.6.4	3.198.939.371.224,53	3.329.713.227.045,77

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk tahun anggaran yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sudah selesai disusun. Maksud penyusunan laporan keuangan adalah memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2023 yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gunungkidul disusun sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Daerah. LKPD terdiri atas 7 (tujuh) komponen yaitu 1) Laporan Realisasi Anggaran, 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 3) Neraca, 4) Laporan Operasional, 5) Laporan Arus Kas, 6) Laporan Perubahan Ekuitas, dan 7) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan juga dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul selama satu periode Tahun Anggaran 2023.

Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Gunungkidul disusun dengan tujuan untuk menyampaikan informasi yang transparan dan bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, berupa posisi keuangan dan aset daerah dan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan di Tahun Anggaran 2023 yaitu membandingkan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan, dengan anggaran yang telah ditetapkan serta untuk mengetahui sisa perhitungan tahun anggaran berkenaan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menerapkan akuntansi berbasis akrual sejak 1 Januari 2015 berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) namun masih terbatas pada menu perencanaan dan penganggaran, sedangkan untuk menu penatausahaan dan pelaporan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Disamping itu untuk pengelolaan aset dan persediaan telah digunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset (SIM Aset) dan Sistem Informasi Manajemen Persediaan (SIM Persediaan) sejak tahun 2018.

Laporan keuangan kadangkala mempunyai potensi kesalahpahaman bagi pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menyusun laporan keuangan harus disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan yang diperlukan untuk melakukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, termasuk juga penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).

Catatan atas Laporan Keuangan perlu dibuat dengan menyajikan penjelasan dan informasi atas seluruh akun dan sub akun pada pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai untuk memudahkan pengguna terutama Lembaga Pemeriksa dalam memahami laporan keuangan dengan jelas dan tidak multi tafsir. Laporan keuangan disusun dengan prinsip *full disclosure* yaitu menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna

Laporan keuangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul digunakan untuk membandingkan realisasi



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagai entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di SKPD dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan daerah, yaitu:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400)
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Indonesia Nomor 6402);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
 - 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 - 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur tentang Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 - 16 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
 - 17 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 88);
 - 18 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 13);

- 19 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- 20 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 21 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 104 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023;
- 22 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.
- 23 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023 memuat penjelasan dan atau catatan atas laporan keuangan dalam periode Tahun Anggaran 2023 yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, yang menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.
- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD, yang menjelaskan tentang ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan indikator pencapaian target kinerja APBD.
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, yang menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Bab IV Kebijakan Akuntansi, yang menjelaskan entitas akuntansi/pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.
- Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan, yang merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan mengenai pendapatan LRA, Belanja, Transfer, Pembiayaan, Pendapatan LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana, dan pos komponen Laporan Arus Kas.
- Bab VI Informasi Tambahan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang menyajikan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- Bab VII Penutup.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN APBD

2.1 Ekonomi Makro

Prioritas pembangunan daerah Tahun 2023 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 dilaksanakan sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 dan diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tanggal 31 Oktober 2023. Adapun penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023 dijabarkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 30 Tahun 2023 Tentang tentang Perubahan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2023.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul 2023 menjadi pedoman dan acuan bagi Bupati bersama DPRD dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara yang menjadi dasar Penyusunan APBD Tahun 2023. RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 telah disusun dengan memperhatikan keterkaitan, sinergi, dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lain tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional.

Mendasarkan perkembangan yang terjadi pada awal tahun sampai triwulan II Tahun 2023, dengan menyesuaikan PMK No.194/PMK.07/2022 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah TA 2023 sebesar 2,2% maka perlu ada penyesuaian program kegiatan serta targetnya dalam upaya pemenuhan batas tersebut. Selain itu, memperhatikan hasil evaluasi atas pelaksanaan APBD Kabupaten Gunungkidul TA 2022, adanya perubahan asumsi pendapatan, serta pemanfaatan SiLPA, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian skema pembangunan tahun 2023.

Perubahan-perubahan yang terjadi disesuaikan dengan kondisi yang ada, diformulasikan kembali dalam kebijakan pembangunan daerah sebagaimana telah termuat dalam Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Anggaran 2023 Nomor 900.1.14/5623 dan Nomor 900.1.14/303 dan Nota Kesepakatan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Nomor 900.1.14/5624 dan 900.1.14/304. Perubahan formulasi kebijakan dan rencana pelaksanaan dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah memberi arah dan pedoman terhadap program, kegiatan yang perlu disesuaikan dan perlu didanai melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023. Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan untuk meneruskan upaya pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengamankan kesiapan anggaran dalam rangka pemulihan dari COVID-19.

2.2 Gambaran Umum Makro Ekonomi Kabupaten Gunungkidul

2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Indikator makro yang digunakan untuk melihat kinerja nyata ekonomi suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat memberikan *trickle down effect* bagi proses pembangunan di suatu wilayah melalui perluasan kesempatan kerja untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Tahun 2023 yang menjadi fokus utama dalam menentukan kebijakan adalah upaya pemulihan ekonomi dampak pandemi COVID-19. Memasuki tahun ke-4 pelaksanaan RPJMN 2020-2024 sudah banyak upaya yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan di Tahun 2022, dan dilanjutkan dalam proses perencanaan Tahun 2023.

RKP Tahun 2023 diarahkan untuk mengatasi efek sosial ekonomi guna mengejar target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode Tahun 2020-2024. Rencana Kerja Pemerintah 2023 mengusung tema dan prioritas pembangunan nasional tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Arah kebijakan RKP tahun 2023 adalah sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim;
2. Peningkatan kualitas SDM;
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job* (pekerjaan yang layak);
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi;
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta selama 2023 tumbuh sebesar 5,07 persen (c-to-c). Semua lapangan usaha tumbuh positif, dan yang tertinggi dicapai lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi, sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit (LNPRT). Ekonomi DIY Triwulan IV-2023 tumbuh 4,86 Persen (y-on-y). Dibanding triwulan III-2023 perekonomian DIY tumbuh sebesar 2,90 persen (q-to-q). Lapangan usaha yang tumbuh tinggi adalah Jasa Lainnya, diikuti oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Dari sisi pengeluaran, terutama didorong oleh pertumbuhan Konsumsi Pemerintah dan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit.

Berdasarkan data dari BPS, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2018-2019 mengalami kenaikan secara signifikan. Akan tetapi, dengan adanya Pandemi COVID-19 di Tahun 2020 berdampak pada turunnya LPE di Kabupaten Gunungkidul hingga menyentuh angka negatif sebesar -0,68. Di Tahun 2021 kebangkitan dari COVID-19 mulai dirasakan yang ditunjukkan dengan kenaikan angka LPE menjadi 5,31 di tahun 2021 dan 5,37 di tahun 2022, sedangkan di tahun 2023 turun pada angka 5,04.

Sektor pariwisata Tahun 2023 yang mulai berangsur pulih dengan penerapan new normal dengan menerapkan protokol kesehatan diharapkan akan memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul. Pembangunan fasilitas pendukung penerapan protokol kesehatan juga telah dilakukan guna memberikan kenyamanan dan rasa aman kepada pengunjung bahwa obyek wisata telah menerapkan protokol kesehatan. Berkembangnya sektor pariwisata akan memberikan dorongan produktivitas pada sektor yang lain khususnya sektor industri pengolahan dan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

manufaktur yang merupakan penunjang dalam pencapaian visi daerah yang menitikberatkan pada pariwisata daerah.

Pemberlakuan penurunan level PPKM di Jawa Bali dan new normal di awal tahun 2022, menjadi arah positif dalam meraih proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 yaitu dikisaran 3,25%-5,25%, dimana angka tersebut didasarkan pada pendekatan “distribusi” target makro DIY pada Kabupaten/Kota berdasarkan bobot tiap kabupaten/Kota, dan diselaraskan dengan proyeksi dalam RPJMD Gunungkidul 2021-2026. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 – 2023

Rincian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunungkidul (persen)	5,34	-0,68	5,31	5,37	5,04
Pertumbuhan Ekonomi DIY (persen)	6,59	-2,67	5,58	5,15	5,07

Sumber: BPS, 2022

Dari Tahun 2019-2023 hampir selama 5 tahun Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Gunungkidul mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Namun demikian di tahun 2020 angka LPE Kabupaten Gunungkidul turun di angka -0,68% jauh dari target LPE di RKPD Tahun 2021 sebesar 5,42%. Turunnya angka LPE tersebut disebabkan adanya Pandemi COVID-19 di awal tahun 2020. Di tahun 2021, adaptasi terhadap COVID-19 dan new normal mampu sedikit memulihkan kondisi perekonomian di Gunungkidul sehingga capaian LPE di tahun 2022 sebesar 5,37%, di tahun 2023 sebesar 5,04%.

2.2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan indikator makro ekonomi yang menggambarkan kinerja perekonomian suatu wilayah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan hasil daerah dalam mengelola dan mengolah sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa dalam kurun waktu satu tahun. Besaran nilai PDRB suatu wilayah yang tercermin melalui perputaran perekonomian dalam satu tahun. Melalui pencapaian tahun ke tahun maka akan terlihat bagaimana perkembangan tingkat



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Dinamika perkembangan nilai PDRB Kabupaten Gunungkidul sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Gunungkidul menurut lapangan usaha sebagaimana ditampilkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
PDRB Kabupaten Gunungkidul Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Sektor PDRB	Tahun				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.431,95	4.678,18	4.837,89	5.473,17	6.228,67
B. Pertambangan dan Penggalian	222,10	206,99	214,00	229,73	256,85
C. Industri Pengolahan	1.781,91	1.724,04	1.792,91	1.935,36	2.085,20
D. Pengadaan Listrik dan Gas	17,87	17,51	17,99	19,78	22,18
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	30,79	31,08	33,69	35,81	38,17
F. Konstruksi	1.953,47	1.709,06	1.942,17	2.137,52	2.248,94
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.775,16	1.735,22	1.823,58	2.049,77	2.207,98
H. Transportasi dan Pergudangan	946,52	865,11	942,85	1.141,02	1.297,00
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.115,09	1.061,92	1.229,93	1.430,59	1.577,94
J. Informasi dan Komunikasi	1.355,48	1.614,72	1.930,97	2.062,11	2.211,06
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	450,97	437,27	472,35	545,32	620,60
L. Real Estat	697,94	721,00	742,00	792,03	845,58
M,N. Jasa Perusahaan	83,86	72,95	80,78	90,49	101,59
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.771,32	1.782,25	1.809,44	1.934,62	2.019,12
P. Jasa Pendidikan	1.170,72	1.246,36	1.355,69	1.424,16	1.565,28
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	378,95	469,14	509,43	553,64	624,24
R, S, T, U. Jasa lainnya	660,66	563,37	694,86	893,68	1.025,92
Produk Domestik Regional Bruto	18.844,74	18.936,74	20.430,52	22.748,83	24.976,31



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Sumber: Kabupaten Gunungkidul Dalam Angka 2024

*Keterangan: *Angka sementara*

***Angka sangat sementara*

Berdasarkan tabel di atas PDRB ADHB Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami kenaikan. Rata-rata kenaikan sebelum tahun 2020 mencapai angka di atas 1 triliun rupiah. Akan tetapi, di tahun 2020 dikarenakan ada pandemi COVID-19 kenaikan PDRB ADHB hanya mencapai angka 91 milyar rupiah. Namun pada tahun 2021-2022 kenaikannya lebih dari 1 triliun rupiah. Distribusi PDRB ADHB menurut lapangan usaha, selama tahun 2019-2023 menggambarkan kontribusi PDRB Kabupaten Gunungkidul. Kontribusi terbesar penyumbang PDRB Kabupaten Gunungkidul di tahun 2023 masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Adapun sektor lain penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Gunungkidul di tahun 2023 adalah sektor konstruksi, informasi komunikasi, perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor, sektor administrasi pemerintahan jaminan sosial wajib, dan industri pengolahan.

Sektor pertanian masih menjadi unggulan di Kabupaten Gunungkidul karena masih tingginya masyarakat di wilayah ini yang menggantungkan mata pencahariannya dari sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor unggulan daerah yang mendukung misi kedua dalam RPJMD 2021-2026 dengan tujuan memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi sektor unggulan daerah menuju ke unggulan kompetitif daerah untuk membangun struktur perekonomian daerah yang tangguh dengan sasaran untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan ketahanan pangan. Namun demikian kontribusi sektor pertanian semakin berkurang yang dikarenakan mulai adanya transformasi sektoral dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya kontribusi informasi dan komunikasi, *real estate*, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda serta konstruksi. Sedangkan tiga sektor pembentukan PDRB Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2019-2023 yang terendah adalah sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, serta sektor jasa perusahaan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Tabel 2.3
PDRB Kabupaten Gunungkidul Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Sektor PDRB	Tahun				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.752,91	2.846,17	2.869,48	3.013,77	3.082,56
B. Pertambangan dan Penggalian	180,07	166,31	164,68	167,51	173,39
C. Industri Pengolahan	1.300,66	1.239,34	1.240,87	1.267,86	1.321,02
D. Pengadaan Listrik dan Gas	14,41	14,21	14,58	15,53	16,72
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22,07	22,15	23,69	24,48	25,53
F. Konstruksi	1.368,86	1.191,99	1.319,94	1.400,52	1.492,02
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.314,10	1.264,83	1.296,37	1.360,46	1.420,28
H. Transportasi dan Pergudangan	693,29	606,65	638,72	732,90	789,14
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	806,28	760,37	843,09	920,31	987,38
J. Informasi dan Komunikasi	1.368,39	1.636,39	1.913,25	1.983,56	2.090,87
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	298,15	290,35	297,10	312,82	349,73
L. Real Estat	503,84	510,39	512,74	527,59	548,16
M,N. Jasa Perusahaan	71,42	60,99	65,93	70,55	76,46
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.171,35	1.146,29	1.123,96	1.152,71	1.180,71
P. Jasa Pendidikan	915,83	957,53	1.007,73	1.017,41	1.071,69
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	299,431	358,75	374,51	390,21	414,86
R, S, T, U. Jasa lainnya	524,01	439,73	523,50	636,03	708,71
Produk Domestik Regional Bruto	13.605,07	13.512,44	14.230,14	14.994,23	15.749,22

Sumber: Publikasi PDRB Kabupaten Gunungkidul Menurut Lapangan Usaha 2018-2022

Keterangan: *Angka sementara

**Angka sangat sementara



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Penghitungan PDRB ADHK telah memperhitungkan inflasi di tahun 2023. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa PDRB ADHK tahun 2019-2023 mengalami kenaikan. Namun demikian, Akibat dari pandemi di tahun 2020 PDRB ADHK tahun 2020 mengalami penurunan hingga -0,68% dari tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2022-2023 kembali mengalami kenaikan masing-masing sebesar 5,37% dan 5,04%.

Tabel 2.4
Kontribusi Lapangan Usaha PDRB ADHB Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023

No.	LAPANGAN USAHA	Tahun				
		2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,52	24,70	23,68	24,06	24,94
B	Pertambangan dan Penggalian	1,18	1,09	1,05	1,01	1,03
C	Industri Pengolahan	9,46	9,10	8,78	8,51	8,35
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15
F	Konstruksi	10,37	9,03	9,51	9,40	9,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,42	9,16	8,93	9,01	8,84
H	Transportasi dan Pergudangan	5,02	4,57	4,61	5,02	5,19
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,92	5,61	6,02	6,29	6,32
J	Informasi dan Komunikasi	7,19	8,53	9,45	9,06	8,85
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,39	2,31	2,31	2,40	2,48
L	Real Estat	3,70	3,81	3,63	3,48	3,39
M,N	Jasa Perusahaan	0,44	0,39	0,40	0,40	0,41
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	9,40	9,41	8,86	8,50	8,08
P	Jasa Pendidikan	6,21	6,58	6,64	6,26	6,27
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,01	2,48	2,49	2,43	2,50
R,S,T,U	Jasa Lainnya	3,51	2,98	3,40	3,93	4,11

Sumber: Publikasi PDRB Kabupaten Gunungkidul Menurut Lapangan Usaha 2019-2023

Keterangan: *Angka sementara

**Angka sangat sementara

Tahun 2021 merupakan tahun mulai pemulihan perekonomian Kabupaten Gunungkidul yang ditunjukkan dengan reboundnya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,31%. Status pandemi COVID-19 memang belum dicabut oleh Pemerintah Pusat, namun dengan vaksinasi massal dan pelonggaran aktivitas masyarakat berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan dan asuransi, dan jasa lainnya di tahun 2023 mengalami kenaikan kontribusi dibandingkan sektor yang lain.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2.2.3. Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa digambarkan dalam Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK merupakan indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Tingkat Inflasi D.I. Yogyakarta dan Nasional Tahun 2010 sampai dengan 2023 dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5

Tingkat Inflasi D.I. Yogyakarta dan Nasional, 2010-2023 (persen)

Tahun	D.I Yogyakarta	Nasional
2010	7.38	6.96
2011	3.88	3.79
2012	4.31	4.30
2013	7.32	8.38
2014	6.59	8.36
2015	3.09	3.35
2016	2.29	3.02
2017	4.20	3.61
2018	2.66	3.13
2019	2.77	2.72
2020	1.40	1.68
2021	2.29	1.87
2022	6.49	5.51
2023	3.17	2.61

Sumber: Tabel dinamis BPS, 2023

Lanjutan Tabel 2.5

Bulan	D.I Yogyakarta	Nasional
Jan-23	0.17	0.34
Feb-23	0.27	0.16
Mar-23	0.60	0.18
Apr-23	0.22	0.33
May-23	0.35	0.09
Jun-23	0.02	0.14
Jul-23	0.28	0.21
Aug-23	-0.04	-0.02
Sep-23	0.29	0.19
Oct-23	0.25	0.17



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nov-23	0.35	0.38
Dec-23	0.35	0.41

Sumber: Tabel dinamis BPS, 2023

Tingkat inflasi tahunan DIY di tahun 2023 sebesar 3,17% mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai angka 6,49%. Jika dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional tahun 2023 sebesar 2,61%, maka tingkat inflasi DIY tahun 2023 masih di atas angka tingkat inflasi nasional. Tingkat inflasi bulanan DIY tahun 2023 tercatat relatif fluktuatif, di mana Tingkat inflasi tertinggi pada tahun 2023 berada di bulan Maret, yaitu sebesar 0,60%. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi Maret 2023 di antaranya adalah beras, angkutan udara, bensin, telur ayam ras, bawang putih, perbaikan ringan kendaraan, kontrak rumah, daging ayam ras, rokok kretek filter, es, makanan ringan/snack, nasi dengan lauk, emas perhiasan, air kemasan, biaya keamanan, cabai rawit, daun melinjo, teh siap saji, teh, tahu mentah, dan papaya. Sementara itu data di bulan Agustus menunjukkan adanya deflasi sebesar -0,04%. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi pada bulan ini yaitu bawang merah, telur ayam ras, angkutan udara, daging ayam ras, dan tomat.

2.2.4. ICOR (Incremental Capital Output Ratio)

Salah satu komponen pembentukan PDRB adalah investasi, dalam teori menurut Harold Domar bahwa semakin tinggi investasi yang diperoleh, maka semakin besar PDRB yang didapat sehingga berakibat tingginya pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan perubahan stok bisa dikatakan investasi, sehingga kolerasi antara PDRB dengan investasi/PMTB dikenal dengan *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). Berikut ini data ICOR Kabupaten Gunungkidul dari Tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.6
Perkembangan ICOR Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2020-2022

Rincian	2020	2021*	2022**
Perkembangan ICOR	-35,20	5,05	5,03

Sumber : BPS, 2023

Keterangan: *Angka sementara

**Angka sangat sementara

Parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output), dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

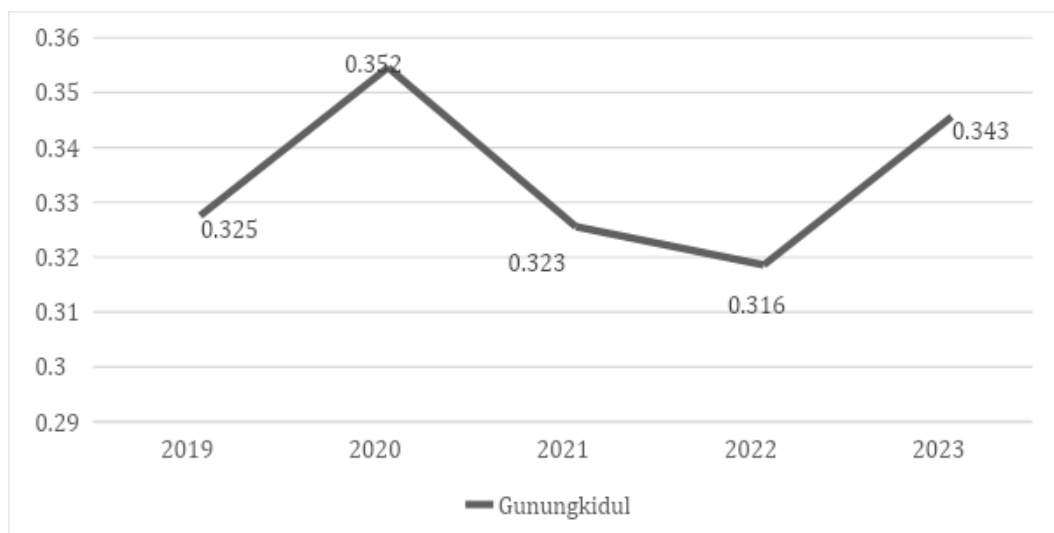
sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran). Semakin tinggi rasio ICOR semakin tidak efisien perekonomian tersebut, artinya penggunaan anggaran belanja pemerintah tidak menghasilkan output yang optimal, produktivitasnya rendah.

Nilai ICOR tahunan Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 berfluktuasi. Sempat turun drastis pada tahun 2020, ICOR pada tahun 2021-2022 kembali mengalami kenaikan masing-masing menjadi 5,05 dan 5,03. Hal ini menunjukkan penambahan 1 unit PDRB diperlukan 5 hingga 6 unit Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Koefisien negatif dapat terjadi jika output pada suatu waktu tertentu lebih kecil dari pada tahun sebelumnya. Penurunan output terjadi jika ada sebagian barang modal dijual, rusak atau tidak diaktifkan karena alasan tertentu.

2.2.5. Ketimpangan Pendapatan/Gini Ratio

Ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Gunungkidul bisa memakai satu indikator yaitu indikator Rasio Gini. Ide dasar perhitungan Rasio Gini sebenarnya berasal dari upaya pengukuran luas suatu kurva (yang kemudian dinamakan Kurva Lorenz) yang menggambarkan distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pengeluaran, adapun Gini Rasio Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut.

Gambar 2.1
Rasio Gini Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023



Sumber: BPS, 2023



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

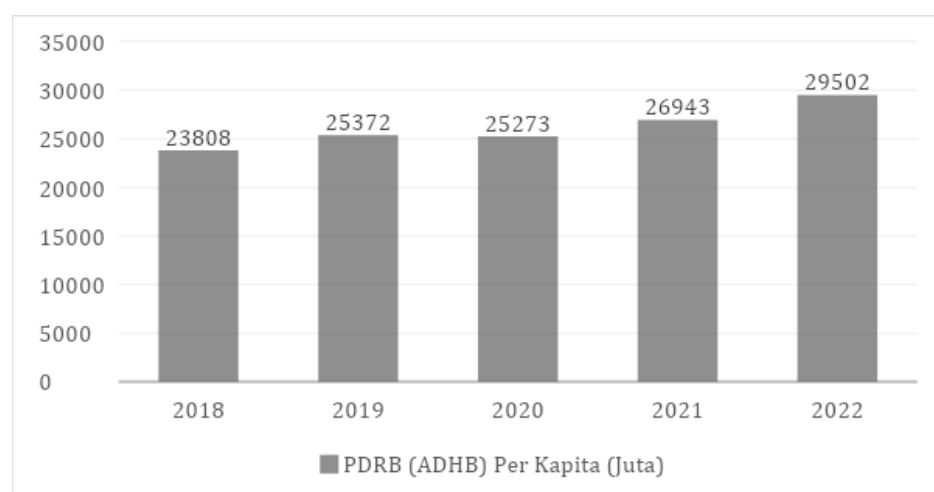
Selama periode 2019-2023, rasio gini Kabupaten Gunungkidul cenderung berfluktuatif. Dengan naiknya angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul di Tahun 2020 akibat Pandemi COVID-19, tidak hanya jumlah penduduk miskin yang naik tetapi angka rasio gini juga mengalami kenaikan di angka 0,352. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kenaikan tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan di Kabupaten Gunungkidul. Di tahun 2021-2022, angka gini rasio mengalami penurunan masing-masing di angka 0,323 dan 0,316. Meski demikian, angka ini naik kembali di tahun 2023 menjadi 0,343. Untuk rasio gini di Gunungkidul angka tersebut masih termasuk ke dalam kategori ketidakmerataan sedang.

2.2.6. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara/daerah. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional/daerah suatu negara/daerah dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDB per kapita. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara/daerah; semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur negara/daerah tersebut. Pendapatan per kapita didekati dengan PDRB Per kapita menunjukkan besaran rata-rata pendapatan per tahun setiap individu yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Berikut ini adalah pendapatan per kapita Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2022.

Gambar 2.2

PDRB Per Kapita Kab. Gunungkidul Tahun 2018-2022



Pada gambar 2.2 terlihat bahwa PDRB ADHB Per kapita menunjukkan peningkatan di tahun 2018-2022. Di tahun 2020 akibat dari Pandemi COVID-19



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PDRB ADHB Per kapita turun menjadi Rp.25,273 juta rupiah per tahun. Di tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 29,502 juta rupiah.

2.2.7. Ketenagakerjaan

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran di suatu daerah. Pengangguran di Kabupaten Gunungkidul masih menjadi masalah yang perlu diselesaikan. Dalam pembahasan ini penduduk usia kerja (tenaga kerja) didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun ke atas, Penduduk Usia Kerja terdiri dari Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Mereka yang termasuk dalam Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan, sedangkan Bukan Angkatan Kerja adalah mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan lainnya.

Tingkat pengangguran terbuka merupakan gambaran belum terwadahnya jumlah angkatan kerja bagi usia kerja suatu daerah, baik yang belum siap kerja maupun sudah siap kerja dengan kriteria minimal umur angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka bila terwadahi maka akan terciptanya perubahan struktur tenaga kerja secara bertahap dari masing-masing sektor. Keseimbangan dalam menciptakan lapangan kerja akan tercapai bila pertumbuhan ekonomi yang tercipta dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya kepada angkatan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran terbuka bagi daerah tersebut, tabel berikut ini adalah tingkat pengangguran terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023.

Tabel 2.7
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
TPT	1,92	2,16	2,20	2,08	2,09
TPAK	76,09	65,30	75,99	74,07	76,66

Sumber: Tabel Dinamis website BPS Gunungkidul, 2023

Dari informasi tabel 2.7 di atas terlihat bahwa tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Gunungkidul relatif rendah. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Gunungkidul naik 2,16% dan naik lagi di tahun 2021 menjadi 2,20% namun menurun kembali di tahun 2022 diangka 2,08% sejalan dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

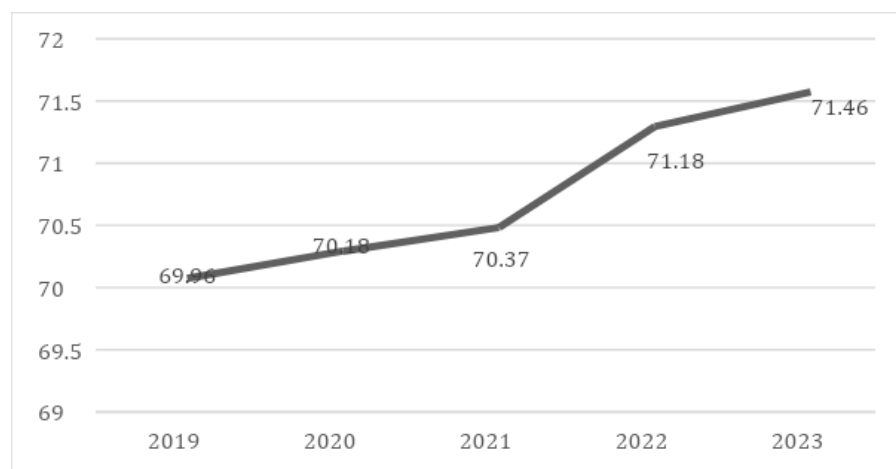
COVID-19 melalui upaya Pemerintah dengan paket-paket stimulusnya, pelonggaran aktivitas masyarakat hingga dicabutnya status PPKM. TPT kembali naik di tahun 2023 menjadi 2,09%.

2.2.8. Indeks Pembangunan Manusia

Capaian kinerja pembangunan manusia yang ditunjukkan oleh nilai IPM di Kabupaten Gunungkidul adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Dari sekian banyak ukuran capaian pembangunan manusia, Persatuan Bangsa-Bangsa menetapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) sebagai sebuah ukuran capaian pembangunan manusia yang dapat dipergunakan secara internasional dan bisa diperbandingkan antar wilayah, baik dalam satu Negara maupun antar Negara.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merangkum tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur Panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak, yang tersusun atas 4 (empat) komponen indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup pada saat lahir. Dimensi pengetahuan diukur menggunakan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Standar hidup layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita riil disesuaikan.

Gambar 2.3
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Gunungkidul di DI Yogyakarta Tahun 2019-2023





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Gambar di atas menunjukkan capaian pembangunan manusia di Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2019 sampai dengan 2023 dengan kecenderungan meningkat secara perlahan. Pada tahun 2023 capaian IPM Kabupaten Gunungkidul sebesar 71,46. Berdasarkan pengelompokan capaian IPM dalam beberapa kategori, yaitu (1) $IPM < 60$: IPM rendah, (2) $60 \leq IPM < 70$: IPM sedang, (3) $70 \leq IPM < 80$: IPM tinggi, dan (4) $IPM \geq 80$: IPM sangat tinggi, capaian kinerja pembangunan manusia yang ditunjukkan oleh nilai IPM di Kabupaten Gunungkidul masuk pada kategori “IPM Tinggi”.

Tabel 2.8
Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019-2023

Indikator IPM	Indikator IPM				
	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Harapan Hidup (tahun)	74,03	74,60	74,69	74,75	74,76
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,13	7,21	7,30	7,31	7,32
Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,96	12,97	12,98	13,33	13,39
Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan (000 Rp)	9.612	9.486	9.505	9.874	10.065
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,96	70,18	70,37	71,18	71,46

Sumber: BPS, 2023

2.2.9 Kemiskinan

Perkembangan perekonomian harus bermanfaat bagi masyarakat miskin. Karena itu orientasi pada peningkatan kualitas pertumbuhan harus semakin ditingkatkan. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan (rupiah perkapita perbulan), baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Dinamika jumlah penduduk miskin adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.12.

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023

Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan)					
Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah	123,08	127,61	135,33	122,82	122,24
Persentase	16,61	17,07	17,69	15,86	15,60

Sumber: BPS, 2023



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Dari tahun 2019 hingga tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Gunungkidul menunjukkan fluktuasi naik turun. Pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin di Gunungkidul ada sebanyak 122,24 ribu jiwa atau 15,60% atau turun sebesar kurang lebih 0,26% dibandingkan tahun 2022. Untuk garis kemiskinan, nilainya meningkat menjadi 382.249 dibandingkan tahun 2022 sebesar 350.739.

Tabel 2.10

Garis Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023

Rincian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Garis Kemiskinan	301.125	319.851	325.907	350.739	382.249

Sumber : BPS, 2023

2.3 Kebijakan Keuangan

Berdasarkan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan/atau keadaan luar biasa. Selanjutnya, disebutkan dalam Pasal 162 bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah, dan/atau perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

Dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam KUA Kabupaten Gunungkidul TA 2023, maka perlu dilakukan penyesuaian atas APBD Kabupaten Gunungkidul yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Penyesuaian telah dilakukan dengan melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Gunungkidul



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya guna mengikuti perkembangan dinamika kondisi ekonomi global dan nasional perlu dilakukan penyesuaian terhadap asumsi-asumsi yang dijadikan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Penyesuaian tersebut meliputi perubahan asumsi ekonomi makro, asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan yang ada terkait dengan adanya perubahan kebijakan serta regulasi yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah DIY yang perlu disikapi sehingga pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dapat mencapai tujuan dan sasaran prioritas pembangunan yang diharapkan. Perubahan asumsi tersebut juga dipengaruhi oleh perubahan kondisi keuangan daerah baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan.

Kebijakan keuangan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2023 diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah dan belanja wajib yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan dasar khususnya untuk mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kebijakan keuangan daerah pada perubahan APBD Tahun 2023 diarahkan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.07/2022 tentang batas maksimal kumulatif defisit APBD TA 2023 dan memenuhi kebutuhan belanja wajib yang belum terpenuhi di tahun 2023. Untuk memenuhi hal tersebut pada APBD Tahun 2023 telah dilakukan penyesuaian atau pengurangan belanja sebagaimana yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan keenam Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.

Kebijakan keuangan juga diharapkan dapat mendukung visi dan misi daerah dan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sesuai prioritas pembangunan tahun 2023 yaitu Infrastruktur, Lingkungan Hidup, Pengelolaan Bencana, peningkatan ekonomi melalui UMKM unggulan, Investasi dan pariwisata yang didukung potensi budaya daerah, dan pengembangan sektor unggulan, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas SDM yang kompeten, peningkatan ketentraman dan ketertiban menjadi prioritas selanjutnya, dan upaya reformasi birokrasi di pemerintahan.

2.3.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri atas unsur pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Pendapatan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Intensif Daerah (DID) merupakan porsi terbesar



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

dalam pendapatan daerah di Kabupaten Gunungkidul dan menjadi sumber utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat masih tinggi.

Selain Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat terdapat juga potensi sumber pendapatan dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Daerah DIY berupa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Daerah DIY yang berasal dari Dana Keistimewaan dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan selama 4 tahun terakhir, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan karena pada tahun 2022 terdapat pendapatan BLUD yang besar berupa klaim penanganan Covid-19. Penerimaan PAD dibandingkan pendapatan daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.11
Proporsi PAD dibandingkan Pendapatan Daerah

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Proporsi
2019	254,810,945,072.62	2,113,060,424,939.34	12.06%
2020	228,208,528,545.52	1,492,055,719,343.21	15.29%
2021	236,371,058,364.19	1,919,774,313,499.39	12.31%
2022	313,516,321,990.86	1,988,675,824,171.86	15.77%
2023	267,240,187,152.00	1,985,328,493,903.00	13.46%

Dari tabel tersebut dapat diartikan bahwa kemampuan anggaran Tahun Anggaran 2023 masih bergantung dari pendapatan transfer karena proporsinya yang masih kecil 12,06% - 15,77%. Kondisi ini tentu harus disikapi secara bijak, serta terus memacu peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah sehingga secara bertahap akan dapat mengurangi tingkat ketergantungan keuangan daerah kepada pemerintah pusat melalui inovasi-inovasi daerah dalam merangsang peningkatan pendapatan asli daerah. Oleh karena terbatasnya potensi penerimaan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2023, maka dibutuhkan arah pengelolaan keuangan daerah.

Arah kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunungkidul pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

1. Dana perimbangan berupa Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing jenis pajak. Sedangkan DAU dikarenakan sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa untuk Pagu DAU pada perubahan akan menyesuaikan dengan pendapatan Negara maka diasumsikan sama dengan tahun 2023;
2. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis Pendapatan Asli Daerah;
3. Pendapatan daerah masih diproyeksikan tidak mengalami perubahan namun perlu dilakukan pencermatan terhadap hal-hal yang mempengaruhi target pendapatan di tahun 2023 mengingat adanya kebijakan dari PMK khususnya terkait pendapatan DAK non fisik yang masih terdapat Silpa tahun sebelumnya akan mengurangi pendapatan di tahun berikutnya.
4. Lain-lain pendapatan yang sah diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan yaitu berupa pendapatan hibah yang dialokasikan untuk penyertaan modal pada BUMD.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul maka diperlukan upaya berikut ini.

- a. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Melanjutkan pemasangan Alat Rekam Transaksi (*tapping box*) pada Wajib Pajak Hotel dan Restoran disertai monitoring dan intensifikasi pengawasannya;
- c. Melakukan sinergi dengan pemerintah kalurahan dalam rangka pemungutan pajak daerah melalui Layanan Mobil Keliling Pajak;
- d. Pendayagunaan aset daerah;
- e. Peningkatan kontribusi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal [ada perusahaan milik daerah/BUMD melalui upaya memperkuat permodalan perusahaan daerah/BUMD];
- f. Optimalisasi penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak melalui Kerjasama intansi vertikal dan daerah dalam menyerap basis pajak terkait.
- g. Mendorong pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah untuk Retribusi Pengelolaan Pasar, Pengelolaan Sampah dan Restoran dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 159/KPTS/TIM/2020 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
- h. Pembentukan e-ticketing pada retribusi wisata di Kawasan Pantai.
- i. Peningkatan Pelayanan Perubahan SPPT PBB-P2 secara daring.
- j. Peningkatan kemudahan pembayaran bagi petugas pungut desa dan bendahara penerima melalui Daftar Penerimaan Harian (DPH) secara daring.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dari pendapatan transfer adalah:

- a. Dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, karena ketiga dana tersebut bersifat alokasi *top down*, maka upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan pengendalian kegiatan yang anggarannya berasal dari ketiganya, agar sesuai dengan ketentuan, tepat sasaran dan secara tatakal dan penyerapan anggaran memenuhi target yang telah ditentukan sehingga tidak ada potensi sanksi yang akan diterima Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Dana Insentif Daerah (DID) diupayakan dengan jalan memenuhi indikator yang digunakan sebagai penghitung pengalokasiannya.
- b. Dana Desa merupakan alokasi *top down* sehingga upaya yang ditempuh untuk mendapatkan alokasinya adalah dengan pengendalian pada kegiatan dan anggarannya sehingga sesuai dengan ketentuan, baik dari sisi pemanfaatannya maupun target pencapaian keluaran dan penyerapan anggarannya.
- c. Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta bersifat alokasi *top down*, upaya yang dilakukan untuk mendapatkan dana ini adalah dengan memenuhi ketentuan pemanfaatannya.
- d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bentuk campuran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pembangunan di Kabupaten/Kota, meliputi Dana Keistimewaan, dimana upaya untuk mendapatkan dana ini dengan mengajukan usulan kegiatan dan anggaran serta redesign kegiatan sesuai dengan ketentuan dan jadwal pelaksanaan kegiatan dan Bantuan Keuangan Khusus yang diberikan kepada Kabupaten/Kota untuk tujuan tertentu.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang terdiri yang berasal dari Pendapatan hibah diupayakan didapat dari Pemerintah Pusat guna mendanai kebutuhan PD. PDAM Tirta Handayani. Pendapatan hibah ini bersifat reimburse. Disamping itu juga terdapat Pendapatan hibah BOS, diupayakan didapat dengan mengajukan proposal kegiatan dan anggaran kepada Pemerintah Pusat. Data yang digunakan sebagai dasar pengajuan adalah Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang selalu diperbaharui. Dana ini masuk dalam dokumen anggaran setelah mendapatkan penetapan dari Pemerintah Pusat.

Jumlah Perubahan Pendapatan Daerah yang menjadi sumber pendanaan APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.985.328.493.903,00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp267.240.187.152,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.712.108.306.751,00 dan Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Rp5.980.000.000,00. Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp267.240.187.152,00, meliputi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp76.056.035.000,00 Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp34.276.784.905,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp16.354.127.008,00 dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp140.553.240.239,00. Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp1.712.108.306.751,00 meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.504.607.740.365,00 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp207.500.566.386,00. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp5.980.000.000,00 diproyeksikan akan didapatkan dari Pendapatan Hibah atau *reimburse* dari Pemerintah Pusat untuk penambahan modal PDAM Tirta Handayani sebesar Rp5.980.000.000,00. Proyeksi Perubahan pendapatan daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 dan penyesuaiannya tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.12

Proyeksi Perubahan Pendapatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	272.858.493.451	267.240.187.152	(5.618.306.299)	2%
4.1.01	Pajak Daerah	72.556.035.000	76.056.035.000	3.500.000.000	5%
4.1.02	Retribusi Daerah	38.932.819.825	34.276.784.905	(4.656.034.920)	12%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.700.556.442	16.354.127.008	(1.346.429.434)	8%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	143.669.082.184	140.553.240.239	(3.115.841.945)	2%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.663.817.416.381	1.712.108.306.751	48.290.890.370	3%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.491.601.669.000	1.504.607.740.365	13.006.071.365	1%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	172.215.747.381	207.500.566.386	35.284.819.005	20%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.000.000.000	5.980.000.000	980.000.000	20%
4.3.01	Pendapatan Hibah	5.000.000.000	5.980.000.000	980.000.000	20%
	Jumlah Pendapatan	1.941.675.909.832	1.985.328.493.903	43.652.584.071	2%

2.3.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Klasifikasi kelompok belanja daerah terbagi sebagai berikut:

- Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- b. Belanja Modal yang meliputi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- c. Belanja Tidak Terduga.
- d. Belanja Transfer.

Besaran alokasi belanja daerah pada setiap tahun anggaran akan sangat ditentukan oleh kapasitas keuangan daerah atau besaran pendapatan daerah. Dengan demikian jika besaran penerimaan pendapatan daerah relatif kecil/minim dibandingkan kebutuhan untuk pelaksanaan program dan kegiatan, maka penentuan skala prioritas belanja daerah menjadi suatu keharusan agar penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana.

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perencanaan belanja daerah dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, sehingga belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Kebijakan Belanja Daerah ditetapkan antara lain:

- a. Kebijakan belanja juga diharapkan dapat mendukung visi dan misi daerah dan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sesuai prioritas pembangunan tahun 2023 yaitu Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan pengelolaan bencana, peningkatan ekonomi melalui UMKM unggulan, Investasi dan pariwisata yang didukung potensi budaya daerah, dan pengembangan sektor unggulan, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas SDM yang kompeten, Peningkatan ketentraman dan ketertiban menjadi prioritas selanjutnya, dan upaya reformasi birokrasi di pemerintahan
- b. Kebijakan belanja juga disesuaikan dengan kebijakan dari kementerian keuangan terkait terbitnya PMK 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya TA 2023 berupa alokasi DAU untuk Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan alokasi Gaji PPPK.
- c. Pelaksanaan anggaran berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran kinerja, sehingga belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.
- d. Belanja daerah diprioritaskan terlebih dahulu untuk pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai wajib mengikat (posisi saat RKPD ini disusun, masih menunggu keputusan dan kepastian kebijakan pemerintah pusat apabila ditetapkan alokasi jumlah penerimaan ASN Tahun 2022), peningkatan pemulihan sosial ekonomi pasca pandemi



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

COVID-19, penguatan UMKM, dan percepatan investasi dengan memaksimalkan potensi daerah.

- e. Belanja daerah berupa hibah diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- f. Belanja operasi pada setiap SKPD untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
- g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kalurahan diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan aturan pelaksanaannya;
- h. Belanja yang bersumber dari dana perimbangan disesuaikan dengan peruntukannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, prioritas penggunaan dana perimbangan adalah:
 - 1) Dana bagi hasil pajak; untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan perdesaan, pembangunan irigasi, serta jaringan jalan dan jembatan.
 - 2) Dana alokasi umum; untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum.
 - 3) Dana alokasi khusus; untuk mengatasi ketimpangan penyediaan infrastruktur layanan publik dan mendukung operasional penyelenggaraan layanan publik sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan. Pada saat ini mekanisme pengusulan DAK Fisik masih berproses melalui Platform KRISNA DAK sesuai lokpri yang sudah ditetapkan.

Belanja daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp2.070.651.923.803 yang terdiri dari:

- a. Belanja Operasi sebesar Rp1.507.431.275.017,00 yang meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp853.438.580.368,00 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp564.248.936.021,00 Belanja Subsidi sebesar Rp270.000.000,00 Belanja Hibah sebesar Rp72.798.308.628,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp16.675.450.000,00.
- b. Belanja Modal sebesar Rp196.600.536.686,00 yang meliputi Belanja Modal Tanah sebesar Rp5.415.827.500,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp47.071.242.658,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp93.986.596.425,00 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp42.806.483.233,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp7.320.386.870,00.
- c. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2.000.000.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- d. Belanja Transfer sebesar Rp364.620.112.100,00 yang meliputi Belanja Bagi Hasil sebesar Rp16.416.635.450,00 dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp348.203.476.650,00

Proyeksi belanja daerah untuk Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13
Proyeksi Belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Jumlah		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1	BELANJA OPERASI	1.439.683.962.421	1.507.431.275.017	67.747.312.596	5%
5.1.01	Belanja Pegawai	828.920.141.167	853.438.580.368	24.518.439.201	3%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	530.857.410.626	564.248.936.021	33.391.525.395	6%
5.1.04	Belanja Subsidi	250.000.000	270.000.000	20.000.000	8%
5.1.05	Belanja Hibah	63.588.160.628	72.798.308.628	9.210.148.000	14%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	16.068.250.000	16.675.450.000	607.200.000	4%
5.2	BELANJA MODAL	217.225.928.770	196.600.536.686	(20.625.392.084)	9%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.233.854.000	5.415.827.500	181.973.500	3%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.072.516.359	47.071.242.658	3.998.726.299	9%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93.659.483.808	93.980.596.425	327.112.617	0%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	68.226.431.733	42.806.483.233	(25.419.948.500)	37%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.025.642.870	7.320.386.870	294.744.000	4%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	8.000.000	0	(8.000.000)	100%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	13.000.000.000	2.000.000.000	(11.000.000.000)	85%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	13.000.000.000	2.000.000.000	(11.000.000.000)	85%
5.4	BELANJA TRANSFER	362.831.822.700	364.620.112.100	1.788.289.400	0%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	15.153.849.500	16.416.635.450	1.262.785.950	8%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	347.677.973.200	348.203.476.650	525.503.450	0%
	Jumlah Belanja	2.032.741.713.891	2.070.651.923.803	37.910.209.912	2%

2.3.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah menutup defisit belanja dengan SiLPA Audited Tahun Anggaran 2021 yang telah di audit BPK. Kebijakan pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran kewajiban penyertaan modal pada PT. Bank BPD DIY, PT Bank BDG dan PDAM Tirta Handayani.

Kebijakan Penerimaan pembiayaan bersumber dari penerimaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) berdasarkan LKPD Audited Tahun 2022 yang akan digunakan untuk menutup defisit belanja APBD TA 2023. Berdasarkan proyeksi SiLPA yang terpasang di APBD murni tahun 2023 sebesar Rp106.065.804.059,00 perlu disesuaikan berdasar LKPD Audited Tahun 2022 SiLPA sebesar Rp100.323.429.342,00.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah Tahun 2023 sebesar Rp15.000.000.000,00 dan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD 2023 tidak ada penambahan atau tetap. Pengeluaran



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

pembiayaan digunakan untuk investasi daerah yang berupa penyertaan modal pada PT. Bank BPD DIY sebesar Rp5.000.000.000,00, penyertaan modal pada PT. Bank Daerah Gunungkidul Rp5.000.000.000,00, dan penyertaan modal kepada PDAM Tirta Handayani sebesar Rp5.000.000.000,00. Ringkasan estimasi pembiayaan daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.14

Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

6	PEMBIAYAAN	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	106.065.804.059	100.323.429.900	(5.742.374.159)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	106.065.804.059	100.323.429.900	(5.742.374.159)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	106.065.804.059	100.323.429.900	(5.742.374.159)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.000.000.000	15.000.000.000	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000	15.000.000.000	0

2.4 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD TA 2023

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan dan menjadi sangat penting mengingat beberapa kondisi dan kebijakan yang berkonsekuensi pada penyesuaian anggaran tahun berjalan. Berdasarkan perubahan kebijakan umum sebagaimana termuat dalam Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan agar perubahan program dan kegiatan sejalan dengan kebijakan perubahan anggaran, maka diperlukan perubahan besaran plafon anggaran sementara untuk masing-masing perangkat daerah berdasarkan skala prioritas dan belanja daerah yang harus didanai sesuai dengan ketersediaan dana dan kemampuan keuangan daerah. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk menyesuaikan rencana penganggaran dalam hal pendapatan, belanja, serta pembiayaan dengan perkembangan kondisi di tahun berjalan. Perkembangan dimaksud meliputi perubahan dan penyesuaian kebijakan pendapatan, kebijakan belanja maupun kebijakan penyesuaian pembiayaan daerah serta penyesuaian/pergeseran belanja pada perangkat daerah yang sudah diuraikan sebelumnya.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 merupakan pagu indikatif jumlah anggaran pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang memberikan gambaran kemampuan keuangan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

pemerintah daerah dari sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang akan menjadi dasar dalam penyusunan program kegiatan satuan kerja perangkat daerah berdasarkan tugas dan fungsi dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD).

Adapun tujuan penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah;
2. Sebagai pedoman mengenai perubahan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan pembangunan PD yang akan dibiayai melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; dan
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Prioritas program dan kegiatan berdasarkan urusan wajib dan pilihan per Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Tabel 2.15
Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023

No.	Perangkat Daerah	MURNI	PERUBAHAN
1	Dinas Pendidikan	640,830,186,462.00	671,449,603,534.00
2	Sanggar Kegiatan Belajar	589,862,619.00	582,762,619.00
3	Dinas Kesehatan	320,488,832,811.00	359,989,779,537.00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	141,480,574,190.00	118,534,250,981.00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	15,429,243,849.00	13,376,803,213.00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6,814,006,224.00	6,655,082,540.00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13,094,553,474.00	13,128,489,974.00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14,441,989,704.00	14,582,447,204.00
9	Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana	12,573,527,689.00	12,385,185,090.00
10	Dinas Lingkungan Hidup	15,108,018,484.00	17,882,744,899.00
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5,908,743,031.00	5,843,863,031.00
12	Dinas Perhubungan	20,938,845,697.00	21,725,521,771.00
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika	15,437,138,821.00	15,010,900,489.00
14	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja	9,024,963,677.00	21,387,778,168.00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3,743,319,844.00	3,411,632,930.00
16	Dinas Pemuda dan Olahraga	11,168,783,254.00	10,808,699,199.00
17	Kundha Kabudayan	36,396,360,209.00	36,059,766,209.00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3,822,129,438.00	5,050,159,744.00
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	5,312,230,927.00	5,214,813,319.00
20	Dinas Pariwisata	18,618,035,497.00	17,185,832,243.00
21	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	6,176,643,364.00	6,252,204,224.00
22	Dinas Pertanian dan Pangan	20,690,232,606.00	20,005,947,365.00
23	Dinas Perdagangan	11,621,416,977.00	11,422,493,842.00
24	Sekretariat Daerah	25,617,031,770.00	24,872,421,059.00
25	Sekretariat DPRD	53,832,110,664.00	49,917,514,450.00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7,468,820,848.00	7,645,211,848.00
27	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	431,652,388,545.00	421,865,934,723.00
28	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	97,858,065,594.00	82,531,926,587.00
29	Inspektorat Daerah	7,051,331,489.00	7,156,523,768.00
30	Kapanewon Wonosari	2,420,312,167.00	2,478,877,667.00
31	Kapanewon Paliyan	2,492,160,086.00	2,447,053,086.00
32	Kapanewon Panggang	2,455,038,390.00	2,418,256,390.00
33	Kapanewon Tepus	2,564,838,432.00	2,506,076,432.00
34	Kapanewon Rongkop	2,647,015,733.00	2,602,545,609.00
35	Kapanewon Semanu	2,563,925,971.00	2,389,799,616.00
36	Kapanewon Ponjong	2,513,932,336.00	2,539,832,836.00
37	Kapanewon Karangmojo	2,386,555,522.00	2,324,539,611.00
38	Kapanewon Playen	2,680,205,305.00	2,685,174,874.00
39	Kapanewon Nglipar	2,210,552,741.00	2,183,617,346.00
40	Kapanewon Ngawen	2,365,237,276.00	2,348,964,276.00
41	Kapanewon Semin	2,195,409,916.00	2,185,299,916.00
42	Kapanewon Patuk	2,379,565,859.00	2,465,466,954.00
43	Kapanewon Saptosari	2,239,713,332.00	2,194,014,928.00
44	Kapanewon Gedangsari	2,413,021,252.00	2,363,611,252.00
45	Kapanewon Girisubo	2,534,813,151.00	2,400,465,708.00
46	Kapanewon Tanjungsari	2,561,618,346.00	2,966,690,046.00
47	Kapanewon Purwosari	2,155,217,031.00	2,119,659,409.00
48	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	15,773,193,287.00	25,095,683,287.00
Jumlah		2,032,741,713,891.00	2,070,651,923,803.00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2.5 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tetap berpedoman pada sasaran dan prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2023. Namun demikian, terdapat penyesuaian-penyesuaian target kinerja sebagai dampak perubahan kebijakan mengikuti kondisi daerah di tahun 2023. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 yang sudah menyesuaikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemda DIY di pasca adanya pandemi COVID-19 yang telah dijabarkan pada indikator sasaran PD untuk mencapai indikator dan target ke dalam program kegiatan PD secara rinci terjabarkan ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.16
Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Pembangunan Daerah
Tahun 2023

No.	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1. 1	Kapasitas tata kelola pemerintah meningkat	Opini BPK	Opini	WTP	WTP
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	82,00 (A)	79,18-82,00 (A)
2. 2	Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat	Indeks ketenteraman dan ketertiban	Indeks	95,00	95,00-100,00
		Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,70	0,66-0,70
3. 3	Derajat kualitas SDM meningkat	Indeks Pembangunan	Indeks	72,00	71,45-72,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

		Manusia (IPM)			
4. 4	Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun	Angka Pengangguran	Persen (%)	2,0	1,9%-1,98%
		Persentase Angka Kemiskinan	Persen (%)	16,84	14%-15,08%
5. 5	Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat	Pertumbuhan ekonomi	Persen (%)	3,50-5,5	3,50-5,5
		Indeks gini	Indeks	0,321	0,319-0,321
6. 6	Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	70,00	65,90-70,00
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	66,00	66,65-66,00
7.	Nilai Investasi Meningkat	Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto	Juta Rupiah	3.550.000,00	3.550.000,00-3.837.967,00

Dengan melihat capaian realisasi di tahun 2022, maka diperlukan perubahan asumsi terhadap target Indikator Kinerja Sasaran Daerah Kabupaten Gunungkidul, sehingga di akhir tahun 2023 target tersebut dapat tercapai. Dengan menyesuaikan kondisi keuangan daerah yang melebihi dari asumsi batas defisit APBD Tahun 2023 sebesar 2,2%, dan adanya belanja wajib yang belum terpenuhi alokasi anggarannya maka telah dilakukan beberapa kali perubahan anggaran melalui perubahan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Struktur APBD murni Kabupaten Gunungkidul yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tanggal 29 Desember 2022 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 102 tahun 2022 tanggal 29 Desember 2022 adalah Pendapatan Rp1.941.675.909.832,00; Belanja Rp2.032.741.713.891,00; dan Pembiayaan Rp106.065.804.059,00.

Perubahan APBD TA 2023 terakhir ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2023 tanggal 20 November 2023, Pendapatan sebesar Rp1.985.328.493.903,00, Belanja sebesar Rp2.070.651.923.803,00, defisit sebesar Rp85.323.429.900,00, Pembiayaan sebesar Rp100.323.429.900,00 dan Penyertaan Modal sebesar Rp15.000.000.000,00.

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

3.1.1 Pendapatan

Realisasi pendapatan tahun 2023 sebesar Rp1.992.172.404.395,86 dari anggaran sebesar Rp1.985.328.493.903,00 atau mencapai 100,34% dan lebih dari target sebesar Rp6.843.910.492,86 Komposisi realisasi dan rasio realisasi pendapatan sebagai berikut:

No	Komponen Pendapatan	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/(Kurang) dari Anggaran	Persentase Realisasi terhadap Anggaran	Persentase Realisasi terhadap Total Pendapatan
1	Pendapatan Asli Daerah	267.240.187.152,00	277.318.850.589,86	10.078.663.437,86	103,77%	13,92%
2	Pendapatan Transfer	1.712.108.306.751,00	1.708.712.069.515,00	(3.396.237.236,00)	99,80%	85,77%
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.980.000.000,00	6.141.484.291,00	161.484.291,00	102,70%	0,31%
	Jumlah Pendapatan	1.985.328.493.903,00	1.992.172.404.395,86	6.843.910.492,86	100,34%	100,00%

a. Rasio Komponen Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Asli Daerah

No	Komponen Pendapatan	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/(Kurang) dari Anggaran	Persentase Realisasi terhadap Anggaran	Persentase Realisasi terhadap Total PAD
1	Pendapatan Pajak Daerah	76.056.035.000,00	80.211.846.865,00	4.155.811.865,00	105,46%	28,92%
2	Pendapatan Retribusi Daerah	34.276.784.905,00	35.520.370.106,00	1.243.585.201,00	103,63%	12,81%
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.354.127.008,00	16.354.134.672,07	7.664,07	100,00%	5,90%
4	Lain-Lain PAD yang Sah	140.553.240.239,00	145.232.498.946,79	4.679.258.707,79	103,33%	52,37%
	Total PAD	267.240.187.152,00	277.318.850.589,86	10.078.663.437,86	103,77%	100,00%



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

b. Rasio Komponen Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan Transfer

No	Komponen Pendapatan	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/(Kurang) dari Anggaran	Persentase Realisasi terhadap Anggaran	Persentase Realisasi terhadap Total Pendapatan Transfer
1	Dana Bagi Hasil	20.812.199.365,00	20.812.199.365,00	0,00	100,00%	1,22%
2	Dana Alokasi Umum	898.397.959.000,00	912.903.769.190,00	14.505.810.190,00	101,61%	53,43%
3	Dana Alokasi Khusus-Fisik	82.185.659.000,00	74.024.339.759,00	(8.161.319.241,00)	90,07%	4,33%
4	Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	317.325.875.000,00	309.405.479.537,00	(7.920.395.463,00)	97,50%	18,11%
5	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%
6	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	Dana Desa	179.933.551.000,00	179.933.551.000,00	0,00	100,00%	10,53%
9	Insentfi Daerah	5.952.497.000,00	5.952.497.000,00	0,00	100,00%	0,35%
10	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	126.340.246.831,00	127.194.303.115,00	854.056.284,00	100,68%	7,44%
11	Bantuan Keuangan	81.160.319.555,00	78.485.930.549,00	(2.674.389.006,00)	96,70%	4,59%
	Total Pendapatan Transfer	1.712.108.306.751,00	1.708.712.069.515,00	(3.396.237.236,00)	99,80%	100,00%

c. Rasio Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Total Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

No	Komponen Pendapatan	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/(Kurang) dari Anggaran	Persentase Realisasi terhadap Anggaran	Persentase Realisasi terhadap Total Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
1	Pendapatan Hibah	5.980.000.000,00	6.141.484.291,00	161.484.291,00	102,70%	100,00%
2	Pendapatan Dana Darurat					
3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
	Total Lain-Lain Pendapatan yang Sah	5.980.000.000,00	6.141.484.291,00	161.484.291,00	102,70%	100,00%

3.1.2 Belanja

Realisasi belanja tahun 2023 sebesar Rp2.000.900.739.750,10 dari anggaran sebesar Rp2.070.651.923.803,00 atau mencapai 96,63% dan kurang dari target sebesar Rp69.751.184.052,90. Komposisi realisasi belanja dan rasio belanja adalah sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

a. Rasio Belanja per Kelompok terhadap Total Belanja

No	Komponen Belanja dan Transfer	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/(Kurang) dari Anggaran	Persentase Realisasi terhadap Anggaran	Persentase Realisasi terhadap Total Belanja
1	Belanja Operasi	1.507.027.401.034,00	1.459.831.749.104,10	(47.195.651.929,90)	96,87%	72,96%
2	Belanja Modal	197.955.869.546,00	177.916.134.671,00	(20.039.734.875,00)	89,88%	8,89%
3	Belanja Tidak Terduga	1.048.541.123,00	235.998.075,00	(812.543.048,00)	22,51%	0,01%
4	Belanja Transfer	364.620.112.100,00	362.916.857.900,00	(1.703.254.200,00)	99,53%	18,14%
	Jumlah Belanja	2.070.651.923.803,00	2.000.900.739.750,10	(69.751.184.052,90)	96,63%	100,00%

b. Rasio Komponen Belanja Operasi terhadap Total Belanja Operasi

No	Komponen Belanja Operasi	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/(Kurang) dari Anggaran	Persentase Realisasi terhadap Anggaran	Persentase Realisasi terhadap Total Belanja
1	Belanja Pegawai	853.443.622.697,00	839.785.150.907,00	(13.658.471.790)	98,40%	57,53%
2	Belanja Barang dan Jasa	563.480.576.709,00	531.453.185.475,10	(32.027.391.234)	94,32%	36,41%
3	Belanja Bunga					
4	Belanja Subsidi	270.000.000,00	269.872.500,00	(127.500)	99,95%	0,02%
5	Belanja Hibah	73.157.751.628,00	71.692.177.954,00	(1.465.573.674)	98,00%	4,91%
6	Belanja Bantuan Sosial	16.675.450.000,00	16.631.362.268,00	(44.087.732)	99,74%	1,14%
	Jumlah Belanja Operasi	1.507.027.401.034,00	1.459.831.749.104,10	(47.195.651.930)	96,87%	100,00%

c. Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja

$\frac{839.785.150.907,00}{2.000.900.739.750,10} \times 100\% = 41,97\%$
--

d. Rasio Belanja Barang dan Jasa terhadap Total Belanja

$\frac{531.453.185.475,10}{2.000.900.739.750,10} \times 100\% = 26,56\%$
--

e. Rasio Belanja Subsidi terhadap Total Belanja

$\frac{269.872.500,00}{2.000.900.739.750,10} \times 100\% = 0,01\%$

f. Rasio Belanja Hibah terhadap Total Belanja

$\frac{71.692.177.954,00}{2.000.900.739.750,10} \times 100\% = 3,58\%$
--

g. Rasio Belanja Bantuan Sosial terhadap Total Belanja

$\frac{16.631.362.268,00}{2.000.900.739.750,10} \times 100\% = 0,83\%$
--

Berikut adalah penjelasan terhadap deviasi capaian keuangan antara target dan realisasi belanja.

1. Belanja pegawai mengalami deviasi sebesar 1,60% karena terdapat sisa belanja gaji akibat adanya pegawai yang pensiun dan mutasi tugas ke OPD lain



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2. Belanja barang dan jasa mengalami deviasi sebesar 5,68% karena adanya efisiensi anggaran, sisa lelang dan e-catalog pengadaan barang dan jasa, serta adanya sisa honor narasumber forkompimda karena diberikan sesuai kehadiran
3. Belanja subsidi mengalami deviasi hanya sebesar 0,05% karena penyaluran Dana Subsidi Kredit Usaha Rakyat Daerah sesuai pengajuan dari Bank Daerah Gunungkidul dan sisanya kembali ke Kasda
4. Belanja hibah mengalami deviasi sebesar 2% karena adanya efisiensi anggaran dan sisa pengadaan mebel dan sarpras pada sekolah swasta
5. Belanja bantuan sosial mengalami deviasi hanya sebesar 0,26%. Artinya hampir keseluruhan bantuan sosial sudah tersalurkan, hanya terdapat selisih harga pembelian material pembuatan jamban dan septictank di masing-masing penerima.
6. Belanja modal mengalami deviasi sebesar 10,12% karena adanya efisiensi anggaran dan sisa lelang pengadaan barang dan jasa
7. Belanja tidak terduga mengalami deviasi sebesar 77,49% karena anggaran bersifat cadangan, menyesuaikan kebutuhan. Di tahun 2023 tidak banyak bencana alam ataupun kebutuhan mendesak harus didanai dengan BTT.
8. Belanja transfer mengalami deviasi hanya sebesar 0,47% karena BKK tersalurkan secara keseluruhan dan terjadi efisiensi perhitungan bagi hasil pajak dan retribusi ke desa.

3.1.3 Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2023 adalah sebesar Rp100.323.429.900,00 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2022 sebesar Rp100.323.429.900,00.

Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2023 adalah sebesar Rp15.000.000.000,00 yang digunakan untuk penyertaan modal daerah pada BUMD sebesar Rp15.000.000.000,00.

Realisasi pembiayaan netto tahun 2023 adalah sebesar Rp100.323.429.900,00 yang berasal dari realisasi penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp100.323.429.900,00 dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp15.000.000.000,00.

- a. Rasio SiLPA terhadap Total Penerimaan Pembiayaan

$\frac{100.323.429.900,00}{100.323.429.900,00} \times 100\% = 100,00\%$

- b. Rasio Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terhadap Total Pengeluaran Pembiayaan

$\frac{15.000.000.000,00}{15.000.000.000,00} \times 100\% = 100,00\%$

3.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2023 sebesar Rp76.595.094.545,76 yang diperoleh dari perbandingan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan netto.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

3.2 Analisis Kondisi Keuangan Daerah

Kondisi keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran kapasitas pemerintah daerah dalam mendanai layanan secara berkelanjutan, sehingga penting untuk mengetahui kondisi keuangan daerah ini karena kondisi keuangan yang baik menjamin keberlanjutan pemerintah daerah dalam memberikan layanan berkualitas yang dibutuhkan masyarakat.

Kondisi Keuangan Daerah ini dapat dianalisis menggunakan enam (6) dimensi pengukuran yaitu kemandirian daerah, fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas anggaran, dan solvabilitas layanan.

Rasio pengukuran masing-masing dimensi dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Rasio Kemandirian Daerah

Kemandirian keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan di luar kendalanya atau pengaruhnya, baik dari sumber-sumber dalam negeri maupun luar negeri. Semakin besar nilainya, maka semakin baik kemandirian keuangan pemerintah daerah. Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah dan semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \\ &= \frac{277.318.850.589,86}{1.992.172.404.395,86} = 0,1392 \end{aligned}$$

2) Rasio Fleksibilitas Keuangan

Fleksibilitas keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah dapat meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang (*debt capacity*). Rasio ini menunjukkan keseimbangan antara kapasitas pendapatan dan kapasitas utang pemerintah daerah untuk satu periode tertentu. Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin baik fleksibilitas keuangan pemerintah daerah untuk menghadapi peristiwa luar biasa, yang dapat berasal dari internal maupun eksternal pemerintah daerah.

$$\begin{aligned} &= \frac{(\text{Total Pendapatan} - \text{DAK})}{(\text{Total Kewajiban} + \text{Belanja Pegawai})} \\ &= \frac{(1.992.172.404.395,86 - 383.429.819.296,00)}{(48.435.447.058,98 + 839.785.150.907,00)} \\ &= \frac{1.608.742.585.099,86}{888.580.287.116,98} = 1,81 \end{aligned}$$

3) Rasio Solvabilitas Operasional

Solvabilitas operasional merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional pemerintah selama periode anggaran. Semakin tinggi nilainya maka menunjukkan semakin banyak pendapatan pemerintah daerah yang tersedia untuk membiayai belanja operasional pemerintah daerah.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

$$\begin{aligned} &= \frac{(\text{Total Pendapatan LO} - \text{Pendapatan DAK LO})}{\text{Total Beban LO}} \\ &= \frac{(2.048.021.394.661,57 - 383.429.819.296,00)}{2.083.975.290.211,82} \\ &= \frac{1.664.591.575.365,57}{2.083.975.290.211,82} = 0,80 \end{aligned}$$

4) Rasio Solvabilitas Jangka Pendek

Solvabilitas jangka pendek menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 12 bulan. Semakin tinggi nilainya maka semakin banyak aset lancar yang tersedia untuk menjamin kewajiban lancar. Namun nilai yang terlalu tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memiliki aset lancar yang berlebihan yang lebih baik digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, aset lancar yang berlebih-lebihan dapat menyebabkan pelayanan yang tidak optimal kepada masyarakat.

$$\begin{aligned} &= \frac{(\text{Kas dan Setara Kas} + \text{Investasi Jangka Pendek})}{\text{Kewajiban Lancar}} \\ &= \frac{(77.361.579.999,76 + 0)}{48.795.136.209,98} \\ &= \frac{77.361.579.999,76}{48.795.136.209,98} = 1,59 \end{aligned}$$

5) Rasio Solvabilitas Anggaran

Solvabilitas anggaran menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan untuk mendanai operasinya selama satu periode anggaran keuangan. Rasio ini menunjukkan keseimbangan pendapatan normal pemerintah daerah dan pengeluaran operasional selama satu periode. Semakin tinggi nilainya maka menunjukkan semakin banyak pendapatan pemerintah daerah yang tersedia untuk membiayai belanja operasional pemerintah daerah.

$$\begin{aligned} &= \frac{(\text{Total Pendapatan LRA} - \text{Pendapatan DAK LRA})}{(\text{Total Belanja} - \text{Belanja Modal})} \\ &= \frac{(1.992.172.404.395,86 - 383.429.819.296,00)}{(2.000.900.739.750,10 - 177.916.134.671,00)} \\ &= \frac{1.608.742.585.099,86}{1.822.984.605.079,10} = 0,88 \end{aligned}$$

6) Rasio Solvabilitas Layanan

Solvabilitas layanan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat. Semakin tinggi nilainya, maka semakin baik pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Jumlah Penduduk}} \\ &= \frac{2.659.313.198.657,15}{751.011,00} = 3.540.977,69 \end{aligned}$$



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Berikut adalah trend analisis kondisi keuangan daerah selama 2 tahun mulai tahun 2022.

Analisis Rasio	Tahun 2022	Tahun 2023
Rasio kemandirian	0,16	0,14
Rasio fleksibilitas	1,86	1,81
Rasio solvabilitas ops	1,27	0,80
Rasio solvabilitas jk pdk	4,64	1,59
Rasio solvabilitas anggaran	0,90	0,88
Rasio solvabilitas layanan	3.555.885,82	3.540.977,69

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa:

1. Rasio kemandirian mengalami penurunan karena rasio pendapatan daerah di tahun 2023 lebih rendah dibandingkan pendapatan transfernya sehingga daerah sangat bergantung kemampuan keuangannya dari transfer pemerintah pusat maupun provinsi jika dibandingkan tahun 2022.
2. Rasio fleksibilitas menunjukkan penurunan di tahun 2023, artinya kemampuan keuangan tidak cukup fleksibel untuk menghadapi peristiwa luar biasa dibandingkan tahun 2022 karena peningkatan pendapatan tidak cukup besar untuk membiayai peningkatan belanja.
3. Rasio solvabilitas operasional mengalami penurunan, artinya kemampuan pendapatan pemerintah daerah untuk menutupi beban operasional di tahun 2023 lebih rendah dibandingkan tahun 2022.
4. Rasio solvabilitas jangka pendek mengalami penurunan, artinya aset lancar di tahun 2023 digunakan untuk membiayai kegiatan untuk pelayanan masyarakat lebih banyak dibandingkan tahun 2022.
5. Rasio solvabilitas anggaran mengalami penurunan, artinya semakin rendah kemampuan daerah untuk mendapatkan pendapatan pemerintah daerah untuk memenuhi pengeluaran operasionalnya dibandingkan tahun 2022.
6. Rasio solvabilitas layanan mengalami penurunan, artinya semakin rendah kemampuan pemerintah daerah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dibandingkan tahun 2022. Hal ini bisa disebabkan karena rasio belanja modal terhadap total belanja daerah yang turun di tahun 2023.

3.3 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian target kinerja keuangan tahun 2023, secara umum dapat dijelaskan berikut ini.

1. Dalam pengelolaan pendapatan daerah beberapa kendala yang dihadapi diantaranya:
 - a. Keakuratan data obyek pajak dalam penetapan pajak
 - b. Terjadi kebocoran di penerimaan retribusi
 - c. Kurangnya kesadaran wajib pajak dan retribusi terhadap ketentuan regulasi yang berlaku
 - d. Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah belum memberikan kontribusi yang optimal
 - e. Keterbatasan SDM pengelola pendapatan baik secara kuantitas dan kualitas
2. Dalam pengelolaan belanja daerah beberapa kendala yang dihadapi diantaranya:
 - a. Penggunaan aplikasi sistem keuangan daerah yang belum optimal. Kemendagri mewajibkan pemerintah daerah menggunakan aplikasi SIPD untuk penatausahaan dan pelaporan, namun aplikasi belum siap digunakan.
 - b. Banyaknya ketentuan penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat cukup menyulitkan untuk realiasi belanjanya.
 - c. Pergeseran anggaran yang sering terjadi tanpa didukung pengendalian yang baik
 - d. Pemahaman aparaturnya terkait perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah yang masih terbatas.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Ciri-ciri entitas pelaporan keuangan adalah:

1. Entitas dibiayai oleh APBD.
2. Entitas dibentuk dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
4. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Sesuai PP No 8 Tahun 2006, pemerintah daerah dalam hal ini diwakili kepala daerah merupakan entitas pelaporan. Dalam pelaksanaannya kepala daerah melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). PPKD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

Produk dari entitas pelaporan adalah laporan keuangan konsolidasian yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

BKAD Kabupaten Gunungkidul ditunjuk sebagai entitas pelaporan yang bertugas menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2023.

Entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi melimpahkan wewenangnya kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/PPK SKPD untuk menyelenggarakan akuntansi pengelolaan keuangan dan secara periodik menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk kemudian dilakukan penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Adapun entitas akuntansi di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah:

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
4. Satuan Polisi Pamong Praja
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
8. Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana (Dinas Pertanahan dan Tata Ruang)
9. Dinas Lingkungan Hidup
10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
11. Dinas Perhubungan
12. Dinas Komunikasi dan Informatika
13. Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
16. Kundha Kabudayan (Dinas Kebudayaan)
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18. Dinas Kelautan dan Perikanan
19. Dinas Pariwisata
20. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
21. Dinas Pertanian dan Pangan
22. Dinas Perdagangan
23. Sekretariat Daerah
24. Sekretariat DPRD
25. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
26. Badan Keuangan dan Aset Daerah
27. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah
28. Inspektorat Daerah
29. Kapanewon Wonosari
30. Kapanewon Paliyan
31. Kapanewon Panggang
32. Kapanewon Tepus
33. Kapanewon Rongkop
34. Kapanewon Semanu
35. Kapanewon Ponjong
36. Kapanewon Karangmojo
37. Kapanewon Playen
38. Kapanewon Nglipar
39. Kapanewon Ngawen
40. Kapanewon Semin
41. Kapanewon Patuk
42. Kapanewon Saptosari
43. Kapanewon Gedangsari
44. Kapanewon Girisubo
45. Kapanewon Tanjungsari
46. Kapanewon Purwosari
47. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual penuh, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak asing dalam bentuk jasa disajikan pada LO.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

4.4 Kebijakan Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh entitas pelaporan, sedangkan untuk setiap entitas akuntansi tidak menyajikan Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Struktur dan Isi masing-masing laporan sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) Pendapatan-LRA;
- (2) Belanja;
- (3) Surplus/Defisit-LRA;
- (4) Pembiayaan; dan
- (5) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya dengan pos-pos sebagai berikut:

- 1) Saldo Anggaran Lebih Awal;
- 2) Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan;
- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran;
- 4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- 5) Lain-lain; dan
- 6) Saldo Anggaran Lebih Akhir.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Di samping itu, pemerintah daerah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur- unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Pemerintah daerah mengklasifikasikan Aset dalam Aset Lancar dan Aset Non Lancar serta mengklasifikasikan Kewajiban menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Sedangkan Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

d. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- 2) Beban dari kegiatan operasional;
- 3) Surplus/defisit dari kegiatan non operasional;
- 4) Beban luar biasa; dan
- 5) Surplus/defisit-LO.

e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas
- 4) Jumlah Ekuitas Akhir.

g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:

- 1) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- 2) Informasi tentang ekonomi makro dan kebijakan fiskal/keuangan;
- 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- 4) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan - kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 5) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- 6) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- 7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Di dalam bagian penjelasan kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan, diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- 2) Kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang memerlukan pengaturan lebih rinci oleh entitas pelaporan; dan
- 3) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Definisi dan Klasifikasi Pendapatan

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
3. Pendapatan diklasifikasikan berdasarkan sumbernya:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - b. Pendapatan Transfer
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pengakuan Pendapatan

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*.
- 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan LO dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternatif:

- 1) Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.
- 2) Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO.

Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.

Pendapatan LRA diakui pada saat :

- 1) Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
- 2) Diterima oleh SKPD; atau
- 3) Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pengukuran Pendapatan

Pengukuran Pendapatan-LO

- 1) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- 3) Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pengukuran Pendapatan-LRA

- 1) Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- 3) Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Beban, Belanja, dan Transfer

Definisi dan Klasifikasi Beban, Belanja, dan Transfer

- 1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 2) Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 3) Transfer adalah penerimaan dan pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada
- 4) Beban, belanja, dan transfer diklasifikasi menurut:
 - a. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.
 - b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.
 - c. Klasifikasi transfer berdasarkan sumber kejadiannya adalah transfer dari pemerintah pusat-dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya, transfer pemerintah provinsi, transfer/bagi hasil ke Desa, dan transfer/bantuan keuangan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- d. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran meliputi beban dan belanja pada SKPD.

Pengakuan Beban, Belanja, dan Transfer

1) Pengakuan Beban

a. Timbulnya kewajiban,

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.

b. Terjadi konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah

c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

2) Pengakuan Belanja

a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.

c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum

3) Pengakuan Transfer

a. Transfer masuk diakui pada saat diterimanya PMK/Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan Presiden maka timbul hak daerah terhadap transfer masuk.

b. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Daerah maka timbul kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban menggunakan metode pendekatan Beban, dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat, sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau dikonsumsi sesegera mungkin.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pengukuran Beban, Belanja, dan Transfer

- 1) Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.
- 2) Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.
- 3) Transfer diukur ketika:
 - a) Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
 - b) Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Definisi dan Klasifikasi Pembiayaan

- 1) Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
- 2) Pembiayaan diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu:
 - a. Penerimaan pembiayaan
Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya, penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
 - b. Pengeluaran pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana Cadangan.

Pengakuan Pembiayaan

- 1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat :
 - a) Penerimaan pembiayaan yang diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
 - b) Penerimaan pembiayaan pada rekening khusus yang dibentuk untuk menampung transaksi pembiayaan yang bersumber dari utang.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- c) Pencairan oleh pemberi pinjaman atas perintah BUD untuk membayar pihak ketiga atau pihak lain terkait atas dana pinjaman yang dianggarkan untuk pembiayaan.
- 2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:
 - a) Pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - b) Pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah yang diakui oleh Bendahara Umum Daerah.

Pengukuran Pembiayaan

- 1) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah
- 2) Berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- 3) Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Pengungkapan Pembiayaan

Hal-hal yang perlu diungkap sehubungan dengan transfer adalah:

- 1) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- 2) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan.
- 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Definisi dan Klasifikasi Kas dan Setara Kas

- 1) Kas adalah uang tunai, dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- 2) Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Kas Lainnya. Termasuk dalam kategori kas adalah setara kas yang merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan tanggal perolehannya.
- 3) Klasifikasi Kas dan Setara kas

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola,



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggungjawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran
- b) Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah

Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Piutang

Definisi dan Klasifikasi Piutang

- 1) Piutang adalah hal pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah
- 2) Penyisihan piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
- 3) Klasifikasi Piutang :
 - a) Piutang Pendapatan
 1. Piutang Pajak Daerah
 2. Piutang Retribusi
 3. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 4. Piutang Lain-lain PAD yang Sah
 5. Piutang Transfer Pemerintah Pusat
 6. Piutang Transfer Pemerintah lainnya
 7. Piutang Transfer Pemerintah Daerah lainnya
 8. Piutang Pendapatan Lainnya
 - b) Piutang Lainnya
 1. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
 2. Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
 3. Uang Muka



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pengakuan Piutang

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Piutang diakui saat:

- 1) Diterbitkan surat ketetapan; atau
- 2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- 3) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pengukuran Piutang

- 1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- 2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- 3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Penilaian Piutang

- 1) Piutang disajikan sebesar Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan.
- 2) Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- 3) Dasar yang digunakan untuk menghitung Penyisihan piutang adalah kualitas piutang yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - 1) Kualitas Piutang lancar
 - 2) Kualitas Piutang Kurang Lancar
 - 3) Kualitas Piutang Diragukan dan
 - 4) Kualitas Piutang Macet

Adapun besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

**Tabel 4.1 Kebijakan Persentase Penyisihan Piutang
Berdasarkan Kualitas Piutang**

Nomor	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	Lancar	0,5%
2	Kurang lancar	10 %
3	Diragukan	50 %
4	Macet	100 %

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Definisi dan Klasifikasi Persediaan

- 1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam bentuk pelayanan kepada Masyarakat.
- 2) Persediaan merupakan aset berwujud, yang berupa:
 - a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah;
 - b) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi.
 - c) Barang dalam proses produksi yang dimaksud untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
 - d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Daerah.
- 3) Klasifikasi barang persediaan meliputi:
 - a) Persediaan barang pakai habis:
 - Bahan
 - Suku cadang
 - Alat/bahan untuk kegiatan kantor
 - Obat-obatan
 - Persediaan untuk dijual/diserahkan
 - Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga
 - Natura dan Pakan
 - Persediaan dan Penelitian



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Persediaan dalam proses
- b) Persediaan barang tak habis pakai
 - Komponen
 - PIPA
- c) Persediaan barang bekas dipakai
 - Komponen bekas dan pipa bekas

Pengakuan Persediaan

- 1) Persediaan diakui pada saat:
 - a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau ke penguasaannya berpindah.
- 2) Pada akhir periode akuntansi, dilakukan *stock opname* persediaan sebagai dasar penilaian persediaan.
- 3) Pengakuan beban persediaan pada Laporan Operasional dengan menggunakan pendekatan beban.
- 4) Selisih Persediaan didapatkan dengan cara membandingkan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname* Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.

Pengukuran Persediaan

- 1) Persediaan disajikan:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
 - b. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
 - c. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - d. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi
- 2) Percetakan barang cetakan dan barang kuasi yang sudah tidak digunakan lagi, rusak dan cacat, dilakukan perhitungan kembali dan dituangkan dalam Berita Acara menurut nilai persediaan kemudian dilakukan proses penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pencatatan Persediaan

- 1) Metode pencatatan persediaan menggunakan Metode Perpetual yang dinilai menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama atau *First In First Out (FIFO)*.
- 2) Beban persediaan
 - a) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan
 - b) Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional (pada akun beban persediaan).
 - c) Penyesuaian beban persediaan dilakukan pada setiap akhir periode akuntansi.

Pengungkapan Persediaan

Laporan keuangan pemerintah daerah mengungkapkan:

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan
- 2) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan Masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat; dan
- 3) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Investasi

Definisi dan Klasifikasi Investasi

- 1) Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat.
- 2) Klasifikasi Investasi meliputi:
 - a) Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek berbeda dengan kas dan setara kas. Suatu investasi masuk klasifikasi kas dan setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.
 - b) Investasi jangka panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya yaitu:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Investasi jangka panjang non permanen
Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
- Investasi jangka panjang permanen
Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Pengakuan Investasi

- 1) Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
 - b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*)

Pengukuran Investasi

- 1) Pengukuran investasi jangka pendek
 - a) Investasi dalam bentuk surat berharga:
 - Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
 - b) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka 6 bulan
- 2) Pengukuran investasi jangka panjang
 - a) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - b) Investasi nonpermanen
 - Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya
 - Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Penanaman modal di proyek-proyek Pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Penilaian Investasi

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1) Metode Biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode Ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta Revaluasi Aset Tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Pemilihan metode penilaian investasi didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- d) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Definisi dan Klasifikasi Aset Tetap

- 1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 2) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
 - a) Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai
 - b) Peralatan mesin
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - c) Gedung dan bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai
 - d) Jalan, irigasi, dan jaringan
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - e) Aset tetap lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.
 - f) Konstruksi dalam pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses Pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pengakuan Aset Tetap

- 1) Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

- 2) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
- Berwujud
 - Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan
 - Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
 - Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
 - Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
 - Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara
 - Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batas kapitalisasi aset tetap yang diterapkan. Memenuhi kriteria material/Batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

Tabel 4.2 Batasan minimal kapitalisasi aset tetap

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat/Besar	300.000
2.2	Alat-alat Angkutan	300.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	150.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	150.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	150.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	300.000
2.7	Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan	300.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	300.000
2.9	Alat Persenjataan	300.000
2.10	Komputer	150.000
2.11	Alat Eksplorasi	1.000.000
2.12	Alat Pengeboran	1.000.000
2.13	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	1.000.000
2.14	Alat Bantu Eksplorasi	1.000.000
2.15	Alat Keselamatan Kerja	1.000.000
2.16	Alat Peraga	1.000.000
2.17	Peralatan Proses/Produksi	1.000.000
2.18	Rambu-rambu	5.000.000
2.19	Peralatan Olahraga	100.000
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	5.000.000
3.2	Bangunan Monumen	5.000.000
3.3	Bangunan Menara	5.000.000
3.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	5.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	1



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

4.2	Bangunan Air/Irigasi	1
4.3	Instalasi	1
4.4	Jaringan	1
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	50.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	100.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	1
5.4	Biota Perairan	1
5.5	Tanaman	1
5.6	Barang Koleksi Non Budaya	1
5.7	Aset Tetap Dalam Renovasi	1
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
6.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

- 3) Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam rekening belanja barang dan tidak disajikan sebagai aset tetap dalam neraca namun akan diungkap dalam CaLK maupun dalam laporan barang milik daerah serta pencatatannya secara ekstrakomptabel.
- 4) Pengeluaran belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi akan diperlakukan sebagai beban barang pada pos beban aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dan disajikan dalam Laporan Operasional.
- 5) Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai nilai tercatatnya.

Pengukuran Aset Tetap

- 1) Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi
- 3) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut
- 4) Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- a. Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- b. Biaya atribusi terdiri atas komponen yang harus dipenuhi dan nilainya juga harus terukur. Pemerintah Daerah menetapkan komponen biaya atribusi meliputi:
 - i. Biaya perencanaan dan pembuatan DED
 - ii. Biaya pengawasan pekerjaan konstruksi asset
 - iii. Honorarium Pejabat/Panitia pengadaan barang dan jasa/Kelompok Kerja BPBJ (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa) non fungsional, masuk biaya yang dapat diatribusikan ke aset tetap apabila pembebanannya di Satuan Kerja
 - iv. Honorarium Pejabat/Panitia penerima hasil pekerjaan.
 - v. Biaya lain yang secara langsung membawa aset ke dalam kondisi dapat digunakan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan nilai kewajaran dan kepatutan dari biaya-biaya lain diluar harga beli aset tetap.
- c. Khusus untuk pengadaan tanah, pertama kali diakui sebesar biaya perolehan yang mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honorarium panitia pengadaan/pembebasan tanah dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Biaya administrasi dan biaya umum adalah biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan usaha. Misalnya gaji, telepon, listrik, air, gas, perlengkapan, peralatan, ATK, dan sebagainya.

5) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- a. Penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran
- b. Penyusunan DED (*Detail Engineering Design*) yang diikuti pelaksanaan pekerjaan pengadaan konstruksi pada tahun berikutnya.

Konstruksi dalam pengerjaan di atas digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam Pembangunan proyek telah dikeluarkan maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan aset yang bersangkutan.

DED (*Detail Engineering Design*) yang tidak diikuti dengan pelaksanaan pekerjaan pengadaan konstruksi pada tahun berikutnya, dicatat sebagai Aset Tak Berwujud pada Aset Lainnya.

6) Perolehan secara gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

7) Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperolehnya itu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

8) Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengukuran Aset tetap dari donasi:

- a) Aset tetap dari donasi disajikan di neraca sesuai dengan nilai perolehan dalam berita acara serah terima; atau
 - b) Apabila diperoleh tanpa nilai perolehan, maka disajikan di neraca sebesar nilai wajar pada saat peroleh dengan penjelasan pada CaLK.
- ### 9) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat Aset yang bersangkutan.

Pengeluaran belanja tidak dikapitalisasi pada nilai aset tetap jika hanya untuk mempertahankan fungsi atau mempertahankan umur ekonomis aset tetap. Biaya-biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal dikapitalisasi pada nilai aset tetap jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Biaya untuk pemeliharaan aset tetap dilakukan kapitalisasi apabila digunakan untuk:
 - Meningkatkan kapasitas (menambah luas/volume);
 - Memperpanjang umur teknis (memperkuat dan/atau mengganti struktur pondasi, struktur dinding dan/atau struktur atap);
 - Meningkatkan kualitas/mutu (mengganti dengan kualitas yang lebih baik).
 - Menambah fungsi;
 - Mengubah fungsi; atau
 - Menambah aksesoris/komponen peralatan.
 - b) Biaya untuk pemeliharaan aset tetap yang dilakukan kapitalisasi dianggarkan dalam belanja modal.
 - c) Biaya pemeliharaan aset tetap yang tidak dilakukan kapitalisasi dianggarkan dalam belanja pemeliharaan.
- 10) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat Aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam Neraca dan Beban Penyusutan dalam Laporan Operasional.
 - 11) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
 - 12) Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
 - 13) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan perkiraan masa manfaat sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Tabel 4.3 Masa Manfaat Aset Tetap

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1					2	3
1	3				ASET TETAP	
1	3	2			Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01		Alat Berat	
1	3	2	01	01	Alat Besar Darat	10
1	3	2	01	02	Alat Besar Apung	8
1	3	2	01	03	Alat Bantu	7
1	3	2	02		Alat Angkutan	
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1	3	2	02	04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1	3	2	03		Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5
1	3	2	04		Alat Pertanian	
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	4
1	3	2	05		Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	05	03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	06		Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	
1	3	2	06	01	Alat Studio	5
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	15



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

1	3	2	07		Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	08		Alat Laboratorium	
1	3	2	08	01	Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	08	03	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	08	06	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	10
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10
1	3	2	09		Alat Persenjataan	
1	3	2	09	01	Senjata Api	10
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	5
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	4
1	3	2	10		Komputer	
1	3	2	10	01	Komputer Unit	4
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	4
1	3	2	11		Alat Eksplorasi	
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1	3	2	12		Alat Pengeboran	
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	10
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

1	3	2	13	01	Sumur	10
1	3	2	13	02	Produksi	10
1	3	2	13	03	Pengolahan dan Pemurnian	15
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	10
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	10
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	01	Alat Detektif	5
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	5
1	3	2	15	03	Alat SAR	2
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan 10	
1	3	2	16		Alat Peraga	
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
1	3	2	17		Peralatan Proses/ Produksi	
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/ Produksi	8
1	3	2	18		Rambu-Rambu	
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15
1	3	2	19		Peralatan Olahraga	
1	3	2	19	01	Peralatan Olahraga	3
1	3	3			Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	02		Monumen	
1	3	3	02	01	Candi/ Tugu/Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	03		Bangunan Menara	
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	04		Tugu Titik Kontrol / Pasti	
1	3	3	04	01	Tugu/Tanda Batas	50
1	3	4			Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
1	3	4	01		Jalan dan Jembatan	
1	3	4	01	01	Jalan	10



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

1	3	4	01	02	Jembatan	50
1	3	4	02		Bangunan Air	
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih / Baku	40
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	03		Instalasi	
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih/ Air Baku	30
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	30
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	03	10	Instalasi Lain	20
1	3	4	04		Jaringan	
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	40
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	20
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	30

Penyusutan terhadap Aset Tetap dilakukan pada tahun Aset Tetap tersebut diperoleh berdasarkan Harga Perolehan dan masa manfaatnya setiap tahun. Terhitung mulai Tahun 2022, perhitungan penyusutan dilakukan setiap bulan sesuai dengan kebijakan Akuntansi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Penyusutan Aset Tetap setiap bulan disajikan sebagai akumulasi penyusutan di Neraca periode berjalan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

4.4.10 Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Definisi dan Klasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

- 1) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses Pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.
- 2) Klasifikasi KDP mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.
- 3) Kontrak konstruksi dapat meliputi:
 - a) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - b) Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset
 - c) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
 - d) Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Pengakuan KDP

- 1) Suatu aset berwujud harus diakui sebagai KDP jika:
 - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. Aset tersebut masih dalam pengerjaan.
- 2) KDP biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasi dalam aset tetap.
- 3) KDP ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.
- 4) Aset tetap direklasifikasi menjadi KDP jika aset tersebut dinyatakan belum selesai dan belum bisa digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Dengan kata lain, KDP ini diakui pada akhir periode pelaporan.
- 5) Jika sebuah KDP tidak dapat diselesaikan dan hendak dihapuskan, maka nilai aset tetap yang masuk dalam KDP direklasifikasikan ke Aset Lainnya. Pemindahan dari KDP ke Aset Lainnya didasarkan atas surat keputusan dari Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- 6) Apabila Aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
- 7) Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah (walaupun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh), namun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.
- 8) Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (KDP), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*force majeure*) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*force majeure* dan atas dasar pernyataan tersebut KDP dapat dihapusbukukan.
- 9) Apabila Berita Acara Serah Terima sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP.
- 10) KDP dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.
- 11) Suatu KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Pengukuran KDP

- 1) KDP dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
 - a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c) Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- 2) Biaya-biaya berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain, meliputi:
 - a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia
 - b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi
 - c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi
 - d) Biaya penyewaan sarana dan peralatan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- e) Biaya rancangan (DED) dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi
- 3) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
 - a) Asuransi
 - b) Biaya rancangan (DED) dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu
 - c) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- 4) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan
 - b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan
 - c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

4.4.11 Kebijakan akuntansi Dana Cadangan

Definisi dan Klasifikasi Dana Cadangan

- 1) Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- 2) Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:
 - a) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan
 - b) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan
 - c) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri
 - d) Sumber dana cadangan
 - e) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- 3) Klasifikasi dana cadangan menurut tujuan pembentukannya:
 - a) Dana cadangan Pembangunan jembatan
 - b) Dana cadangan Pembangunan gedung
 - c) Dana cadangan Pembangunan waduk
 - d) Dana cadangan Penyelenggaraan Pilkada



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- e) Dana cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON)

Pengakuan dana cadangan

- 1) Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.
- 2) Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

Pengukuran dana cadangan

- 1) Pembentukan dana cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

- 2) Hasil pengelolaan dana cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengolahan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

- 3) Pencairan dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

4.4.12 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Definisi dan Klasifikasi Aset lainnya

- 1) Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan.
- 2) Klasifikasi Aset lainnya antara lain Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-Lain.

Pengakuan Aset Lainnya

- 1) Tagihan Jangka Panjang terdiri Atas Tagihan Penjualan Angsuran dan Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah.
 - a) Tagihan Penjualan Angsuran



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah Golongan III

b) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga dapat berupa:

- a) Sewa, diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan sewa.
- b) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. KSP diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).
- c) Bangun Guna Serah (BGS), adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu kemudian menyerahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati.
- d) Bangun Serah Guna (BSG), adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya, kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

3) Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud terdiri atas:

1) Goodwill

Aset tidak berwujud berupa kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku.

2) Lisensi dan *Franchise*

Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.

Franchise (waralaba) adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Franchise merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

3) Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggunaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan.

4) Hak Paten

Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

berhak untuk memanfaatkannya.

5) *Software*

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tidak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.

Perangkat lunak (*software*) yang masuk dalam ATB adalah perangkat lunak (*software*) komputer yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti *flashdisk*, *compact disk*, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya. Perangkat lunak (*software*) yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu.

6) *Kajian*

Kajian adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

7) *Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya*

Contoh Aset Tak Berwujud yang mempunyai nilai Sejarah adalah film dokumenter yang dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah maupun masyarakat. Hal ini berarti film tersebut mengandung nilai tertentu yang dapat mempunyai manfaat di masa depan bagi pemerintah. Film/Karya Seni/Budaya dapat dikategorikan dalam heritage ATB.

8) *Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan*

Suatu kegiatan perolehan ATB dalam pemerintahan, khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah. Namun dalam hal ini seperti juga aset tetap, aset ini nantinya juga diniatkan untuk digunakan dalam pelaksanaan operasional pemerintahan, sehingga dapat diakui sebagai bagian dari ATB.

9) *Aset Tidak Berwujud Lainnya*

Aset Tidak Berwujud Lainnya merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik dan tidak masuk kategori Goodwill, Lisensi dan Franchise, Hak Cipta, Hak Paten, Software, Kajian, Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya, dan Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Contoh aset tidak berwujud lainnya adalah Konsultan Perencana yaitu hasil pelaksanaan pekerjaan oleh konsultan perencanaan, dapat berupa gambar kerja pelaksanaan, desain bangunan, detail perencanaan bangunan, pembuatan gambar shop drawing.

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Daerah.

Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi dilakukan dengan metode Garis Lurus. Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tak Berwujud secara merata setiap tahun selama masa manfaat.

Perhitungan metode garis lurus menggunakan formula sebagai berikut.

$$\text{Amortisasi} = \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Didalam penghitungan dan pencatatannya Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas, tidak diamortisasi sedangkan Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat terbatas, dilakukan amortisasi.

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga. Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

4.4.13 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Definisi dan Klasifikasi Kewajiban

1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

2) Klasifikasi kewajiban

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis Akrua! Nomor 09 tentang Kewajiban antara lain:

a) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- (a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
- (b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- (c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban jangka panjang diantaranya utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.

Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

- 1) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- 2) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan, yang belum dibayar lunas sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- 3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government related events*); dan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- 4) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Pengukuran Kewajiban

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek:

- 1) pengukuran utang kepada Pihak Ketiga. Utang kepada pihak ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat ini pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.
- 2) Pengukuran utang transfer. Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.
- 3) Pengukuran utang bunga. Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- 4) Pengukuran utang perhitungan pihak ketiga (PFK). Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.
- 5) Pengukuran bagian lancar utang jangka panjang. Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- 6) Pengukuran kewajiban lancar lainnya. Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

Pengukuran utang jangka panjang berdasarkan karakteristiknya:

- 1) Utang yang tidak diperjualbelikan
Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.
- 2) Utang yang diperjualbelikan. utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah.

4.4.14 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

Definisi dan Klasifikasi Koreksi Kesalahan

- 1) Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Sedangkan kesalahan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan Tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

2) Klasifikasi Koreksi Kesalahan

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

a) Kesalahan tidak berulang.

Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, terdiri atas:

- Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
- Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

b) Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Perlakuan Koreksi Kesalahan

1) Kesalahan tidak berulang

a) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

b) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

- Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

- Koreksi - Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/Perkada Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

2) Kesalahan berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui.

4.4.15 Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

Definisi dan Klasifikasi

- 1) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 85/PMK.05/2021 tentang PSAP Nomor 17 Properti Investasi menjelaskan bahwa Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - a) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - b) Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
- 2) Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.
- 3) Klasifikasi Properti Investasi
Properti Investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Berikut adalah contoh properti investasi:

- a) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek.
- b) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai.
- c) Bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
- d) Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
- e) Properti dalam proses Pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.

Pengukuran Properti Investasi

- 1) Properti Investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
- 2) Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
- 3) Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung.
- 4) Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak, dan biaya transaksi lainnya.
- 5) Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya dibawah ini:
 - a) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi yang siap digunakan).
 - b) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai Tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
 - c) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa Pembangunan atau pengembangan properti investasi.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pengukuran setelah pengakuan awal

- 1) Properti Investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- 2) Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.
- 3) Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
- 4) Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Perlakuan Properti Investasi

1) Alih Guna

Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

- a) Dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, disalahgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap.
- b) Dimulai pengembangan properti investasi untuk dijual, disalahgunakan dari properti investasi menjadi persediaan
- c) Berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, disalahgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi.
- d) Dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

2) Pelepasan

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.

Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

APBD Kabupaten Gunungkidul disusun menggunakan basis kas sehingga Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun menggunakan basis kas. Dengan basis tersebut, maka pengakuan pos-pos dalam LRA adalah sebagai berikut:

- Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerimaan satuan kerja atau Bendahara BLUD;
- Transfer diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Daerah dan/atau pada saat dilakukan pembayaran oleh bendahara pengeluaran satuan kerja;
- Belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah dan/atau bendahara pengeluaran.

5.1.1 Pendapatan

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	1.985.328.493.903,00	1.992.172.404.395,86	100,34	1.988.675.824.171,86

Pendapatan LRA meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Asli (PAD) Daerah yang Sah. Anggaran dan realisasi pendapatan pada tahun 2023 sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah	267.240.187.152,00	277.318.850.589,86	103,77	313.516.321.990,86
2.	Pendapatan Transfer	1.712.108.306.751,00	1.708.712.069.515,00	99,80	1.669.559.901.181,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.980.000.000,00	6.141.484.291,00	102,70	5.599.601.000,00
	Jumlah	1.985.328.493.903,00	1.992.172.404.395,86	100,34	1.988.675.824.171,86

Realisasi Pendapatan tahun 2023 sebesar Rp1.992.172.404.395,86 atau mencapai 100,34% dari anggaran sebesar Rp1.985.328.493.903,00 dan naik sebesar Rp3.496.580.224,00 dibandingkan realisasi tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	267.240.187.152,00	277.318.850.589,86	103,77	313.516.321.990,86

Pemungutan PAD selalu berdasarkan pada Peraturan Daerah. Anggaran dan Realisasi dari komponen PAD adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Pajak Daerah	76.056.035.000,00	80.211.846.865,00	105,46	77.069.733.200,50
2.	Retribusi Daerah	34.276.784.905,00	35.520.370.106,00	103,63	30.236.710.833,65
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.354.127.008,00	16.354.134.672,07	100,00	16.569.133.085,04
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	140.553.240.239,00	145.232.498.946,79	103,33	189.640.744.871,67
	Jumlah	267.240.187.152,00	277.318.850.589,86	103,77	313.516.321.990,86

Realisasi PAD tahun 2023 sebesar Rp277.318.850.589,86 atau mencapai 103,77% dari anggaran sebesar Rp267.240.187.152,00 dan turun sebesar Rp36.197.471.401,00 dibandingkan realisasi tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

5.1.1.1. a Pendapatan Pajak Daerah

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Pajak Daerah	76.056.035.000,00	80.211.846.865,00	105,46	77.069.733.200,50

Pendapatan pajak daerah dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah dan diperoleh dari beberapa komponen pajak sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	PAJAK HOTEL	4.400.000.000,00	4.524.181.432,00	102,82	3.087.128.949,00
	Hotel	4.130.381.048,00	4.239.077.698,00	102,63	2.864.067.864,00
	Motel	2.700.000,00	2.850.000,00	105,56	1.550.000,00
	Losmen	248.206.452,00	263.440.484,00	106,14	218.786.085,00
	Pajak Wisma Pariwisata	8.465.000,00	8.215.000,00	97,05	0,00
	Rumah Penginapan dan sejenisnya	7.500.000,00	7.076.300,00	94,35	2.425.000,00
	Rumah Kos Dengan Jumlah Kamar Lebih Dari 10 (Sepuluh)	2.747.500,00	3.521.950,00	128,19	300.000,00
2	PAJAK RESTORAN	11.585.000.000,00	13.280.174.489,00	114,63	12.115.505.943,00
	Restoran dan Sejenisnya	3.250.000.000,00	3.536.405.884,00	108,81	2.052.661.695,00
	Rumah Makan dan Sejenisnya	4.146.501.087,00	4.477.872.432,00	107,99	4.723.741.397,00
	Kafetaria dan Sejenisnya	32.277.300,00	32.032.200,00	99,24	4.916.590,00
	Warung dan Sejenisnya	434.600,00	424.600,00	97,70	88.081.518,00
	Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.155.787.013,00	5.233.439.373,00	125,93	5.246.104.743,00
3	PAJAK HIBURAN - LRA	170.000.000,00	174.771.597,00	102,81	119.333.395,00
	Pagelaran	500.000,00	500.000,00		1.000.000,00
	Kesenian/Musik/Tari/Busana			100,00	
	Diskotik, Karaoke, Klab Malam Dan Sejenisnya	32.530.000,00	27.940.000,00	85,89	31.919.000,00
	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan	136.770.000,00	145.361.597,00	106,28	86.214.395,00
	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa Dan Pusat Kebugaran (Fitnes Center)	200.000,00	220.000,00	110,00	200.000,00
	Pajak Pertandingan Olahraga	0,00	750.000,00	0,00	0,00
4	PAJAK REKLAME	1.290.000.000,00	1.340.906.158,00	103,95	1.180.073.725,00
	Reklame Papan/Bilboard / Videotron / Megatron	1.168.905.017,00	1.226.250.275,00	104,91	950.207.579,00
	Reklame Kain	120.212.983,00	113.773.883,00	94,64	229.761.146,00
	Reklame Melekat/Stiker	882.000,00	882.000,00	100,00	105.000,00
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	19.750.000.000,00	20.482.189.344,00	103,71	19.378.017.705,00
	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	19.750.000.000,00	20.482.189.344,00	103,71	19.378.017.705,00
6	PAJAK PARKIR	85.000.000,00	101.780.564,00	119,74	63.179.400,00
	Pajak Parkir	85.000.000,00	101.780.564,00	119,74	63.179.400,00
7	PAJAK AIR TANAH	876.035.000,00	984.013.003,00	112,33	935.436.448,00
	Pajak Air Tanah	876.035.000,00	984.013.003,00	112,33	935.436.448,00
8	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	1.600.000.000,00	1.809.782.600,00	113,11	1.057.881.000,00
	Pajak Batu Kapur	1.149.459.200,00	1.294.298.200,00	112,60	997.788.000,00
	Pajak Batu Apung	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Pajak Granit/Andesit	10.335.000,00	10.335.000,00	100,00	0,00
	Kaolin	13.737.800,00	36.959.000,00	269,03	10.758.000,00
	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Lainnya	426.468.000,00	468.190.400,00	109,78	49.295.000,00
9	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	24.300.000.000,00	24.785.710.364,00	102,00	24.589.756.058,00
	Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	24.300.000.000,00	24.785.710.364,00	102,00	24.589.756.058,00
10	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	12.000.000.000,00	12.728.337.314,00	106,07	14.543.420.577,50
	BPHTB - Pemindahan Hak	12.000.000.000,00	12.728.337.314,00	106,07	14.543.420.577,50
	Jumlah	76.056.035.000,00	80.211.846.865,00	105,46	77.069.733.200,50



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2023 sebesar Rp80.211.846.865,00 atau mencapai 105,46% dari anggaran sebesar Rp76.056.035.000,00 dan naik sebesar Rp3.142.113.664,50 dibandingkan realisasi tahun 2022.

Penjelasan atas realisasi pendapatan pajak daerah yang melebihi target di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Adanya penambahan obyek pajak baru
2. Optimalisasi upaya penagihan dan pemeriksaan pajak
3. Beberapa Wajib Pajak MBLB telah menyelesaikan proses perijinan
4. Adanya objek baru *incidental* (turnamen olah raga yang mengenakan tiket masuk)
5. Beralihnya minat pengguna reklame kain ke Reklame
6. Meningkatnya jumlah subjek pajak/konsumen pengguna tenaga listrik.

5.1.1.1.b Pendapatan Retribusi Daerah

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Retribusi Daerah	34.276.784.905,00	35.520.370.106,00	103,63	30.236.710.833,65

Pendapatan retribusi daerah diperoleh dari beberapa komponen retribusi sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN	464.049.500,00	516.453.900,00	111,29	546.279.730,00
	Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	464.049.500,00	516.453.900,00	111,29	546.279.730,00
2	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN	1.271.394.750,00	1.274.771.128,00	100,27	1.239.090.802,00
	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.271.394.750,00	1.274.771.128,00	100,27	1.239.090.802,00
3	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR	3.041.295.400,00	3.050.320.900,00	100,30	2.500.659.950,00
	Pelataran	3.041.295.400,00	3.050.320.900,00	100,30	2.500.659.950,00
4	RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	276.540.000,00	280.155.000,00	101,31	346.780.000,00
	Pengujian Kendaraan Bermotor	276.540.000,00	280.155.000,00	101,31	346.780.000,00
5	RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS	72.300.000,00	75.650.000,00	104,63	73.200.000,00
	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	72.300.000,00	75.650.000,00	104,63	73.200.000,00
6	RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG	17.000.000,00	18.301.000,00	107,65	17.733.000,00
	Pelayanan Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	17.000.000,00	18.301.000,00	107,65	17.733.000,00
7	RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	629.238.975,00	517.250.553,00	82,20	639.289.274,00
	Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	629.238.975,00	517.250.553,00	82,20	639.289.274,00
8	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	1.731.607.750,00	2.407.155.800,00	139,01	2.076.692.625,00
	Penyewaan Tanah dan Bangunan	647.533.250,00	1.334.834.300,00	206,14	896.552.925,00
	Penyewaan Tanah	160.440.000,00	100.393.000,00	62,57	159.164.000,00
	Penyewaan Bangunan	289.192.000,00	300.648.500,00	103,96	570.853.700,00
	Pemakaian Laboratorium	137.041.500,00	212.269.000,00	154,89	166.053.000,00
	Pemakaian Ruangan	406.918.000,00	356.334.000,00	87,57	232.814.000,00
	Pemakaian Kendaraan Bermotor	57.043.000,00	102.677.000,00	180,00	51.255.000,00
	Pemakaian Alat	33.440.000,00	0,00	0,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

9	RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN	500.000.000,00	428.773.002,00	85,75	367.312.002,55
	Penyediaan Tempat Pelelangan	500.000.000,00	428.773.002,00	85,75	367.312.002,55
10	RETRIBUSI TERMINAL	51.006.000,00	50.201.800,00	98,42	45.532.000,00
	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus	38.690.000,00	40.599.000,00	104,93	41.574.000,00
	Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
	Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	12.316.000,00	9.602.800,00	77,97	2.658.000,00
11	RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN /VILLA	20.000.000,00	17.762.500,00	88,81	16.231.250,00
	Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	20.000.000,00	17.762.500,00	88,81	16.231.250,00
12	RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	24.798.161.000,00	25.147.470.480,00	101,41	20.609.885.749,00
	Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	24.798.161.000,00	25.147.470.480,00	101,41	20.609.885.749,00
13	RETRIBUSI PENJUALAN USAHA DAERAH	595.000.000,00	689.704.500,00	115,92	672.614.500,00
	Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih	95.000.000,00	98.925.000,00	104,13	88.620.000,00
	Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	75.000.000,00	75.067.500,00	100,09	78.218.500,00
	Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	425.000.000,00	515.712.000,00	121,34	505.776.000,00
14	RETRIBUSI IZIN TRAYEK UNTUK MENYEDIKAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM	5.519.000,00	5.729.000,00	103,81	9.528.000,00
	Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.519.000,00	5.729.000,00	103,81	9.528.000,00
15	RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN	803.672.530,00	1.040.670.543,00	129,49	1.075.881.951,10
	Persetujuan Bangunan	803.672.530,00	1.040.670.543,00	129,49	1.075.881.951,10
	Jumlah	34.276.784.905,00	35.520.370.106,00	103,63	30.236.710.833,65

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2023 sebesar Rp35.520.370.106,00 atau mencapai 103,63% dari anggaran sebesar Rp34.276.784.905,00 dan naik sebesar Rp5.283.659.272,35 dari tahun 2022.

Pendapatan retribusi daerah tersebut diperoleh dari beberapa SKPD sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Dinas Kesehatan (Dinkes)	105.041.500,00	187.988.000,00	178,97	127.680.000,00
	Retribusi Pemakaian Laboratorium	105.041.500,00	187.988.000,00	178,97	127.680.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPUPRKP)	365.143.000,00	415.616.500,00	113,82	359.712.500,00
	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	72.300.000,00	75.650.000,00	104,63	73.200.000,00
	Retribusi Penyewaan Bangunan	235.800.000,00	237.289.500,00	100,63	235.257.500,00
	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	57.043.000,00	102.677.000,00	180,00	51.255.000,00
3	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	1.271.394.750,00	1.274.771.128,00	100,27	1.239.090.802,00
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.271.394.750,00	1.274.771.128,00	100,27	1.239.090.802,00
4	Dinas Perhubungan (Dishub)	333.065.000,00	336.085.800,00	100,91	401.840.000,00
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	276.540.000,00	280.155.000,00	101,31	346.780.000,00
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	38.690.000,00	40.599.000,00	104,93	41.574.000,00
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	12.316.000,00	9.602.800,00	77,97	2.658.000,00
	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.519.000,00	5.729.000,00	103,81	9.528.000,00
5	Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)	629.238.975,00	517.250.553,00	82,20	639.289.274,00
	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	629.238.975,00	517.250.553,00	82,20	639.289.274,00
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	803.672.530,00	1.040.670.543,00	129,49	1.075.881.951,10
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	803.672.530,00	1.040.670.543,00	129,49	1.075.881.951,10
7	Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)	1.000.000.000,00	1.019.552.502,00	101,96	951.306.502,55
	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	500.000.000,00	428.773.002,00	85,75	367.312.002,55
	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	75.000.000,00	75.067.500,00	100,09	78.218.500,00
	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	425.000.000,00	515.712.000,00	121,34	505.776.000,00
8	Dinas Pariwisata (Dispar)	24.855.251.000,00	25.199.552.980,00	101,39	20.873.577.199,00
	Retribusi Penyewaan Bangunan	37.090.000,00	34.320.000,00	92,53	247.460.200,00
	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	20.000.000,00	17.762.500,00	88,81	16.231.250,00
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	24.798.161.000,00	25.147.470.480,00	101,41	20.609.885.749,00
9	Dinas Pertanian dan Pangan (DPP)	95.000.000,00	98.925.000,00	104,13	88.620.000,00
	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	95.000.000,00	98.925.000,00	104,13	88.620.000,00
10	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH)	496.049.500,00	540.734.900,00	109,01	584.652.730,00
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	464.049.500,00	516.453.900,00	111,29	546.279.730,00
	Retribusi Pemakaian Laboratorium	32.000.000,00	24.281.000,00	75,88	38.373.000,00
11	Dinas Perdagangan (Disdag)	3.637.928.650,00	4.308.130.200,00	118,42	3.404.795.875,00
	Retribusi Pelataran	3.041.295.400,00	3.050.320.900,00	100,30	2.500.659.950,00
	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	17.000.000,00	18.301.000,00	107,65	17.733.000,00
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	579.633.250,00	1.239.508.300,00	213,84	886.402.925,00
12	Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	685.000.000,00	581.092.000,00	84,83	490.264.000,00
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	67.900.000,00	95.326.000,00	140,39	10.150.000,00
	Retribusi Penyewaan Tanah	160.440.000,00	100.393.000,00	62,57	159.164.000,00
	Retribusi Penyewaan Bangunan	16.302.000,00	29.039.000,00	178,13	88.136.000,00
	Retribusi Pemakaian Ruangan	406.918.000,00	356.334.000,00	87,57	232.814.000,00
	Retribusi Pemakaian Alat	33.440.000,00	0,00	0,00	-
	Jumlah	34.276.784.905,00	35.520.370.106,00	103,63	30.236.710.833,65

Penjelasan atas pendapatan retribusi yang terealisasi kurang dari 90% adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal Dishub terealisasi 77,97% dikarenakan tidak banyak pedagang yang beroperasi di kawasan terminal setiap harinya sehingga pendapatan sewa los dan sewa kios harian relatif sangat sedikit.
2. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Diskominfo terealisasi 82,20% dikarenakan beberapa provider/pemilik menara telekomunikasi mengalami keterlambatan pembayaran. Keterlambatan pembayaran dicatat sebagai penambahan piutang di neraca tahun 2023.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

3. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan DKP terealisasi 85,75% dikarenakan pelabuhan dan TPI Gesing masih dalam proses pembangunan sehingga belum bisa ditarik retribusi dan adanya cuaca ekstrim serta gelombang tinggi.
4. Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila Dispar terealisasi 88,81% dikarenakan pengunjung/ tamu memilih penginapan milik swasta yang lebih representatif dan nyaman.
5. Retribusi Pemakaian Laboratorium DPKH terealisasi 75,88% dikarenakan adanya pembatasan lalu lintas ternak utk mencegah penyebaran penyakit PMK dan LSD yg mengakibatkan palaku usaha yg mengirimkan ternak keluar gunungkidul menurun. Pelaku usaha biasanya membutuhkan pelayanan laboratorium utk mendapatkan surat keterangan kesehatan hewan utk ternak yg akan keluar Gunungkidul. Dari daerah penerima mensyaratkan uji lab tambahan utk pengujian PMK & LSD yg harus dikirim ke BBVet Wates krn keterbatasan kemampuan pengujian UPT Lab Keswan.
6. Retribusi Penyewaan Tanah BKAD terealisasi 62,57% dikarenakan terdapat pembayaran sewa tanah yang jatuh tempo namun belum melakukan pembayaran

Penjelasan atas pendapatan retribusi yang terealisasi lebih dari 110% adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Pemakaian Laboratorium Dinkes terealisasi 178,97% dikarenakan adanya kewajiban untuk melakukan pemeriksaan air bersih bagi Industri pangan dan rumah tangga yang mendapatkan pelatihan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah provinsi, sehingga angka pemeriksaan air ke laboratorium kesehatan daerah meningkat.
2. Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor DPUPRKP terealisasi 180% dikarenakan ada peningkatan penggunaan alat berat berupa excavator yang digunakan/disewa oleh Pemerintah Kalurahan Petir, Pemerintah Kalurahan Pringombo, Perataan lahan untuk calon lokasi perumahan dan untuk pekerjaan jalan di Kapanewon Patuk.
3. Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan DPP terealisasi 121,34% dikarenakan kondisi pertanaman di MH2 bagus sehingga produksi benihnya tinggi.
4. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan Disdag terealisasi 213,84% dikarenakan adanya pengoptimalan perpanjangan dan sewa kios/los pada penempatan Tugas Pembantuan di Pasar Munggi Semanu, dan Ponjong, serta adanya pembangunan kios di Pasar Dondong dan los di Pasar Karangmojo.
5. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan BKAD terealisasi 140,39% dikarenakan adanya pembayaran sewa tanah dan bangunan yang lebih dari 1 tahun.
6. Retribusi Penyewaan Bangunan BKAD terealisasi 178,13% dikarenakan adanya pembayaran sewa bangunan atas tunggakan tahun sebelumnya.

5.1.1.1.c Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.354.127.008,00	16.354.134.672,07	100,00	16.569.133.085,04

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah atas penyertaan modal pada perusahaan daerah/BUMD yang direalisasikan melalui BKAD selaku PPKD dengan rincian sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1	Bank Pembangunan Daerah DIY	12.448.509.036,00	12.448.509.036,00	100,00
2	PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul	3.740.819.843,00	3.740.819.843,00	100,00
3	BUKP	164.798.129,00	164.805.793,07	100,00
4	PDAM	0,00	0,00	0,00
Jumlah		16.354.127.008,00	16.354.134.672,07	100,00

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2023 sebesar Rp16.354.134.672,07 atau mencapai 100,00% dari anggaran sebesar Rp16.354.127.008,00.

Di dalam Bagan Akun Standar sesuai Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317, bagian laba pemerintah daerah atas penyertaan modal pada BPD DIY, BPR BDG, dan BUKP dikelompokkan dalam akun Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal BUMD (Lembaga Keuangan).

Sedangkan bagian laba pemerintah daerah atas penyertaan modal pada PDAM dikelompokkan dalam akun Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum).

Di tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tidak memperoleh bagian laba atas penyertaan modal dari PDAM dikarenakan PDAM mengalami kerugian di tahun anggaran sebelumnya.

Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut:

Bagian Laba PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul

No	Uraian	Tanggal Penerimaan	Jumlah (Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Bank Daerah Gunungkidul (BDG)	04-Mei-23	2.000.000.000,00
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Bank Daerah Gunungkidul (BDG)	08-Nov-23	1.740.819.843,00
Jumlah Bagian Laba PT BPR BDG			3.740.819.843,00

Bagian Laba Bank Pembangunan Daerah DIY

No	Uraian	Tanggal Penerimaan	Jumlah (Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Bank Pembangunan Daerah (BPD)	27-Jan-23	12.448.509.036,00
Jumlah Bagian Laba BPD DIY			12.448.509.036,00

Uraian		Tanggal Penerimaan	Jumlah (Rp)
Laba Jasa Pemilik Modal BUKP			
1	Laba Jasa Pemilik Modal BUKP Kapanewon Ponjong	13-Okt-23	613.901,08
2	Laba Jasa Pemilik Modal BUKP Kapanewon Playen	05-Okt-23	700.599,30
3	Laba Jasa Pemilik Modal BUKP Kapanewon Semin	30-Okt-23	1.530.251,70
4	Laba Jasa Pemilik Modal BUKP Kapanewon Panggang	19-Okt-23	662.541,59
5	Laba Jasa Pemilik Modal BUKP Kapanewon Rongkop	06-Okt-23	499.844,16
6	Laba Jasa Pemilik Modal BUKP Kapanewon Nglipar	04-Okt-23	481.178,83
7	Laba Jasa Pemilik Modal BUKP Kapanewon Semanu	09-Okt-23	137.523,95
8	Laba Jasa Pemilik Modal BUKP Kapanewon Paliyan	05-Okt-23	480.125,83
9	Laba Jasa Pemilik Modal BUKP Kapanewon Karangmojo	05-Okt-23	190.649,17
10	Laba Jasa Pemilik Modal BUKP Kapanewon Ngawen	17-Okt-23	759.382,43
11	Laba Jasa Pemilik Modal BUKP Kapanewon Patuk	04-Okt-23	384.508,57
12	Laba Jasa Pemilik Modal BUKP Kapanewon Wonosari	09-Okt-23	38.651,19
13	Laba Jasa Pemilik Modal BUKP Kapanewon Saptosari	03-Okt-23	495.547,32
14	Laba Jasa Pemilik Modal BUKP Kapanewon Gedangsari	18-Okt-23	523.841,13
Jumlah Jasa Pemilik Modal BUKP			7.498.546,25
Dana Pembinaan BUKP			
1	Dana Pembinaan BUKP Kapanewon Ponjong	13-Okt-23	6.172.876,43
2	Dana Pembinaan BUKP Kapanewon Playen	05-Okt-23	5.196.003,28
3	Dana Pembinaan BUKP Kapanewon Semin	30-Okt-23	16.362.280,78
4	Dana Pembinaan BUKP Kapanewon Panggang	19-Okt-23	7.151.763,25
5	Dana Pembinaan BUKP Kapanewon Rongkop	06-Okt-23	6.381.660,10
6	Dana Pembinaan BUKP Kapanewon Nglipar	04-Okt-23	3.846.328,67



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

7	Dana Pembinaan BUKP Kapanewon Semanu	09-Okt-23	2.236.333,96
8	Dana Pembinaan BUKP Kapanewon Paliyan	05-Okt-23	6.266.010,40
9	Dana Pembinaan BUKP Kapanewon Karangmojo	05-Okt-23	4.012.869,55
10	Dana Pembinaan BUKP Kapanewon Ngawen	17-Okt-23	6.507.293,43
11	Dana Pembinaan BUKP Kapanewon Patuk	04-Okt-23	5.989.589,58
12	Dana Pembinaan BUKP Kapanewon Wonosari	09-Okt-23	1.446.169,19
13	Dana Pembinaan BUKP Kapanewon Saptosari	03-Okt-23	6.762.693,74
14	Dana Pembinaan BUKP Kapanewon Gedangsari	18-Okt-23	11.557.982,98
	Jumlah Dana Pembinaan BUKP		89.889.855,34
Laba Jasa Produksi BUKP			
1	Laba Jasa Produksi BUKP Kapanewon Ponjong	13-Okt-23	4.629.657,32
2	Laba Jasa Produksi BUKP Kapanewon Playen	05-Okt-23	3.897.002,46
3	Laba Jasa Produksi BUKP Kapanewon Semin	30-Okt-23	12.271.710,58
4	Laba Jasa Produksi BUKP Kapanewon Panggang	19-Okt-23	5.363.822,44
5	Laba Jasa Produksi BUKP Kapanewon Rongkop	06-Okt-23	4.786.245,08
6	Laba Jasa Produksi BUKP Kapanewon Nglipar	04-Okt-23	2.884.746,50
7	Laba Jasa Produksi BUKP Kapanewon Semanu	09-Okt-23	1.677.250,47
8	Laba Jasa Produksi BUKP Kapanewon Paliyan	05-Okt-23	4.699.507,80
9	Laba Jasa Produksi BUKP Kapanewon Karangmojo	05-Okt-23	3.009.652,16
10	Laba Jasa Produksi BUKP Kapanewon Ngawen	17-Okt-23	4.880.470,07
11	Laba Jasa Produksi BUKP Kapanewon Patuk	04-Okt-23	4.492.192,18
12	Laba Jasa Produksi BUKP Kapanewon Wonosari	09-Okt-23	1.084.626,89
13	Laba Jasa Produksi BUKP Kapanewon Saptosari	03-Okt-23	5.072.020,30
14	Laba Jasa Produksi BUKP Kapanewon Gedangsari	18-Okt-23	8.668.487,23
	Jumlah Jasa Produksi BUKP		67.417.391,48
	Jumlah Pendapatan BUKP		164.805.793,07

5.1.1.1.d. Lain-lain PAD yang Sah

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Lain-lain PAD yang Sah	140.553.240.239,00	145.232.498.946,79	103,33	189.640.744.871,67

Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Penjualan Bangunan Gedung	107.857.100,00	289.156.020,00	268,09	1.202.608.667,00
2	Penjualan Bahan Perpustakaan	0,00	2.020.000,00	0,00	0,00
3	Penjualan Tanaman	0,00	13.308.200,00	0,00	0,00
4	Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Sewa BMD	210.290.000,00	199.602.000,00	94,92	197.734.000,00
6	Kerja Sama Daerah	2.958.176.880,00	2.818.492.000,00	95,28	2.557.370.000,00
7	Jasa Giro pada Kas Daerah	965.000.000,00	1.072.822.952,00	111,17	1.556.842.784,00
8	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	35.000.000,00	81.854.179,00	233,87	45.735.079,00
9	Bunga atas Penempatan Uang	941.666.674,00	1.046.003.385,00	111,08	2.611.458.328,00
10	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	345.782.364,00	496.192.012,40	143,50	0,00
11	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara dan Pejabat Lain	0,00	0,00	0,00	3.082.751.049,97
12	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	151.208.315,00	0,00	189.080.070,00
13	Denda Pajak Hotel	2.523.717,00	3.156.469,00	125,07	1.310.046,00
14	Denda Pajak Losmen	426.038,00	1.181.099,00	277,23	413.944,00
15	Denda Pajak Wisma Pariwisata	0,00	20.000,00	0,00	0,00
16	Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	40.192,00	60.592,00	150,76	109.500,00
17	Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar lebih dari 10	326.700,00	360.750,00	110,42	0,00
18	Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.491.961,00	5.742.815,00	230,45	3.713.741,00
19	Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	8.798.090,00	16.505.270,00	187,60	8.424.836,00
20	Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	25.874,00	152.432,00	589,13	214.458,00
21	Denda Pajak Warung dan Sejenisnya	392,00	392,00	0,00	0,00
22	Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	3.387.571,00	7.609.887,00	224,64	8.577.862,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

23	Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	349.600,00	478.600,00	136,90	442.180,00
24	Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan	625.405,00	902.368,00	144,29	568.770,00
25	Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/SPA dan Pusat Kebugaran	2.000,00	4.400,00	220,00	800,00
26	Denda Pajak Pertandingan Olah Raga	0,00	75.000,00	0,00	61.680,00
27	Denda Pajak Reklame Papan/Billboard / Videotron / Megatron	2.623.040,00	5.271.038,00	200,95	6.250.809,00
28	Denda Pajak Reklame Kain	5.944,00	5.944,00	100,00	9590,00
29	Denda Pajak Parkir	80.125,00	271.712,00	339,11	113.300,00
30	Denda Pajak Air Tanah	246.765,00	748.666,00	303,39	1.234.117,00
31	Denda Pajak Batu Kapur	10.414.740,00	13.396.528,00	128,63	14.407.120,00
32	Denda Pajak Kaolin	681.240,00	10.951.440,00	1607,57	651.120,00
33	Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batu Lainnya	16.335.200,00	30.685.088,00	187,85	441.000,00
34	Denda PBBP2	328.138.807,00	576.219.406,00	175,60	315.384.139,00
35	Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	23.921.100,00	0,00	38.996.400,00
36	Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.673.720,00	12.087.545,00	157,52	2.581.560,00
37	Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	3.861.893,86	100,00	242.668,58
38	Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	197.080,00	0,00	755.120,00
39	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	0,00	30.900.000,00	0,00	0,00
40	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	253.827.618,38	100,00	160.491.731,12
41	Pendapatan BLUD	134.364.270.100,00	138.063.244.750,15	102,75	177.631.768.402,00
	Jumlah	140.553.240.239,00	145.232.498.946,79	103,33	189.640.744.871,67

Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah tahun 2022 sebesar Rp145.232.498.946,79 atau mencapai 103,33% dari anggaran sebesar Rp140.553.240.239,00 dan turun sebesar Rp44.408.245.924,88 dibandingkan realisasi tahun 2022.

Pendapatan Denda Retribusi sebesar Rp40.067.618,86 direalisasikan melalui SKPD dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	7.673.720,00	12.087.545,00	157,52	2.581.560,00
	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha (Pemakaian Kekayaan Daerah)	7.673.720,00	12.087.545,00	157,52	2.581.560,00
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	3.861.893,86	0,00	242.668,58
	Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	3.861.893,86	0,00	242.668,58
3	Dinas Perhubungan	0,00	24.118.180,00	0,00	39.751.520,00
	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	23.921.100,00	0,00	38.996.400,00
	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	197.080,00	0,00	755.120,00
	Jumlah	7.673.720,00	40.067.618,86	522,14	42.575.748,58



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pendapatan BLUD sebesar Rp138.063.244.750,15 terdiri dari:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1	Puskesmas Nglipar I	1.279.331.500,00	1.281.437.644,00	100,16
2	Puskesmas Nglipar II	1.255.666.150,00	1.334.699.901,00	106,29
3	Puskesmas Gedangsari I	1.350.456.000,00	1.353.306.871,00	100,21
4	Puskesmas Gedangsari II	1.223.666.832,00	1.273.838.044,00	104,10
5	Puskesmas Patuk I	1.449.938.000,00	1.402.255.453,00	96,71
6	Puskesmas Patuk II	1.140.000.000,00	1.108.215.044,00	97,21
7	Puskesmas Rongkop	1.108.215.044,00	2.081.457.477,00	187,82
8	Puskesmas Giriubobo	1.693.323.112,00	1.683.863.653,00	99,44
9	Puskesmas Ponjong I	2.428.872.000,00	2.424.726.048,00	99,83
10	Puskesmas Ponjong II	1.110.144.000,00	1.212.497.489,00	109,22
11	Puskesmas Wonosari I	1.990.819.156,00	2.042.406.761,00	102,59
12	Puskesmas Wonosari II	2.473.541.161,00	2.664.219.852,00	107,71
13	Puskesmas Karangmojo I	1.691.209.500,00	2.092.846.977,00	123,75
14	Puskesmas Karangmojo II	1.725.765.013,00	1.742.003.009,00	100,94
15	Puskesmas Panggang I	870.118.950,00	907.819.777,00	104,33
16	Puskesmas Panggang II	1.523.396.820,00	1.421.091.501,00	93,28
17	Puskesmas Purwosari	1.488.013.680,00	1.537.461.062,00	103,32
18	Puskesmas Tepus I	960.000.000,00	1.008.567.888,00	105,06
19	Puskesmas Tepus II	1.489.161.450,00	1.585.462.207,00	106,47
20	Puskesmas Tanjungsari.	1.959.519.292,00	1.864.931.777,00	95,17
21	Puskesmas Paliyan	2.181.373.250,00	2.043.733.603,00	93,69
22	Puskesmas Saptosari	2.529.597.620,00	2.658.700.567,00	105,10
23	Puskesmas Ngawen I	1.249.800.000,00	1.316.416.692,00	105,33
24	Puskesmas Ngawen II	963.790.079,00	923.439.193,00	95,81
25	Puskesmas Semanu I	2.139.157.959,00	2.179.929.201,00	101,91
26	Puskesmas Semanu II	1.468.308.477,00	1.594.639.213,00	108,60
27	Puskesmas Semin I	2.251.757.645,00	2.239.808.240,00	99,47
28	Puskesmas Semin II	1.678.217.493,00	1.704.220.662,00	101,55
29	Puskesmas Playen I	2.304.762.575,00	2.272.099.833,00	98,58
30	Puskesmas Playen II	1.792.863.386,00	1.797.924.953,00	100,28
31	RSUD Wonosari I	75.425.000.000,00	76.951.431.168,15	102,02
32	RSUD Saptosari	9.000.000.000,00	10.357.792.990,00	115,09
	Jumlah Pendapatan BLUD	133.195.786.144,00	138.063.244.750,15	103,65

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan Transfer	1.712.108.306.751,00	1.708.712.069.515,00	99,80	1.669.559.901.181,00

Pendapatan transfer yang diterima di rekening Kas Umum Daerah merupakan pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat direalisasikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Besaran pendapatan ini sepenuhnya merupakan otoritas pemerintah pusat dengan mempertimbangkan kondisi fiskal nasional. Pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi direalisasikan berdasar APBD Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Anggaran dan Realisasi masing-masing komponen pendapatan transfer tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat	1.504.607.740.365,00	1.503.031.835.851,00	99,90	1.474.380.919.383,00
2	Transfer Antar Daerah	207.500.566.386,00	205.680.233.664,00	99,12	195.178.981.798,00
	Jumlah	1.712.108.306.751,00	1.708.712.069.515,00	99,80	1.669.559.901.181,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

5.1.1.2.a Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat	1.504.607.740.365,00	1.503.031.835.851,00	99,90	1.474.380.919.383,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Dana Perimbangan	1.318.721.692.365,00	1.317.145.787.851,00	99,88	1.317.586.173.383,00
2	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	12.428.629.000,00
3	Dana Desa	179.933.551.000,00	179.933.551.000,00	100,00	144.366.117.000,00
4	Insentif Fiskal	5.952.497.000,00	5.952.497.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	1.504.607.740.365,00	1.503.031.835.851,00	99,90	1.474.380.919.383,00

5.1.1.2.a.1 Dana Perimbangan

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Dana Perimbangan	1.318.721.692.365,00	1.317.145.787.851,00	99,88	1.338.077.976.600,00
- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	20.812.199.365,00	20.812.199.365,00	100,00	26.798.133.902,00
- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	898.397.959.000,00	912.903.769.190,00	101,61	865.880.327.665,00
- Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	82.185.659.000,00	74.024.339.759,00	90,07	141.410.401.807,00
- Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	317.325.875.000,00	309.405.479.537,00	97,50	283.497.310.009,00

5.1.1.2.a.1.1 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	20.812.199.365,00	20.812.199.365,00	100,00	26.798.133.902,00

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.507.026.532,00	1.507.026.532,00	100,00	6.453.354.797,00
2	DBH PPh Pasal 21	14.224.198.544,00	14.052.099.548,00	98,79	14.468.843.118,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN	926.583.000,00	1.098.681.996,00	118,57	2.211.440.126,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2.092.194.429,00	2.092.194.429,00	100,00	1.560.658.128,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	233.000,00	233.000,00	100,00	15.354.369,00
6	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.120.232,00	1.120.232,00	100,00	0,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)	162.214.417,00	162.214.417,00	100,00	130.172.364,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.898.629.211,00	1.898.629.211,00	100,00	1.958.311.000,00
	Jumlah	20.812.199.365,00	20.812.199.365,00	100,00	26.798.133.902,00

- a) Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:
Penerimaan DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota

No.	Uraian	Tanggal Penerimaan	Realisasi 2023 (Rp)
1	- DBH TRIWULAN I 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D01.DBH PBB Migas Bagian Daerah)	31-Mar-23	158.411.800,00
2	- DBH TRIWULAN II 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D01.DBH PBB Migas Bagian Daerah)	26-Jun-23	198.014.750,00
3	- DBH MINGGU I 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D05.DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah)	04-Agu-23	86.300,00
4	- DBH MINGGU I 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D06.DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah)	04-Agu-23	3.230.100,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

5	- DBH MINGGU 1 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D03.DBH PBB Perkebunan Bagian Daerah)	04-Agu-23	7.550,00
6	- DBH MINGGU 2 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D03.DBH PBB Perkebunan Bagian Daerah)	09-Agu-23	7.550,00
7	- DBH MINGGU 2 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D05.DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah)	09-Agu-23	86.300,00
8	- DBH MINGGU 2 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D06.DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah)	09-Agu-23	3.230.100,00
9	- DBH MINGGU 3 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D05.DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah)	18-Agu-23	86.300,00
10	- DBH MINGGU 3 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D06.DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah)	18-Agu-23	3.230.100,00
11	- DBH MINGGU 3 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D03.DBH PBB Perkebunan Bagian Daerah)	18-Agu-23	7.550,00
12	- DBH MINGGU 4 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D03.DBH PBB Perkebunan Bagian Daerah)	23-Agu-23	7.550,00
13	- DBH MINGGU 4 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D05.DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah)	23-Agu-23	86.300,00
14	- DBH MINGGU 4 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D06.DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah)	23-Agu-23	3.230.100,00
15	- DBH MINGGU 5 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D05.DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah)	30-Agu-23	86.300,00
16	- DBH MINGGU 5 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D06.DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah)	30-Agu-23	3.230.100,00
17	- DBH MINGGU 5 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D03.DBH PBB Perkebunan Bagian Daerah)	30-Agu-23	7.550,00
18	- DBH MINGGU 6 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D05.DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah)	07-Sep-23	86.300,00
19	- DBH MINGGU 6 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D06.DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah)	07-Sep-23	3.230.100,00
20	- DBH MINGGU 6 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D03.DBH PBB Perkebunan Bagian Daerah)	07-Sep-23	7.550,00
21	- DBH MINGGU 7 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D03.DBH PBB Perkebunan Bagian Daerah)	11-Sep-23	7.550,00
22	- DBH MINGGU 7 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D05.DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah)	11-Sep-23	86.300,00
23	- DBH MINGGU 7 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D06.DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah)	11-Sep-23	3.230.100,00
24	- DBH TRIWULAN III 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D01.DBH PBB Migas Bagian Daerah)	21-Sep-23	277.220.650,00
25	- DBH MINGGU 8 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D03.DBH PBB Perkebunan Bagian Daerah)	21-Sep-23	7.550,00
26	- DBH MINGGU 8 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D05.DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah)	21-Sep-23	86.300,00
27	- DBH MINGGU 8 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D06.DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah)	21-Sep-23	3.230.100,00
28	- DBH MINGGU 9 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D05.DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah)	29-Sep-23	86.300,00
29	- DBH MINGGU 9 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D06.DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah)	29-Sep-23	3.230.100,00
30	- DBH MINGGU 9 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D03.DBH PBB Perkebunan Bagian Daerah)	29-Sep-23	7.550,00
31	- DBH MINGGU 10 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D03.DBH PBB Perkebunan Bagian Daerah)	05-Okt-23	7.550,00
32	- DBH MINGGU 10 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D05.DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah)	05-Okt-23	86.300,00
33	- DBH MINGGU 10 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D06.DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah)	05-Okt-23	3.230.100,00
34	- DBH MINGGU 11 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D05.DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah)	05-Okt-23	86.300,00
35	- DBH MINGGU 11 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D06.DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah)	11-Okt-23	3.230.100,00
36	- DBH MINGGU 11 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D03.DBH PBB Perkebunan Bagian Daerah)	11-Okt-23	7.550,00
37	- DBH PBB	12-Okt-23	648.488.532,00
38	- DBH MINGGU 12 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D05.DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah)	18-Okt-23	86.300,00
39	- DBH MINGGU 12 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D06.DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah)	18-Okt-23	3.230.100,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

40	- DBH MINGGU 12 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D03.DBH PBB Perkebunan Bagian Daerah)	18-Okt-23	7.550,00
41	- DBH MINGGU 13 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D06.DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah)	25-Okt-23	3.230.100,00
42	- DBH MINGGU 13 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D03.DBH PBB Perkebunan Bagian Daerah)	25-Okt-23	7.550,00
43	- DBH MINGGU 13 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D05.DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah)	25-Okt-23	86.300,00
44	- DBH TRIWULAN IV 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D01.DBH PBB Migas Bagian Daerah)	31-Okt-23	158.411.800,00
45	- DBH MINGGU 14 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D03.DBH PBB Perkebunan Bagian Daerah)	03-Nov-23	7.550,00
46	- DBH MINGGU 14 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D05.DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah)	03-Nov-23	86.300,00
47	- DBH MINGGU 14 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D06.DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah)	03-Nov-23	3.230.100,00
48	- DBH MINGGU 15 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D03.DBH PBB Perkebunan Bagian Daerah)	08-Nov-23	7.550,00
49	- DBH MINGGU 15 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D05.DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah)	08-Nov-23	86.300,00
50	- DBH MINGGU 15 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D06.DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah)	08-Nov-23	3.230.100,00
51	- DBH MINGGU 16 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D06.DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah)	15-Nov-23	3.230.100,00
52	- DBH MINGGU 16 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D05.DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah)	15-Nov-23	86.300,00
53	- DBH MINGGU 16 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D03.DBH PBB Perkebunan Bagian Daerah)	15-Nov-23	7.550,00
54	- DBH MINGGU 17 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D05.DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah)	22-Nov-23	86.300,00
55	- DBH MINGGU 17 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D06.DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah)	22-Nov-23	3.230.100,00
56	- DBH MINGGU 17 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D03.DBH PBB Perkebunan Bagian Daerah)	22-Nov-23	7.550,00
57	- DBH MINGGU 18 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D05.DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah)	29-Nov-23	86.300,00
58	- DBH MINGGU 18 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D06.DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah)	29-Nov-23	3.230.100,00
59	- DBH MINGGU 18 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D03.DBH PBB Perkebunan Bagian Daerah)	29-Nov-23	7.550,00
60	- DBH MINGGU 19 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D05.DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah)	15-Dec-23	172.600,00
61	- DBH MINGGU 19 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D06.DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah)	15-Dec-23	6.460.200,00
62	- DBH MINGGU 19 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D03.DBH PBB Perkebunan Bagian Daerah)	15-Dec-23	15.100,00
	Jumlah		1.507.026.532,00

b) Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tanggal Penerimaan	Realisasi 2023 (Rp)
1	- Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan, Triwulan ke-1 TA 2022 => 611111 DBH PPh Pasal 21 (001.Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	31-Mar-23	2.478.371.600,00
2	- Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan, Triwulan ke-2 TA 2022 => 611111 DBH PPh Pasal 21 (001.Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	14-Apr-23	1.350.268.000,00
3	- Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan, Triwulan ke-3 TA 2022 => 611111 DBH PPh Pasal 21 (001.Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	26-Jun-23	2.478.371.600,00
4	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Tahun 2021 dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil berdasarkan KMK Nomor 29/KM.7/2022 pada, TA 2022 => 611111 DBH PPh Pasal 21 (003.Alokasi Kurang Bayar DBH yang disalurkan)	21-Sep-23	2.478.371.600,00
5	- Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan dan Potongan Berdasarkan KMK Nomor 35/KM.7/2022, Triwulan ke-4 TA 2022 => 611111 DBH PPh Pasal 21 (001.Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	12-Okt-23	309.973.548,00
6	- Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Tahun 2021 dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil berdasarkan KMK Nomor 37/KM.7/2022 pada, TA 2022 => 611111 DBH PPh Pasal 21 (003.Alokasi Kurang Bayar DBH yang disalurkan)	30-Nov-23	4.956.743.200,00
	Jumlah		14.052.099.548,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- c) Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tanggal Penerimaan	Realisasi 2023 (Rp)
1	- DBH, TRIWULAN I 2023 => 611112 DBH PPh Pasal 25/29 OP (001.Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	31-Mar-23	185.316.600,00
2	- DBH, TRIWULAN II 2023 => 611112 DBH PPh Pasal 25/29 OP (001.Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	26-Jun-23	185.316.600,00
3	- DBH, TRIWULAN III 2023 => 611112 DBH PPh Pasal 25/29 OP (001.Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	21-Sep-23	185.316.600,00
4	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29	12-Okt-23	172.098.996,00
5	- DBH, TRIWULAN IV 2023 => 611112 DBH PPh Pasal 25/29 OP (001.Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	30-Nov-23	370.633.200,00
Jumlah			1.098.681.996,00

- d) Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tanggal Penerimaan	Realisasi 2023 (Rp)
1	- DBH, TRIWULAN I 2023 => 613111 DBH Cukai Hasil Tembakau (001.Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	31-Mar-23	382.792.800,00
2	DBH Cukai Tembakau (CHT)	11-Apr-23	178.230.429,00
3	- DBH, TRIWULAN II 2023 => 613111 DBH Cukai Hasil Tembakau (001.Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	26-Jun-23	574.189.200,00
4	- DBH, TRIWULAN III 2023 => 613111 DBH Cukai Hasil Tembakau (001.Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	31-Okt-23	574.189.200,00
5	DBH, TRIWULAN IV 2023 => 613111 DBH Cukai Hasil Tembakau (001.Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	31-Okt-23	382.792.800,00
Jumlah			2.092.194.429,00

- e) Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tanggal Penerimaan	Realisasi 2023 (Rp)
1	- DBH, TRIWULAN I 2023 => 612311 DBH SDA Minerba - Iuran Tetap (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	31-Jan-23	46.600,00
2	- DBH, TRIWULAN II 2023 => 612311 DBH SDA Minerba - Iuran Tetap (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	12-Apr-23	58.250,00
3	- DBH, TRIWULAN IV 2023 => 612311 DBH SDA Minerba - Iuran Tetap (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	31-Okt-23	46.600,00
4	- DBH, TRIWULAN III 2023 => 612311 DBH SDA Minerba - Iuran Tetap (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	12-Des-23	81.550,00
Jumlah			233.000,00

- f) Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalti adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tanggal Penerimaan	Realisasi 2023 (Rp)
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara Landrent	12-Okt-23	1.120.232
Jumlah			1.120.232,00

- g) DBH SDA Kehutanan - PSDH

No.	Uraian	Tanggal Penerimaan	Realisasi 2023 (Rp)
1	- DBH, TRIWULAN I 2023 => 612512 DBH SDA Kehutanan (002.PSDH . Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	30-Mar-23	23.307.150,00
2	- DBH, TRIWULAN II 2023 => 612512 DBH SDA Kehutanan (002.PSDH . Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	26-Jun-23	23.307.150,00
3	DBH SDA Kehutanan _propinsi Sumberdaya Hutan (PSDH)	12-Okt-23	6.833.417,00
4	- DBH, TRIWULAN III 2023 => 612512 DBH SDA Kehutanan (002.PSDH . Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	30-Nov-23	54.383.350,00
4	- DBH, TRIWULAN III 2023 => 612512 DBH SDA Kehutanan (002.PSDH . Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	22-Des-23	54.383.350,00
Jumlah			162.214.417,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- h) Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tanggal Penerimaan	Realisasi 2023 (Rp)
1	- DBH, TRIWULAN I 2023 => 612611 DBH SDA Perikanan (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	31-Jan-23	253.031.400,00
2	- DBH, TRIWULAN II 2023 => 612611 DBH SDA Perikanan (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	12-Apr-23	253.031.400,00
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	12-Okt-23	211.753.211,00
4	- DBH, TRIWULAN IV 2023 => 612611 DBH SDA Perikanan (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	31-Okt-23	590.406.600,00
5	- DBH, TRIWULAN III 2023 => 612611 DBH SDA Perikanan (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	29-Des-23	590.406.600,00
	Jumlah		1.898.629.211,00

5.1.1.2.a.1.2 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	898.397.959.000,00	912.903.769.190,00	101,61	865.880.327.665,00

Menurut pasal 38A Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 211/PMK.07/2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, alokasi DAU daerah terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya.

Bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya terdiri atas : a) penggajian formasi PPPK; b. pendanaan kelurahan; c. bidang pendidikan; d. bidang kesehatan; dan/atau e. bidang pekerjaan umum.

Rincian alokasi DAU yang diterima Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah:

1. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya	Rp734.164.187.190,00
2. DAU yang ditentukan penggunaannya	Rp178.739.582.000,00
Jumlah	Rp912.903.769.190,00

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mendapatkan alokasi transfer sebesar Rp178.739.582,00 dengan rincian sebagai berikut:

a) Penggajian format PPPK	Rp27.874.452.000,00
b) Bidang Pendidikan	Rp76.992.403.000,00
c) Bidang Kesehatan	Rp34.082.490.000,00
d) Bidang Pekerjaan Umum	Rp39.790.237.000,00
Jumlah	Rp178.739.582.000,00

Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak ditentukan adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tanggal Penerimaan	Realisasi 2023 (Rp)
1	- Transfer Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya JANUARI 2023 [621111004] Alokasi DAU tidak ditentukan penggunaannya yang disalurkan => 621111 Transfer Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya (004.Alokasi DAU tidak ditentukan penggunaannya yang disalurkan)	02-Jan-23	59.971.531.000,00
2	- Transfer Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya FEBRUARI 2023 [621111004] Alokasi DAU tidak ditentukan penggunaannya yang disalurkan => 621111 Transfer Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya (004.Alokasi DAU tidak ditentukan penggunaannya yang disalurkan)	31-Jan-23	59.971.531.000,00
3	- Transfer Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya MARET 2023 [621111004] Alokasi DAU tidak ditentukan penggunaannya yang disalurkan => 621111 Transfer Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya (004.Alokasi DAU tidak ditentukan penggunaannya yang disalurkan)	28-Feb-23	59.971.531.000,00
4	- Transfer Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya APRIL 2023 [621111004] Alokasi DAU tidak ditentukan penggunaannya yang disalurkan => 621111 Transfer Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya (004.Alokasi DAU tidak ditentukan penggunaannya yang disalurkan)	31-Mar-23	59.971.531.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

5	- Transfer Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya MEI 2023 [621111004] Alokasi DAU tidak ditentukan penggunaannya yang disalurkan => 621111 Transfer Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya (004.Alokasi DAU tidak ditentukan penggunaannya yang disalurkan)	28-Apr-23	59.971.531.000,00
6	- Transfer Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya JUNI 2023 [621111004] Alokasi DAU tidak ditentukan penggunaannya yang disalurkan => 621111 Transfer Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya (004.Alokasi DAU tidak ditentukan penggunaannya yang disalurkan)	31-Mei-23	59.971.531.000,00
7	- Transfer Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya JULI 2023 [621111004] Alokasi DAU tidak ditentukan penggunaannya yang disalurkan => 621111 Transfer Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya (004.Alokasi DAU tidak ditentukan penggunaannya yang disalurkan)	03-Jul-23	59.971.531.000,00
8	- Transfer Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya AGUSTUS 2023 [621111004] Alokasi DAU tidak ditentukan penggunaannya yang disalurkan => 621111 Transfer Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya (004.Alokasi DAU tidak ditentukan penggunaannya yang disalurkan)	31-Jul-23	59.971.531.000,00
9	- Transfer Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya SEPTEMBER 2023 [621111004] Alokasi DAU tidak ditentukan penggunaannya yang disalurkan => 621111 Transfer Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya (004.Alokasi DAU tidak ditentukan penggunaannya yang disalurkan)	31-Agu-23	59.971.531.000,00
10	- Transfer Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya OKTOBER 2023 [621111004] Alokasi DAU tidak ditentukan penggunaannya yang disalurkan => 621111 Transfer Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya (004.Alokasi DAU tidak ditentukan penggunaannya yang disalurkan)	29-Sep-23	59.889.306.190,00
11	- Transfer Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya NOVEMBER 2023 [621111004] Alokasi DAU tidak ditentukan penggunaannya yang disalurkan => 621111 Transfer Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya (004.Alokasi DAU tidak ditentukan penggunaannya yang disalurkan)	31-Okt-23	59.971.531.000,00
12	- Transfer Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya DESEMBER 2023 [621111004] Alokasi DAU tidak ditentukan penggunaannya yang disalurkan => 621111 Transfer Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya (004.Alokasi DAU tidak ditentukan penggunaannya yang disalurkan)	31 nov 2023	59.971.536.000,00
13	Transfer Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya SEKALIGUS 2023 [621111012] Alokasi DAU Tambahan THR bagi ASN Guru Daerah yang disalurkan => 621111 Transfer Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya (012.Alokasi DAU Tambahan THR bagi ASN Guru Daerah yang disalurkan)	29-Des-23	14.588.035.000,00
Jumlah DAU yang Ditentukan Penggunaannya			734.164.187.190,00

Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) ditentukan Penggunaannya adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tanggal Penerimaan	Realisasi 2023 (Rp)
Penggajian Formasi PPPK			
1	Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK JULI 2023 [621121007] Alokasi DAU Penggajian Formasi PPPK yang disalurkan => 621121 Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK (007.Alokasi DAU Penggajian Formasi PPPK yang disalurkan)	28-Agu-23	628.709.983
2	Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK MEI 2023 [621121007] Alokasi DAU Penggajian Formasi PPPK yang disalurkan => 621121 Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK (007.Alokasi DAU Penggajian Formasi PPPK yang disalurkan)	28-Agu-23	628.428.994
3	Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK Ke-13 2023 [621121007] Alokasi DAU Penggajian Formasi PPPK yang disalurkan => 621121 Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK (007.Alokasi DAU Penggajian Formasi PPPK yang disalurkan)	31-Agu-23	628.428.994
4	Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK JUNI 2023 [621121007] Alokasi DAU Penggajian Formasi PPPK yang disalurkan => 621121 Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK (007.Alokasi DAU Penggajian Formasi PPPK yang disalurkan)	31-Agu-23	862.994.831
5	Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK JULI 2023 [621121007] Alokasi DAU Penggajian Formasi PPPK yang disalurkan => 621121 Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK (007.Alokasi DAU Penggajian Formasi PPPK yang disalurkan)	22-Sep-23	612.845.173
6	Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK AGUSTUS 2023 [621121007] Alokasi DAU Penggajian Formasi PPPK yang disalurkan => 621121 Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK (007.Alokasi DAU Penggajian Formasi PPPK yang disalurkan)	29-Sep-23	1.475.792.721
7	Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK SEPTEMBER 2023 [621121007] Alokasi DAU Penggajian Formasi PPPK yang disalurkan => 621121 Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK (007.Alokasi DAU Penggajian Formasi PPPK yang disalurkan)	26-Okt-23	1.461.574.229
8	Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK OKTOBER 2023 [621121007] Alokasi DAU Penggajian Formasi PPPK yang disalurkan => 621121 Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK (007.Alokasi DAU Penggajian Formasi PPPK yang disalurkan)	28-Nov-23	1.461.667.622
9	Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK NOVEMBER 2023 [621121007] Alokasi DAU Penggajian Formasi PPPK yang disalurkan => 621121 Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK (007.Alokasi DAU Penggajian Formasi PPPK yang disalurkan)	18-Des-23	1.462.400.235
10	Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK DESEMBER 2023 [621121007] Alokasi DAU Penggajian Formasi PPPK yang disalurkan => 621121 Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK (007.Alokasi DAU Penggajian Formasi PPPK yang disalurkan)	29-Des-23	18.651.609.218
Jumlah			27.874.452.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Bidang Pendidikan			
1	- Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan TAHAP 1 2023 [621123009] Alokasi DAU Bidang Pendidikan yang disalurkan => 621123 Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan (009.Alokasi DAU Bidang Pendidikan yang disalurkan)	07-Mar-23	23.097.720.000
2	- Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan TAHAP 2 2023 [621123009] Alokasi DAU Bidang Pendidikan yang disalurkan => 621123 Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan (009.Alokasi DAU Bidang Pendidikan yang disalurkan)	27-Jun-23	34.646.581.000
3	- Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan TAHAP 3 2023 [621123009] Alokasi DAU Bidang Pendidikan yang disalurkan => 621123 Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan (009.Alokasi DAU Bidang Pendidikan yang disalurkan)	05-Okt-23	19.248.102.000
Jumlah			76.992.403.000
Bidang Kesehatan			
1	- Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan TAHAP 1 2023 [621124010] Alokasi DAU Bidang Kesehatan yang disalurkan => 621124 Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan (010.Alokasi DAU Bidang Kesehatan yang disalurkan)	07-Mar-23	10.224.747.000
2	- Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan TAHAP 2 2023 [621124010] Alokasi DAU Bidang Kesehatan yang disalurkan => 621124 Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan (010.Alokasi DAU Bidang Kesehatan yang disalurkan)	22-Jun-23	15.337.120.000
3	- Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan TAHAP 3 2023 [621124010] Alokasi DAU Bidang Kesehatan yang disalurkan => 621124 Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan (010.Alokasi DAU Bidang Kesehatan yang disalurkan)	05-Okt-23	8.520.623.000
Jumlah			34.082.490.000
Bidang Pekerjaan Umum			
1	- Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum TAHAP 1 2023 [621125011] Alokasi DAU Bidang Pekerjaan Umum yang disalurkan => 621125 Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum (011.Alokasi DAU Bidang Pekerjaan Umum yang disalurkan)	07-Mar-23	11.937.071.000
2	- Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum TAHAP 2 2023 [621125011] Alokasi DAU Bidang Pekerjaan Umum yang disalurkan => 621125 Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum (011.Alokasi DAU Bidang Pekerjaan Umum yang disalurkan)	06-Jul-23	17.905.606.000
3	- Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum TAHAP 3 2023 [621125011] Alokasi DAU Bidang Pekerjaan Umum yang disalurkan => 621125 Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum (011.Alokasi DAU Bidang Pekerjaan Umum yang disalurkan)	05-Okt-23	9.947.560.000
Jumlah			39.790.237.000
Jumlah DAU yang Ditentukan Penggunaannya			178.739.582.000,00

5.1.1.2.a.1.3 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	82.185.659.000,00	74.024.339.759,00	90,07	141.410.401.807,00

Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Fisik Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD

No.	Uraian	Tanggal Penerimaan	Realisasi 2023 (Rp)
1	- DAK Fisik, Tahap ke-1 2023 => 631212 Dana Alokasi Khusus Penugasan (C01.Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan Subbidang PAUD yang disalurkan)	13-Jun-23	545.306.250,00
2	- DAK Fisik, Tahap ke-2 2023 => 631212 Dana Alokasi Khusus Penugasan (C01.Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan Subbidang PAUD yang disalurkan)	21-Sep-23	981.551.250,00
3	- DAK Fisik, Tahap ke-3 2023 => 631212 Dana Alokasi Khusus Penugasan (C01.Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan Subbidang PAUD yang disalurkan)	11-Dec-23	337.200.100,00
Jumlah			1.864.057.600,00

DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD

No.	Uraian	Tanggal Penerimaan	Realisasi 2023 (Rp)
1	- DAK Fisik, Tahap ke-1 2023 => 631212 Dana Alokasi Khusus Penugasan (C02.Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan Subbidang SD yang disalurkan)	16-Jun-23	1.003.580.500,00
2	- DAK Fisik, Tahap ke-2 2023 => 631212 Dana Alokasi Khusus Penugasan (C02.Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan Subbidang SD yang disalurkan)	18-Sep-23	1.806.444.900,00
3	- DAK Fisik, Tahap ke-4 2023 => 631212 Dana Alokasi Khusus Penugasan (C02.Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan Subbidang SD yang disalurkan)	06-Nov-23	429.550.000,00
4	- DAK Fisik, Tahap ke-4 2023 => 631212 Dana Alokasi Khusus Penugasan (C02.Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan Subbidang SD yang disalurkan)	28-Nov-23	628.620.675,00
Jumlah			3.868.196.075,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP

No.	Uraian	Tanggal Penerimaan	Realisasi 2023 (Rp)
1	- DAK Fisik, Tahap ke-1 2023 => 631212 Dana Alokasi Khusus Penugasan (C03.Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan Subbidang SMP yang disalurkan)	13-Jun-23	4.514.026.750,00
2	- DAK Fisik, Tahap ke-2 2023 => 631212 Dana Alokasi Khusus Penugasan (C03.Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan Subbidang SMP yang disalurkan)	10-Okt-23	8.125.248.150,00
3	- DAK Fisik, Tahap ke-3 2023 => 631212 Dana Alokasi Khusus Penugasan (C03.Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan Subbidang SMP yang disalurkan)	07-Dec-23	3.075.356.800,00
Jumlah			15.714.631.700,00

DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian

No.	Uraian	Tanggal Penerimaan	Realisasi 2023 (Rp)
1	- DAK Fisik, Tahap ke-4 2023 => 631212 Dana Alokasi Khusus Penugasan (D06.Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan Subbidang Pengendalian Penyakit yang disalurkan)	12-Jul-23	1.849.600.000
Jumlah			1.849.600.000,00

DAK Fisik-Bidang Pertanian

No.	Uraian	Tanggal Penerimaan	Realisasi 2023 (Rp)
1	DAK Fisik, Tahap ke-1 2023 => 631212 Dana Alokasi Khusus Penugasan (G06.Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) yang disalurkan)	15-Jun-23	1.050.000.000
2	- DAK Fisik, Tahap ke-2 2023 => 631212 Dana Alokasi Khusus Penugasan (G06.Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) yang disalurkan)	26-Jul-23	1.890.000.000
3	- DAK Fisik, Tahap ke-3 2023 => 631212 Dana Alokasi Khusus Penugasan (G06.Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) yang disalurkan)	10-Okt-23	1.260.000.000
Jumlah			4.200.000.000,00

DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan

No.	Uraian	Tanggal Penerimaan	Realisasi 2023 (Rp)
1	- DAK Fisik, Tahap ke-2 2023 => 631212 Dana Alokasi Khusus Penugasan (F01.Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan Mendukung Konektivitas Daerah yang disalurkan)	05-Jun-23	3.828.531.000
2	- DAK Fisik, Tahap ke-2 2023 => 631212 Dana Alokasi Khusus Penugasan (F01.Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan Mendukung Konektivitas Daerah yang disalurkan)	16-Jun-23	6.891.355.800
3	- DAK Fisik, Tahap ke-3 2023 => 631212 Dana Alokasi Khusus Penugasan (F01.Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan Mendukung Konektivitas Daerah yang disalurkan)	09-Nov-23	3.952.736.200
Jumlah			14.672.623.000,00

DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan

No.	Uraian	Tanggal Penerimaan	Realisasi 2023 (Rp)
1	- DAK Fisik, Tahap ke-1 2023 => 631212 Dana Alokasi Khusus Penugasan (D04.Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan yang disalurkan)	13-Jun-23	5.307.763.534
2	- DAK Fisik, Tahap ke-4 2023 => 631212 Dana Alokasi Khusus Penugasan (D04.Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan yang disalurkan)	09-Sep-23	960.322.000
3	- DAK Fisik, Tahap ke-4 2023 => 631212 Dana Alokasi Khusus Penugasan (D04.Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan yang disalurkan)	05-Okt-23	934.783.472
4	- DAK Fisik, Tahap ke-2 2023 => 631212 Dana Alokasi Khusus Penugasan (D04.Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan yang disalurkan)	10-Okt-23	9.553.974.361
5	- DAK Fisik, Tahap ke-4 2023 => 631212 Dana Alokasi Khusus Penugasan (D04.Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan yang disalurkan)	25-Okt-23	396.560.300
6	- DAK Fisik, Tahap ke-4 2023 => 631212 Dana Alokasi Khusus Penugasan (D04.Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan yang disalurkan)	11-Dec-23	478.000.000
7	- DAK Fisik, Tahap ke-4 2023 => 631212 Dana Alokasi Khusus Penugasan (D04.Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan yang disalurkan)	28-Nov-23	2.441.039.347
8	- DAK Fisik, Tahap ke-4 2023 => 631212 Dana Alokasi Khusus Penugasan (D04.Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan yang disalurkan)	11-Dec-23	818.000.000



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

9	- DAK Fisik, Tahap ke-4 2023 => 631212 Dana Alokasi Khusus Penugasan (D04.Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan yang disalurkan)	11-Des-23	7.099.967.988
10	- DAK Fisik, Tahap ke-3 2023 => 631212 Dana Alokasi Khusus Penugasan (D04.Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan yang disalurkan)	11-Des-23	3.728.872.492
11	- DAK Fisik, Tahap ke-4 2023 => 631212 Dana Alokasi Khusus Penugasan (D04.Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan yang disalurkan)	18-Des-23	135.947.890
Jumlah			31.855.231.384,00

5.1.1.2.a.1.4 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	317.325.875.000,00	309.405.479.537,00	97,50	283.497.310.009,00

Anggaran dan Realisasi Dana Tranfer Khusus-Dana Alokasi Non Fisik Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1	DAK Non Fisik -BOS Reguler	72.830.480.000,00	72.187.176.247,00	99,12
2	DAK Non Fisik -BOS Kinerja	4.292.500.000,00	4.292.500.000,00	100,00
3	DAK Non Fisik - TPG PNSD	176.597.993.000,00	176.597.991.000,00	100,00
4	DAK Non Fisik - Tamsil Guru PNSD	2.757.000.000,00	2.399.280.385,00	87,03
5	DAK Non Fisik- BOP PAUD	17.610.450.000,00	17.572.051.500,00	99,78
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.621.780.000,00	1.621.780.000,00	100,00
7	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK	31.370.348.000,00	25.235.624.936,00	80,44
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	269.601.000,00	-	0,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	6.785.506.000,00	6.568.164.166,00	96,80
10	DAK Non Fisik Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK Penguatan Kapasitas Kelembagaan sebra IKM	410.170.000,00	409.699.000,00	99,89
11	DAK Non Fisik-BOKKB-Dana Pelayanan Kepariwisata	846.247.000,00	844.947.000,00	99,85
12	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	396.500.000,00	367.925.750,00	92,79
13	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan anak	598.000.000,00	424.805.963,00	71,04
14	DAK Non-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	939.300.000,00	883.533.590,00	94,06
Jumlah		317.325.875.000,00	309.405.479.537,00	97,50

Realisasi Pendapatan Dana Belanja Operasional Sekolah dan Pemerintah Pusat yang langsung ditransfer ke masing-masing sekolah adalah sebagai berikut:

DAK Non Fisik -BOS Reguler

No.	Uraian	Tanggal Penerimaan	Realisasi 2023 (Rp)
1	- DAKNF-BOSP TAHAP ke-1 2023 => 654311 Dana Bantuan Operasional Sekolah (001.Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang disalurkan)	16-Feb-23	139.790.000,00
2	- DAKNF-BOSP TAHAP ke-1 2023 => 654311 Dana Bantuan Operasional Sekolah (001.Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang disalurkan)	22-Feb-23	1.274.710.000,00
3	- DAKNF-BOSP TAHAP ke-1 2023 => 654311 Dana Bantuan Operasional Sekolah (001.Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang disalurkan)	21-Mar-23	34.264.555.149,00
4	- DAKNF-BOSP TAHAP ke-1 2023 => 654311 Dana Bantuan Operasional Sekolah (001.Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang disalurkan)	11-Apr-23	48.914.470,00
5	- DAKNF-BOSP TAHAP ke-1 2023 => 654311 Dana Bantuan Operasional Sekolah (001.Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang disalurkan)	22-Jun-23	25.446.888,00
6	- DAKNF-BOSP TAHAP ke-2 2023 => 654311 Dana Bantuan Operasional Sekolah (001.Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang disalurkan)	25-Jul-23	36.393.235.000,00
7	Penyaluran Dana BOS Reguler KAB. GUNUNGKIDUL Tahap 2 untuk 1 sekolah	14-Sep-23	3.480.000,00
8	Penyaluran Dana BOS Reguler KAB. GUNUNGKIDUL Tahap Cadangan untuk 1 sekolah	20-Sep-23	37.044.740,00
Jumlah BOS Reguler			72.187.176.247,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DAK Non Fisik -BOS Kinerja

No.	Uraian	Tanggal Penerimaan	Realisasi 2023 (Rp)
1	- DAKNF-BOSP TAHAP ke-1 2023 => 654311 Dana Bantuan Operasional Sekolah (015.Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja yang disalurkan)	22-Jun-23	2.082.500.000
2	- DAKNF-BOSP TAHAP ke-1 2023 => 654311 Dana Bantuan Operasional Sekolah (015.Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja yang disalurkan)	05-Sep-23	2.210.000.000
Jumlah BOS Kinerja			4.292.500.000,00

DAK Non Fisik - TPG PNSD

No.	Uraian	Tanggal Penerimaan	Realisasi 2023 (Rp)
1	- DAKNF 31 2023 => 654111 Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah (003.Alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah yang disalurkan)	14-Apr-23	52.979.397.000
2	- DAKNF 31 2023 => 654111 Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah (003.Alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah yang disalurkan)	03-Jul-23	44.149.498.000
3	- DAKNF 33 2023 => 654111 Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah (003.Alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah yang disalurkan)	20-Okt-23	44.149.498.000
4	- DAKNF 34 2023 => 654111 Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah (003.Alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah yang disalurkan)	05-Dec-23	35.319.598.000
Jumlah TPG PNSD			176.597.991.000,00

DAK Non Fisik -Tamsil PNSD

No.	Uraian	Tanggal Penerimaan	Realisasi 2023 (Rp)
1	- DAKNF 31 2023 => 654211 Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah (004.Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah yang disalurkan)	14-Apr-23	827.100.000
2	- DAKNF 32 2023 => 654211 Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah (004.Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah yang disalurkan)	27-Jun-23	689.250.000
3	- DAKNF 33 2023 => 654211 Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah (004.Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah yang disalurkan)	18-Okt-23	331.530.385
4	- DAKNF 34 2023 => 654211 Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah (004.Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah yang disalurkan)	18-Dec-23	551.400.000
Jumlah Tamsil PNSD			2.399.280.385,00

DAK Non Fisik -BOP PAUD

No.	Uraian	Tanggal Penerimaan	Realisasi 2023 (Rp)
1	- DAKNF-BOSP TAHAP ke-1 2023 => 654911 Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (002.Pendidikan Anak Usia Dini . Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler yang disalurkan)	18-Apr-23	8.198.820.000
2	- DAKNF-BOSP TAHAP ke-1 2023 => 654911 Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (002.Pendidikan Anak Usia Dini . Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler yang disalurkan)	24-Mei-23	36.855.000
3	- DAKNF-BOSP TAHAP ke-1 2023 => 654911 Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (029.Pendidikan Anak Usia Dini . Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kinerja yang disalurkan)	15-Jun-23	1.095.000.000
4	- DAKNF-BOSP TAHAP ke-1 2023 => 654911 Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (002.Pendidikan Anak Usia Dini . Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler yang disalurkan)	21-Jul-23	9.450.000
5	- DAKNF-BOSP TAHAP ke-2 2023 => 654911 Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (002.Pendidikan Anak Usia Dini . Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler yang disalurkan)	25-Jul-23	7.711.830.000
6	Penyaluran Dana BOP PAUD KAB. GUNUNGKIDUL Tahap 2 untuk 42 satuan pendidikan	07-Agu-23	486.675.000
7	Penyaluran Dana BOP PAUD KAB. GUNUNGKIDUL Tahap 2 untuk 1 satuan pendidikan	14-Sep-23	3.150.000
8	Penyaluran Dana BOP PAUD KAB. GUNUNGKIDUL Tahap 2 untuk 6 satuan pendidikan	11-Okt-23	26.910.450
9	- BOP PAUD REGULER, TA.2022 => 654911 Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (002.BOP PAUD REGULER)	14-Nov-23	3.361.050
Jumlah Tamsil PNSD			17.572.051.500



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DAK Non Fisik -BOP kesetaraan

No.	Uraian	Tanggal Penerimaan	Realisasi 2023 (Rp)
1	- DAKNF-BOSP TAHAP ke-1 2023 => 654912 Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan (010.Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler yang disalurkan)	18-Apr-23	584.435.000
2	- DAKNF-BOSP TAHAP ke-1 2023 => 654912 Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan (010.Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler yang disalurkan)	24-Mei-23	138.055.000
3	- DAKNF-BOSP TAHAP ke-1 2023 => 654912 Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan (030.Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kinerja yang disalurkan)	25-Jul-23	722.490.000
4	- DAKNF-BOSP TAHAP ke-1 2023 => 654912 Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan (030.Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kinerja yang disalurkan)	05-Sep-23	135.000.000
5	- DAKNF-BOSP TAHAP ke-1 2023 => 654912 Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan (030.Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kinerja yang disalurkan)	20-Sep-23	41.800.000
Jumlah BOP Kesetaraan			1.621.780.000,00

DAK Non Fisik- BOKKB-BOK

No.	Uraian	Tanggal Penerimaan	Realisasi 2023 (Rp)
1	- DAKNF TAHAP 1 2023 => 654711 Dana Bantuan Operasional Kesehatan (031.Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas yang disalurkan)	28-Mar-23	7.030.834.500
2	- DAKNF, TAHAP 2 2023 => 654711 Dana Bantuan Operasional Kesehatan (031.Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas yang disalurkan)	18-Jul-23	9.374.446.000
3	- DAKNF, TAHAP 3 2023 => 654711 Dana Bantuan Operasional Kesehatan (031.Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas yang disalurkan)	07-Nov-23	1.164.111.600
4	- DAKNF, 22 2023 => 654711 Dana Bantuan Operasional Kesehatan (006.Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dinas yang disalurkan)	15-Nov-23	2.473.724.836
5	- DAKNF, TAHAP 3 2023 => 654711 Dana Bantuan Operasional Kesehatan (031.Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas yang disalurkan)	22-Nov-23	4.611.948.000
6	- DAKNF, TAHAP 3 2023 => 654711 Dana Bantuan Operasional Kesehatan (031.Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas yang disalurkan)	04-Des-23	580.560.000
Jumlah			25.235.624.936,00

DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB

No.	Uraian	Tanggal Penerimaan	Realisasi 2023 (Rp)
1	- DAKNF, TAHAP 1 2023 => 654712 Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (007.Alokasi Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang disalurkan)	09-Mar-23	3.175.411.166
2	- DAKNF, TAHAP 1 2023 => 654712 Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (007.Alokasi Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang disalurkan)	15-Agu-23	3.392.753.000

DAK Non Fisik Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK Penguatan Kapasitas Kelembagaan sentra IKM

1	- DAKNF, 21 2023 => 654821 Dana Pelayanan Kepariwisata (012.Alokasi Dana Pelayanan Kepariwisata yang disalurkan)	09-Mar-23	421.823.500
2	- DAKNF, 22 2023 => 654821 Dana Pelayanan Kepariwisata (012.Alokasi Dana Pelayanan Kepariwisata yang disalurkan)	10-Okt-23	423.123.500
Jumlah			844.947.000,00

DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal

No.	Uraian	Tanggal Penerimaan	Realisasi 2023 (Rp)
1	- DAKNF, 22 2023 => 655311 Dana Fasilitas Penanaman Modal (020.Alokasi Dana Fasilitas Penanaman Modal yang disalurkan)	23-Agu-23	198.250.000
2	- DAKNF, 21 2023 => 655311 Dana Fasilitas Penanaman Modal (020.Alokasi Dana Fasilitas Penanaman Modal yang disalurkan)	11-Apr-23	169.675.750
Jumlah			367.925.750,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan anak

No.	Uraian	Tanggal Penerimaan	Realisasi 2023 (Rp)
1	- DAKNF, TAHAP 1 2023 => 655211 Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (019.Alokasi Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang disalurkan)	20-Mar-23	125.805.963
2	- DAKNF, 22 2023 => 655211 Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (019.Alokasi Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang disalurkan)	23-Agu-23	299.000.000
Jumlah			424.805.963,00

DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian

No.	Uraian	Tanggal Penerimaan	Realisasi 2023 (Rp)
1	DAKNF, 21 2023 => 655411 Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (021.Alokasi Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian yang disalurkan)	10-Apr-23	413.883.590
2	- DAKNF, 22 2023 => 655411 Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (021.Alokasi Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian yang disalurkan)	30-Agu-23	469.650.000
Jumlah			883.533.590,00

5.1.1.2.a.2 Dana Insentif Daerah (DID)

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	12.428.629.000,00

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, penganggaran transfer DID berubah kode rekeningnya menjadi Insentif Fiskal.

5.1.1.2.a.3 Dana Desa

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Dana Desa	179.933.551.000,00	179.933.551.000,00	100,00	144.366.117.000,00

Adapun rincian penerimaan Dana Desa tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tanggal Penerimaan	Realisasi 2023 (Rp)
1	- DANDES TAHAP ke-1 2023 => 662111 Dana Desa (001.Alokasi Dana Desa yang disalurkan)	07-Feb-23	20.672.638.200
2	- DANDES TAHAP ke-1 2023 => 662111 Dana Desa (001.Alokasi Dana Desa yang disalurkan)	07-Feb-23	13.430.848.500
3	- DANDES TAHAP ke-1 2023 => 662111 Dana Desa (001.Alokasi Dana Desa yang disalurkan)	08-Feb-23	15.456.981.000
4	- DANDES TAHAP ke-1 2023 => 662111 Dana Desa (001.Alokasi Dana Desa yang disalurkan)	08-Feb-23	11.506.742.550
5	- DANDES TAHAP ke-1 2023 => 662111 Dana Desa (001.Alokasi Dana Desa yang disalurkan)	22-Feb-24	1.316.700.000
6	- DANDES TAHAP ke-1 2023 => 662111 Dana Desa (001.Alokasi Dana Desa yang disalurkan)	03-Mar-24	3.830.400.000
7	- DANDES TAHAP ke-1 2023 => 662111 Dana Desa (001.Alokasi Dana Desa yang disalurkan)	05-Mar-24	596.700.000
8	- DANDES TAHAP ke-2 2023 => 662111 Dana Desa (001.Alokasi Dana Desa yang disalurkan)	07-Mar-24	680.526.250
9	- DANDES TAHAP ke-2 2023 => 662111 Dana Desa (001.Alokasi Dana Desa yang disalurkan)	11-Apr-24	2.243.102.100
10	- DANDES TAHAP ke-1 2023 => 662111 Dana Desa (001.Alokasi Dana Desa yang disalurkan)	12-Apr-24	5.743.800.000
11	- DANDES TAHAP ke-2 2023 => 662111 Dana Desa (001.Alokasi Dana Desa yang disalurkan)	18-Apr-24	2.673.113.100
12	- DANDES TAHAP ke-2 2023 => 662111 Dana Desa (001.Alokasi Dana Desa yang disalurkan)	17-Jun-23	8.168.570.700
13	- DANDES TAHAP ke-2 2023 => 662111 Dana Desa (001.Alokasi Dana Desa yang disalurkan)	17-Jan-00	1.726.120.500
14	- DANDES TAHAP ke-2 2023 => 662111 Dana Desa (001.Alokasi Dana Desa yang disalurkan)	12-Jun-23	6.294.778.800
15	- DANDES TAHAP ke-2 2023 => 662111 Dana Desa (001.Alokasi Dana Desa yang disalurkan)	12-Jul-23	3.601.968.200
16	- DANDES TAHAP ke-2 2023 => 662111 Dana Desa (001.Alokasi Dana Desa yang disalurkan)	03-Jul-23	6.045.526.800
17	- DANDES TAHAP ke-2 2023 => 662111 Dana Desa (001.Alokasi Dana Desa yang disalurkan)	03-Jul-24	8.275.868.000
18	- DANDES TAHAP ke-3 2023 => 662111 Dana Desa (001.Alokasi Dana Desa yang disalurkan)	12-Jul-23	246.602.000
19	- DANDES TAHAP ke-2 2023 => 662111 Dana Desa (001.Alokasi Dana Desa yang disalurkan)	12-Jul-23	1.824.784.200
20	- DANDES TAHAP ke-2 2023 => 662111 Dana Desa (001.Alokasi Dana Desa yang disalurkan)	12-Jul-24	633.945.300
21	- DANDES TAHAP ke-2 2023 => 662111 Dana Desa (001.Alokasi Dana Desa yang disalurkan)	25-Jul-23	7.508.364.300
22	- DANDES TAHAP ke-2 2023 => 662111 Dana Desa (001.Alokasi Dana Desa yang disalurkan)	25-Jul-24	6.577.733.350
23	- DANDES TAHAP ke-1 2023 => 662111 Dana Desa (001.Alokasi Dana Desa yang disalurkan)	04-Agu-23	5.743.800.000
24	- DANDES TAHAP ke-2 2023 => 662111 Dana Desa (001.Alokasi Dana Desa yang disalurkan)	04-Agu-23	713.032.000
25	- DANDES TAHAP ke-2 2023 => 662111 Dana Desa (001.Alokasi Dana Desa yang disalurkan)	04-Agu-23	1.371.379.200



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

26	- DANDES TAHAP ke-3 2023 => 662111 Dana Desa (001.Alokasi Dana Desa yang disalurkan)	18-Agu-23	4.121.682.800
27	- DANDES TAHAP ke-2 2023 => 662111 Dana Desa (001.Alokasi Dana Desa yang disalurkan)	29-Agu-23	1.084.484.350
28	- DANDES TAHAP ke-3 2023 => 662111 Dana Desa (001.Alokasi Dana Desa yang disalurkan)	08-Sep-23	3.522.978.000
29	- DANDES TAHAP ke-3 2023 => 662111 Dana Desa (001.Alokasi Dana Desa yang disalurkan)	22-Sep-23	9.188.925.200
30	- DANDES TAHAP ke-3 2023 => 662111 Dana Desa (001.Alokasi Dana Desa yang disalurkan)	06-Okt-23	7.422.128.400
31	- DANDES TAHAP ke-3 2023 => 662111 Dana Desa (001.Alokasi Dana Desa yang disalurkan)	24-Okt-23	5.549.042.800
32	- DANDES TAHAP ke-3 2023 => 662111 Dana Desa (001.Alokasi Dana Desa yang disalurkan)	25-Okt-23	4.084.618.000
33	- DANDES TAHAP ke-3 2023 => 662111 Dana Desa (001.Alokasi Dana Desa yang disalurkan)	01-Nov-23	1.749.358.400
34	- DANDES TAHAP ke-1 2023 => 662111 Dana Desa (001.Alokasi Dana Desa yang disalurkan)	01-Nov-23	5.743.800.000
35	- DANDES TAHAP ke-3 2023 => 662111 Dana Desa (001.Alokasi Dana Desa yang disalurkan)	17-Nov-23	582.508.000
Jumlah			179.933.551.000,00

5.1.1.2.a.4 Insentif Fiskal

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Insentif Fiskal	5.952.497.000,00	5.952.497.000,00	100,00	0,00

Insentif fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah berdasarkan kinerja tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang, dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memperoleh Insentif fiskal tahun 2023 berdasarkan kinerja serapan anggaran tahun 2022 dengan nilai 39,77 dan menduduki peringkat 47 dengan nilai alokasi sebesar Rp5.952.497.000,00.

5.1.1.2. b Transfer Antar Daerah

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Transfer Antar Daerah	207.500.566.386,00	205.680.233.664,00	99,12	195.178.981.798,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi terdiri dari:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil	126.340.246.831,00	127.194.303.115,00	100,68	123.106.178.070,00
2	Bantuan Keuangan	81.160.319.555,00	78.485.930.549,00	96,70	72.072.803.728,00
	Jumlah	207.500.566.386,00	205.680.233.664,00	99,12	195.178.981.798,00

5.1.1.2.b.1 Pendapatan Bagi Hasil

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil	126.340.246.831,00	127.194.303.115,00	100,68	123.106.178.070,00

Pendapatan Bagi Hasil terdiri dari:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	35.471.182.398,00	35.704.289.972,00	100,66	34.516.527.833,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	15.098.253.898,00	14.635.718.552,00	96,94	13.833.526.981,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	31.514.562.800,00	36.202.689.341,00	114,88	32.627.464.264,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	42.569.020,00	42.569.020,00	100,00	73.931.450,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	44.213.678.715,00	40.609.036.230,00	91,85	42.054.727.542,00
	Jumlah	126.340.246.831,00	127.194.303.115,00	100,68	123.106.178.070,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Tanggal Penerimaan	Realisasi 2023 (Rp)
1	Penerimaan Pendapatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor tw I	18-Apr-23	7.698.051.099
2	Penerimaan Pendapatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor tw II	07-Jul-23	7.696.726.315
3	Penerimaan Pendapatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor tw III	19-Okt-23	8.281.718.033
4	Kurang bayar Tahun 2022 Penerimaan Pendapatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	04-Dec-23	637.236.072
5	Penerimaan Pendapatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor tw IV	29-Dec-23	11.390.558.453
Jumlah			35.704.289.972,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Tanggal Penerimaan	Realisasi 2023 (Rp)
1	Penerimaan Pendapatan BBN KB TW I	18-Apr-23	3.382.776.585
2	Penerimaan Pendapatan BBN KB TW II	07-Jul-23	2.970.007.000
3	Penerimaan Pendapatan BBN KB TW III	19-Okt-23	3.173.506.301
4	Kurang Bayar tahun 2022 Penerimaan Pendapatan BBN KB	04-Dec-23	195.594.300
5	Penerimaan Pendapatan BBN KB TW IV	29-Dec-23	4.913.834.366
Jumlah			14.635.718.552,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Tanggal Penerimaan	Realisasi 2023 (Rp)
1	penerimaan pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor TW I	18-Apr-23	5.282.490.055
2	penerimaan pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor TW II	07-Jul-23	5.597.917.446
3	penerimaan pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor TW III	19-Okt-23	5.099.277.321
4	penerimaan pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor TW IV	29-Dec-23	20.223.004.519
Jumlah			36.202.689.341,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Tanggal Penerimaan	Realisasi 2023 (Rp)
1	Penerimaan pendapatan Bagi Hasil PAP TW I	18-Apr-23	2.581.142
2	Penerimaan pendapatan Bagi Hasil PAP TW II	07-Jul-23	19.101.973
3	Penerimaan pendapatan Bagi Hasil PAP TW III	19-Okt-23	11.720.160
4	kurang bayar Penerimaan pendapatan Bagi Hasil PAP	04-Dec-23	284.570
5	Penerimaan pendapatan Bagi Hasil PAP TW IV	29-Dec-23	8.881.175
Jumlah			42.569.020,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun 2023 dengan rincian

No.	Uraian	Tanggal Penerimaan	Realisasi 2023 (Rp)
1	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok TW I	02-Mei-23	16.527.845.964
2	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok TW I I	20-Jul-23	9.108.898.978
3	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok TW III	31-Okt-23	8.110.010.592
4	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok TW IV	22-Dec-23	6.862.280.696
Jumlah			40.609.036.230,00

5.1.1.2.b.2 Bantuan Keuangan

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Bantuan Keuangan	81.160.319.555,00	78.485.930.549,00	96,70	72.072.803.728,00

Bantuan Keuangan merupakan bantuan keuangan khusus (BKK) dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	81.160.319.555,00	78.485.930.549,00	96,70	72.072.803.728,00
Jumlah		81.160.319.555,00	78.485.930.549,00	96,70	72.072.803.728,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Bantuan Keuangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 4 (empat) jenis yaitu sebagai berikut :

No.	Uraian	Tanggal Penerimaan	Realisasi 2023 (Rp)
1	Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan	22-Feb-23	6.173.000.000
2	Bantuan Keuangan Bantuan Khusus infrastruktur	21-Mar-23	10.400.000.000
3	Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan	08-Jun-23	43.000.000.000
4	Bantuan Keuangan Bantuan Khusus infrastruktur	10-Okt-23	100.000.000
5	Bantuan Keuangan Bantuan Khusus Jambanisasi	11-Okt-23	330.000.000
6	Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan	17-Nov-23	21.036.000.000
Jumlah			81.039.000.000,00

Sesuai Pergub DIY No 52 tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan, Bantuan keuangan khusus yang tidak terealisasi/sisa disetorkan kembali ke rekening kas umum daerah Pemerintah Daerah. Sisa BKK tahun 2023 sebesar Rp2.553.069.451,00, dengan rincian: sisa BKK dana keistimewaan Rp2.225.539.050,00 dan sisa BKK non dana keistimewaan Rp327.530.401,00. Sisa BKK dana keistimewaan telah disetor di tahun 2023, sedangkan sisa BKK non dana keistimewaan dicatat sebagai utang ke provinsi.

sehingga jumlah penerimaan di rekening Kas Daerah Kabupaten Gunungkidul sebesar :

2.553.069.451,00

78.485.930.549,00

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5.980.000.000,00	6.141.484.291,00	102,70	5.599.601.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari pendapatan hibah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan penerimaan pemindahbukuan sumbangan pihak ketiga dari rekening BPBD ke rekening Kasda, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Tanggal Penerimaan	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Air Perkotaan dan Air Pedesaan	29-Des-23	5.974.000.000,00
2.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis (pemindahbukuan donasi covid dari rekening BPBD ke rekening kasda)		167.484.291,00
Jumlah			6.141.484.291,00

5.1.2 BELANJA

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Operasi	1.507.027.401.034,00	1.459.831.749.104,10	96,87	1.404.040.273.941,56
2.	Belanja Modal	197.955.869.546,00	177.916.134.671,00	89,88	269.199.129.500,45
3.	Belanja Tidak Terduga	1.048.541.123,00	235.998.075,00	22,51	10.131.998.741,62
4.	Belanja Transfer	364.620.112.100,00	362.916.857.900,00	99,53	323.080.118.430,00
Jumlah		2.070.651.923.803,00	2.000.900.739.750,10	96,63	2.006.451.520.613,63

Realisasi Belanja Daerah tahun 2023 sebesar Rp2.000.900.739.750,10 atau 96,63% dari anggaran sebesar Rp2.070.651.923.803,00 turun sebesar Rp5.550.780.863,53 dengan rincian sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

5.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Pegawai	853.443.622.697,00	839.785.150.907,00	98,40	826.287.498.713,00
2.	Belanja Barang & Jasa	563.480.576.709,00	531.453.185.475,10	94,32	500.452.445.773,56
3.	Belanja Subsidi	270.000.000,00	269.872.500,00	99,95	1.437.202.577,00
4.	Belanja Hibah	73.157.751.628,00	71.692.177.954,00	98,00	57.152.607.491,00
5.	Belanja Bantuan Sosial	16.675.450.000,00	16.631.362.268,00	99,74	18.710.519.387,00
	Jumlah	1.507.027.401.034,00	1.459.831.749.104,10	96,87	1.404.040.273.941,56

Realisasi Belanja Operasi tahun 2023 sebesar Rp1.459.831.749.104,10 atau 96,87% dari anggaran sebesar Rp1.507.027.401.034,00 naik sebesar Rp55.791.475.162,54 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.1.a Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Pegawai	853.443.622.697,00	839.785.150.907	98,40	826.287.498.713,00

Rincian realisasi belanja pegawai adalah sebagai berikut;

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN	564.206.526.923,00	554.127.735.625,00	98,21	547.770.551.775,00
	Gaji Pokok PNS	371.338.513.177,00	369.168.548.250,00	99,42	385.780.805.331,00
	Gaji Pokok PPPK	51.616.945.504,00	49.732.371.200,00	96,35	26.645.313.777,00
	Tunjangan Keluarga PNS	35.130.521.946,00	33.937.334.545,00	96,60	35.423.943.424,00
	Tunjangan Keluarga PPPK	4.689.361.695,00	4.241.884.514,00	90,46	2.242.470.756,00
	Tunjangan Jabatan PNS	7.293.511.158,00	7.064.816.000,00	96,86	7.156.465.108,00
	Tunjangan Jabatan PPPK	0,00	0,00	0,00	1.551.595.000,00
	Tunjangan Fungsional PNS	28.647.309.404,00	27.923.504.000,00	97,47	28.588.563.600,00
	Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.976.232.958,00	3.673.310.250,00	73,82	4.417.165.500,00
	Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.403.705.569,00	3.133.400.000,00	92,06	120.120.000,00
	Tunjangan Beras PNS	19.994.341.112,00	19.379.918.940,00	96,93	20.424.523.866,00
	Tunjangan Beras PPPK	3.450.910.569,00	3.200.167.380,00	92,73	1.709.763.780,00
	Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus PNS	2.407.871.065,00	2.261.685.157,00	93,93	2.201.537.633,00
	Pembulatan Gaji PNS	5.413.585,00	4.962.807,00	91,67	5.351.146,00
	Pembulatan Gaji PPPK	825.071,00	754.531,00	91,45	483.273,00
	Iuran Jaminan Kesehatan PNS	24.796.100.110,00	24.332.468.748,00	98,13	26.762.504.616,00
	Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.820.000.000,00	2.635.908.364,00	93,47	1.355.071.544,00
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	836.000.000,00	756.742.045,00	90,52	788.277.596,00
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	108.964.000,00	102.433.337,00	94,01	57.941.189,00
	Iuran Jaminan Kematian PNS	2.380.000.000,00	2.270.225.581,00	95,39	2.364.831.429,00
	Iuran Jaminan Kematian PPPK	310.000.000,00	307.299.976,00	99,13	173.823.207,00
2	BELANJA TAMBAHAN	76.236.651.261,00	76.235.630.372,00	100,00	73.095.000.091,00
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	76.236.651.261,00	76.235.630.372,00	100,00	73.095.000.091,00
3	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN	187.117.874.689,00	185.252.534.339,00	99,00	179.834.953.411,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	2.647.181.580,00	2.593.196.102,00	97,96	1.918.443.347,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	4.988.598.215,00	3.587.929.959,00	71,92	786.695.351,00
	Belanja Tunjangan Profesi Guru	176.597.993.000,00	176.582.141.800,00	99,99	174.264.202.400,00
	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.757.000.000,00	2.377.590.000,00	86,24	1.851.515.000,00
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	116.101.894,00	100.676.478,00	86,71	949.032.313,00
	Belanja Honorarium	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	57.565.000,00
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
4	GAJI DAN TUNJANGAN DPRD	19.780.893.430,00	19.661.788.489,00	99,40	19.395.002.901,00
	Uang Representasi DPRD	998.129.750,00	991.410.000,00	99,33	1.000.860.000,00
	Tunjangan Keluarga DPRD	95.225.000,00	86.209.200,00	90,53	92.225.700,00
	Tunjangan Beras DPRD	108.660.780,00	98.346.360,00	90,51	105.660.780,00
	Uang Paket DPRD	86.058.000,00	85.113.000,00	98,90	86.058.000,00
	Tunjangan Jabatan DPRD	1.446.679.500,00	1.437.544.500,00	99,37	1.451.247.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

	Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	141.044.400,00	138.852.000,00	98,45	140.313.600,00
	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	13.500.000,00	12.743.325,00	94,40	13.017.375,00
	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.628.000.000,00	5.607.000.000,00	99,63	5.670.000.000,00
	Tunjangan Reses DPRD	1.407.000.000,00	1.396.500.000,00	99,25	1.417.500.000,00
	Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	15.500.000,00	14.421.928,00	93,04	14.235.018,00
	Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.892.376.000,00	4.871.458.176,00	99,57	4.926.685.428,00
	Tunjangan Transportasi DPRD	4.936.120.000,00	4.915.890.000,00	99,59	4.477.200.000,00
	Uang Jasa Pengabdian DPRD	12.600.000,00	6.300.000,00	50,00	0,00
5	GAJI DAN TUNJANGAN KDH/WKDH	214.216.394,00	199.069.774,00	92,93	194.051.235,00
	Gaji Pokok KDH/WKDH	58.000.000,00	54.600.000,00	94,14	54.600.000,00
	Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.000.000,00	7.644.000,00	84,93	7.644.000,00
	Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	100,00	98.280.000,00
	Tunjangan Beras KDH/WKDH	10.000.000,00	8.111.040,00	81,11	8.111.040,00
	Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.000.000,00	881.556,00	44,08	881.556,00
	Pembulatan Gaji KDH/WKDH	50.000,00	1.040,00	2,08	1.040,00
	Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.640.000,00	5.503.680,00	97,58	5.503.680,00
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.440,00	112.320,00	99,89	112.320,00
	Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	348.000,00	336.960,00	96,83	336.960,00
	Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	30.785.954,00	23.599.178,00	76,66	18.580.639,00
6	PENERIMAAN LAINNYA PIMPINAN DPRD SERTA KDH/WKDH	852.000.000,00	852.000.000,00	100,00	852.000.000,00
	Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	252.000.000,00	100,00	0,00
	Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	852.000.000,00
7	BELANJA PEGAWAI BLUD	5.035.460.000,00	3.456.392.308,00	68,64	5.145.939.300,00
	Belanja Pegawai - BLUD	5.035.460.000,00	3.456.392.308,00	68,64	5.145.939.300,00
	Jumlah	853.443.622.697,00	839.785.150.907,00	98,40	826.287.498.713,00

5.1.2.1.b Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Barang dan Jasa	563.480.576.709,00	531.453.185.475,10	94,32	500.452.445.773,56

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2023 sebesar Rp531.453.185.475,10 atau 94,32% dari anggaran sebesar Rp563.480.576.709,00 naik sebesar Rp31.000.739.701,54.

Rincian realisasi belanja barang dan jasa adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Barang	79.911.701.179,00	74.224.950.241,50	92,88	79.991.893.548,00
	Belanja Barang Pakai Habis	79.907.306.179,00	74.220.555.241,50	92,88	79.960.393.548,00
	Belanja Barang Tak Habis Pakai	4.395.000,00	4.395.000,00	100,00	31.500.000,00
2	Belanja Jasa	201.834.124.703,00	192.421.342.164,00	95,34	181.015.962.741,00
	Belanja Jasa Kantor	134.515.169.492,00	128.944.611.625,00	95,86	118.399.763.799,00
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	42.344.555.897,00	39.914.162.423,00	94,26	43.375.408.817,00
	Belanja Sewa Tanah	343.500.000,00	330.675.000,00	96,27	253.600.000,00
	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.005.590.666,00	8.344.519.485,00	92,66	4.785.008.150,00
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.431.800.000,00	3.283.450.500,00	95,68	2.991.380.680,00
	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	1.598.125.000,00	1.590.425.000,00	99,52	1.437.425.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.803.239.200,00	3.621.103.393,00	95,21	2.386.274.750,00
	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.051.619.000,00	1.040.717.225,00	98,96	1.830.150.590,00
	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	144.250.000,00
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.824.628.300,00	2.525.838.836,00	89,42	3.285.514.178,00
	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.357.570.783,00	1.334.838.253,00	98,33	981.702.247,00
	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	1.396.326.365,00	1.336.630.124,00	95,72	1.145.484.530,00
	Belanja sewa Aset Tidak Berwujud	153.000.000,00	145.370.300,00	95,01	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

3	Belanja Pemeliharaan	25.711.219.450,00	25.160.421.633,59	97,86	15.287.692.308,35
	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	139.159.500,00
	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	11.480.542.155,00	11.153.068.836,00	97,15	10.504.804.489,00
	Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.788.895.172,00	3.761.002.345,25	99,26	4.309.974.091,35
	Belanja pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	9.636.722.123,00	9.524.917.052,34	98,84	302.054.228,00
	Belanja pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.060.000,00	5.060.000,00	100,00	31.700.000,00
	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	800.000.000,00	716.373.400,00	89,55	0,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	50.047.273.400,00	41.789.716.915,00	83,50	36.443.003.984,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	50.033.773.400,00	41.776.216.915,00	83,50	36.443.003.984,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	0,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.128.017.400,00	12.020.712.074,00	99,12	10.324.227.059,00
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.369.270.400,00	10.361.217.279,00	99,92	7.491.339.300,00
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.758.747.000,00	1.659.494.795,00	94,36	2.832.887.759,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	51.739.625.878,00	50.776.535.650,00	98,14	47.666.983.050,00
	Belanja Barang dan Jasa BOS	51.739.625.878,00	50.776.535.650,00	98,14	47.666.983.050,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	142.108.614.699,00	135.059.506.797,01	95,04	129.722.683.083,21
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	142.108.614.699,00	135.059.506.797,01	95,04	129.722.683.083,21
	JUMLAH	563.480.576.709,00	531.453.185.475,10	94,32	500.452.445.773,56

5.1.2.1.c Belanja Subsidi

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Subsidi	270.000.000,00	269.872.500,00	99,95	1.437.202.577,00

Realisasi Belanja Subsidi tahun 2023 sebesar Rp269.872.500,00 atau 99,95% dari anggaran sebesar Rp270.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Subsidi	270.000.000,00	269.872.500,00	99,95	1.855.425.154,00
	Belanja Subsidi kepada BUMN	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	1.437.202.577,00
	Belanja Subsidi kepada BUMD	250.000.000,00	249.872.500,00	99,95	418.222.577,00

Belanja subsidi adalah upaya pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam percepatan pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi. Kegiatan terlaksana dengan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan BUMN dalam hal ini BULOG, dan BUMD yaitu PT. BPR BDG dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. BULOG menyediakan barang kebutuhan pokok untuk kegiatan pasar murah yang disalurkan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Dinas Perdagangan memberikan subsidi Rp2.000,00 per kilogram dan/atau per liter barang kebutuhan pokok yang disediakan BULOG. Total subsidi yang diberikan sebesar Rp20.000.000,00, adapun barang yang dapat dibeli masyarakat meliputi 5.000 liter minyak goreng, 3.200 kg gula pasir, dan 1.800 kg tepung terigu.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2. Belanja subsidi kepada BUMD merupakan belanja subsidi bunga KURDA yang diberikan kepada PT. BPR BDG melalui Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) tentang Penyaluran Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan Nomor 134.2.2/PK/01/2022 dan Nomor 008/PT.BPR.BDG/GK/I/2022 tanggal 26 Januari 2022. Di tahun 2023 pembayaran subsidi bunga KURDA dilaksanakan sebanyak 3 kali, satu kali di bulan Februari dan dua kali di bulan Maret. Pada bulan Februari subsidi bunga KURDA dicairkan sebesar Rp99.872.500,00 dengan jumlah debitur sebanyak 113 debitur. Sedangkan pada bulan Maret subsidi bunga KURDA dicairkan sebanyak dua kali, yang pertama dicairkan sebesar Rp116.585.000,00 dengan jumlah debitur sebanyak 126 Debitur dan pencairan kedua sebesar Rp33.415.000,00 dengan jumlah debitur sebanyak 30 debitur. Dengan demikian jumlah pencairan subsidi bunga KURDA selama tahun 2023 sebesar Rp249.872.500,00 dengan jumlah debitur sebanyak 269 debitur.

5.1.2.1.d Belanja Hibah

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Hibah	73.157.751.628,00	71.692.177.954,00	98,00	57.152.607.491,00

Realisasi Belanja Hibah tahun 2023 sebesar Rp71.692.177.954,00 atau 98,00% dari anggaran sebesar Rp73.157.751.628,00 naik sebesar Rp14.539.570.463,00 dari tahun 2022.

Rincian realisasi belanja hibah adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	58.651.308.870,00	57.292.790.262,00	97,68	43.916.188.698,00
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	49.953.090.870,00	48.826.367.133,00	97,74	25.903.873.810,00
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	317.575.000,00	300.378.629,00	94,59	1.258.891.124,00
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	8.380.643.000,00	8.166.044.500,00	97,44	16.753.423.764,00
2	Belanja Hibah Dana BOS	13.397.430.000,00	13.290.374.934,00	99,20	12.127.406.035,00
	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta	13.397.430.000,00	13.290.374.934,00	99,20	12.127.406.035,00
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.109.012.758,00	1.109.012.758,00	100,00	1.109.012.758,00
	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.109.012.758,00	1.109.012.758,00	100,00	1.109.012.758,00
	JUMLAH	73.157.751.628,00	71.692.177.954,00	98,00	57.152.607.491,00

Belanja hibah dikelola oleh 11 (sebelas) SKPD dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	40.666.380.820,00	39.455.966.585,00
	Keterangan: Belanja Hibah Dinas Pendidikan senilai Rp39.455.966.585,00 adalah hibah BOP PAUD, Kesetaraan, LPK, pembangunan jamban SD, SMP dan juga pembelian meja kursi, dan juga BOS Satdikdas Swasta.		



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan	2.984.572.000,00	2.975.148.000,00
	Keterangan: a. Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan senilai Rp1.718.500.000,00 yang terdiri dari pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan senilai Rp340.000.000,00, Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan senilai Rp1.228.500.000,00, Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Pemukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota senilai Rp150.000.000,00. b. Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan senilai Rp1.256.648.000,00 yang terdiri dari Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota senilai Rp899.553.000,00 dan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian senilai Rp357.095.000,00.		
3	Kundha Niti Mandala Sarta Sasana	108.841.050,00	87.208.482,00
	Keterangan: Hibah senilai Rp87.208.482,00 diberikan kepada Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo untuk pembelian perlengkapan ruang arsip berupa: Meja, kursi, lemari, filling Cabinet, scanner type 4, kipas angin tempel dinding merk Maspion, material besi ada kaki/roda penyangga, komputer all in one dengan processor 15 gen 11, printer tinta all in one dan lampu ruangan.		
4	Dinas Lingkungan Hidup	1.823.732.000,00	1.819.064.960,00
	Keterangan: Hibah untuk sarana dan prasarana TPS3R Tepus dan Kemadang Tanjungsari senilai Rp34.000.000,00 berupa pembelian tempat sampah 80 buah dan tempat sampah beroda 20 buah; Pembangunan TPS3R Tepus dan Sarpras (jalan, tanggul, talud, dan watertoren) di Tepus dan Kemadang senilai Rp1.059.055.560,00; Pembelian tempat sampah dan mesin pemotong rumput untuk kegiatan bersih kali untuk Kalurahan Wonosari, Tambakromo, Karangasem Ponjong, Ngilundur Girisubo dan Kepek Wonosari senilai Rp131.780.000,00; Pembangunan PAL di Tambakrejo Sodo senilai Rp225.331.900,00; Penanaman pohon dilakukan di Gunung Gentong Gedangsari, Gunung Ireng Patuk dan pantai Kesirat Panggang senilai Rp149.545.000,00; Pemasangan papan rambu dilakukan di Kalurahan Kemadang dan Banjarejo Tanjungsari senilai Rp24.904.000,00; Pembelian tempat sampah terpilah kepada Kalurahan Kedungkeris Nglipar, Putat, Karangawen Girisubo, Omah Godong Kelor, Dunggubah II Duwet, dan Gluntung Patuk senilai Rp139.500.000,00; Diberikan kepada bank sampah Dusun Namberan Karangasem Paliyan, Sumberejo Nglipar, Sabrang Watusigar, dan Tunggul Barat semanu senilai Rp34.948.500,00 dan Pengolahan sampah organik metode biokonversi untuk Kalurahan Songbanyu Girisubo senilai Rp20.000.000,00.		
5	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00
	Keterangan: Hibah kepada KONI Rp1.500.000.000,00 ; Hibah kepada Kwarcap Rp500.000.000,00; Hibah kepada NPC Rp600.000.000,00; dan Hibah kepada KNPI Rp200.000.000,00.		
6	Kundha Kabudayan	423.000.000,00	410.208.000,00
	Keterangan: Belanja hibah gamelan masing-masing @Rp136.736.000,00 a. Paguyuban Kesenian Karawitan "Ngudi Laras" b. Paguyuban Seni dan Budaya "Gendhing Katresnan" c. Paguyuban Kesenian Karawitan "Marsudi Budoyo"		
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	317.575.000,00	300.378.629,00
	Keterangan: Hibah Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp300.378.629,00 terdiri dari : Pengadaan lele kolam bundar untuk POKIR senilai Rp169.833.924,00; Pengadaan pakan ikan senilai Rp71.077.500,00; Pengadaan lele kolam bundar untuk PIS senilai Rp26.119.296,00; Belanja 810 kg pakan ikan senilai Rp10.935.000,00; dan Pengadaan bahan pelatihan budidaya Mina Padi (PIS) senilai Rp22.412.909,00.		



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

8	Dinas Pertanian dan Pangan	2.590.749.000,00	2.507.180.800,00
	Keterangan: Hibah DPP senilai Rp2.507.180.800,00 adalah dengan rincian sebagai berikut : Hibah barang untuk bahan Kawasan Pangan Rumah Lestari senilai Rp70.000.000,00; kepada 7 Kelompok, Hibah Selang Air dan Terpal sejumlah 2 Kelompok Tani senilai Rp11.000.000,00; Hibah Sumur (DAU - PIS) sejumlah 3 Kelompok senilai Rp294.189.000,00 ; Hibah Cultivator (DAU) sejumlah 12 kelompok senilai Rp171.000.000,00; Hibah Hansprayer sejumlah 4 kelompok senilai Rp4.000.000,00; Hibah Paddy Mover sejumlah 9 kelompok senilai Rp22.500.000,00; Hibah Power Thresher sejumlah 1 kelompok senilai Rp17.000.000,00; Hibah Traktor sejumlah 36 kelompok senilai Rp792.000.000,00; Hibah Bahan Praktek Pengolahan Mete Rp1.500.000,00; Hibah belanja Kegaitan Bimtek Bawang Merah sejumlah 3 kelompok senilai Rp4.500.000,00; Hibah Benih Tanaman Sayur Kangkung sejumlah 1 kelompok senilai Rp1.000.000,00; Hibah Benih Tanaman sayur terong sejumlah 1 kelompok senilai Rp1.000.000,00; Hibah bibit tanaman buah alpukat sejumlah 1 kelompok senilai Rp11.000.000,00; Hibah bibit tanaman buah durian sejumlah 1 kelompok senilai Rp6.000.000,00; Hibah bibit tanaman buah jambu kristal sejumlah 1 kelompok senilai Rp1.500.000,00; Hibah bibit tanaman buah kelengkeng sejumlah 1 kelompok senilai Rp8.000.000,00; Hibah bibit tanaman buah mangga sejumlah 1 kelompok senilai Rp5.000.000,00; Hibah kegiatan ekstentifikasi kelapa sejumlah 2 kelompok senilai Rp114.900.000,00; Hibah padi segreng sejumlah 7 kelompok senilai Rp144.390.000,00; Hibah pelatihan budidaya jagung sejumlah 1 senilai Rp2.560.000,00; Hibah pelatihan budidaya cabe sejumlah 1 senilai Rp1.000.000,00; Hibah pelatihan budidaya jamur sejumlah 1 kelompok senilai Rp1.000.000,00; Hibah Pelatihan Budidaya Padi Hibrida sejumlah 1 kelompok senilai Rp4.320.000,00; Hibah Pupuk Organik 1 kelompok senilai Rp10.500.000,00; Hibah Sarana Budidaya Jamur sejumlah 1 kelompok senilai Rp1.500.000,00; Hibah barang pengembangan Lumbung Mataraman sejumlah 10 kelompok senilai Rp400.000.000,00; Hibah cultivator (DBHCHT) sejumlah 5 kelompok senilai Rp 90.000.000; Hibah Cultivator (DBHCHT) - Silpa sejumlah 2 kelompok senilai Rp 36.000.000, Hibah Cultivator (DBHCHT) TDF sejumlah 2 kelompok senilai Rp 36.000.000; Hibah kegiatan pekarangan pangan lestari (DAK-NF) sejumlah 2 kelompok senilai Rp100.000.000,00; Hibah Bibit Tanaman Buah Pekarangan Pangan Sekolah (DAU) sejumlah 5 sekolah senilai Rp10.000.000,00; Hibah Pengembangan Sumber Air (DBHCHT) sejumlah 1 kelompok senilai Rp 147.000.000,00; Hibah Paket Bantuan Pengendalian OPT Tikus 20 Pasang Tyto Alba beserta sarana di kapanewon Playen sejumlah 10 kelompok senilai Rp50.000.000,00.		
9	Sekretariat Daerah	550.000.000,00	450.000.000,00
	Keterangan: Hibah Sekretariat Daerah senilai Rp.450.000.000,- terdiri dari : Hibah kepada NU senilai Rp300.000.000,00 dan kepada PMI senilai Rp150.000.000,00.		
10	Kapanewon Tanjungsari	413.970.000,00	408.090.740,00
	Keterangan: Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan senilai Rp408.090.740,00 yaitu berupa pembelian 1 Unit Ambulance dan peralatan dapur diperuntukkan Tagana.		
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20.478.931.758,00	20.478.931.758,00
	Keterangan: Hibah uang senilai Rp20.478.931.758,00 yang terdiri dari: Hibah kepada KPU senilai Rp15.214.177.000,00; Hibah kepada Bawaslu senilai Rp4.155.742.000,00 dan Hibah kepada Partai Politik dengan rincian : Hibah kepada Partai Amanat nasional senilai Rp131.214.160,00 Partai Demokrasi Indonesia Persatuan senilai Rp268.705.850,00 Partai Demokrat senilai Rp64.404.200,00 Partai Gerindra senilai Rp107.274.342,00 Partai Golkar senilai Rp125.281.248,00 Partai Keadilan Sejahtera senilai Rp95.831.946,00 Partai Kebangkitan Bangsa senilai Rp106.587.698,00 dan Partai Nasdem senilai Rp209.173.314,00.		
Jumlah		73.157.751.628,00	71.692.177.954,00

5.1.2.1.e Belanja Bantuan Sosial

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial	16.675.450.000,00	16.631.362.268,00	99,74	18.710.519.387,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2023 sebesar Rp16.631.362.268,00 atau 99,74% dari anggaran sebesar Rp16.675.450.000,00 turun sebesar Rp2.079.157.119,00 dari tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	8.334.450.000,00	8.327.862.700,00	99,92	10.692.250.780,00
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	8.056.200.000,00	8.051.400.000,00	99,94	10.412.200.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	278.250.000,00	276.462.700,00	99,36	280.050.780,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	2.891.000.000,00	2.853.499.568,00	98,70	7.228.268.607,00
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	735.000.000,00	735.000.000,00	100,00	2.773.000.000,00
	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	2.156.000.000,00	2.118.499.568,00	98,26	4.455.268.607,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	5.450.000.000,00	5.450.000.000,00	100,00	790.000.000,00
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok	5.450.000.000,00	5.450.000.000,00	100,00	790.000.000,00
	JUMLAH	16.675.450.000,00	16.631.362.268,00	99,74	18.710.519.387,00

Belanja Bantuan Sosial dikelola oleh Dinas Kesehatan, DPUPRKP dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta 17 Kapanewon dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023
1	Dinas Kesehatan	450.000.000,00	450.000.000,00
	Keterangan : Bansos Dinas Kesehatan senilai Rp450.000.000,00 adalah untuk Bantuan Jambanisasi kepada 150 KK dengan rincian per KK Rp3.000.000,00.		
2	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	7.608.000.000,00	7.608.000.000,00
	Keterangan : Belanja Bantuan Sosial DPUPRKP yang terealisasi senilai Rp7.608.000.000,00 terdiri dari: a. Stimulan Bedah Rumah (IKU BUPATI) (DAU) @20.000.000,00 untuk 325 KK senilai Rp6,500,000,000,00 b. Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Berserta PSU (DAU) @20.000.000,00 untuk 23 KK senilai Rp460,000,000,00 c. Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana (DAU) @50.000.000,- Untuk 6 KK senilai Rp300,000,000,00. d. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana (DAU) @30.000.000,- untuk 6 KK senilai Rp180,000,000,00 e. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) @7.000.000 24 Unit untuk 1 kelompok masyarakat senilai Rp.168,000,000,00.		
3	Dinas Sosial, P2KP	6.461.450.000,00	6.454.862.700,00
	Keterangan : Bantuan DBHCHT untuk 1,027 orang senilai Rp611,400,000,00. Bantuan sosial penyediaan alat bantu disabilitas, permakanan dan alat memasak untuk 100 orang senilai Rp276,462,700,00. Bantuan Sosial Uang Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin, terdiri dari 6 KUBE FM PIWK dan 208 KUBE FM POKIR Dewan. sehingga total ada 214 KUBE @ Rp20.000.000 dengan total Rp4.280.000.000. Bantuan Sosial Uang Usaha Sosial Ekonomi Produktif Keluarga Miskin terdiri dari 3 USEP KM PIWK dan 106 USEP KM Pokir Dewan sehingga total ada 109 USEP KM @ Rp10.000.000 dengan nilai 1.090.000.000 kepada 320 kelompok.		
4	Kapanewon Wonosari	80.000.000,00	79.317.825,00
	Keterangan : Belanja material untuk pembangunan jamban kepada 10 KK dan septictank kepada 10 KK		
5	Kapanewon Paliyan	288.000.000,00	280.887.720,00
	Keterangan : Belanja material untuk pembangunan jamban kepada 30 KK, sanitasi dan septictank kepada 20 KK dan PAH kepada 11 KK		
6	Kapanewon Panggang	232.000.000,00	231.004.865,00
	Keterangan : Belanja material untuk pembangunan jamban dan septictank kepada 8 KK dan PAH kepada 25 KK		
7	Kapanewon Tepus	248.000.000,00	247.057.000,00
	Keterangan : Belanja material untuk pembangunan jamban dan septictank kepada 40 KK dan PAH kepada 11 KK		
8	Kapanewon Rongkop	120.000.000,00	119.813.400,00
	Keterangan : Belanja material untuk pengadaan PAH kepada 15 KK		
9	Kapanewon Semanu	124.000.000,00	123.024.075,00
	Keterangan : Belanja material untuk pembangunan jamban dan septictank kepada 31 KK		



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

10	Kapanewon Ponjong	136.000.000,00	132.484.000,00
	Keterangan : Belanja material untuk pembangunan jamban dan septictank kepada 34 KK		
11	Kapanewon Karangmojo	60.000.000,00	57.495.000,00
	Keterangan : Belanja material untuk pembangunan jamban dan septictank kepada 15 KK		
12	Kapanewon Playen	164.000.000,00	161.783.610,00
	Keterangan : Belanja material untuk pembangunan jamban dan septictank kepada 15 KK		
13	Kapanewon Nglipar	64.000.000,00	63.534.000,00
	Keterangan : Belanja material untuk pembangunan jamban dan septictank kepada 11 KK dan PAH kepada 3 KK		
14	Kapanewon Ngawen	108.000.000,00	107.595.963,00
	Keterangan : Belanja material untuk pembangunan jamban dan septictank kepada 21 KK dan PAH kepada 3KK		
15	Kapanewon Patuk	56.000.000,00	55.565.490,00
	Keterangan : Belanja material untuk pembangunan jamban dan septictank kepada 14 KK		
16	Kapanewon Saptosari	44.000.000,00	42.894.285,00
	Keterangan : Belanja material untuk pembangunan jamban dan septictank kepada 4 KK dan PAH kepada 3 KK		
17	Kapanewon Girisubo	200.000.000,00	194.819.430,00
	Keterangan : Belanja material untuk pembangunan jamban kepada 16 KK dan septictank kepada 16 KK ,dan PAH 9 KK		
18	Kapanewon Tanjungsari	116.000.000,00	115.423.905,00
	Keterangan : Belanja material untuk pembangunan jamban 19 KK dan septictank kepada 12 KK		
19	Kapanewon Purwosari	116.000.000,00	105.799.000,00
	Keterangan : Belanja material untuk pembangunan jamban kepada 6 KK dan septictank kepada 2 KK ,dan PAH 3 KK		
	JUMLAH	16.675.450.000,00	16.631.362.268,00

5.1.2.2 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal terdiri dari:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Modal Tanah	5.415.827.500,00	4.510.814.335,00	83,29	5.366.354.820,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.585.234.753,00	42.951.484.642,00	94,22	109.055.394.711,00
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93.986.597.141,00	80.119.934.255,00	85,25	69.278.521.126,45
4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	42.806.483.233,00	40.332.789.870,00	94,22	79.328.069.800,00
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.161.726.919,00	10.001.111.569,00	98,42	6.114.846.943,00
6.	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	55.942.100,00
	Jumlah	197.955.869.546,00	177.916.134.671,00	89,88	269.199.129.500,45

Realisasi Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp177.916.134.671,00 atau 89,88% dari anggaran sebesar Rp197.955.869.546,00, turun sebesar Rp91.282.994.829,45 dari tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

5.1.2.2.a Belanja Modal Tanah

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Modal Tanah	5.415.827.500,00	4.510.814.335,00	83,29	5.366.354.820,00

Realisasi Belanja Modal Tanah tahun 2023 sebesar Rp4.510.814.335,00 atau 83,29% dari anggaran sebesar Rp5.415.827.500,00, turun sebesar Rp855.540.485,00 dari tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1 Belanja Tanah	5.415.827.500,00	4.510.814.335,00	83,29	5.366.354.820,00
Belanja Modal Tanah Persil	2.134.438.500,00	2.086.377.920,00	97,75	5.366.354.820,00
Belanja Modal Lapangan	3.281.389.000,00	2.424.436.415,00	73,88	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Belanja Modal Tanah terdapat di 4 SKPD yaitu Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, dan Kundha Kabudayan dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Uraian
a.	Belanja Modal Tanah Persil	2.134.438.500,00	2.086.377.920,00	97,75	
	Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana	1.679.488.500,00	1.676.151.120,00	99,80	Pengadaan tanah untuk SDN Mulusan sebidang tanah dengan SHM No. 02292 NIB Nomor 02260 seluas 2.007 meter persegi an. Budi Setiyawan
	DPUPRKP	454.950.000,00	410.226.800,00	90,17	- Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana (shelter) diPadukuhan Prenguk, Tegalrejo, Kap. Gedangsari dan Padukuhan Pangkah, Candirejo, Kap. Semin
b.	Belanja Modal Lapangan	3.281.389.000,00	2.424.436.415,00	73,88	
	Dinas Lingkungan Hidup	3.166.120.000,00	2.309.167.415,00	72,93	Pengadaan Tanah untuk Konservasi Ekosistem Lokal di Giritirto
	Kundha Kabudayan	115.269.000,00	115.269.000,00	100,00	Jasa apraisal dan tim pengadaan tanah untuk bangunan bersejarah Goa Barholo
	Jumlah	5.415.827.500,00	4.510.814.335,00	83,29	

5.1.2.2.b Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.585.234.753,00	42.951.484.642,00	94,22	109.055.394.711,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2023 sebesar Rp42.951.484.642,00 atau 94,22% dari anggaran sebesar Rp45.585.234.753,00, turun sebesar Rp66.103.910.069,00 dari tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	103.200.000,00	99.811.000,00	96,72	288.436.600,00
	Belanja Modal Alat Besar Darat	90.000.000,00	86.700.000,00	96,33	0,00
	Belanja Modal Alat Bantu	13.200.000,00	13.111.000,00	99,33	288.436.600,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	5.909.524.000,00	5.741.857.000,00	97,16	5.930.311.500,00
	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	5.909.524.000,00	5.741.857.000,00	97,16	5.930.311.500,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	643.735.000,00	634.780.950,00	98,61	257.710.732,00
	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	24.500.000,00	24.500.000,00	100,00	89.743.500,00
	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	1.325.000,00	1.284.950,00	96,98	0,00
	Belanja Modal Alat Ukur	617.910.000,00	608.996.000,00	98,56	167.967.232,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

4	Belanja Modal Alat Pertanian	141.726.000,00	141.456.000,00	99,81	21.756.000,00
	Belanja Modal Alat Pengolahan	141.726.000,00	141.456.000,00	99,81	21.756.000,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.652.010.100,00	4.534.045.720,00	97,46	5.323.021.124,00
	Belanja Modal Alat Kantor	965.483.000,00	944.300.470,00	97,81	765.456.433,00
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.677.027.100,00	3.580.245.250,00	97,37	4.554.164.691,00
	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	3.400.000,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	836.269.600,00	831.249.012,00	99,40	2.517.361.983,00
	Belanja Modal Alat Studio	241.294.600,00	238.571.417,00	98,87	2.476.092.983,00
	Belanja Modal Alat Komunikasi	157.050.000,00	156.865.095,00	99,88	26.695.000,00
	Belanja Modal Peralatan Pemancar	437.925.000,00	435.812.500,00	99,52	0,00
	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	0,00	0,00	0,00	14.574.000,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	13.897.675.398,00	12.683.072.777,00	91,26	31.107.743.352,00
	Belanja Modal Alat Kedokteran	7.767.253.091,00	7.443.242.278,00	95,83	1.641.470.295,00
	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	6.130.422.307,00	5.239.830.499,00	85,47	29.466.273.057,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.685.766.861,00	1.619.655.000,00	96,08	1.805.561.800,00
	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.682.084.861,00	1.616.167.000,00	96,08	148.562.800,00
	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	632.000,00	588.000,00	93,04	906.729.000,00
	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika/Nuklir/Elektronika	0,00	0,00	0,00	123.410.000,00
	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	3.050.000,00	2.900.000,00	95,08	626.860.000,00
9	Belanja Modal Komputer	2.943.656.500,00	2.747.585.512,00	93,34	24.336.067.775,00
	Belanja Modal Komputer Unit	1.914.982.000,00	1.886.886.413,00	98,53	2.820.978.535,00
	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.028.674.500,00	860.699.099,00	83,67	21.515.089.240,00
10	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	700.000.000,00	553.773.000,00	79,11	49.947.000,00
	Belanja Modal Sumur	0,00	0,00	0,00	49.947.000,00
	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	700.000.000,00	553.773.000,00	79,11	0,00
11	Belanja Modal Alat Keselamatan	27.800.000,00	27.800.000,00	100,00	10.019.112,00
	Belanja Modal Alat Pelindung	600.000,00	600.000,00	100,00	3.719.112,00
	Belanja Modal Alat SAR	27.200.000,00	27.200.000,00	100,00	6.300.000,00
12	Belanja Modal Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	113.498.900,00
	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	0,00	0,00	113.498.900,00
13	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.519.810.000,00	1.512.239.890,00	99,50	490.957.192,00
	Belanja Modal Rambu-Rambu/Lalu Lintas Darat	1.519.810.000,00	1.512.239.890,00	99,50	490.957.192,00
14	Belanja Modal Peralatan Olah Raga	67.788.000,00	60.031.000,00	88,56	75.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan Olah Raga	67.788.000,00	60.031.000,00	88,56	75.000.000,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.877.429.101,00	7.853.243.278,00	99,69	12.067.118.520,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	7.877.429.101,00	7.853.243.278,00	99,69	12.067.118.520,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.578.844.193,00	3.910.884.503,00	85,41	24.660.883.121,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.578.844.193,00	3.910.884.503,00	85,41	24.660.883.121,00
Jumlah		45.585.234.753,00	42.951.484.642,00	94,22	109.055.394.711,00

5.1.2.2.c Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93.986.597.141,00	80.119.934.255,00	85,25	69.278.521.126,45



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2023 sebesar Rp80.119.934.255,00 atau 85,25% dari anggaran sebesar Rp93.986.597.141,00, naik sebesar Rp10.841.413.128,55 dari tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	89.826.551.675,00	76.544.670.788,00	85,21	66.616.868.654,45
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	89.826.551.675,00	76.544.670.788,00	85,21	66.616.868.654,45
2	Belanja Modal Monumen	0,00	0,00	0,00	431.746.400,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	431.746.400,00
3	Belanja Modal Tugu Titik	211.620.000,00	211.620.000,00	100,00	0,00
	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	211.620.000,00	211.620.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	3.948.425.466,00	3.363.643.467,00	85,19	2.229.906.072,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.948.425.466,00	3.363.643.467,00	85,19	2.229.906.072,00
	JUMLAH	93.986.597.141,00	80.119.934.255,00	85,25	69.278.521.126,45

5.1.2.2.d Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	42.806.483.233,00	40.332.789.870,00	94,22	79.328.069.800,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi tahun 2023 sebesar Rp40.332.789.870,00 atau 94,22% dari anggaran sebesar Rp42.806.483.233,00, turun sebesar Rp38.995.279.930,00 dari tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	37.216.289.188,00	34.841.362.500,00	93,62	59.134.854.700,00
	Belanja Modal Jalan	37.216.289.188,00	34.841.362.500,00	93,62	57.329.712.800,00
	Belanja Modal Jembatan	0,00	0,00	0,00	1.805.141.900,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	4.579.842.045,00	4.512.457.720,00	98,53	20.174.765.100,00
	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	3.827.718.915,00	3.764.899.720,00	98,36	20.174.765.100,00
	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	38.439.900,00	38.439.000,00	100,00	0,00
	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air	520.890.000,00	518.380.000,00	99,52	0,00
	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	192.793.230,00	190.739.000,00	98,93	0,00
3	Belanja Modal Instalasi	495.352.000,00	488.500.000,00	98,62	0,00
	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Instalasi Pengolahan	446.500.000,00	440.000.000,00	98,54	0,00
	Belanja Modal Instalasi Pengaman	48.852.000,00	48.500.000,00	99,28	0,00
4	Belanja Modal Jaringan	365.000.000,00	363.319.650,00	99,54	0,00
	Belanja Modal Jaringan Listrik	365.000.000,00	363.319.650,00	99,54	0,00
5	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	150.000.000,00	127.150.000,00	84,77	18.450.000,00
	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi BLU	150.000.000,00	127.150.000,00	84,77	18.450.000,00
	Jumlah	42.806.483.233,00	40.332.789.870,00	94,22	79.328.069.800,00

5.1.2.2.e Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.161.726.919,00	10.001.111.569,00	98,42	6.114.846.943,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi tahun 2023 sebesar Rp10.001.111.569,00 atau 98,42% dari anggaran sebesar Rp10.161.726.919,00, naik sebesar Rp3.886.264.626,00 dari tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	55.919.750,00	55.916.750,00	99,99	82.134.500,00
	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	55.919.750,00	55.916.750,00	99,99	15.085.000,00
	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	0,00	0,00	0,00	67.049.500,00
2	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	4.607.944.000,00	4.548.359.035,00	98,71	2.406.369.824,00
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	4.607.944.000,00	4.548.359.035,00	98,71	2.406.369.824,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.349.783.169,00	5.286.518.869,00	98,82	3.567.800.419,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.349.783.169,00	5.286.518.869,00	98,82	3.567.800.419,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	148.080.000,00	110.316.915,00	74,50	58.542.200,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	148.080.000,00	110.316.915,00	74,50	58.542.200,00
	Jumlah	10.161.726.919,00	10.001.111.569,00	98,42	6.114.846.943,00

5.1.2.2.f Belanja Modal Aset Lainnya

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	55.942.100,00

Tidak ada realisasi belanja modal aset lainnya di tahun 2023.

5.1.2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja tidak terduga (BTT) adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Berikut adalah rincian belanja tidak terduga Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2023.

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Tidak Terduga	1.048.541.123,00	235.998.075,00	22,51	10.131.998.741,62

Belanja tidak terduga tahun 2023 hanya mencapai 22,51% dikarenakan realisasi belanja berdasarkan permohonan penggunaan anggaran BTT sesuai keadaan darurat, kebutuhan mendesak yang diajukan SKPD pengampu BTT.

Dari total pengajuan sebesar Rp237.903.075,00 terealisasi sebesar Rp235.998.075,00, sisa pengajuan sebesar Rp1.905.000,00 disetor kembali ke Kasda. Berikut adalah rincian pengajuan dan realisasi BTT tahun 2023.

No	Uraian	Pengajuan Rp	Realisasi Rp	Sisa	Keterangan
1	BKAD	42.460.075,00	42.460.075,00	0,00	Surat No. 900.1.15.1/123 tgl 19 Jan 2023 untuk restitusi pajak
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perlindungan, dan Perlindungan Anak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Surat No.400.9.3.3653 tgl 12 Okt 2023 untuk pembayaran bantuan biaya hidup pekerja migran



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

3	BPBD	190.443.000,00	188.538.000,00	1.905.000,00	Surat No.700.1.2.8/788 tgl 28 Nov 2023 untuk pembayaran BTT Hidrometeorologi kekeringan
Jumlah		237.903.075,00	235.998.075,00		

5.1.2.4 BELANJA TRANSFER

Realisasi Belanja Transfer terdiri dari:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Bagi Hasil	16.416.635.450,00	14.768.381.250,00	89,96	14.194.807.550,00
2.	Belanja Bantuan Keuangan	348.203.476.650,00	348.148.476.650,00	99,98	308.885.310.880,00
Jumlah		364.620.112.100,00	362.916.857.900,00	99,53	323.080.118.430,00

Realisasi Belanja Transfer tahun 2023 sebesar Rp362.916.857.900,00 atau 99,53% dari anggaran sebesar Rp364.620.112.100,00, naik sebesar Rp39.836.739.470,00 dari tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

5.1.2.4.a Belanja Bagi Hasil

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Bagi Hasil	16.416.635.450,00	14.768.381.250	89,96	14.194.807.550,00

Rincian realisasi belanja Bagi Hasil adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten /	7.925.688.500,00	7.925.688.500,00	100,00	7.383.990.500,00
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	7.925.688.500,00	7.925.688.500,00	100,00	7.383.990.500,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten / Kota kepada Pemerintah Desa	8.490.946.950,00	6.842.692.750,00	80,59	6.810.817.050,00
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten / Kota kepada Pemerintah	8.490.946.950,00	6.842.692.750,00	80,59	6.810.817.050,00
Jumlah		16.416.635.450,00	14.768.381.250,00	89,96	14.194.807.550,00

Belanja bagi hasil pajak dan retribusi dikelola oleh 2 (dua) SKPD yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPMK2KB) dan Dinas Pariwisata (Dispar), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	SKPD
1	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa (Berdasarkan SK Bupati No. 88/KPTS/2023 tentang Penetapan Penerima dan besarnya alokasi dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Kalurahan se Kabupaten Gunungkidul)	6.971.603.500,00	6.971.603.500,00	DPMKP2KB
2	Kekurangan Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa (Berdasarkan SK Bupati No. 292/KPTS/2023 tentang Penerima dan besarnya alokasi dana kekurangan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah TA 2022 kepada Kalurahan se Kabupaten Gunungkidul)	954.085.000,00	954.085.000,00	DPMKP2KB
Jumlah		7.925.688.500,00	7.925.688.500,00	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

1	Bagi Hasil Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga kepada Pemerintah Desa	8.182.246.000,00	6.533.991.800,00	Dispar
	SK Bupati No. 88/KPTS/2023			3.885.782.000,00
	- Januari	SK Bupati No.44/KPTS/2023		246.118.550,00
	- Februari	SK Bupati No.73/KPTS/2023		136.845.725,00
	- Maret	SK Bupati No.93/KPTS/2023		115.196.775,00
	- April	SK Bupati No.136/KPTS/2023		178.172.225,00
	- Mei	SK Bupati No.169/KPTS/2023		326.455.225,00
	- Juni	SK Bupati No.195/KPTS/2023		253.059.100,00
	- Juli	SK Bupati No.203/KPTS/2023		375.500.800,00
	- Agustus	SK Bupati No.225/KPTS/2023		218.800.200,00
	- September	SK Bupati No.242/KPTS/2023		255.826.175,00
	- Oktober	SK Bupati No.263/KPTS/2023		303.610.850,00
	- November	SK Bupati No.294/KPTS/2023		238.624.175,00
				6.533.991.800,00
2	Kekurangan Bagi Hasil Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga kepada Pemerintah Desa	308.700.950,00	308.700.950,00	Dispar
	(Berdasarkan SK Bupati No. 280/KPTS/2023 tentang besarnya penerimaan bagian dari hasil pelaksanaan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga kepada Kalurahan yangn belum dibayarkan tahun 2022)			
		8.490.946.950,00	6.842.692.750,00	
	Jumlah	16.416.635.450,00	14.768.381.250,00	

5.1.2.4.b Belanja Bantuan Keuangan

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Bantuan Keuangan	348.203.476.650,00	348.148.476.650,00	99,98	308.885.310.880,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan tahun 2023 sebesar Rp348.148.476.650,00 atau 99,98% dari anggaran sebesar Rp348.203.476.650,00, naik sebesar Rp39.263.165.770,00 dari tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian realisasi Belanja Bantuan Keuangan adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	55.852.713.150	55.797.713.150,00	99,90	59.201.981.380,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	179.933.551.000	179.933.551.000,00	100,00	144.366.117.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	112.417.212.500	112.417.212.500,00	100,00	105.317.212.500,00
	Jumlah	348.203.476.650,00	348.148.476.650,00	99,98	308.885.310.880,00

1. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa

Bantuan Keuangan Khusus (BKK) merupakan bantuan kepada kalurahan yang bersumber anggaran APBD Pemerintah Daerah yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Belanja BKK tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dikelola oleh 6 SKPD yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB), Dinas Pertanian Pangan (DPP), Dinas Pariwisata (Dispar), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP), dan Dinas Pendidikan (Disdik) dan terealisasi sebesar 99,90% dengan selisih nilai sebesar Rp55.000.000,00.

Penjelasan atas selisih nilai antara anggaran dan realisasi sebesar Rp55.000.000,00, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	SKPD	Keterangan
1	Karya Bhakti TNI di 4 Kalurahan	200.000.000,00	DPMKP2KB	
2	TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) di 5 kalurahan	1.075.000.000,00	DPMKP2KB	
3	Bantuan pengganti tanah lungguh bagi pamong yang tidak mempunyai tanah lungguh untuk Kalurahan Kalitekuk dan Kalurahan Kemejing	106.500.000,00	DPMKP2KB	
4	BKK di 52 padukuhan dan 31 kalurahan	36.174.955.050,00	DPMKP2KB	1 Kalurahan yang tidak mencairkan BKK karena dobel dengan penganggaran dais yaitu Kayuwalang, Wiladeg, Karangmojo senilai Rp20.000.000,00
5	Jalan Usaha Tani di 15 kalurahan	615.189.000,00	DPP	
6	BKK di 5 kalurahan	298.900.000,00	DPP	
7	BKK di 1 kalurahan	30.000.000,00	Dispar	
8	BKK di 1 kalurahan	39.000.000,00	DLH	
9	BKK di 92 Kalurahan	17.218.169.100,00	DPUPRKP	2 Kalurahan tidak mencairkan BKK yaitu Serpeng Kidul RT 003/RW 026 Kalurahan Pacarejo Kap. Semanu senilai Rp25.000.000,00; dan Tawarsari Wonosari senilai Rp10.000.000,00
10	BKK di 1 kalurahan	40.000.000,00	Disdik	
	Jumlah	55.797.713.150,00		

2. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa

Dana Desa merupakan kewajiban dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan dalam APBN. Penyaluran Dana Desa secara langsung ke Desa melalui Rekening Kas Desa (RKD)

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memperoleh TKD berupa Dana Desa sebesar Rp175.848.933.000,00 diperuntukkan bagi 144 Kalurahan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 210/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memperoleh tambahan Dana Desa sebesar Rp4.084.618.000,00, sehingga total menjadi Rp179.933.551,00.

Sesuai pasal 32 PMK Nomor 201/PMK.07/2022, dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan Dana Desa, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencatatan belanja Dana Desa berdasarkan daftar rincian SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD dari Aplikasi OM SPAN.

3. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan kedalam APBD melalui dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemudian disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD).

ADD Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Besarnya Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan besaran anggaran senilai Rp112.417.212.500,00.

5.1.2.5 SURPLUS/DEFISIT

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan	1.985.328.493.903,00	1.992.172.404.395,86	100,34	1.988.675.824.171,86
Belanja	2.070.651.923.803,00	2.000.900.739.750,10	96,63	2.006.451.520.613,63
Surplus/defisit	(85.323.429.900,00)	(8.728.335.354,24)	10,23	(17.775.696.441,77)

5.1.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Penerimaan Pembiayaan	100.323.429.900,00	100.323.429.900,00	100,00	144.266.126.342,35
2.	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	26.167.000.000,00
	Netto	85.323.429.900,00	85.323.429.900,00	100,00	118.099.126.342,35

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2023 berasal dari SiLPA tahun anggaran 2022 yaitu sebesar Rp100.323.429.900,00.

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Rincian realisasi pengeluaran pembiayaan adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Penyertaan Modal kepada PDAM	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
2	Penyertaan Modal kepada PT BPR	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	7.500.000.000,00
3	Penyertaan Modal kepada BPD DIY	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	13.667.000.000,00
	Jumlah	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	26.167.000.000,00

5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan APBD (SiKPA), yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah. Sisa Perhitungan Anggaran tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan	1.985.328.493.903,00	1.992.172.404.395,86	100,34	1.988.675.824.171,86
Belanja	2.070.651.923.803,00	2.000.900.739.750,10	96,63	2.006.451.520.613,63
Surplus (Defisit) (a - b - c)	(85.323.429.900,00)	(8.728.335.354,24)	10,23	1.567.782.502,67
Penerimaan Pembiayaan	100.323.429.900,00	100.323.429.900,00	100,00	144.266.126.342,35
Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	26.167.000.000,00
Pembiayaan Neto (d - e)	85.323.429.900,00	85.323.429.900,00	100,00	142.698.343.839,68
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	-	76.595.094.545,76		144.266.126.342,35



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2023 sebesar Rp76.595.094.545,76 terdiri dari:

Uraian	Realisasi 2023
Kas Daerah	36.177.480.000,04
Kas BLUD	35.210.068.789,72
Kas BOK	4.160.398.064,00
Kas Lainnya (BOS, BOP)	1.047.147.692,00
Jumlah SiLPA	76.595.094.545,76

1. Kas Daerah

36.177.480.000,04

a. Kas Tunai :

721.067.357,00

1) Kas di Bendahara Umum Daerah (BUD)	-
2) Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD	38.665.083,00
- Kap. Ngawen	1.790.000,00
- Kap. Nglipar	36.825.083,00
- RSUD Saptosari	50.000,00
3) Kas di Bendahara Penerimaan SKPD	682.402.274,00
- Dispar	663.499.620,00
- BKAD	603.875,00
- RSU Wonosari	18.168.979,00
- UPT Ponjong 1	124.000,00
- UPT Panggang 1	5.800,00

b. Kas di Rekening Giro BPD Yogyakarta Cab. Wonosari :

35.332.666.483,04

1) A/C 002.111.000038 : Rek. Kas Umum Daerah	36.099.151.937,04
2) Dikurangi :	
- Sisa BKK (setor ke Provinsi)	(327.530.401,00)
- Utang JKN BPJS TPG Peserta 1%	(436.120.053,00)
- Utang dana BOP TK ABA Puleireng	(2.835.000,00)

c. Kas di rekening penampung pembayaran PBB (BPD & Kantor Pos)

123.746.160,00

2. Kas BLUD

35.210.068.789,72

Kas di Rekening BLUD

1) NGLIPAR I	002.111.000765	94.886.718,62
2) NGLIPAR II	002.111.000859	155.565.578,00
3) GEDANGSARI I	002.111.000847	370.299.763,00
4) GEDANGSARI II	002.111.000842	293.229.896,00
5) PATUK I	012.111.000763	140.823.267,97
6) PATUK II	002.111.000846	138.590.452,89
7) RONGKOP	002.111.000768	240.636.593,00
8) GIRISUBO	002.111.000839	125.126.899,00
9) PONJONG I	002.111.000767	352.326.144,00
10) PONJONG II	002.111.000857	112.873.382,00
11) WONOSARI I	012.111.000766	206.681.786,49
12) WONOSARI II	002.111.000853	376.718.624,00
13) KARANGMOJO I	002.111.000848	783.429.890,14
14) KARANGMOJO II	002.111.000855	158.033.401,00
15) PANGGANG I	002.111.000856	99.993.530,00
16) PANGGANG II	012.111.000764	11.650.168,00
17) PURWOSARI	002.111.000845	107.990.087,00
18) TEPUS I	002.111.000849	92.504.867,00
19) TEPUS II	002.111.000851	219.809.014,40
20) TANJUNGSARI	002.111.000844	189.941.342,00
21) PALIYAN	012.111.000762	251.451.928,00
22) SAPTOSARI	002.111.000843	418.631.406,68
23) NGAWEN I	002.111.000840	191.696.379,00
24) NGAWEN II	002.111.000850	74.886.654,00
25) SEMANU I	002.111.000142	518.181.645,00
26) SEMANU II	002.111.000858	334.637.879,00
27) SEMIN I	002.111.000769	199.417.824,00
28) SEMIN II	002.111.000852	102.916.524,00
29) PLAYEN I	002.111.000761	222.959.120,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

30) PLAYEN II	002.111.000841	314.629.465,02
30) RSUD Saptosari	013.111.000167	5.483.773.034,00
31) RSUD Wonosari	002.111.000679	22.825.775.526,51
3. Kas BOK		4.160.398.064,00
Kas di Rekening BOK		4.160.398.064,00
1) NGLIPAR I	1.590.107.634	276.149.489,00
2) NGLIPAR II	1.590.107.599	163.596.750,00
3) GEDANGSARI I	1.590.107.544	125.769.352,00
4) GEDANGSARI II	1.590.107.533	131.070.794,00
5) PATUK I	1.590.107.678	128.636.600,00
6) PATUK II	1.590.107.577	63.486.352,00
7) RONGKOP	1.590.107.816	57.277.300,00
8) GIRISUBO	1.590.107.769	202.637.808,00
9) PONJONG I	1.590.107.781	133.511.995,00
10) PONJONG II	1.590.107.656	261.137.285,00
11) WONOSARI I	1.590.107.770	297.805.325,00
12) WONOSARI II	1.590.107.792	198.700.407,00
13) KARANGMOJO I	1.590.107.703	112.387.187,00
14) KARANGMOJO II	1.590.107.667	201.107.582,00
15) PANGGANG I	1.590.107.566	92.796.902,00
16) PANGGANG II	1.590.107.623	100.128.982,00
17) PURWOSARI	1.590.107.601	97.261.816,00
18) TEPUS I	1.590.107.588	94.847,00
19) TEPUS II	1.590.107.645	91.682.625,00
20) TANJUNGSARI	1.590.107.714	137.694.776,00
21) PALIYAN	1.590.107.747	75.761.320,00
22) SAPTOSARI	1.590.107.725	169.779.784,00
23) NGAWEN I	1.590.107.612	4.631.062,00
24) NGAWEN II	1.590.107.522	117.290.093,00
25) SEMANU I	1.590.107.736	116.317.985,00
26) SEMANU II	1.590.107.555	97.552.920,00
27) SEMIN I	1.590.107.758	106.567.374,00
28) SEMIN II	1.590.107.690	190.455.887,00
29) PLAYEN I	1.590.107.805	206.008.944,00
30) PLAYEN II	1.590.107.689	203.098.521,00
4. Kas Lainnya		1.047.147.692,00
a. Saldo kas BOS	(1+2+3-4-5+6-7)	1.047.147.692,00
1 Saldo tahun lalu		967.296.835,00
2 Pendapatan Tahun 2023		76.479.676.247,00
3 Belanja tahun 2023		76.396.432.731,00
4 Pengembalian Kas 2022		3.392.659,00
b. Saldo kas BOP PAUD		0,00
1 Saldo tahun lalu	(1+2+3-4-5+6-7)	0,00
2 Pendapatan Tahun 2023		17.572.051.500,00
3 Belanja tahun 2023		17.572.051.500,00
c. Saldo kas BOP Kesetaraan		0,00
1 Saldo tahun lalu	(1+2+3-4-5+6-7)	0,00
2 Pendapatan Tahun 2023		1.621.780.000,00
3 Belanja tahun 2023		1.621.780.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

5.2.1. PENJELASAN SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL

Saldo Anggaran Lebih Awal Kabupaten Gunungkidul untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal	100.323.429.900,58	144.266.126.342,35

Realisasi Saldo Anggaran Lebih Awal TA 2023 sebesar Rp100.323.429.900,58 sedangkan untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp144.266.126.342,35 atau turun sebesar Rp43.942.696.441,77.

5.2.2. PENJELASAN PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Kabupaten Gunungkidul untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	100.323.429.900,00	144.266.126.342,35

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan TA 2023 sebesar Rp100.323.429.900, sedangkan untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp144.266.126.342,35 atau turun sebesar Rp43.942.696.442,35.

5.2.3. PENJELASAN SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN

Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Gunungkidul untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	76.595.094.545,76	100.323.429.900,58

Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp76.595.094.545,76 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Kabupaten Gunungkidul dari surplus/defisit anggaran ditambah dengan pembiayaan netto, dengan perhitungan sebagai berikut.

Pendapatan	Rp 1.992.172.404.395,86	
Belanja Daerah	Rp 2.000.900.739.750,10	
Surplus/Defisit		Rp (8.728.335.354,24)
Penerimaan Pembiayaan	Rp 100.323.429.900,00	
Pengeluaran Pembiayaan	Rp 15.000.000.000,00	
Pembiayaan Netto		Rp 85.323.429.900,00
SilPA		Rp 76.595.094.545,76



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

5.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan perbandingannya dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan uraian sebagai berikut.

5.3.1 ASET LANCAR

Rp143.808.587.602,72

Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp143.808.587.602,72 turun sebesar Rp20.143.035.004,69 atau 12,29% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp163.951.622.607,42 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1. Kas dan Setara Kas	77.361.579.999,76	100.490.701.270,58
2. Inventasi Jangka Pendek	0,00	0,00
3. Piutang Daerah Netto	33.184.060.398,53	29.799.329.162,19
4. Beban Dibayar Dimuka	10.000.000,00	70.000.000,00
5. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
6. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
7. Persediaan	33.252.947.204,43	33.591.592.174,65
Jumlah	143.808.587.602,72	163.951.622.607,42

5.3.1.1 Kas dan Setara Kas

Rp77.361.579.999,76

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp77.361.579.999,76 turun sebesar Rp23.129.121.270,82 atau 23,02% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp100.490.701.270,58 yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Bendahara BOS di masing-masing SKPD dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1. Kas di Kas Daerah	36.099.151.937,04	45.813.217.053,00
2. Kas di Bendahara Penerimaan	682.402.274,00	269.647.792,00
3. Kas di Bendahara Pengeluaran	38.665.083,00	4.125.000,00
4. Kas di BLUD	35.210.068.789,72	53.259.201.093,58
5. Kas Dana BOS	1.047.147.692,00	967.296.835,00
6. Kas Lainnya	123.746.160,00	177.213.497,00
7. Kas Dana BOK Puskesmas	4.160.398.064,00	0,00
Jumlah	77.361.579.999,76	100.490.701.270,58

1 Kas di Kas Daerah **Rp36.099.151.937,04**

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp36.099.151.937,04 turun sebesar Rp9.714.065.115,96 atau 21,20% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp45.813.217.053,00. Saldo Kas di Kas Daerah merupakan dana milik Pemerintah Kabupaten Gunungkidul di PT Bank Pembangunan Daerah DIY dengan Nomor Rekening 002.111.000038 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kas di Kas Daerah (BUD)	36.099.151.937,04	45.813.217.053,00
Jumlah	36.099.151.937,04	45.813.217.053,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2 Kas di Bendahara Penerimaan **Rp682.402.274,00**

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp682.402.274,00 naik sebesar Rp412.754.482,00 atau 153,07% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp269.647.792,00. Kas di bendahara penerimaan merupakan saldo kas pada bendahara penerimaan SKPD yang sampai tanggal 31 Desember 2023 belum disetor ke rekening kas daerah, dengan rincian:

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1) RSUD Saptosari	0,00	1.542.118,00
2) RSUD Wonosari	18.168.979,00	6.466.655,00
3) UPT Panggang 1	5.800,00	-
4) UPT Ponjong 1	124.000,00	140.000,00
5) Dinas Pariwisata	663.499.620,00	176.250.740,00
6) BKAD	603.875,00	70.248.279,00
7) DPUPRPK	0,00	15.000.000,00
Jumlah	682.402.274,00	269.647.792,00

3 Kas di Bendahara Pengeluaran **Rp38.665.083,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp38.665.083,00 naik sebesar Rp34.540.083,00 atau 837,34% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.125.000,00. Saldo kas ini merupakan saldo kas yang masih berada di tangan bendahara pengeluaran SKPD yang belum disetor ke rekening kas daerah, dan terdiri dari:

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1) DPMKPPKB	0,00	4.125.000,00
2) Kap. Ngawen	1.790.000,00	0,00
3) Kap. Nglipar	36.825.083,00	0,00
4) RSUD Saptosari	50.000,00	0,00
5) UPT Puskesmas Ponjong 1	0,00	0,00
Jumlah	38.665.083,00	4.125.000,00

4 Kas di BLUD **Rp35.210.068.789,72**

Kas di BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp35.210.068.789,72 turun sebesar Rp18.049.132.303,86 atau 33,89% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp53.259.201.093,58. Saldo kas ini merupakan saldo kas yang masih berada di tangan bendahara pengeluaran BLUD yang berada di 30 UPT Puskesmas dan RSUD, dan terdiri dari:

		31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1) Dinas Kesehatan			
- UPT Puskesmas Nglipar I	No. Rek :	002.111.000765	94.886.718,62
- UPT Puskesmas Nglipar II	No. Rek :	002.111.000859	155.565.578,00
- UPT Puskesmas Rongkop	No. Rek :	002.111.000768	370.299.763,00
- UPT Puskesmas Ponjong I	No. Rek :	002.111.000767	293.229.896,00
- UPT Puskesmas Ponjong II	No. Rek :	002.111.000857	140.823.267,97
- UPT Puskesmas Wonosari I	No. Rek :	002.111.000766	138.590.452,89
- UPT Puskesmas Wonosari II	No. Rek :	002.111.000853	240.636.593,00
- UPT Puskesmas Paliyan	No. Rek :	002.111.000762	125.126.899,00
- UPT Puskesmas Panggang I	No. Rek :	002.111.000856	352.326.144,00
- UPT Puskesmas Panggang II	No. Rek :	002.111.000764	112.873.382,00
- UPT Puskesmas Tanjungsari	No. Rek :	002.111.000844	206.681.786,49
- UPT Puskesmas Playen I	No. Rek :	002.111.000761	376.718.624,00
- UPT Puskesmas Playen II	No. Rek :	002.111.000841	783.429.890,14
- UPT Puskesmas Patuk I	No. Rek :	012.111.000763	158.033.401,00
- UPT Puskesmas Patuk II	No. Rek :	002.111.000846	99.993.530,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- UPT Puskesmas Saptosari	No. Rek :	002.111.000843	11.650.168,00	680.011.716,68
- UPT Puskesmas Purwosari	No. Rek :	002.111.000845	107.990.087,00	73.617.311,00
- UPT Puskesmas Semin I	No. Rek :	002.111.000769	92.504.867,00	152.742.750,00
- UPT Puskesmas Semin II	No. Rek :	002.111.000852	219.809.014,40	82.304.283,00
- UPT Puskesmas Semanu I	No. Rek :	002.111.000142	189.941.342,00	469.149.930,00
- UPT Puskesmas Semanu II	No. Rek :	002.111.000858	251.451.928,00	236.913.890,00
- UPT Puskesmas Girisubo	No. Rek :	002.111.000839	418.631.406,68	84.102.396,00
- UPT Puskesmas Tepus I	No. Rek :	002.111.000849	191.696.379,00	88.928.932,00
- UPT Puskesmas Tepus II	No. Rek :	002.111.000851	74.886.654,00	115.694.319,40
- UPT Puskesmas Gedangsari I	No. Rek :	002.111.000847	518.181.645,00	310.371.782,00
- UPT Puskesmas Gedangsari II	No. Rek :	002.111.000842	334.637.879,00	264.698.110,00
- UPT Puskesmas Ngawen I	No. Rek :	002.111.000840	199.417.824,00	164.575.416,00
- UPT Puskesmas Ngawen II	No. Rek :	002.111.000850	102.916.524,00	81.099.648,00
- UPT Puskesmas Karangmojo I	No. Rek :	002.111.000848	222.959.120,00	665.367.592,14
- UPT Puskesmas Karangmojo II	No. Rek :	002.111.000855	314.629.465,02	97.427.560,00
- RSUD Saptosari	No. Rek :	013.111.000167	5.483.773.034,00	8.320.330.690,00
- RSUD Wonosari	No. Rek :	002.111.000679	22.825.775.526,51	38.979.359.398,36
Jumlah			35.210.068.789,72	53.259.201.093,58

5 Kas Dana BOS **Rp1.047.147.692,00**

Kas Dana BOS sebesar Rp1.047.147.692,00 merupakan saldo kas BOS yang berada di Rekening Bendahara Pengeluaran Sekolah yang merupakan sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut.

Saldo tahun lalu	967.296.835,00
Penyesuaian saldo awal 2023	0,00
Pendapatan Tahun 2023	76.479.676.247,00
Belanja Tahun 2023	76.396.432.731,00
Pengembalian kas 2023	3.392.659,00
Bunga bank	0,00
Administrasi bank	0,00
Jumlah	1.047.147.692,00

6 Kas Lainnya **Rp123.746.160,00**

Saldo kas lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp123.746.160,00 terdapat di SKPD dengan rincian sebagai berikut.

SKPD	Keterangan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
BPBD	Rekening dana donasi pada Bank BPD DIY	0,00	167.211.370,00
BKAD	Rekening pembayaran PBB pada Bank BNI	0,00	410.289,00
	Rekening pembayaran PBB pada Bank BPD DIY	116.701.266,00	5.276.724,00
	Rekening pembayaran PBB pada PT. Pos Indonesia	7.044.894,00	4.315.114,00
Jumlah		123.746.160,00	177.213.497,00

7 Kas Dana BOK Puskesmas **Rp4.160.398.064,00**

Saldo Dana BOK Puskesmas Pemerintah Kabupaten Gunungkidul per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.160.398.064,00 yang terdapat di 30 UPT Puskesmas dengan rincian sebagai berikut :

1	UPT Puskesmas Nglipar I	No. Rek :	1.590.107.634	276.149.489,00
2	UPT Puskesmas Nglipar II	No. Rek :	1.590.107.599	163.596.750,00
3	UPT Puskesmas Gedangsari I	No. Rek :	1.590.107.544	125.769.352,00
4	UPT Puskesmas Gedangsari II	No. Rek :	1.590.107.533	131.070.794,00
5	UPT Puskesmas Patuk I	No. Rek :	1.590.107.678	128.636.600,00
6	UPT Puskesmas Patuk II	No. Rek :	1.590.107.577	63.486.352,00
7	UPT Puskesmas Rongkop	No. Rek :	1.590.107.816	57.277.300,00
8	UPT Puskesmas Girisubo	No. Rek :	1.590.107.769	202.637.808,00
9	UPT Puskesmas Ponjong I	No. Rek :	1.590.107.781	133.511.995,00
10	UPT Puskesmas Ponjong II	No. Rek :	1.590.107.656	261.137.285,00
11	UPT Puskesmas Wonosari I	No. Rek :	1.590.107.770	297.805.325,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

12	UPT Puskesmas Wonosari II	No. Rek :	1.590.107.792	198.700.407,00
13	UPT Puskesmas Karangmojo I	No. Rek :	1.590.107.703	112.387.187,00
14	UPT Puskesmas Karangmojo II	No. Rek :	1.590.107.667	201.107.582,00
15	UPT Puskesmas Panggang I	No. Rek :	1.590.107.566	92.796.902,00
16	UPT Puskesmas Panggang II	No. Rek :	1.590.107.623	100.128.982,00
17	UPT Puskesmas Purwosari	No. Rek :	1.590.107.601	97.261.816,00
18	UPT Puskesmas Tepus I	No. Rek :	1.590.107.588	94.847,00
19	UPT Puskesmas Tepus II	No. Rek :	1.590.107.645	91.682.625,00
20	UPT Puskesmas Tanjungsari	No. Rek :	1.590.107.714	137.694.776,00
21	UPT Puskesmas Paliyan	No. Rek :	1.590.107.747	75.761.320,00
22	UPT Puskesmas Saptosari	No. Rek :	1.590.107.725	169.779.784,00
23	UPT Puskesmas Ngawen I	No. Rek :	1.590.107.612	4.631.062,00
24	UPT Puskesmas Ngawen II	No. Rek :	1.590.107.522	117.290.093,00
25	UPT Puskesmas Semanu I	No. Rek :	1.590.107.736	116.317.985,00
26	UPT Puskesmas Semanu II	No. Rek :	1.590.107.555	97.552.920,00
27	UPT Puskesmas Semin I	No. Rek :	1.590.107.758	106.567.374,00
28	UPT Puskesmas Semin II	No. Rek :	1.590.107.690	190.455.887,00
29	UPT Puskesmas Playen I	No. Rek :	1.590.107.805	206.008.944,00
30	UPT Puskesmas Playen II	No. Rek :	1.590.107.689	203.098.521,00
Jumlah				4.160.398.064,00

5.3.1.2 Investasi Jangka Pendek **Rp0,00**

Investasi Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Gunungkidul per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00

5.3.1.3 Piutang Daerah Netto **Rp33.184.060.398,53**

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, dalam Bab VI tentang Kebijakan Akuntansi Piutang disebutkan bahwa piutang harus disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut.

Penggolongan piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut.

1. Kualitas Piutang Lancar;
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3. Kualitas Piutang Diragukan;
4. Kualitas Piutang Macet.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan sebagai berikut:

No	Kualitas Piutang	Taksiran piutang tak tertagih
1	Lancar	0,5%
2	Kurang Lancar	10,0%
3	Diragukan	50,0%
4	Macet	100,0%

Piutang Daerah Netto per 31 Desember 2023 sebesar Rp33.184.060.398,53 turun sebesar - Rp3.384.731.236,34 atau -11,36% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp29.799.329.162,19 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1 Piutang Daerah	45.759.112.107,65	40.485.291.794,17
2 Penyisihan Piutang Daerah	(12.575.051.709,11)	(10.685.962.631,98)
Piutang Daerah Netto	33.184.060.398,53	29.799.329.162,19

Piutang Daerah Netto terdiri dari :

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1 Piutang Pajak	25.621.993.891,00	21.671.019.864,00
<i>Penyisihan Piutang Pajak</i>	<i>(12.135.735.722,42)</i>	<i>(10.375.733.403,37)</i>
Piutang Pajak Netto	13.486.258.168,58	11.295.286.460,63
2 Piutang Retribusi	449.626.877,00	757.880.647,00
<i>Penyisihan Piutang Retribusi</i>	<i>(340.878.530,00)</i>	<i>(219.908.149,30)</i>
Piutang Retribusi Netto	108.748.347,00	537.972.497,70
3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.352.612.613,65	16.354.621.112,79
<i>Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</i>	<i>(91.763.063,07)</i>	<i>(81.773.105,56)</i>
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto	18.260.849.550,58	16.272.848.007,23
4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.149.980.061,00	868.655.228,38
<i>Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah</i>	<i>(5.749.900,31)</i>	<i>(4.382.399,04)</i>
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.144.230.160,69	864.272.829,34
5 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	184.898.665,00	833.114.942,00
<i>Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya</i>	<i>(924.493,32)</i>	<i>(4.165.574,71)</i>
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	183.974.171,69	828.949.367,29
Jumlah	33.184.060.398,53	29.799.329.162,19

1 Piutang Pajak Netto **Rp13.486.258.168,58**

Piutang pajak netto per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.486.258.168,58 naik sebesar - Rp18.560.495.098,79 atau -57,92% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp32.046.753.267,37 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1 Piutang Pajak	25.621.993.891,00	21.671.019.864,00
2 Penyisihan Piutang Pajak	(12.135.735.722,42)	10.375.733.403
Piutang Pajak Netto	13.486.258.168,58	32.046.753.267,37

1. Piutang Pajak **Rp25.621.993.891,00**

Piutang pajak timbul akibat adanya Pendapatan Pajak Daerah yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Piutang pajak terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang dikelola Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Saldo piutang pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp25.621.993.891,00, dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1 Pajak Hotel	15.347.429,00	-
2 Pajak Restoran	35.926.590,00	58.257.242,00
3 Pajak Hiburan	830.000,00	-



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

4 Pajak Reklame	96.886.400,00	117.699.977,00
5 Pajak Penerangan Jalan	1.936.184.742,00	-
6 Pajak Parkir	413.250,00	25.000,00
7 Pajak Air Bawah Tanah	26.323.149,00	23.495.801,00
8 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB)	32.288.800,00	16.806.000,00
9 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	23.477.793.531,00	21.454.735.844,00
	25.621.993.891,00	21.671.019.864,00

Mutasi penambahan dan pengurangan piutang pajak daerah tahun 2023 dapat digambarkan pada tabel berikut.

REKAPITULASI MUTASI PIUTANG PAJAK DAERAH TAHUN 2023

No	Jenis Pajak	Saldo akhir 2022 Audited (Rp)	Koreksi	Saldo akhir 2022 setelah koreksi (Rp)	Mutasi		Saldo akhir 2023 (Rp)
					Tambah	Kurang	
1	Pajak Hotel	-		-	15.347.429,00		15.347.429,00
2	Pajak Restoran	58.257.242,00		58.257.242,00	24.167.494,00	46.498.146,00	35.926.590,00
3	Pajak Hiburan	-		-	830.000,00		830.000,00
4	Pajak Reklame	117.699.977,00	(11.031.863,00)	106.668.114,00	50.571.023,00	60.352.737,00	96.886.400,00
5	Pajak Penerangan Jalan				1.936.184.742,00		1.936.184.742,00
6	Pajak Parkir	25.000,00		25.000,00	413.250,00	25.000,00	413.250,00
7	Pajak Air Bawah Tanah	23.495.801,00		23.495.801,00	13.786.597,00	10.959.249,00	26.323.149,00
8	Pajak MBLB	16.806.000,00		16.806.000,00	32.288.800,00	16.806.000,00	32.288.800,00
9	PBB-P2	21.454.735.844,00	(4.948.262,00)	21.449.787.582,00	4.240.746.835,00	2.212.740.886,00	23.477.793.531,00
	Jumlah	21.671.019.864,00	- 15.980.125,00	21.655.039.739,00	6.314.336.170,00	2.347.382.018,00	25.621.993.891,00

Koreksi piutang pajak tahun 2022 (audited) disebabkan :

- Pengurangan ketetapan Pajak reklame tahun 2022 sebesar Rp11.031.863,00 (sebelas juta tiga . puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah);
- Pembayar 8 (delapan) tower pada tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp4.948.262,00 (empat juta . sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) yang sudah diakui sebagai pendapatan tahun 2022, namun masih diakui sebagai piutang tahun 2022, dan tahun 2023 baru dilakukan koreksi sebagai pengurang piutang tahun 2022;

1.2 Penyisihan Piutang Pajak

(Rp12.135.735.722,42)

Saldo penyisihan piutang pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.135.735.722,42, dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1 Penyisihan Piutang - Pajak Hotel	76.737,15	-
2 Penyisihan Piutang - Pajak Restoran	5.772.585,47	3.649.128,73
3 Penyisihan Piutang - Pajak Hiburan	4.150,00	-
4 Penyisihan Piutang - Pajak Reklame	12.247.222,42	11.044.757,68
5 Penyisihan Piutang - Pajak Penerangan Jalan	9.680.923,71	-
6 Penyisihan Piutang - Pajak Parkir	2.066,25	125,00
7 Penyisihan Piutang - Pajak Air Bawah Tanah	5.854.094,79	4.054.630,39
8 Penyisihan Piutang - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB)	161.444,00	84.030,00
9 Penyisihan Piutang - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	12.101.936.498,63	10.356.900.731,57
	12.135.735.722,42	10.375.733.403,37



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Berikut adalah daftar piutang dan penyisihan piutang pajak daerah berdasarkan penggolongan piutang per 31 Desember 2023.

DAFTAR PIUTANG PAJAK DAERAH BERDASARKAN PENGGOLONGAN PIUTANG

No	Uraian	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	JUMLAH (Rp)
		(< 1 tahun)	(1-2 tahun)	(>2-5 tahun)	(>5 tahun)	
1	Pajak Hotel	15.347.429,00	0,00	0,00	0,00	15.347.429,00
2	Pajak Restoran	24.167.494,00	682.000,00	10.987.096,00	90.000,00	35.926.590,00
3	Pajak Hiburan	830.000,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00
4	Pajak Reklame	50.571.023,00	30.053.573,00	14.545.588,00	1.716.216,00	96.886.400,00
5	Pajak Penerangan Jalan	1.936.184.742,00	0,00	0,00	0,00	1.936.184.742,00
6	Pajak Parkir	413.250,00	0,00	0,00	0,00	413.250,00
7	Pajak Air Bawah Tanah	13.786.597,00	5.740.548,00	3.169.794,00	3.626.210,00	26.323.149,00
8	Pajak MBLB	32.288.800,00	0,00	0,00	0,00	32.288.800,00
9	PBB-P2	4.231.855.786,00	3.468.552.162,00	8.073.127.921,00	7.704.257.662,00	23.477.793.531,00
Jumlah		6.305.445.121,00	3.505.028.283,00	8.101.830.399,00	7.709.690.088,00	25.621.993.891,00

DAFTAR PENYISIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH BERDASARKAN PENGGOLONGAN PIUTANG

No	Uraian	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	JUMLAH (Rp)
		(< 1 tahun)	(1-2 tahun)	(>2-5 tahun)	(>5 tahun)	
		0,5%	10%	50%	100%	
1	Pajak Hotel	76.737,15	0,00	0,00	0,00	76.737,15
2	Pajak Restoran	120.837,47	68.200,00	5.493.548,00	90.000,00	5.772.585,47
3	Pajak Hiburan	4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
4	Pajak Reklame	252.855,12	3.005.357,30	7.272.794,00	1.716.216,00	12.247.222,42
5	Pajak Penerangan Jalan	9.680.923,71	0,00	0,00	0,00	9.680.923,71
6	Pajak Parkir	2.066,25	0,00	0,00	0,00	2.066,25
7	Pajak Air Bawah Tanah	68.932,99	574.054,80	1.584.897,00	3.626.210,00	5.854.094,79
8	Pajak MBLB	161.444,00	0,00	0,00	0,00	161.444,00
9	PBB-P2	21.159.278,93	346.820.673,20	4.033.097.658,50	7.700.858.888,00	12.101.936.498,63
Jumlah		31.527.225,61	350.468.285,30	4.047.448.897,50	7.706.291.314,00	12.135.735.722,42

2 Piutang Retribusi Netto **Rp108.748.347,00**

Piutang retribusi netto per 31 Desember 2023 sebesar Rp108.748.347,00 turun sebesar Rp869.040.449,30 atau 88,88% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp977.788.796,30 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1 Piutang Retribusi	449.626.877,00	757.880.647,00
2 Penyisihan Piutang Retribusi	(340.878.530,00)	219.908.149
Piutang Retribusi Netto	108.748.347,00	977.788.796,30

2. Piutang Retribusi **Rp449.626.877,00**

Piutang retribusi timbul akibat adanya Pendapatan Retribusi Daerah yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Piutang Retribusi terdiri dari Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dan Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp449.626.877,00, dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	188.729.060,00	22.797.497,00
2 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	66.936.667,00	529.995.000,00
3 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	193.961.150,00	205.088.150,00
	449.626.877,00	757.880.647,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

REKAPITULASI MUTASI PIUTANG RETRIBUSI TAHUN 2023

No	Jenis Pajak	Saldo akhir 2022 Audited	Koreksi	Saldo akhir 2022 setelah koreksi	Mutasi		Saldo akhir 2023
					Tambah	Kurang	
1	Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	22.797.497,00	-	22.797.497,00	180.201.150,00	14.269.587,00	188.729.060,00
2	Pemakaian Kekayaan Daerah	529.995.000,00	(494.735.000,00)	35.260.000,00	62.126.667,00	30.450.000,00	66.936.667,00
3	Persetujuan Bangunan Gedung	205.088.150,00	-	205.088.150,00		11.127.000,00	193.961.150,00
Jumlah		757.880.647,00	(494.735.000,00)	263.145.647,00	242.327.817,00	55.846.587,00	449.626.877,00

- Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan piutang retribusi jasa umum yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

***) Penambahan piutang 2023 terdiri dari :**

1 PT. DAYA MITRA	76 menara	293.010,00
2 PT. INTI BANGUN SEJAHTERA	1 menara	2.490.585,00
3 PT. KOMET INFRA NUSANTARA	1 menara	7.149.444,00
4 PT. XL Axiata	1 menara	2.490.585,00
5 PT. TOWER BERSAMA GROUP	56 menara	136.044.543,00
	4 menara	9.962.340,00
6 PT. HUTCHISON TRI INDONESIA	44 menara	9.962.340,00
		168.392.847,00

No	Uraian	Saldo akhir 2022	Mutasi		Saldo akhir 2023
			Tambah	Kurang	
1	Umur Piutang <1 bulan = Piutang Lancar, penyisihan sebesar 0,5%				-
2	Umur Piutang 1 - 3 bulan = Piutang Kurang Lancar, penyisihan sebesar 10%	11.808.303,00	168.392.847,00	11.808.303,00	168.392.847,00
3	Umur Piutang 3 - 12 bulan = Diragukan, penyisihan sebesar 50%				-
4	Umur Piutang > 12 bulan = Macet, penyisihan sebesar 100%	10.989.194,00	11.808.303,00	2.461.284,00	20.336.213,00
	Jumlah	22.797.497,00	180.201.150,00	14.269.587,00	188.729.060,00

- Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan piutang retribusi jasa usaha yang dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah yang berupa penyewaan aset kepada pihak lain yaitu BPD DIY, BRI, tempat fotocopi, kantin, kios dan Gedung Serbaguna Siyono, kios depan RSUD dan sewa rumah dinas.
- Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung merupakan piutang retribusi perijinan tertentu yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

No	Uraian	Saldo akhir 2022	Mutasi		Saldo akhir 2023
			Tambah	Kurang	
1	Pelimpahan dari DPU				
	2015	25.789.800,00	-	800.500,00	24.989.300,00
	2016	27.972.850,00	-	-	27.972.850,00
	2017	31.084.800,00	-	-	31.084.800,00
2	DPMPSTP				-
	2018	1.223.600,00	-	-	1.223.600,00
	2021	119.017.100,00	-	10.326.500,00	108.690.600,00
	Jumlah	205.088.150,00	-	11.127.000,00	193.961.150,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2. Penyisihan Piutang Retribusi (Rp340.878.530,00)

Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi, dapat dilakukan dengan ketentuan :

Kualitas Lancar : a) Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan atau b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

Kualitas Kurang Lancar : a) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dan/atau b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

Kualitas Diragukan : a) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

Kualitas Macet : a) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan atau b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

Saldo Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp340.878.530,00 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1 - Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	104.532.636,50	12.170.024,30
2 - Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	42.384.743,50	2.649.975,00
3 - Penyisihan Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	193.961.150,00	205.088.150,00
	340.878.530,00	219.908.149,30

Berikut adalah daftar piutang retribusi dan penyisihan piutang retribusi daerah berdasarkan penggolongan piutang per 31 Desember 2023.

DAFTAR PIUTANG RETRIBUSI DAERAH BERDASARKAN PENGGOLONGAN PIUTANG

No	Uraian	LANCAR (0-1 bulan)	KURANG LANCAR (>1-3 bulan)	DIRAGUKAN (>3-12 bulan)	MACET (>12 bulan)	JUMLAH (Rp)
1	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	168.392.847,00	20.336.213,00	188.729.060,00
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	382.000,00	0,00	48.343.667,00	18.211.000,00	66.936.667,00
3	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	193.961.150,00	193.961.150,00
	Jumlah	382.000,00	0,00	216.736.514,00	232.508.363,00	449.626.877,00

DAFTAR PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH BERDASARKAN PENGGOLONGAN PIUTANG

No	Uraian	LANCAR (0-1 bulan)	KURANG LANCAR (>1-3 bulan)	DIRAGUKAN (>3-12 bulan)	MACET (>12 bulan)	JUMLAH (Rp)
		0,5%	10%	50%	100%	
1	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	84.196.423,50	20.336.213,00	104.532.636,50
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.910,00	0,00	24.171.833,50	18.211.000,00	42.384.743,50
3	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	193.961.150,00	193.961.150,00
	Jumlah	1.910,00	0,00	108.368.257,00	232.508.363,00	340.878.530,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Netto

Rp18.260.849.550,58

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan netto per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.260.849.550,58 naik Rp1.988.001.543,35 atau 12,22% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.272.848.007,23 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.352.612.613,65	16.354.621.112,79
2 Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(91.763.063,07)	(81.773.105,56)
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto	18.260.849.550,58	16.272.848.007,23

3.1 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp18.352.612.613,65

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemda pada Bank BPD DIY, PD BPR BDG, PDAM Tirta Handayani dan BUKP se Kabupaten Gunungkidul yang akan diterima pada tahun berikutnya dan dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Piutang ini secara keseluruhan akan diterima di tahun 2023.

Mutasi Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Saldo akhir 2022 (Rp) Audited	Koreksi	Mutasi		Saldo akhir 2023 (Rp)
				Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	BPD DIY	12.448.509.036,00	0,00	11.251.547.690,00	12.448.509.036,00	11.251.547.690,00
2	PD. BPR BDG	3.740.819.843,00	0,00	4.290.071.547,00	3.740.819.843,00	4.290.071.547,00
4	PDAM TIRTA HANDAYANI	0,00	0,00	2.624.798.910,93	0,00	2.624.798.910,93
3	BUKP	165.292.233,79	(486.440,72)	186.194.465,72	164.805.793,07	186.194.465,72
	Jumlah	16.354.621.112,79	-486.440,72	18.352.612.613,65	16.354.134.672,07	18.352.612.613,65

Koreksi atas piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan perbedaan antara perhitungan yang diperoleh tahun 2022 dengan pendapatan atas piutang tersebut yang ditransfer ke Kasda.

3.2 Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Rp91.763.063,07)

Saldo penyisihan sebesar Rp91.763.063,07 adalah saldo penyisihan piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2023 kategori lancar dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1 BPD DIY	56.257.738,45	62.242.545,18
2 PD. BPD BDG	21.450.357,74	18.704.099,22
3 PDAM TIRTA HANDAYANI	13.123.994,55	0,00
4 BUKP	930.972,33	826.461,17
	91.763.063,07	81.773.105,56



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

4 Piutang Lain - lain PAD Yang Sah Netto **Rp1.144.230.160,69**

Piutang Lain-lain PAD Yang Sah netto per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.144.230.160,69 naik sebesar Rp279.957.331,35 atau 32,39% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp864.272.829,34 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	1.149.980.061,00	868.655.228,38
2 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(5.749.900,31)	(4.382.399,04)
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Netto	1.144.230.160,69	864.272.829,34

4.1 Piutang Lain - lain PAD Yang Sah **Rp1.149.980.061,00**

Piutang Lain-lain PAD Yang Sah pada Dinas Kesehatan adalah Piutang BLUD yaitu piutang atas klaim Jaminan Kesehatan Nasional yang belum dibayarkan sampai akhir pelaporan keuangan.

Mutasi Piutang BLUD selama tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Tahun Piutang/Uraian	Saldo akhir 2022 (Rp) Audited	Mutasi		Saldo akhir 2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Piutang lain-lain PAD yang sah	867.957.040,00	1.149.980.061,00	867.957.040,00	1.149.980.061,00
	- BPJS Kesehatan	154.605.042,00	95.946.162,00	154.605.042,00	95.946.162,00
	- BPJS Ketenagakerjaan	411.820,00	0,00	411.820,00	0,00
	- Jasa raharja	421.498,00	125.538.599,00	421.498,00	125.538.599,00
	- Klaim Covid-19	712.518.680,00	900.881.300,00	712.518.680,00	900.881.300,00
	- Temuan BPK atas Kerjasama Pendidikan Ketenagakerjaan	0,00	27.614.000,00	0,00	27.614.000,00
2	BKAD	698.188,38		698.188,38	0,00
	Jumlah	868.655.228,38	1.149.980.061,00	868.655.228,38	1.149.980.061,00

4.2 Penyisihan Piutang Lain - lain PAD Yang Sah **(Rp5.749.900,31)**

Saldo penyisihan sebesar Rp5.749.900,31 adalah saldo penyisihan piutang BLUD per 31 Desember 2023 kategori lancar dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Piutang Atas Klaim BPJS	479.730,81	773.025,21
Piutang Atas Klaim BPJS Ketenagakerjaan	-	41.182,00
Piutang Atas Klaim Jasa raharja	627.693,00	2.107,49
Piutang covid 19	4.504.406,50	3.562.593,40
Piutang Atas temuan BPK	138.070,00	-
Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	-	3.490,94
	5.749.900,31	4.382.399,04

5 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Nett **Rp183.974.171,68**

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya netto per 31 Desember 2023 sebesar Rp183.974.171,68 naik sebesar -Rp644.975.195,62 atau -77,81% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp828.949.367,29 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	184.898.665,00	833.114.942,00
2 Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	(924.493,32)	(4.165.574,71)
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Netto	183.974.171,68	828.949.367,29



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

5.1 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Rp184.898.665,00

Piutang ini merupakan transfer bagi hasil pajak daerah dari Pemerintah DIY yang pada saat akhir tahun 2023 belum terbayarkan, yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Air Permukaan (P-AP) serta Pajak Rokok yang dikelola oleh PPKD.

Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya selama tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Jenis Piutang	Saldo akhir 2022 (Rp) Audited	Mutasi		Saldo akhir 2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Pajak Kendaraan Bermotor	637.236.072,00	152.834.394,00	637.236.072,00	152.834.394,00
2	Bea Balik Nama Kend. Bermotor	195.594.300,00	24.760.380,00	195.594.300,00	24.760.380,00
3	Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor	-			0,00
4	Pajak Air Permukaan	284.570,00	7.303.891,00	284.570,00	7.303.891,00
5	Pajak rokok	-	0,00		0,00
	Jumlah	833.114.942,00	184.898.665,00	833.114.942,00	184.898.665,00

5.2 Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

(Rp924.493,32)

Saldo penyisihan sebesar Rp924.493,32 adalah saldo penyisihan piutang transfer pemerintah daerah lainnya per 31 Desember 2023 kategori lancar dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1. Penyisihan Piutang - Pajak Kendaraan Bermotor	764.171,96	3.186.180,36
2. Penyisihan Piutang - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	123.801,90	977.971,50
3. Penyisihan Piutang - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	0,00
4. Penyisihan Piutang - Pajak Air Permukaan	36.519,46	1.422,85
5. Penyisihan Piutang - Pajak rokok	0,00	0,00
	924.493,32	4.165.574,71

Selain dari Piutang yang telah diungkapkan di atas, terdapat juga saldo tagihan yang merupakan tindak lanjut dari laporan hasil pemeriksaan BPK dan APIP yang tidak ditetapkan dengan SKTJM.

Adapun secara rinci rincian temuan IRDA dan BPK dapat disajikan sebagai berikut.

Saldo Tagihan Yang Merupakan Tindak Lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP yang tidak ditetapkan dengan SKTJM

No	Uraian	Saldo akhir 2022 Audited (Rp)	Mutasi		Saldo akhir 2023 (Rp)	Status TL dan Bukti Dukung
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)		
I	TEMUAN IRDA	29.256.300,25	326.825.640,00	348.042.312,25	8.039.628,00	
1	DISDIKPORA					
	Kekurangan volume pekerjaan fisik	1.818.280,00	0,00	1.818.280,00	-	STS no 201410 tgl 27 Juni 2023 sejumlah Rp. 1.818.280,00
	Kelebihan pembayaran karena kekurangan volume pekerjaan fisik	0,25	0,00	0,25	-	Koreksi pembulatan
2	DINSOSNAKERTRANS					
	Kelebihan pembayaran honor	9.747.600,00	0,00	6.000.000,00	3.747.600,00	STS tgl 16 Mei 2014 sejumlah Rp. 6.000.000,00
3	DINAS KELAUTAN DAN					
	Kekurangan penyeteroran retribusi pelelangan ikan	17.607.420,00	0,00	17.607.420,00	-	SK Bupati Nomor 413/KPTS/2021 tentang Penghapusan Piutang Daerah Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2021

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

4	PUSKESMAS PATUK 2					
	Kelebihan pembayaran tunjangan anak dan tunjangan beras	83.000,00	0,00	83.000,00	-	STS no. 027203 tgl 11 Desember 2021 sejumlah Rp. 83.000,00
5	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA					
	Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia tidak sesuai realisasi	0,00	6.475.000,00	6.475.000,00	-	STS no 004/STS-GU/2.17.01.0000/202 tgl 29 Nov 2023 sejumlah 6.475.000,00
	Pertanggungjawaban kegiatan tidak sesuai realisasi	0,00	3.336.590,00	3.336.590,00	-	STS no 051070 tgl 26 Januari 2023 sejumlah Rp. 3.336.590,00
	Keterlambatan penyelesaian kontrak Pengadaan Material Padat Karya	0,00	5.555.006,00	5.555.006,00	-	STS no 057753 tgl 3 Maret 2023 sejumlah Rp. 5.555.006,00
	Pembayaran Upah Tidak Sesuai Realisasi	0,00	5.145.000,00	5.145.000,00	-	STS no 057505 tgl 3 Maret 2023 sejumlah Rp. 5.145.000,00
6	DINAS PERHUBUNGAN					
	Pertanggungjawaban belanja tidak sesuai dengan ketentuan seluruhnya	0,00	2.546.000,00	2.546.000,00	-	STS no 043382 tgl 6 Januari 2023 sejumlah Rp. 2.546.000,00
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
	Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00	-	STS no 310266 tgl 16 Januari 2023 sejumlah Rp. 1.830.000,00
8	DINAS KESEHATAN					
	Pertanggungjawaban Uang Harian Diklat Tidak Sesuai dengan Ketentuan	0,00	4.378.000,00	4.378.000,00	-	STS no. 332496 tgl 20 Februari 2023 sejumlah Rp. 4.378.000,00
	Kelebihan pembayaran tunjangan anak dan tunjangan beras	0,00	1.267.406,00	1.267.406,00	-	STS tgl 14 Februari 2023 Rp 1.267.406,00
	Kelebihan pembayaran pengadaan barang dan jasa	0,00	1.233.050,00	1.233.050,00	-	STS no 117842 tgl 24 Februari 2023 sejumlah Rp. 1.233.050,00
	Pertanggungjawaban kegiatan tidak sesuai	0,00	47.817.922,00	47.817.922,00	-	STS no 054320 tgl 29 Des 2023 sejumlah Rp. 47.817.922,00
9	DINAS KOMUNIKASI					0
	Belanja tidak sesuai realisasi	0,00	3.093.200,00	3.093.200,00	-	STS tgl 10 Mei 2023 sejumlah Rp. 3.093.200,00
10	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	0,00	0,00	-	-	0
	Kelebihan pembayaran material dan kekurangan kualitas pembuatan patok batas tanah kas kalurahan	0,00	105.509.746,00	105.509.746,00	-	STS no 061306 tgl 26 Mei 2023 Sejumlah Rp. 105.509.746,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
	Penghapusan BMD tidak sesuai ketentuan	0,00	79.209.792,00	79.209.792,00	-	STS no 204240 tgl 30 Nov 2023 Sejumlah Rp. 79.209.792,00
12	KAPANEWON WONOSARI					
	Pertanggungjawaban belanja tidak sesuai dengan ketentuan	0,00	16.535.000,00	16.535.000,00	-	STS no 043300 tgl 4 Oktober 2023 Sejumlah Rp. 880.000,00 dan STS no. 042912 tgl 4 Oktober 2023 sejumlah Rp. 15.655.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

13	KAPANEWON SEMANU					
	Belanja tidak sesuai ketentuan	0,00	610.000,00	610.000,00	-	STS no 01/STS/7.01.06/2023 tgl 26 Sept 2023 sejumlah Rp. 610.000,00
	Belanja tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah	0,00	2.696.477,00	2.696.477,00	-	STS no 01/STS/7.01.06/2023 tgl 26 Sept 2023 sejumlah Rp. 2.696.477,00
	Belanja tidak sesuai realisasi	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	-	STS no 01/STS/7.01.06/2023 tgl 26 Sept 2023 sejumlah Rp. 2.750.000,00
14	SMP N 2 GEDANGSARI					
	Kemahalan harga atas belanja barang aset tetap	0,00	4.456.012,00	4.456.012,00	-	STS tgl 8 Des 2023 sejumlah Rp. 4.456.012,00
15	UPT PUSKESMAS					
	Belanja Pengadaan Barang tidak sesuai realisasi	0,00	2.597.973,00	2.597.973,00	-	STS no 070378 tgl 10 Nov 2023 sejumlah Rp. 2.597.973,00
16	SMP NEGERI 1 NGLIPAR					
	Kelebihan Pembayaran Pengadaan barang dan jasa	0,00	1.261.255,00	1.261.255,00	-	STS tgl 11 Januari 2023 sejumlah Rp. 1.261.255,00
	Kelebihan Tunjangan Anak dan Beras	0,00	527.000,00	527.000,00	-	STS tgl 11 Januari 2023 sejumlah Rp. 527.000,00
17	SMP 2 NGLIPAR					
	Pengeluaran belanja tidak sesuai dengan ketentuan	0,00	5.021.812,00	5.021.812,00	-	STS no 085195 tgl 19 Des 2023 sejumlah Rp. 5.021.812,00
18	SMP N 1 PANGGANG					
	Kemahalan belanja	0,00	961.263,00	961.263,00	-	STS tgl 8 Des 2023 sejumlah Rp. 961.263,00
19	SMP N 1 PANGGANG					
	Pertanggungjawaban belanja sewa kendaraan pada kegiatan lomba mata pelajaran tidak sesuai dengan realisasi	0,00	1.344.000,00	1.344.000,00	-	STS no 083997 tgl 8 Des 2023 sejumlah Rp. 1.344.000,00
20	SMP N 1 PANGGANG					
	Belanja alat tulis kantor melebihi Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum (SSH SBU) Tahun 2023	0,00	975.000,00	975.000,00	-	STS no 005207 tgl 8 Des 2023 sejumlah Rp. 975.000,00
21	SMP NEGERI 2 PATUK					
	Pertanggungjawaban belanja tidak sesuai realisasi	0,00	4.292.028,00	-	4.292.028,00	-
22	UPT PUSKESMAS					
	Belanja makan minum dan uang transport tidak sesuai realisasi	0,00	2.488.182,00	2.488.182,00	-	STS no .068856 tgl 10 Nov 2023 sejumlah Rp. 2.488.182,00
23	UPT PUSKESMAS					
	Pertanggungjawaban belanja tidak sesuai ketentuan	0,00	6.522.926,00	6.522.926,00	-	STS no 205196 tgl 1 Desember 2023 sejumlah Rp. 6.522.926,00
24	UPT PUSKESMAS TEPUS					
	Pertanggungjawaban belanja tidak sesuai ketentuan	0,00	5.220.000,00	5.220.000,00	-	STS no 160663 tgl 21 Nov 2023 sejumlah Rp. 5.220.000,00
	UPT PUSKESMAS					
	Belanja honorarium tidak sesuai dengan Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	-	STS no 900.1.4.4/1330 tgl 2 Des 2023 sejumlah Rp. 1.170.000,00
	JUMLAH TEMUAN IRDA	29.256.300,25	326.825.640,00	348.042.312,25	8.039.628,00	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

II	Temuan BPK-RI	1.638.791.056,00	165.353.523,00	107.419.108,00	1.696.725.471,00	
1	Belanja DPRD dan Sek. DPRD sebesar Rp6.651.383.000,- tidak sesuai ketentuannya	662.768.400,00	0,00	-	662.768.400,00	Usul Status 4 (Surat Bupati no. 700/2384 tgl 10 Mei 2022 perihal Pengajuan Status 4 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan)
2	PPh 21 anggota DPRD belum dipungut dan disetor	64.175.656,00	0,00	-	64.175.656,00	Usul Status 4 (Surat Bupati no. 700/2384 tgl 10 Mei 2022 perihal Pengajuan Status 4 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan)
3	Anggaran & realisasi belanja DPRD dan Sek. DPRD sebesar Rp1.874.921.250,- tidak sesuai ketentuan	891.185.000,00	0,00	-	891.185.000,00	Usul Status 4 (Surat Bupati no. 700/2384 tgl 10 Mei 2022 perihal Pengajuan Status 4 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan)
4	Kerjasama program asuransi jiwa bagi PNS & perangkat desa sebesar Rp. 1.708.281.000 tidak sesuai ketentuan	20.662.000,00	0,00	20.662.000,00	-	Surat BPK-RI No. 252/S/XVIII.YOG/10/2023 tgl 9 Okt 2023 perihal Usulan Status 4 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (Lampiran no. 2)
5	Kekurangan pungut PBB-P2, Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara dan Retribusi PBG senilai Rp123.125.523,00	0,00	123.125.523,00	44.529.108,00	78.596.415,00	Pembayaran PBB BMT (Bukti dukung dari aplikasi SISMOP)
6	Kelebihan pembayaran Belanja Subsidi Sektor Transportasi sebesar Rp34.884.000,00	0,00	34.884.000,00	34.884.000,00	-	STS no 063430 tgl 9 Mei 2023 sejumlah 34.884.000,00
7	Menguji kebenaran penerima subsidi sebesar Rp192.780.000,00 merupakan penerima yang berhak sesuai ketentuan dan apabila hasilnya terdapat bukti ketidakabsahan maka dilakukan penyetoran kembali ke Kas Daerah	0,00	7.344.000,00	7.344.000,00	-	STS no 063430 tgl 9 Mei 2023 sejumlah 34.884.000,00
	JUMLAH BPK RI	1.638.791.056,00	165.353.523,00	107.419.108,00	1.696.725.471,00	
	JUMLAH TOTAL	1.668.047.356,25	492.179.163,00	455.461.420,25	1.704.765.099,00	

Disamping piutang yang telah diungkapkan diatas dan saldo yang merupakan tindak lanjut dari laporan hasil pemeriksaan BPK dan APIP yang tidak ditetapkan dengan SKTJM, Kabupaten Gunungkidul tahun 2023 menghapus piutang bersyarat sebesar Rp32.334.737,00 berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 319/KPTS/2023 tentang Penghapusan Bersyarat Piutang Daerah Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023 tanggal 19 Desember 2023. Sampai dengan tahun 2023 piutang yang dihapuskan secara bersyarat sebesar Rp6.221.608.046,00.

5.3.1.4 BEBAN DIBAYAR DIMUKA **Rp10.000.000,00**

Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kabupaten Gunungkidul per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp10.000.000,00 berupa pembayaran sewa gudang Sekretariat DPRD untuk tahun 2024.

1) Beban dibayar dimuka

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
10.000.000,00	70.000.000,00
10.000.000,00	70.000.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

5.3.1.5 BAGIAN LANCAR TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN **Rp0,00**

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00

5.3.1.6 BAGIAN LANCAR TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH ... **Rp0,00**

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00

5.3.1.5 PERSEDIAAN **Rp33.252.947.204,43**

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

Saldo persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp33.252.947.204,43 turun sebesar Rp338.644.870,22 atau 1,01% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp33.591.592.074,65 dengan rincian sebagai berikut.

Daftar Mutasi Persediaan Tahun 2023

No	SKPD	Saldo akhir 2022 (Rp) Audited	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo akhir 2023 (Rp)
1	DISDIKPORA	547.010.664,00	12.504.939.504,00	12.605.596.856,00	446.353.312,00
2	Dinas Kesehatan	27.395.316.325,60	88.089.064.386,41	89.675.089.718,36	25.809.290.993,65
3	DPUPRKP	263.310.948,00	3.243.556.250,00	3.261.644.350,00	245.222.848,00
4	Satpol PP	6.694.200,00	4.107.888.470,00	4.110.539.670,00	4.043.000,00
5	BPBD	450.068.250,15	692.643.810,00	617.263.740,15	525.448.320,00
6	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak	13.235.300,00	313.688.000,00	286.054.300,00	40.869.000,00
7	DPMKP2KB	140.022.891,00	1.980.927.085,00	1.976.151.150,00	144.798.826,00
8	DISPERTARUNG	2.026.000,00	267.634.350,00	267.549.180,00	2.111.170,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	61.492.882,41	627.460.325,00	555.655.012,24	133.298.195,17
10	DISDUKCAPIL	1.422.424.670,00	1.197.981.983,00	1.319.063.710,00	1.301.342.943,00
11	Dinas Perhubungan	240.055.551,89	344.066.510,00	424.408.261,16	159.713.800,73
12	DISKOMINFO	315.963.800,00	51.845.500,00	235.354.150,00	132.455.150,00
13	DISPERINKOP UKM DAN NAKER	9.435.110,00	5.318.973.829,00	5.317.664.570,00	10.744.369,00
14	DPMPTSP	4.193.000,00	163.580.500,00	165.653.500,00	2.120.000,00
15	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.497.500,00	1.087.283.352,50	1.088.800.852,50	980.000,00
16	Dinas Kebudayaan	4.741.000,00	2.219.204.100,00	2.220.595.100,00	3.350.000,00
17	DPK	1.253.000,00	183.234.960,00	183.667.960,00	820.000,00
18	DKP	160.076.390,00	976.794.355,00	1.056.525.745,00	80.345.000,00
19	Dinas Pariwisata	1.290.766.821,71	570.399.443,56	611.032.219,22	1.250.134.046,05
20	DPKH	411.104.750,00	5.331.940.024,00	3.731.095.848,00	2.011.948.926,00
21	DPP	555.880.554,00	500.016.976,00	453.626.534,00	602.270.996,00
22	DINAS PERDAGANGAN	102.255.389,12	534.239.482,00	548.905.082,15	87.589.788,97
23	Sekretariat Daerah	16.739.400,00	1.318.290.410,00	1.314.091.410,00	20.938.400,00
24	Sekretariat DPRD	34.434.000,00	392.439.500,00	426.777.500,00	96.000,00
25	BAPPEDA	1.869.000,00	203.695.300,00	204.238.300,00	1.326.000,00
26	BKAD	121.349.126,77	909.294.500,00	807.985.066,91	222.658.559,86
27	BKPPD	1.120.000,00	190.996.510,00	191.063.000,00	1.053.510,00
28	Inspektorat Daerah	7.330.300,00	145.066.000,00	149.332.800,00	3.063.500,00
29	Kapanewon Wonosari	412.000,00	139.714.600,00	139.888.600,00	238.000,00
30	Kapanewon Paliyan	355.000,00	117.160.000,00	117.039.000,00	476.000,00
31	Kapanewon Panggang	447.000,00	105.253.450,00	105.053.450,00	647.000,00
32	Kapanewon Tepus	194.750,00	112.124.100,00	112.176.850,00	142.000,00
33	Kapanewon Rongkop	300.000,00	115.817.500,00	115.740.500,00	377.000,00
34	Kapanewon Semanu	226.000,00	125.040.705,00	124.991.705,00	275.000,00
35	Kapanewon Ponjong	334.000,00	111.578.000,00	111.461.000,00	451.000,00
36	Kapanewon Karangmojo	315.500,00	129.687.000,00	129.647.500,00	355.000,00
37	Kapanewon Playen	1.002.000,00	125.959.400,00	126.342.900,00	618.500,00
38	Kapanewon Nglipar	168.000,00	122.039.000,00	122.012.000,00	195.000,00
39	Kapanewon Ngawen	385.000,00	117.845.000,00	117.799.500,00	430.500,00
40	Kapanewon Semin	270.000,00	112.347.500,00	112.486.500,00	131.000,00
41	Kapanewon Patuk	420.000,00	130.594.500,00	130.323.500,00	691.000,00
42	Kapanewon Saptosari	780.000,00	105.326.500,00	105.703.500,00	403.000,00
43	Kapanewon Gedangsari	270.000,00	127.485.000,00	127.535.000,00	220.000,00
44	Kapanewon GiriSubo	169.000,00	113.720.000,00	113.736.000,00	153.000,00
45	Kapanewon Tanjungsari	1.014.000,00	192.951.740,00	192.539.690,00	1.426.050,00
46	Kapanewon Purwosari	371.000,00	115.243.500,00	115.404.500,00	210.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

47	Badan Kesbangpol	1.492.000,00	148.677.400,00	149.047.900,00	1.121.500,00
	Jumlah	33.591.592.074,65	135.835.710.310,47	136.174.355.180,69	33.252.947.204,43

Sesuai dengan klasifikasi persediaan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, telah dilakukan mapping klasifikasi persediaan menjadi:

Rekapitulasi Persediaan per Jenis Barang Tahun 2023

No.	Uraian	Saldo akhir 2022 (Rp) Audited	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo akhir 2023 (Rp)
1.	BARANG PAKAI HABIS	33.591.592.074,65	135.831.215.310,47	136.169.860.180,69	33.252.947.204,43
1.1	BAHAN	2.098.662.698,80	14.676.278.752,50	15.306.783.725,42	1.468.157.725,88
1.1.1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	4.771.959.119,00	4.771.959.119,00	0,00
1.1.2	Bahan Kimia	1.896.002.473,80	6.203.166.824,00	6.965.456.288,92	1.133.713.008,88
1.1.3	Bahan Peledak	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Bahan Baku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	Bahan Kimia Nuklir	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7	Barang Dalam Proses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8	Bahan/Bibit Tanaman	0,00	289.410.000,00	288.535.000,00	875.000,00
1.1.9	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	3.715.000,00	65.340.331,00	64.770.331,00	4.285.000,00
1.1.10	Isi Tabung Gas Oksigen	11.737.474,00	384.476.464,00	380.209.983,00	16.003.955,00
1.1.11	Bahan/ Bibit Ternak/Bibit Ikan	178.646.751,00	686.266.100,00	646.447.600,00	218.465.251,00
1.1.12	Bahan Lainnya	8.561.000,00	2.275.659.914,50	2.189.405.403,50	94.815.511,00
1.2	SUKU CADANG	309.365.148,00	235.716.615,00	225.598.895,00	319.482.868,00
1.2.1	Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Suku Cadang Alat Besar	262.760.448,00	0,00	18.494.100,00	244.266.348,00
1.2.3	Suku Cadang Alat Kedokteran	1.650.000,00	45.893.800,00	36.355.000,00	11.188.800,00
1.2.4	Suku Cadang Alat Laboratorium	12.663.000,00	52.132.385,00	62.795.385,00	2.000.000,00
1.2.5	Suku Cadang Alat Pemancar	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	26.499.930,00	26.499.930,00	0,00
1.2.8	Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9	Suku Cadang Alat Persenjataan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Bantuan Sosial Barang individu/ke luarga/masyarakat	32.291.700,00	111.190.500,00	81.454.480,00	62.027.720,00
1.3	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	7.186.553.364,53	35.581.096.105,07	35.664.740.044,40	7.102.909.425,20
1.3.1	Alat Tulis Kantor	2.801.189.550,28	9.235.615.709,06	9.323.673.583,97	2.713.131.675,37
1.3.2	Kertas Dan Kover	612.143.283,00	4.162.342.742,00	4.367.761.659,00	406.724.366,00
1.3.3	Bahan Cetak	89.055.000,00	61.150.000,00	65.660.000,00	84.545.000,00
1.3.4	Benda Pos	12.392.000,00	350.396.542,00	354.051.542,00	8.737.000,00
1.3.5	Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Bahan Komputer	1.190.472.081,00	3.032.791.880,00	3.186.703.490,00	1.036.560.471,00
1.3.7	Perabot Kantor	1.824.328.743,53	3.984.595.537,01	4.283.986.097,37	1.524.938.183,17
1.3.8	Alat Listrik	590.720.510,74	1.989.207.535,00	2.233.836.746,06	346.091.299,68
1.3.9	Perlengkapan Dinas	2.250.000,00	8.684.710.841,00	8.686.960.841,00	0,00
1.3.10	Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11	Perlengkapan Pendukung Olah Raga	0,00	230.585.629,00	229.851.397,00	734.232,00
1.3.12	Suvenir/Cinder Mata	9.618.000,00	1.210.214.332,00	1.216.007.332,00	3.825.000,00
1.3.13	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	54.384.195,98	2.639.485.358,00	1.716.247.356,00	977.622.197,98
1.4	OBAT- OBATAN	23.087.537.924,06	69.070.983.352,90	68.979.517.916,11	23.179.003.360,85
1.4.1	Obat	23.087.537.924,06	69.070.983.352,90	68.979.517.916,11	23.179.003.360,85
1.5	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN	30.624.000,00	15.938.128.485,00	15.583.309.705,00	385.442.780,00
1.5.1	Dijual/Diiseraahkan Kepada Masyarakat	30.624.000,00	15.938.128.485,00	15.583.309.705,00	385.442.780,00
1.6	PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN	119.400.000,00	17.350.000,00	17.350.000,00	119.400.000,00
1.6.1	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	119.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	119.400.000,00
1.6.2	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya	0,00	16.150.000,00	16.150.000,00	0,00
1.7	NATURA DAN PAKAN	759.448.939,26	311.662.000,00	392.559.894,76	678.551.044,50
1.7.1	Natura	725.743.299,26	169.997.000,00	230.662.254,76	665.078.044,50
1.7.2	Pakan	33.705.640,00	141.665.000,00	161.897.640,00	13.473.000,00
1.7.3	Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

1.8	PERSEDIAAN PENELITIAN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.1	Persediaan Penelitian Biologi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.2	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3	Persediaan Penelitian Teknologi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.4	Persediaan Penelitian Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	PERSEDIAAN DALAM PROSES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1	Persediaan Dalam Proses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2	Persediaan Dalam Proses Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BARANG TAK PAKAI HABIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	KOMPONEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Komponen Jembatan Baja	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Komponen Jembatan Pratekan	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Komponen Peralatan	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Komponen Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Attchment	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	Komponen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	PIPA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Pipa Air Besi Tuang	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Pipa Asbes Semen (ACP)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Pipa Baja	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Pipa Beton Pratekan	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Pipa Fiber Glass	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Pipa Plastik PVC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Pipa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BARANG BEKAS DIPAKAI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	KOMPONEN BEKAS DAN PIPA BEKAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Komponen Bekas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Pipa Bekas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	0,00	0,00	0,00	0,00

Di dalam saldo Alat Tulis Kantor terdapat sisa karcis tanda masuk obyek wisata pada Dinas Pariwisata sebesar Rp1.145.030.592,71 yang sudah tidak terpakai setelah tanggal 31 desember 2023 karena adanya Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024, maka akan dilakukan penghapusan pada tahun 2024.

5.3.2 INVESTASI JANGKA PANJANG **Rp379.775.308.326,84**

Investasi Jangka panjang Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen, dengan penjelasan sebagai berikut.

5.3.2.1 INVESTASI NON PERMANEN **Rp0,00**

Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Gunungkidul per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00

5.3.2.2 INVESTASI PERMANEN **Rp379.775.308.326,84**

Investasi Permanen adalah investasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, yang dimaksudkan untuk dimiliki seterusnya, dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul dan/atau Peraturan Bupati Gunungkidul.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD

Rp379.775.308.326,84

Investasi Permanen adalah investasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, yang dimaksudkan untuk dimiliki seterusnya, dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul dan/atau Peraturan Bupati Gunungkidul.

Metode ekuitas digunakan untuk mencatat pengakuan penyertaan modal Pemda pada PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul dan PD. BPR Bank Daerah Gunungkidul (BDG). Sedangkan metode biaya masih digunakan untuk menilai investasi atas penyertaan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Bank BPD DIY dan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), karena prosentase kepemilikan Pemerintah Daerah relatif kecil. Adapun rinciannya sebagai berikut.

Nama BUMD	Jumlah Modal yang disertakan sampai dengan awal tahun 2023 (Rp)	Koreksi (+)(-) ekuitas	Penyertaan Modal 2023 (Rp)	Jumlah modal yang disertakan sampai dengan akhir tahun 2023 (Rp)	Prosentase Kepemilikan Saham Pemda
BPD DIY	134.967.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	139.967.000.000,00	6,60%
PD. BPR Bank Daerah Gunungkidul	132.708.239.699,94	2.359.101.006,49	5.000.000.000,00	140.067.340.706,43	99,99%
PDAM TIRTA HANDAYANI	93.515.947.101,17	1.215.677.224,24	5.000.000.000,00	99.731.624.325,41	100%
BUKP se-Kabupaten Gunungkidul	9.343.295,00	0,00	0,00	9.343.295,00	0,43%
Jumlah	361.200.530.096,11	3.574.778.230,73	15.000.000.000,00	379.775.308.326,84	

Koreksi penambahan dan pengurangan ekuitas adalah perubahan ekuitas BUMD selama tahun berjalan berdasarkan metode penilaian investasi yang diberlakukan. Penyertaan modal tahun 2023 sebesar Rp15.000.000.000,00 merupakan penyertaan modal dalam bentuk uang masing-masing sebesar Rp5.000.000.000,00 ke BPD DIY, PT. BPR BDG, dan PDAM Tirta Handayani.

Penjelasan terkait penyertaan modal dengan metode ekuitas adalah sebagai berikut:

- a. Penyertaan Modal pada PD. BPR Bank Daerah Gunungkidul sebesar Rp140.067.340.706,43, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo Awal per 31 Desember 2022 Audited	132.708.239.699,94
Koreksi penambahan dan pengurangan ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2023 oleh KAP Hadiono dan Rekan dengan opini wajar tanpa pengecualian.	2.359.101.006,49
Penambahan 2023	
Cadangan Umum	680.154.685,61
Cadangan Tujuan	680.154.685,61
Kenaikan perhitungan lembar saham	152.173,46
Laba bersih 2023	7.800.130.085,21
Pengurangan 2023	
Pembagian Laba 2022	- 6.801.490.623,40
Tambahan Modal 2023	5.000.000.000,00
Saldo akhir per 31 Desember 2023 Audited	<u>140.067.340.706,43</u>



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- b. Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Handayani sebesar Rp99.731.624.325,41, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo Awal per 31 Desember 2022 Audited		93.515.947.101,17
Koreksi penambahan dan pengurangan ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2022 oleh KAP Drs. Soeroso Donosapoetro dengan opini wajar tanpa pengecualian.		1.215.677.224,24
Penambahan 2023		
Akumulasi Laba (Rugi)	- 3.728.180.858,00	
Laba bersih 2023	4.772.361.656,24	
Pengurangan 2023		
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja	171.496.426,00	
Tambahan Modal 2023		5.000.000.000,00
Saldo akhir per 31 Desember 2023 Audited		99.731.624.325,41

2 Investasi Permanen Lainnya

Rp0,00

Investasi Permanen Lainnya Pemerintah Kabupaten Gunungkidul per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

5.3.3 ASET TETAP Rp 2.659.313.198.657,15

Jumlah di bawah ini merupakan nilai buku aset tetap per 31 Desember 2023 dengan rincian saldo untuk setiap jenis aset tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 :

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Tanah	671.154.626.363,00	665.588.681.028,00
Peralatan dan Mesin	872.387.805.319,56	820.522.778.515,77
Gedung dan Bangunan	1.344.658.133.138,91	1.278.057.874.047,65
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.476.558.644.314,03	1.421.641.563.712,03
Aset Tetap Lainnya	143.486.353.059,01	127.616.801.314,52
Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.466.767.449,00	19.663.967.169,00
Akumulasi Penyusutan	(1.856.399.130.986,36)	(1.667.219.178.788,16)
Jumlah Aset Tetap	2.659.313.198.657,15	2.665.872.486.998,81

Nilai aset tetap disajikan sebesar biaya perolehannya dikurangi dengan akumulasi penyusutan berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul No. 33 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Saldo aset tetap tahun 2022 Audited sebesar Rp4.333.091.665.786,97 kemudian pada tahun 2023 terdapat penambahan Rp230.536.386.686,14 dan pengurangan sebesar Rp47.915.722.829,60 sehingga saldo akhir aset tetap per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp4.515.712.329.643,51 dengan akumulasi penyusutan sebesar (Rp1.856.399.130.986,36) dan nilai buku aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.659.313.198.657,15.

Daftar Mutasi Aset Tetap TA 2023 berdasarkan Klasifikasi

Aset Tetap	Saldo Audited 2022 (Rp)	Mutasi Tambah 2023 (Rp)	Mutasi Kurang 2023 (Rp)	Saldo Akhir 2023 (Rp)
Tanah	665.588.681.028,00	5.716.245.335,00	150.300.000,00	671.154.626.363,00
Peralatan dan Mesin	820.522.778.515,77	54.243.353.119,00	2.378.326.315,21	872.387.805.319,56
Gedung dan Bangunan	1.278.057.874.047,65	70.512.258.599,80	3.911.999.508,54	1.344.658.133.138,91
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.421.641.563.712,03	57.131.705.258,80	2.214.624.656,80	1.476.558.644.314,03
Aset Tetap Lainnya	127.616.801.314,52	16.119.119.420,54	249.567.676,05	143.486.353.059,01
Konstruksi Dalam Pengerjaan	19.663.967.169,00	26.813.704.953,00	39.010.904.673,00	7.466.767.449,00
Sub Jumlah	4.333.091.665.786,97	230.536.386.686,14	47.915.722.829,60	4.515.712.329.643,51
Akumulasi Penyusutan	(1.667.219.178.788,16)			(1.856.399.130.986,36)
Jumlah	2.665.872.486.998,81			2.659.313.198.657,15

Daftar Mutasi Aset Tetap TA 2023 berdasarkan Klasifikasi Obyek

Aset Tetap	Saldo Audited 2022 (Rp)	Mutasi Tambah 2023 (Rp)	Mutasi Kurang 2023 (Rp)	Saldo Akhir 2023 (Rp)
TANAH	665.588.681.028,00	5.716.245.335,00	150.300.000,00	671.154.626.363,00
Tanah	665.588.681.028,00	5.716.245.335,00	150.300.000,00	671.154.626.363,00
PERALATAN & MESIN	820.522.778.515,77	54.243.353.119,00	2.378.326.315,21	872.387.805.319,56
Alat Besar	25.112.402.313,51	1.870.105.677,00	357.402.180,00	26.625.105.810,51
Alat Angkutan	110.282.129.193,57	7.680.893.446,46	1.864.099.135,21	116.098.923.504,82
Alat Bengkel dan Alat Ukur	17.976.540.108,54	683.630.243,00	0,00	18.660.170.351,54
Alat Pertanian	4.504.464.342,15	273.542.040,00	0,00	4.778.006.382,15



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Aset Tetap	Saldo Audited 2022 (Rp)	Mutasi Tambah 2023 (Rp)	Mutasi Kurang 2023 (Rp)	Saldo Akhir 2023 (Rp)
Alat Kantor & Rumah Tangga	199.897.243.747,73	12.186.914.302,54	64.826.500,00	212.019.331.550,27
Alat Studio, Komunikasi, & Pemancar	31.804.188.165,72	1.583.821.305,00	8.224.000,00	33.379.785.470,72
Alat Kedokteran & Kesehatan	165.688.415.136,69	14.646.141.963,00	7.200.000,00	180.327.357.099,69
Alat Laboratorium	62.961.824.890,71	4.907.440.432,00	0,00	67.869.265.322,71
Alat Persenjataan	1.175.565.053,92	9.000.000,00	0,00	1.184.565.053,92
Komputer	186.085.646.531,73	8.759.557.245,00	76.574.500,00	194.768.629.276,73
Alat Eksplorasi	4.773.000,00	0,00	0,00	4.773.000,00
Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	66.330.000,00	0,00	0,00	66.330.000,00
Alat Keselamatan Kerja	331.328.700,84	56.314.400,00	0,00	387.643.100,84
Peralatan Proses/Produksi	104.065.874,00	0,00	0,00	104.065.874,00
Rambu-Rambu	7.361.589.795,08	1.031.928.790,00	0,00	8.393.518.585,08
Peralatan Olahraga	7.166.271.661,58	554.063.275,00	0,00	7.720.334.936,58
GEDUNG DAN BANGUNAN	1.278.057.874.047,65	70.512.258.599,80	3.911.999.508,54	1.344.658.133.138,91
Bangunan Gedung	1.208.465.459.118,70	68.400.673.749,90	3.705.166.308,54	1.273.160.966.560,06
Monumen	5.711.540.781,58	792.607.064,00	0,00	6.504.147.845,58
Bangunan Menara	0,00	10.822.500,00	0,00	10.822.500,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	63.880.874.147,37	1.308.155.285,90	206.833.200,00	64.982.196.233,27
JALAN, JARINGAN, & IRIGASI	1.421.641.563.712,03	57.131.705.258,80	2.214.624.656,80	1.476.558.644.314,03
Jalan dan Jembatan	1.094.361.151.019,77	42.382.447.186,80	1.410.087.256,80	1.135.333.510.949,77
Bangunan Air	182.817.710.887,28	6.801.186.230,00	248.815.000,00	189.370.082.117,28
Instalasi	67.707.223.804,44	6.433.903.123,00	34.860.000,00	74.106.266.927,44
Jaringan	76.755.478.000,54	1.514.168.719,00	520.862.400,00	77.748.784.319,54
ASET TETAP LAINNYA	127.616.801.314,52	16.119.119.420,54	249.567.676,05	143.486.353.059,01
Bahan Perpustakaan	19.886.794.099,12	2.034.030.901,00	0,00	21.920.825.000,12
Barang bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	14.870.185.445,69	434.616.194,00	0,00	15.304.801.639,69
Hewan	192.312.500,00	0,00	0,00	192.312.500,00
Tanaman	1.486.540.656,25	0,00	0,00	1.486.540.656,25
Aset Tetap Dalam Renovasi	91.180.968.613,46	13.650.472.325,54	249.567.676,05	104.581.873.262,95
KONS. DLM Pengerjaan	19.663.967.169,00	26.813.704.953,00	39.010.904.673,00	7.466.767.449,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	19.663.967.169,00	26.813.704.953,00	39.010.904.673,00	7.466.767.449,00
Jumlah	4.333.091.665.786,97	230.536.386.686,14	47.915.722.829,60	4.515.712.329.643,51

Rekapitulasi atas rincian mutasi Aset Tetap selama Tahun 2023 berdasarkan SKPD adalah sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Daftar Mutasi Aset Tetap TA 2023 berdasarkan SKPD

No	Uraian	Saldo Audited 2022 (Rp)	Mutasi Tambah 2023 (Rp)	Mutasi Kurang 2023 (Rp)	Saldo Akhir 2023 (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	954.782.627.298,01	28.398.762.066,00	0,00	983.181.389.364,01
2	DINAS KESEHATAN	534.625.163.109,57	44.655.036.492,00	1.013.503.076,05	578.266.696.525,52
3	DPUPRKP	1.634.039.510.400,29	117.546.835.032,80	41.523.563.109,80	1.710.062.782.323,29
4	SATPOL PP	3.387.404.846,00	339.718.330,00	0,00	3.727.123.176,00
5	BPBD	22.717.183.206,45	968.631.095,00	261.000.000,00	23.424.814.301,45
6	DINAS SOSIAL P3A	5.967.117.340,65	66.400.000,00	0,00	6.033.517.340,65
7	DPMK P2KB	18.437.035.356,72	6.000.000,00	83.139.703,12	18.359.895.653,60
8	DPTR	212.910.613.949,95	1.768.321.120,00	0,00	214.678.935.069,95
9	DLH	49.941.520.120,43	4.723.907.890,83	118.452.350,83	54.546.975.660,43
10	DISDUKCAPIL	12.117.463.237,33	246.835.050,00	0,00	12.364.298.287,33
11	DISHUB	92.606.944.064,20	6.189.951.978,00	0,00	98.796.896.042,20
12	DISKOMINFO	21.958.553.992,00	884.869.720,00	0,00	22.843.423.712,00
13	DISKOP UKMTK	13.938.964.770,43	290.491.226,05	0,00	14.229.455.996,48
14	DPMPSTP	9.284.929.569,56	181.715.160,00	0,00	9.466.644.729,56
15	DISPORA	12.545.381.567,71	563.631.588,00	74.200.000,00	13.034.813.155,71
16	DISBUD	169.953.929.592,85	351.450.100,00	0,00	170.305.379.692,85
17	DPK	18.042.318.916,96	1.545.478.384,00	0,00	19.587.797.300,96
18	DKP	23.277.255.380,00	98.896.000,00	0,00	23.376.151.380,00
19	DISPAR	64.478.604.565,86	6.937.071.956,00	0,00	71.415.676.521,86
20	DPP	39.673.764.531,42	514.311.000,00	556.710.354,75	39.631.365.176,67
21	DPKH	15.056.192.215,41	630.063.682,00	0,00	15.686.255.897,41
22	DINAS PERDAGANGAN	115.823.212.693,58	3.631.161.925,00	95.208.300,00	119.359.166.318,58
23	SEKRETARIAT DAERAH	157.024.906.811,50	186.960.000,00	52.845.000,00	157.159.021.811,50
24	SEKRETARIAT DPRD	11.432.290.355,00	50.550.000,00	0,00	11.482.840.355,00
25	BAPPEDA	5.164.000.510,50	158.483.996,00	19.999.500,00	5.302.485.006,50
26	BKAD	37.531.729.142,74	5.072.536.000,00	1.034.064.777,34	41.570.200.365,40
27	BKPPD	12.830.235.029,65	222.089.703,12	73.700.000,00	12.978.624.732,77
28	INSPEKTORAT DAERAH	7.322.443.942,54	567.076.018,00	304.854.500,00	7.584.665.460,54
29	KAP WONOSARI	5.922.984.395,24	24.090.000,00	0,00	5.947.074.395,24
30	KAP PALIYAN	1.773.190.922,89	26.500.000,00	0,00	1.799.690.922,89
31	KAP PANGGANG	4.279.089.698,46	82.150.000,00	0,00	4.361.239.698,46
32	KAP TEPUS	2.771.496.910,12	55.870.000,00	0,00	2.827.366.910,12
33	KAP RONGKOP	2.358.750.355,32	39.206.120,00	0,00	2.397.956.475,32
34	KAP SEMANU	2.542.894.588,61	13.436.500,00	0,00	2.556.331.088,61
35	KAP PONJONG	2.075.247.627,56	70.550.000,00	0,00	2.145.797.627,56
36	KAP KARANGMOJO	4.011.540.234,26	18.500.000,00	0,00	4.030.040.234,26
37	KAP PLAYEN	4.106.617.367,28	121.340.929,00	0,00	4.227.958.296,28
38	KAP NGLIPAR	2.069.984.191,75	59.480.000,00	0,00	2.129.464.191,75
39	KAP NGAWEN	2.198.872.194,38	55.012.425,78	0,00	2.253.884.620,16
40	KAP SEMIN	3.532.902.831,20	33.850.000,00	0,00	3.566.752.831,20



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Uraian	Saldo Audited 2022 (Rp)	Mutasi Tambah 2023 (Rp)	Mutasi Kurang 2023 (Rp)	Saldo Akhir 2023 (Rp)
41	KAP PATUK	2.930.928.240,28	1.991.591.147,00	2.689.768.957,71	2.232.750.429,57
42	KAP SAPTOSARI	3.355.902.961,81	68.270.000,00	0,00	3.424.172.961,81
43	KAP GEDANGSARI	1.732.305.595,28	504.724.000,00	0,00	2.237.029.595,28
44	KAP GIRISUBO	4.119.697.041,93	44.050.000,00	0,00	4.163.747.041,93
45	KAP TANJUNGSARI	1.447.300.007,23	454.235.200,00	0,00	1.901.535.207,23
46	KAP PURWOSARI	1.876.976.294,17	26.660.000,00	0,00	1.903.636.294,17
47	BAKESBANGPOL	3.113.687.811,89	49.634.851,56	14.713.200,00	3.148.609.463,45
Jumlah		4.333.091.665.786,97	230.536.386.686,14	47.915.722.829,60	4.515.712.329.643,51

Pada tahun 2023 terdapat Penambahan Aset Tetap, diantaranya berasal dari:

- Realisasi belanja aset tetap yang berasal dari APBD 2023 Rp 171.083.392.337,80
- Mutasi masuk antar SKPD Rp 4.054.175.436,51
- Hibah/Hadiah/Perolehan lain Rp 13.830.896.006,00
- Koreksi pencatatan dan Lainnya Rp 41.567.922.905,83

Koreksi Pencatatan dan Lainnya merupakan koreksi atas aset yang belum tercatat, koreksi barang, reklasifikasi dari aset lainnya serta peningkatan nilai dari Aset Tetap Renovasi.

Berikut ini daftar Penambahan Aset Tetap berdasarkan Klasifikasi

Aset Tetap	Belanja 2023 (Rp)	Mutasi Masuk antar SKPD (Rp)	Hibah/Hadiah/Perolehan lain (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
Tanah	4.395.545.335,00	150.300.000,00	1.170.400.000,00	0,00
Peralatan dan Mesin	41.859.873.986,00	1.819.086.460,46	3.902.029.914,00	6.662.362.758,54
Gedung dan Bangunan	34.695.508.812,00	1.103.778.200,00	3.030.564.000,00	31.682.407.587,80
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	48.184.338.448,80	804.537.400,00	5.699.409.010,00	2.443.420.400,00
Aset Tetap Lainnya	15.311.451.703,00	176.473.376,05	28.493.082,00	602.701.259,49
Konstruksi Dalam Pengerjaan	26.636.674.053,00	0,00	0,00	177.030.900,00
Jumlah Mutasi Tambah Aset Tetap	171.083.392.337,80	4.054.175.436,51	13.830.896.006,00	41.567.922.905,83
	230.536.386.686,14			

Penambahan Aset Tetap berdasarkan SKPD, sebagai berikut.

No	Uraian	Belanja 2023 (Rp)	Mutasi Masuk antar SKPD (Rp)	Hibah/Hadiah/Perolehan lain (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	27.958.108.892,00	0,00	287.274.700,00	153.378.474,00
2	DINAS KESEHATAN	41.448.289.744,00	10.600.000,00	3.196.146.748,00	0,00
3	DPUPRKP	75.080.073.799,80	0,00	3.333.246.660,00	39.133.514.573,00
4	SATPOL PP	290.398.330,00	33.800.000,00	15.520.000,00	0,00
5	BPBD	968.631.095,00	0,00	0,00	0,00
6	DINAS SOSIAL P3A	66.400.000,00	0,00	0,00	0,00
7	DPMK P2KB	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8	DPTR	1.768.321.120,00	0,00	0,00	0,00
9	DLH	3.692.949.152,00	991.716.180,00	0,00	39.242.558,83
10	DISDUKCAPIL	0,00	0,00	246.835.050,00	0,00
11	DISHUB	2.325.389.628,00	0,00	3.864.562.350,00	0,00
12	DISKOMINFO	875.869.720,00	9.000.000,00	0,00	0,00
13	DISKOP UKMTK	91.903.850,00	198.587.376,05	0,00	0,00
14	DPMPPTSP	181.715.160,00	0,00	0,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Uraian	Belanja 2023 (Rp)	Mutasi Masuk antar SKPD (Rp)	Hibah/Hadiah/Perolehan lain (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
15	DISPORA	563.631.588,00	0,00	0,00	0,00
16	DISBUD	351.450.100,00	0,00	0,00	0,00
17	DPK	1.450.171.686,00	10.065.000,00	85.241.698,00	0,00
18	DKP	98.896.000,00	0,00	0,00	0,00
19	DISPAR	6.937.071.956,00	0,00	0,00	0,00
20	DPP	444.311.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00
21	DPKH	102.159.982,00	396.553.700,00	130.000.000,00	1.350.000,00
22	DINAS PERDAGANGAN	918.581.625,00	150.103.000,00	2.489.383.000,00	73.094.300,00
23	SEKRETARIAT DAERAH	132.160.000,00	30.045.000,00	24.755.000,00	0,00
24	SEKRETARIAT DPRD	50.550.000,00	0,00	0,00	0,00
25	BAPPEDA	158.483.996,00	0,00	0,00	0,00
26	BKAD	3.559.791.000,00	1.166.064.200,00	157.930.800,00	188.750.000,00
27	BKPPD	138.950.000,00	83.139.703,12	0,00	0,00
28	INSPEKTORAT DAERAH	83.018.018,00	484.058.000,00	0,00	0,00
29	KAP. WONOSARI	24.090.000,00	0,00	0,00	0,00
30	KAP. PALIYAN	26.500.000,00	0,00	0,00	0,00
31	KAP. PANGGANG	82.150.000,00	0,00	0,00	0,00
32	KAP. TEPUS	55.870.000,00	0,00	0,00	0,00
33	KAP. RONGKOP	39.206.120,00	0,00	0,00	0,00
34	KAP. SEMANU	13.436.500,00	0,00	0,00	0,00
35	KAP. PONJONG	70.550.000,00	0,00	0,00	0,00
36	KAP. KARANGMOJO	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00
37	KAP. PLAYEN	121.340.929,00	0,00	0,00	0,00
38	KAP. NGLIPAR	59.480.000,00	0,00	0,00	0,00
39	KAP. NGAWEN	42.875.000,00	12.137.425,78	0,00	0,00
40	KAP. SEMIN	33.850.000,00	0,00	0,00	0,00
41	KAP. PATUK	82.998.147,00	0,00	0,00	1.908.593.000,00
42	KAP. SAPTOSARI	68.270.000,00	0,00	0,00	0,00
43	KAP. GEDANGSARI	62.223.000,00	442.501.000,00	0,00	0,00
44	KAP. GIRISUBO	44.050.000,00	0,00	0,00	0,00
45	KAP. TANJUNGSARI	454.235.200,00	0,00	0,00	0,00
46	KAP. PURWOSARI	26.660.000,00	0,00	0,00	0,00
47	BAKESBANGPOL	13.830.000,00	35.804.851,56	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Tambah Aset Tetap		171.083.392.337,80	4.054.175.436,51	13.830.896.006,00	41.567.922.905,83
		230.536.386.686,14			

Penambahan aset tetap yang berasal dari Hibah/Hadiah/Perolehan lain terdapat pada 11 SKPD sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai	Keterangan
1	DINAS PENDIDIKAN	287.274.700,00	Hibah dari Pemerintah Pusat dan Pihak ketiga berupa Peralatan dan Mesin, Gedung Bangunan, dan Aset Tetap Lainnya.
2	DINAS KESEHATAN	3.196.146.748,00	Hibah dari Kementerian Kesehatan berupa Kendaraan, Alat Rumah Tangga, Alat Kedokteran, Alat Laboratorium, dan Komputer.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Uraian	Nilai	Keterangan
3	DPUPRKP	3.333.246.660,00	Hibah dari Swasta/ Pengembang Perumahan berupa Tanah, Bangunan Gedung dan Jalan Irigasi dan Jaringan.
4	SATPOL PP	15.520.000,00	Hibah Alat Komunikasi Telephone-Megaphone dari Kementerian Dalam Negeri.
5	DISDUKCAPIL	246.835.050,00	Hibah CSR Bank BPD DIY berupa Mobil Daihatsu Luxio Pelayanan Administrasi Kependudukan.
6	DISHUB	3.864.562.350,00	Hibah dari Kementerian ESDM berupa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
7	DPK	85.241.698,00	Hibah dari Perpustakaan Nasional berupa kendaraan bermotor beroda dua dan buku perpustakaan
8	DPKH	130.000.000,00	Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri PT Welgro Feedmill Indonesia berupa kendaraan bermotor Toyota Rush
9	DISDAG	2.489.383.000,00	Hibah Pasar Rakyat Munggi 2 dari Dana Tugas Pembantuan (TP) berupa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
10	SETDA	24.755.000,00	Hibah dari PT Bank BPD DIY Cabang Wonosari berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga serta Komputer
11	BKAD	157.930.800,00	Hibah dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia berupa 1 buah Electric Generating Set
Total		13.830.896.006,00	

Sedangkan Pengurangan Aset Tetap pada tahun 2023, antara lain terdiri dari:

- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Rp 1.080.415.812,46
- Mutasi keluar antar SKPD	Rp 4.054.175.436,51
- Koreksi pencatatan dan Lainnya	Rp 42.781.131.580,63

Koreksi Pencatatan dan Lainnya merupakan koreksi barang dan reklasifikasi aset tetap.

Mekanisme hibah aset tetap dan penghapusan atas aset tetap yang rusak berat adalah melalui proses reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya.

Berikut ini daftar Pengurangan Aset Tetap berdasarkan Klasifikasi:

Aset Tetap	Reklas Ke Aset Lainnya (Rp)	Mutasi Keluar antar SKPD (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
Tanah	0,00	150.300.000,00	0,00
Peralatan dan Mesin	299.239.854,75	1.819.086.460,46	260.000.000,00
Gedung dan Bangunan	781.175.957,71	1.103.778.200,00	2.027.045.350,83
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	804.537.400,00	1.410.087.256,80
Aset Tetap Lainnya	0,00	176.473.376,05	73.094.300,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	39.010.904.673,00
Jumlah Mutasi Kurang Aset Tetap	1.080.415.812,46	4.054.175.436,51	42.781.131.580,63
47.915.722.829,60			

Pengurangan Aset Tetap berdasarkan SKPD, sebagai berikut.

No	Uraian	Reklas Ke Aset Lainnya (Rp)	Mutasi Keluar antar SKPD (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
1	DINAS KESEHATAN	0,00	1.013.503.076,05	0,00
2	DPUPRKP	0,00	1.176.771.180,00	40.346.791.929,80



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Uraian	Reklas Ke Aset Lainnya (Rp)	Mutasi Keluar antar SKPD (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
3	BPBD	0,00	1.000.000,00	260.000.000,00
4	DPMK P2KB	0,00	83.139.703,12	0,00
5	DLH	0,00	0,00	118.452.350,83
6	DISPORA	0,00	0,00	74.200.000,00
7	DPP	195.108.654,75	361.601.700,00	0,00
8	DINAS PERDAGANGAN	0,00	22.114.000,00	73.094.300,00
9	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	52.845.000,00	0,00
10	BAPPEDA	0,00	19.999.500,00	0,00
11	BKAD	15.718.000,00	1.018.346.777,34	0,00
12	BKPPD	73.700.000,00	0,00	0,00
13	INSPEKTORAT DAERAH	0,00	304.854.500,00	0,00
14	KAP. PATUK	781.175.957,71	0,00	1.908.593.000,00
15	BAKESBANGPOL	14.713.200,00	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Kurang Aset Tetap		1.080.415.812,46	4.054.175.436,51	42.781.131.580,63
		47.915.722.829,60		

5.3.3.1 TANAH

..... Rp 671.154.626.363,00

Jumlah tersebut merupakan saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2023. Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bahwasanya Aset Tetap Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Terdapat beberapa catatan untuk pengungkapan yang meliputi:

a. Pada tahun 2023 terdapat Penambahan aset Tanah sebesar Rp5.716.245.335,00 dengan rincian sebagai berikut.

- Realisasi belanja aset tetap yang berasal dari APBD 2023 Rp 4.395.545.335,00
- Mutasi masuk antar SKPD Rp 150.300.000,00
- Hibah Rp 1.170.400.000,00
- Koreksi pencatatan dan Lainnya Rp 0,00

Realisasi belanja aset tetap yang berasal dari APBD 2023 sebesar Rp4.395.545.335,00 terdapat pada DPUPRKP, DPTR, dan Dinas Lingkungan Hidup.

Terdapat Hibah Tanah pada DPUPRKP sebesar Rp1.170.400.000,00 dari pihak ketiga-Pengembang Perumahan berupa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja, Tanah Kering, dan Tanah untuk Jalan.

b. Pada tahun 2023 terdapat Pengurangan aset Tanah sebesar Rp150.300.000.

- Mutasi Keluar antar SKPD Rp 150.300.000,00

Mutasi Tanah sebesar Rp150.300.000,00 merupakan mutasi tanah dari Dinas Kesehatan ke BKAD berupa Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lainnya.

Jenis Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul per 31 Desember 2023 sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO.	URAIAN	BIDANG	NILAI
	Tanah	2.284	671.154.626.363,00
A	Tanah Persil	382	144.950.274.302,00
1	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	29	1.730.979.800,00
2	Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaa	59	16.219.549.679,00
3	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	292	126.915.744.823,00
4	Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	2	84.000.000,00
B	Tanah Non Persil	60	2.661.607.191,20
1	Tanah Kering	59	2.102.711.191,20
2	Tanah Hutan	1	558.896.000,00
C	Lapangan	1.842	523.542.744.869,80
1	Tanah Lapangan Parkir	11	19.436.134.693,00
2	Tanah Lapangan Penimbunan Barang	2	900.600.000,00
3	Tanah Untuk Jalan	1.741	483.783.946.015,20
4	Tanah Untuk Bangunan Air	13	3.860.460.819,60
5	Tanah Untuk Bangunan Instalasi	68	14.191.187.717,00
6	Tanah Untuk Bangunan Jaringan	3	407.889.915,00
7	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	4	962.525.710,00
JUMLAH		2.284	671.154.626.363,00

Daftar Mutasi Tanah TA 2023

	Uraian	Saldo Audited 2022 (Rp)	Mutasi Tambah 2023 (Rp)	Mutasi Kurang 2023 (Rp)	Saldo Akhir 2023 (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	15.184.288.974,00	0,00	0,00	15.184.288.974,00
2	DINAS KESEHATAN	1.614.600.000,00	0,00	150.300.000,00	1.464.300.000,00
3	DPUPRKP	289.237.945.363,00	1.580.626.800,00	0,00	290.818.572.163,00
4	DINAS SOSIAL P3A	200.400.000,00	0,00	0,00	200.400.000,00
5	DPMK P2KB	2.835.000,00	0,00	0,00	2.835.000,00
6	DPTR	208.847.855.337,00	1.676.151.120,00	0,00	210.524.006.457,00
7	DLH	908.286.145,00	2.309.167.415,00	0,00	3.217.453.560,00
8	DISHUB	210.000.000,00	0,00	0,00	210.000.000,00
9	DISKOP UKMTK	800.400.000,00	0,00	0,00	800.400.000,00
10	DISPORA	311.026.000,00	0,00	0,00	311.026.000,00
11	DISBUD	13.992.677.900,00	0,00	0,00	13.992.677.900,00
12	DKP	1.602.035.000,00	0,00	0,00	1.602.035.000,00
13	DISPAR	1.781.091.500,00	0,00	0,00	1.781.091.500,00
14	DPP	1.496.267.000,00	0,00	0,00	1.496.267.000,00
15	DPKH	82.000.000,00	0,00	0,00	82.000.000,00
16	DINAS PERDAGANGAN	9.180.727.500,00	0,00	0,00	9.180.727.500,00
17	SEKRETARIAT DAERAH	112.677.222.049,00	0,00	0,00	112.677.222.049,00
18	SEKRETARIAT DPRD	184.575.000,00	0,00	0,00	184.575.000,00
19	BAPPEDA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
20	BKAD	5.983.388.000,00	150.300.000,00	0,00	6.133.688.000,00
21	BKPPD	25.126.560,00	0,00	0,00	25.126.560,00
22	KAP. PALIYAN	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
23	KAP. TEPUS	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
24	KAP. RONGKOP	76.250.000,00	0,00	0,00	76.250.000,00
25	KAP. SEMANU	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
26	KAP. PONJONG	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

	Uraian	Saldo Audited 2022 (Rp)	Mutasi Tambah 2023 (Rp)	Mutasi Kurang 2023 (Rp)	Saldo Akhir 2023 (Rp)
27	KAP. PLAYEN	75.750.000,00	0,00	0,00	75.750.000,00
28	KAP. NGLIPAR	134.840.700,00	0,00	0,00	134.840.700,00
29	KAP. NGAWEN	71.568.000,00	0,00	0,00	71.568.000,00
30	KAP. SEMIN	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
31	KAP. SAPTOSARI	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
32	KAP. GEDANGSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
33	KAP. GIRISUBO	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
34	BAKESBANGPOL	720.000.000,00	0,00	0,00	720.000.000,00
Jumlah		665.588.681.028,00	5.716.245.335,00	150.300.000,00	671.154.626.363,00

- c. Saldo Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp665.588.681.028,00 Pada tahun 2023 terdapat mutasi tambah sebesar Rp5.716.245.335,00 dan mutasi kurang sebesar Rp150.300.000,00 sehingga Saldo Akhir Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp671.154.626.363,00.

5.3.3.2 PERALATAN DAN MESIN Rp 872.387.805.319,56

Jumlah tersebut merupakan saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2023. Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bahwasanya Aset Tetap Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Atas nilai peralatan dan mesin tersebut telah dilakukan penyusutan dan diperoleh nilai akumulasi penyusutan atas peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 sebesar (Rp663.574.944.521,88) sehingga nilai buku peralatan dan mesin menjadi sebesar Rp208.812.860.797,68. Terdapat beberapa catatan untuk pengungkapan yang meliputi:

a. Penambahan aset Peralatan dan Mesin pada tahun 2023 sebesar Rp54.243.353.119,00 dengan rincian sebagai berikut.

- Realisasi belanja aset tetap yang berasal dari APBD 2023 Rp 41.859.873.986,00
- Mutasi masuk antar SKPD Rp 1.819.086.460,46
- Hibah/Hadiah/Perolehan Lain Rp 3.902.029.914,00
- Koreksi pencatatan dan Lainnya Rp 6.662.362.758,54

Hibah Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.902.029.914,00 terdapat pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Disdukcapil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Sekretariat Daerah serta BKAD.

Koreksi pencatatan dan Lainnya sebesar Rp6.662.362.758,54 terdapat pada Dinas Pendidikan, DPUPRKP, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kapanewon Patuk.

b. Pengurangan aset Peralatan dan Mesin pada tahun 2023 sebesar Rp2.378.326.315,21

- Reklasifikasi ke Aset Lainnya Rp 299.239.854,75
- Mutasi keluar antar SKPD Rp 1.819.086.460,46
- Koreksi pencatatan dan Lainnya Rp 260.000.000,00

Koreksi pencatatan dan Lainnya sebesar Rp260.000.000,00 terdapat pada BPBD yang merupakan hasil temuan BPK karena lebih catat Kendaraan Bermotor Khusus-Mobil Tangki yang masih tercatat sebagai barang milik Kementerian PUPR Ditjen Cipta Karya.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Atas aset tetap tersebut sampai dengan saat ini masih dalam proses penyelesaian hibah ke Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, sebagaimana tercantum dalam Surat Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor ps.0403-Ls/2081 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Permohonan Persetujuan Usulan Hibah Barang milik Daerah sehingga kendaraan tersebut dicatat sebagai Aset Dalam Penguasaan BPBD per 31 Desember 2023.

Berikut ini rincian per jenis peralatan dan mesin beserta dengan mutasinya.

Rincian Per Jenis Peralatan dan Mesin TA 2023

Aset Tetap	Saldo Awal 2023 (Rp)	Mutasi Tambah 2023 (Rp)	Mutasi Kurang 2023 (Rp)	Saldo Akhir 2023 (Rp)
PERALATAN & MESIN				
Alat Besar	25.112.402.313,51	1.870.105.677,00	357.402.180,00	26.625.105.810,51
Alat Angkutan	110.282.129.193,57	7.680.893.446,46	1.864.099.135,21	116.098.923.504,82
Alat Bengkel dan Alat Ukur	17.976.540.108,54	683.630.243,00	0,00	18.660.170.351,54
Alat Pertanian	4.504.464.342,15	273.542.040,00	0,00	4.778.006.382,15
Alat Kantor & Rumah Tangga	199.897.243.747,73	12.186.914.302,54	64.826.500,00	212.019.331.550,27
Alat Studio, Komunikasi, & Pemancar	31.804.188.165,72	1.583.821.305,00	8.224.000,00	33.379.785.470,72
Alat Kedokteran & Kesehatan	165.688.415.136,69	14.646.141.963,00	7.200.000,00	180.327.357.099,69
Alat Laboratorium	62.961.824.890,71	4.907.440.432,00	0,00	67.869.265.322,71
Alat Persenjataan	1.175.565.053,92	9.000.000,00	0,00	1.184.565.053,92
Komputer	186.085.646.531,73	8.759.557.245,00	76.574.500,00	194.768.629.276,73
Alat Eksplorasi	4.773.000,00	0,00	0,00	4.773.000,00
Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	66.330.000,00	0,00	0,00	66.330.000,00
Alat Keselamatan Kerja	331.328.700,84	56.314.400,00	0,00	387.643.100,84
Peralatan Proses/Produksi	104.065.874,00	0,00	0,00	104.065.874,00
Rambu-Rambu	7.361.589.795,08	1.031.928.790,00	0,00	8.393.518.585,08
Peralatan Olahraga	7.166.271.661,58	554.063.275,00	0,00	7.720.334.936,58
Jumlah	820.522.778.515,77	54.243.353.119,00	2.378.326.315,21	872.387.805.319,56

Daftar Mutasi Peralatan dan Mesin TA 2023

No	Uraian	Saldo Audited 2022 (Rp)	Mutasi Tambah 2023 (Rp)	Mutasi Kurang 2023 (Rp)	Saldo Akhir 2023 (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	272.048.010.229,38	10.370.206.147,00	0,00	282.418.216.376,38
2	DINAS KESEHATAN	295.453.038.108,32	21.890.799.177,00	281.024.300,00	317.062.812.985,32
3	DPUPRKP	17.316.685.565,73	6.965.463.750,00	440.303.180,00	23.841.846.135,73
4	SATPOL PP	3.327.050.496,00	339.718.330,00	0,00	3.666.768.826,00
5	BPBD	10.424.935.873,50	968.631.095,00	261.000.000,00	11.132.566.968,50
6	DINAS SOSIAL P3A	2.202.917.159,34	66.400.000,00	0,00	2.269.317.159,34
7	DPMK P2KB	8.050.957.570,72	6.000.000,00	83.139.703,12	7.973.817.867,60
8	DPTR	2.266.906.583,00	92.170.000,00	0,00	2.359.076.583,00
9	DLH	15.217.992.904,83	788.504.930,00	0,00	16.006.497.834,83
10	DISDUKCAPIL	6.975.724.390,33	246.835.050,00	0,00	7.222.559.440,33
11	DISHUB	23.974.773.764,22	2.001.404.499,00	0,00	25.976.178.263,22
12	DISKOMINFO	18.018.447.886,00	521.550.070,00	0,00	18.539.997.956,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Uraian	Saldo Audited 2022 (Rp)	Mutasi Tambah 2023 (Rp)	Mutasi Kurang 2023 (Rp)	Saldo Akhir 2023 (Rp)
13	DISKOP UKMTK	4.957.787.214,43	114.017.850,00	0,00	5.071.805.064,43
14	DPMPSTP	3.333.685.147,56	132.419.517,00	0,00	3.466.104.664,56
15	DISPORA	1.942.022.145,00	366.980.040,00	0,00	2.309.002.185,00
16	DISBUD	24.892.317.507,00	81.756.100,00	0,00	24.974.073.607,00
17	DPK	4.922.159.358,78	1.467.724.866,00	0,00	6.389.884.224,78
18	DKP	8.915.707.548,00	98.896.000,00	0,00	9.014.603.548,00
19	DISPAR	7.606.293.526,05	265.872.290,00	0,00	7.872.165.816,05
20	DPP	11.197.388.820,96	254.565.500,00	199.269.154,75	11.252.685.166,21
21	DPKH	6.006.729.148,08	272.622.482,00	0,00	6.279.351.630,08
22	DINAS PERDAGANGAN	5.393.637.618,38	165.951.000,00	22.114.000,00	5.537.474.618,38
23	SEKRETARIAT DAERAH	17.324.951.506,78	186.960.000,00	52.845.000,00	17.459.066.506,78
24	SEKRETARIAT DPRD	9.501.032.368,00	50.550.000,00	0,00	9.551.582.368,00
25	BAPPEDA	3.454.938.260,78	158.483.996,00	19.999.500,00	3.593.422.756,78
26	BKAD	14.667.949.317,10	4.327.780.600,00	625.363.777,34	18.370.366.139,76
27	BKPPD	3.246.029.927,00	198.089.703,12	73.700.000,00	3.370.419.630,12
28	INSPEKTORAT DAERAH	3.024.854.338,16	567.076.018,00	304.854.500,00	3.287.075.856,16
29	KAP. WONOSARI	1.148.480.895,24	24.090.000,00	0,00	1.172.570.895,24
30	KAP. PALIYAN	750.801.603,17	26.500.000,00	0,00	777.301.603,17
31	KAP. PANGGANG	702.404.153,28	50.650.000,00	0,00	753.054.153,28
32	KAP. TEPUS	662.247.410,12	55.870.000,00	0,00	718.117.410,12
33	KAP. RONGKOP	666.013.514,17	15.400.000,00	0,00	681.413.514,17
34	KAP. SEMANU	766.043.616,28	13.436.500,00	0,00	779.480.116,28
35	KAP. PONJONG	699.312.880,28	70.550.000,00	0,00	769.862.880,28
36	KAP. KARANGMOJO	741.113.980,62	18.500.000,00	0,00	759.613.980,62
37	KAP. PLAYEN	849.001.667,28	47.720.000,00	0,00	896.721.667,28
38	KAP. NGLIPAR	665.123.122,28	59.480.000,00	0,00	724.603.122,28
39	KAP. NGAWEN	799.018.974,28	55.012.425,78	0,00	854.031.400,06
40	KAP. SEMIN	821.524.617,28	33.850.000,00	0,00	855.374.617,28
41	KAP. PATUK	794.256.240,28	83.912.131,54	0,00	878.168.371,82
42	KAP. SAPTOSARI	780.714.630,88	50.350.000,00	0,00	831.064.630,88
43	KAP. GEDANGSARI	790.408.095,28	96.023.000,00	0,00	886.431.095,28
44	KAP. GIRISUBO	732.321.547,28	44.050.000,00	0,00	776.371.547,28
45	KAP. TANJUNGSARI	686.319.877,28	454.235.200,00	0,00	1.140.555.077,28
46	KAP. PURWOSARI	708.363.169,17	26.660.000,00	0,00	735.023.169,17
47	BAKESBANGPOL	1.094.384.237,89	49.634.851,56	14.713.200,00	1.129.305.889,45
Jumlah		820.522.778.515,77	54.243.353.119,00	2.378.326.315,21	872.387.805.319,56

c. Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp820.522.778.515,77 Pada tahun 2023 terdapat mutasi tambah sebesar Rp54.243.353.119,00 dan mutasi kurang sebesar Rp2.378.326.315,21 sehingga Saldo Akhir Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp872.387.805.319,56.

5.3.3.3 GEDUNG DAN BANGUNAN Rp 1.344.658.133.138,91

Jumlah tersebut merupakan saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2023. Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Gunungkidul bahwasanya Aset Tetap Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Atas nilai gedung dan bangunan tersebut telah dilakukan penyusutan dan diperoleh nilai akumulasi penyusutan atas gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp311.589.999.955,42) sehingga nilai buku gedung dan bangunan menjadi sebesar Rp1.033.068.133.183,49. Terdapat beberapa catatan untuk pengungkapan yang meliputi.

a. Penambahan aset Gedung dan Bangunan pada tahun 2023 sebesar Rp70.512.258.599,80 dengan rincian sebagai berikut.

- Realisasi belanja aset tetap yang berasal dari APBD 2023	Rp	34.695.508.812,00
- Mutasi masuk antar SKPD	Rp	1.103.778.200,00
- Hibah/Hadiah/Perolehan lain	Rp	3.030.564.000,00
- Koreksi pencatatan dan Lainnya	Rp	31.682.407.587,80

Hibah Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.030.564.000,00 terdapat pada Dinas Pendidikan, DPUPRKP serta Dinas Perdagangan.

Koreksi pencatatan dan Lainnya sebesar Rp31.682.407.587,80 terdapat pada DPUPRKP, Dinas Perdagangan serta Kapanewon Patuk.

b. Pengurangan aset Gedung dan Bangunan pada tahun 2023 sebesar Rp3.911.999.508,54

- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Rp	781.175.957,71
- Mutasi keluar antar SKPD	Rp	1.103.778.200,00
- Koreksi pencatatan dan Lainnya	Rp	2.027.045.350,83

Mutasi keluar antar SKPD sebesar Rp1.103.778.200,00 terdapat pada Dinas Kesehatan ke BKAD sebesar Rp337.636.000,00, Dinas Pertanian dan Pangan ke DPKH sebesar Rp357.441.200,00 serta BKAD ke Kapanewon Gedangsari sebesar Rp408.701.000,00.

Koreksi pencatatan dan Lainnya sebesar Rp2.027.045.350,83 terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup serta Kapanewon Patuk.

Berikut ini rincian per jenis Gedung dan Bangunan beserta dengan mutasinya.

Rincian Per Jenis Gedung dan Bangunan TA 2023

Aset Tetap	Saldo Audited 2022 (Rp)	Mutasi Tambah 2023 (Rp)	Mutasi Kurang 2023 (Rp)	Saldo Akhir 2023 (Rp)
GEDUNG DAN BANGUNAN				
Bangunan Gedung	1.208.465.459.118,70	68.400.673.749,90	3.705.166.308,54	1.273.160.966.560,06
Monumen	5.711.540.781,58	792.607.064,00	0,00	6.504.147.845,58
Bangunan Menara	0,00	10.822.500,00	0,00	10.822.500,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	63.880.874.147,37	1.308.155.285,90	206.833.200,00	64.982.196.233,27
Jumlah	1.278.057.874.047,65	70.512.258.599,80	3.911.999.508,54	1.344.658.133.138,91

Daftar Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2023

No	Uraian	Saldo Audited 2022 (Rp)	Mutasi Tambah 2023 (Rp)	Mutasi Kurang 2023 (Rp)	Saldo Akhir 2023 (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	524.032.900.526,38	3.156.302.838,00	0,00	527.189.203.364,38
2	DINAS KESEHATAN	219.486.258.149,57	21.721.278.859,00	337.636.000,00	240.869.901.008,57
3	DPUPRKP	39.837.636.058,06	36.687.640.113,00	0,00	76.525.276.171,06
4	BPBD	8.789.690.126,90	0,00	0,00	8.789.690.126,90



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Uraian	Saldo Audited 2022 (Rp)	Mutasi Tambah 2023 (Rp)	Mutasi Kurang 2023 (Rp)	Saldo Akhir 2023 (Rp)
5	DINAS SOSIAL P3A	3.509.806.381,31	0,00	0,00	3.509.806.381,31
6	DPMK P2KB	10.235.611.786,00	0,00	0,00	10.235.611.786,00
7	DPTR	1.793.852.029,95	0,00	0,00	1.793.852.029,95
8	DLH	22.426.234.893,34	1.027.966.545,83	118.452.350,83	23.335.749.088,34
9	DISDUKCAPIL	5.128.385.347,00	0,00	0,00	5.128.385.347,00
10	DISHUB	26.067.439.149,04	127.200.000,00	0,00	26.194.639.149,04
11	DISKOMINFO	3.043.628.753,00	0,00	0,00	3.043.628.753,00
12	DISKOP UKMTK	8.179.054.556,00	0,00	0,00	8.179.054.556,00
13	DPMPTSP	5.513.264.750,00	0,00	0,00	5.513.264.750,00
14	DISPORA	9.968.094.222,71	196.651.548,00	0,00	10.164.745.770,71
15	DISBUD	108.735.427.258,57	0,00	0,00	108.735.427.258,57
16	DPK	11.770.930.775,94	0,00	0,00	11.770.930.775,94
17	DKP	10.818.058.007,00	0,00	0,00	10.818.058.007,00
18	DISPAR	29.539.377.289,67	1.290.500.686,00	0,00	30.829.877.975,67
19	DPP	24.649.165.844,33	238.475.500,00	357.441.200,00	24.530.200.144,33
20	DPKH	8.527.796.867,33	357.441.200,00	0,00	8.885.238.067,33
21	DINAS PERDAGANGAN	97.243.218.617,12	3.315.107.925,00	0,00	100.558.326.542,12
22	SEKRETARIAT DAERAH	26.676.438.081,72	0,00	0,00	26.676.438.081,72
23	SEKRETARIAT DPRD	1.542.916.187,00	0,00	0,00	1.542.916.187,00
24	BAPPEDA	1.698.860.549,72	0,00	0,00	1.698.860.549,72
25	BKAD	16.333.141.125,64	526.386.000,00	408.701.000,00	16.450.826.125,64
26	BKPPD	9.527.171.742,65	24.000.000,00	0,00	9.551.171.742,65
27	INSPEKTORAT DAERAH	4.280.806.278,38	0,00	0,00	4.280.806.278,38
28	KAP. WONOSARI	4.251.727.500,00	0,00	0,00	4.251.727.500,00
29	KAP. PALIYAN	945.699.819,72	0,00	0,00	945.699.819,72
30	KAP. PANGGANG	3.433.096.045,18	31.500.000,00	0,00	3.464.596.045,18
31	KAP. TEPUS	2.061.677.000,00	0,00	0,00	2.061.677.000,00
32	KAP. RONGKOP	1.598.784.741,15	0,00	0,00	1.598.784.741,15
33	KAP. SEMANU	1.674.614.972,33	0,00	0,00	1.674.614.972,33
34	KAP. PONJONG	1.359.444.747,28	0,00	0,00	1.359.444.747,28
35	KAP. KARANGMOJO	3.228.723.253,64	0,00	0,00	3.228.723.253,64
36	KAP. PLAYEN	3.081.357.200,00	73.620.929,00	0,00	3.154.978.129,00
37	KAP. NGLIPAR	1.260.485.269,47	0,00	0,00	1.260.485.269,47
38	KAP. NGAWEN	1.311.865.220,10	0,00	0,00	1.311.865.220,10
39	KAP. SEMIN	2.608.919.713,92	0,00	0,00	2.608.919.713,92
40	KAP. PATUK	2.125.773.000,00	1.311.565.455,97	2.689.768.957,71	747.569.498,26
41	KAP. SAPTOSARI	2.537.753.230,93	17.920.000,00	0,00	2.555.673.230,93
42	KAP. GEDANGSARI	911.327.500,00	408.701.000,00	0,00	1.320.028.500,00
43	KAP. GIRISUBO	3.326.252.494,65	0,00	0,00	3.326.252.494,65
44	KAP. TANJUNGSARI	751.702.629,95	0,00	0,00	751.702.629,95
45	KAP. PURWOSARI	1.157.714.125,00	0,00	0,00	1.157.714.125,00
46	BAKESBANGPOL	1.075.790.230,00	0,00	0,00	1.075.790.230,00
Jumlah		1.278.057.874.047,65	70.512.258.599,80	3.911.999.508,54	1.344.658.133.138,91



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- c. Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.278.057.874.047,65 Pada tahun 2023 terdapat mutasi tambah sebesar Rp70.512.258.599,80 dan mutasi kurang sebesar Rp3.911.999.508,54 sehingga Saldo Akhir Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.344.658.133.138,91.

5.3.3.4 JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI Rp 1.476.558.644.314,03

Jumlah tersebut merupakan saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2023. Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bahwasanya Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Atas nilai Jalan, Jaringan, dan Irigasi tersebut telah dilakukan penyusutan dan diperoleh nilai akumulasi penyusutan atas Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2023 sebesar (Rp881.234.186.509,06) sehingga nilai buku Jalan, Jaringan, dan Irigasi menjadi sebesar Rp595.324.457.804,97. Terdapat beberapa catatan untuk pengungkapan yang meliputi:

a. Penambahan aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada tahun 2023 sebesar Rp57.131.705.258,8 dengan rincian sebagai berikut.

- | | |
|--|----------------------|
| - Realisasi belanja aset tetap yang berasal dari APBD 2023 | Rp 48.184.338.448,80 |
| - Mutasi masuk antar SKPD | Rp 804.537.400,00 |
| - Hibah/Hadiah/Perolehan lain | Rp 5.699.409.010,00 |
| - Koreksi pencatatan dan Lainnya | Rp 2.443.420.400,00 |

Hibah Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp5.699.409.010,00 terdapat pada DPUPRKP dan Dinas Perhubungan.

Koreksi pencatatan dan Lainnya sebesar Rp2.443.420.400,00 terdapat pada Dinas Pendidikan dan DPUPRKP.

b. Pengurangan aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada tahun 2023 sebesar Rp2.214.624.656,8 dengan rincian sebagai berikut.

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| - Mutasi keluar antar SKPD | Rp 804.537.400,00 |
| - Koreksi pencatatan dan Lainnya | Rp 1.410.087.256,80 |

Mutasi keluar antar SKPD sebesar Rp804.537.400,00 terdapat pada Dinas Kesehatan ke BKAD sebesar Rp68.069.400,00, DPUPRKP ke DLH sebesar Rp586.365.000,00 dan DPUPRKP ke Dinas Perdagangan sebesar Rp150.103.000,00.

Pada DPUPRKP terdapat koreksi pencatatan jumlah unit Jalan Kabupaten dikarenakan adanya kapitalisasi aset tetap jalan kabupaten yang tadinya dicatat sebagai unit tersendiri kemudian dikapitalisasikan ke ruas jalan kabupaten induknya sehingga mengakibatkan perubahan jumlah barang yang tadinya sebanyak 6 unit Jalan Kabupaten menjadi 3 unit Jalan Kabupaten namun nilai perolehan atas Jalan Kabupaten tersebut tidak mengalami perubahan.

Berikut ini rincian per jenis Jalan, Jaringan, dan Irigasi beserta dengan mutasinya.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Rincian Per Jenis Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2023

Aset Tetap	Saldo Audited 2022 (Rp)	Mutasi Tambah 2023 (Rp)	Mutasi Kurang 2023 (Rp)	Saldo Akhir 2023 (Rp)
JALAN, JARINGAN, & IRIGASI				
Jalan dan Jembatan	1.094.361.151.019,77	42.382.447.186,80	1.410.087.256,80	1.135.333.510.949,77
Bangunan Air	182.817.710.887,28	6.801.186.230,00	248.815.000,00	189.370.082.117,28
Instalasi	67.707.223.804,44	6.433.903.123,00	34.860.000,00	74.106.266.927,44
Jaringan	76.755.478.000,54	1.514.168.719,00	520.862.400,00	77.748.784.319,54
Jumlah	1.421.641.563.712,03	57.131.705.258,80	2.214.624.656,80	1.476.558.644.314,03

Daftar Mutasi Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2023

	Uraian	Saldo Audited 2022 (Rp)	Mutasi Tambah 2023 (Rp)	Mutasi Kurang 2023 (Rp)	Saldo Akhir 2023 (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	29.236.517.740,17	906.245.257,00	0,00	30.142.762.997,17
2	DINAS KESEHATAN	17.689.380.587,37	827.106.456,00	68.069.400,00	18.448.417.643,37
3	DPUPRKP	1.266.539.427.444,50	44.743.373.916,80	2.146.555.256,80	1.309.136.246.104,50
4	BPBD	624.586.260,40	0,00	0,00	624.586.260,40
5	DINAS SOSIAL P3A	48.518.000,00	0,00	0,00	48.518.000,00
6	DPMK P2KB	147.631.000,00	0,00	0,00	147.631.000,00
7	DPTR	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
8	DLH	10.209.243.877,26	586.365.000,00	0,00	10.795.608.877,26
9	DISDUKCAPIL	11.885.000,00	0,00	0,00	11.885.000,00
10	DISHUB	42.333.521.450,94	4.061.347.479,00	0,00	46.394.868.929,94
11	DISKOMINFO	895.727.353,00	363.319.650,00	0,00	1.259.047.003,00
12	DISKOP UKMTK	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
13	DPMPTSP	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
14	DISPORA	130.289.200,00	0,00	0,00	130.289.200,00
15	DISBUD	19.600.367.528,54	0,00	0,00	19.600.367.528,54
16	DPK	180.487.572,00	0,00	0,00	180.487.572,00
17	DKP	1.900.564.325,00	0,00	0,00	1.900.564.325,00
18	DISPAR	23.500.915.650,14	5.380.698.980,00	0,00	28.881.614.630,14
19	DPP	2.112.326.508,63	21.270.000,00	0,00	2.133.596.508,63
20	DPKH	439.666.200,00	0,00	0,00	439.666.200,00
21	DINAS PERDAGANGAN	3.923.017.458,08	150.103.000,00	0,00	4.073.120.458,08
22	SEKRETARIAT DAERAH	240.361.162,00	0,00	0,00	240.361.162,00
23	SEKRETARIAT DPRD	120.829.000,00	0,00	0,00	120.829.000,00
24	BKAD	538.287.900,00	68.069.400,00	0,00	606.357.300,00
25	BKPPD	12.215.000,00	0,00	0,00	12.215.000,00
26	KAP. WONOSARI	522.776.000,00	0,00	0,00	522.776.000,00
27	KAP. PALIYAN	21.689.500,00	0,00	0,00	21.689.500,00
28	KAP. PANGGANG	143.589.500,00	0,00	0,00	143.589.500,00
29	KAP. TEPUS	7.572.500,00	0,00	0,00	7.572.500,00
30	KAP. RONGKOP	17.702.100,00	23.806.120,00	0,00	41.508.220,00
31	KAP. SEMANU	72.236.000,00	0,00	0,00	72.236.000,00
32	KAP. PONJONG	10.990.000,00	0,00	0,00	10.990.000,00
33	KAP. KARANGMOJO	41.703.000,00	0,00	0,00	41.703.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

34	KAP. PLAYEN	100.508.500,00	0,00	0,00	100.508.500,00
35	KAP. NGLIPAR	9.385.100,00	0,00	0,00	9.385.100,00
36	KAP. NGAWEN	16.420.000,00	0,00	0,00	16.420.000,00
37	KAP. SEMIN	102.433.500,00	0,00	0,00	102.433.500,00
38	KAP. PATUK	7.899.000,00	0,00	0,00	7.899.000,00
39	KAP. SAPTOSARI	16.435.100,00	0,00	0,00	16.435.100,00
40	KAP. GEDANGSARI	30.570.000,00	0,00	0,00	30.570.000,00
41	KAP. GIRISUBO	21.123.000,00	0,00	0,00	21.123.000,00
42	KAP. TANJUNGSARI	9.277.500,00	0,00	0,00	9.277.500,00
43	KAP. PURWOSARI	10.899.000,00	0,00	0,00	10.899.000,00
44	BAKESBANGPOL	39.988.194,00	0,00	0,00	39.988.194,00
Jumlah		1.421.641.563.712,03	57.131.705.258,80	2.214.624.656,80	1.476.558.644.314,03

c. Saldo Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.421.641.563.712,03 Pada tahun 2023 terdapat mutasi tambah sebesar Rp57.131.705.258,80 dan mutasi kurang sebesar Rp2.214.624.656,80 sehingga Saldo Akhir Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.476.558.644.314,03.

5.3.3.5 ASET TETAP LAINNYA Rp 143.486.353.059,01

Jumlah tersebut merupakan saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2023. Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bahwasanya Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Terdapat beberapa catatan untuk pengungkapan yang meliputi:

a. Penambahan Aset Tetap Lainnya pada tahun 2023 sebesar Rp16.119.119.420,54 dengan rincian sebagai berikut.

- Realisasi belanja aset tetap yang berasal dari APBD 2023	Rp 15.311.451.703,00
- Mutasi masuk antar SKPD	Rp 176.473.376,05
- Hibah/Hadiah/Perolehan lain	Rp 28.493.082,00
- Koreksi pencatatan dan Lainnya	Rp 602.701.259,49

Hibah Aset tetap Lainnya sebesar Rp28.493.082,00 terdapat pada Dinas Pendidikan serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Koreksi pencatatan dan Lainnya sebesar Rp602.701.259,49 terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kapanewon Patuk.

b. Pengurangan Aset Tetap Lainnya pada tahun 2023 sebesar Rp249.567.676,05 dengan rincian sebagai berikut.

- Mutasi keluar antar SKPD	Rp 176.473.376,05
- Koreksi pencatatan dan Lainnya	Rp 73.094.300,00

Mutasi keluar antar SKPD sebesar Rp176.473.376,05 terdapat pada Dinas Kesehatan ke Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja.

Berikut ini rincian per jenis Aset Tetap Lainnya beserta dengan mutasinya.

Rincian Per Jenis Aset Tetap Lainnya TA 2023

Aset Tetap	Saldo Audited 2022 (Rp)	Mutasi Tambah 2023 (Rp)	Mutasi Kurang 2023 (Rp)	Saldo Akhir 2023 (Rp)
ASET TETAP LAINNYA				
Bahan Perpustakaan	19.886.794.099,12	2.034.030.901,00	0,00	21.920.825.000,12



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Aset Tetap	Saldo Audited 2022 (Rp)	Mutasi Tambah 2023 (Rp)	Mutasi Kurang 2023 (Rp)	Saldo Akhir 2023 (Rp)
Barang bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	14.870.185.445,69	434.616.194,00	0,00	15.304.801.639,69
Hewan	192.312.500,00	0,00	0,00	192.312.500,00
Tanaman	1.486.540.656,25	0,00	0,00	1.486.540.656,25
Aset Tetap Dalam Renovasi	91.180.968.613,46	13.650.472.325,54	249.567.676,05	104.581.873.262,95
Jumlah	127.616.801.314,52	16.119.119.420,54	249.567.676,05	143.486.353.059,01

Daftar Mutasi Aset Tetap Lainnya TA 2023

No	Uraian	Saldo Audited 2022 (Rp)	Mutasi Tambah 2023 (Rp)	Mutasi Kurang 2023 (Rp)	Saldo Akhir 2023 (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	114.280.909.828,08	13.940.835.824,00	0,00	128.221.745.652,08
2	DINAS KESEHATAN	381.886.264,31	215.852.000,00	176.473.376,05	421.264.888,26
3	DPUPRKP	1.518.048.800,00	793.101.500,00	0,00	2.311.150.300,00
4	SATPOL PP	60.354.350,00	0,00	0,00	60.354.350,00
5	BPBD	2.877.970.945,65	0,00	0,00	2.877.970.945,65
6	DINAS SOSIAL P3A	5.475.800,00	0,00	0,00	5.475.800,00
7	DLH	1.179.762.300,00	0,00	0,00	1.179.762.300,00
8	DISDUKCAPIL	1.468.500,00	0,00	0,00	1.468.500,00
9	DISHUB	21.209.700,00	0,00	0,00	21.209.700,00
10	DISKOMINFO	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
11	DISKOP UKMTK	1.323.000,00	176.473.376,05	0,00	177.796.376,05
12	DPMPTSP	437.779.672,00	49.295.643,00	0,00	487.075.315,00
13	DISPORA	119.750.000,00	0,00	0,00	119.750.000,00
14	DISBUD	2.733.139.398,74	269.694.000,00	0,00	3.002.833.398,74
15	DPK	1.168.741.210,24	77.753.518,00	0,00	1.246.494.728,24
16	DKP	40.890.500,00	0,00	0,00	40.890.500,00
17	DISPAR	2.050.926.600,00	0,00	0,00	2.050.926.600,00
18	DPP	218.616.357,50	0,00	0,00	218.616.357,50
19	DINAS PERDAGANGAN	82.611.500,00	0,00	73.094.300,00	9.517.200,00
20	SEKRETARIAT DAERAH	105.934.012,00	0,00	0,00	105.934.012,00
21	SEKRETARIAT DPRD	82.937.800,00	0,00	0,00	82.937.800,00
22	BAPPEDA	9.201.700,00	0,00	0,00	9.201.700,00
23	BKAD	8.962.800,00	0,00	0,00	8.962.800,00
24	BKPPD	19.691.800,00	0,00	0,00	19.691.800,00
25	INSPEKTORAT DAERAH	16.783.326,00	0,00	0,00	16.783.326,00
26	KAP. PALIYAN	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
27	KAP. NGLIPAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
28	KAP. PATUK	3.000.000,00	596.113.559,49	0,00	599.113.559,49
29	BAKESBANGPOL	183.525.150,00	0,00	0,00	183.525.150,00
Jumlah		127.616.801.314,52	16.119.119.420,54	249.567.676,05	143.486.353.059,01

- c. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp127.616.801.314,52 Pada tahun 2023 terdapat mutasi tambah sebesar Rp16.119.119.420,54 dan mutasi kurang sebesar Rp249.567.676,05 sehingga Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp143.486.353.059,01.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

5.3.3.6 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan Rp 7.466.767.449,00

Jumlah tersebut merupakan saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2023. Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bahwasanya Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Terdapat beberapa catatan untuk pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang meliputi.

a. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tahun 2023 sebesar Rp26.813.704.953,00 dengan rincian sebagai berikut.

- Realisasi belanja aset tetap yang berasal dari APBD 2023 Rp 26.636.674.053,00
- Koreksi pencatatan dan Lainnya Rp 177.030.900,00

Realisasi belanja aset tetap yang berasal dari APBD 2023 sebesar Rp26.636.674.053,00 terdapat pada Dinas Pendidikan, DPUPRKP, dan Dinas Lingkungan Hidup.

Koreksi pencatatan dan Lainnya sebesar Rp177.030.900,00 terdapat pada DPUPRKP.

b. Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tahun 2023 sebesar Rp39.010.904.673,00.

- Koreksi pencatatan dan Lainnya Rp 39.010.904.673,00

Koreksi pencatatan dan Lainnya sebesar Rp39.010.904.673,00 terdapat pada DPUPRKP dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Berikut ini rincian per jenis Konstruksi Dalam Pengerjaan beserta dengan mutasinya.

Daftar Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2023

No	Uraian	Saldo Audited 2022 (Rp)	Mutasi Tambah 2023 (Rp)	Mutasi Kurang 2023 (Rp)	Saldo Akhir 2023 (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	0,00	25.172.000,00	0,00	25.172.000,00
2	DPUPRKP	19.589.767.169,00	26.776.628.953,00	38.936.704.673,00	7.429.691.449,00
3	DLH	0,00	11.904.000,00	0,00	11.904.000,00
4	DISPORA	74.200.000,00	0,00	74.200.000,00	0,00
Jumlah		19.663.967.169,00	26.813.704.953,00	39.010.904.673,00	7.466.767.449,00

- c. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.663.967.169,00 Pada tahun 2023 terdapat mutasi tambah sebesar Rp26.813.704.953,00 dan mutasi kurang sebesar Rp39.010.904.673,00 sehingga Saldo Akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.466.767.449,00.

Rincian Per Jenis Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2023

NO.	Perangkat Daerah	Uraian	Dokumen	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan
1	DINAS PENDIDIKAN	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan/ DED Pembangunan Aula (Belanja Modal)	53/SPK/DED/2.KRM OJO/DAU/2023	2023	25.172.000,00
2	DPUPRKP	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan/ Gedung RS Bedoyo	08/SPK/PRGP/IX/2019 dan 01/SP/P4BG/VI/2022	2019	5.220.507.425,00
		Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan/ RS Ngoro-oro	06/SPK/PRGP/IX/2019	2019	1.911.363.374,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO.	Perangkat Daerah	Uraian	Dokumen	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan
		Konsultansi Perencana Interior Gedung DPRD	11/SPK/P4BG/DED/XI/2023	2023	98.844.000,00
		Jasa Konsultansi Perencana Pekerjaan Power House dan Landscape Gedung DPRD	10/SPK/P4BG/DED/XI/2023	2023	99.282.000,00
		Jasa Konsultan Perencana T-1 DAK Jalan Kabupaten (APBDP)	85/SPK/PL-REKON/2023	2023	99.694.650,00
3	DLH	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan/ Konsultan Perencana pembangunan RTH Taman RD Bupati (KDP)	03/SPK/RTH-RUMAH - PERNC/III/2023	2023	11.904.000,00
JUMLAH					7.466.767.449,00

5.3.3.7 AKUMULASI PENYUSUTAN 1.856.399.130.986,36

Dalam rangka penyajian Laporan Keuangan dengan basis akrual Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) melakukan perhitungan penyusutan atas saldo aset tetap. Penyusutan pertama kali atas aset tetap didasarkan pada data saldo aset tetap yang telah diaudited oleh BPK RI. Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul No. 33 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul penyusutan dilakukan menggunakan metode garis lurus terhadap aset tetap berupa:

- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap bulan tanpa memperhitungkan adanya nilai residu, serta dilakukan sejak bulan diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap.

Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan namun secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan berikut akumulasi penyusutannya dan tidak serta merta dilakukan penghapusan.

Tatacara penghitungan penyusutan aset tetap dengan tetap memperhitungkan adanya penambahan masa manfaat aset tetap sebagai akibat adanya perbaikan atau renovasi, tabel penambahan masa manfaat aset tetap akibat perbaikan terdapat pada Peraturan Bupati Gunungkidul No. 33 Tahun 2023.

Berikut ini daftar akumulasi penyusutan aset tetap.

Uraian	Nilai Aset Tetap 2023 (Rp)	Akumulasi Penyusutan 2023	Nilai Buku Aset Tetap 2023 (Rp)
Peralatan dan Mesin	872.387.805.319,56	(663.574.944.521,88)	208.812.860.797,68
Gedung dan Bangunan	1.344.658.133.138,91	(311.589.999.955,42)	1.033.068.133.183,49
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.476.558.644.314,03	(881.234.186.509,06)	595.324.457.804,97
Jumlah	3.693.604.582.772,50	(1.856.399.130.986,36)	1.837.205.451.786,14



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Daftar akumulasi penyusutan aset tetap berdasarkan SKPD

No	Uraian	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Jumlah Akumulasi Penyusutan 2023
1	DINAS PENDIDIKAN	231.709.200.559,46	179.213.886.539,90	7.716.084.468,06	418.639.171.567,42
2	DINAS KESEHATAN	218.022.728.388,17	35.514.943.259,87	3.896.434.810,60	257.434.106.458,64
3	DPUPRKP	13.516.700.640,72	7.503.676.072,80	831.618.319.845,00	852.638.696.558,52
4	SATPOL PP	3.023.889.602,54	0,00	0,00	3.023.889.602,54
5	BPBD	9.166.259.456,56	569.177.207,48	47.601.271,30	9.783.037.935,34
6	DINAS SOSIAL P3A	2.136.137.873,46	658.809.956,19	8.490.650,08	2.803.438.479,73
7	DPMK P2KB	6.784.164.909,11	1.575.005.127,73	32.352.891,58	8.391.522.928,42
8	DPTR	2.170.055.430,35	376.931.254,50	650.000,08	2.547.636.684,93
9	DLH	13.606.302.151,25	2.692.203.921,41	7.852.634.817,67	24.151.140.890,33
10	DISDUKCAPIL	6.573.918.211,95	764.364.216,86	8.319.500,16	7.346.601.928,97
11	DISHUB	16.615.714.804,69	7.691.046.624,61	10.770.538.009,46	35.077.299.438,76
12	DISKOMINFO	15.406.686.495,63	312.417.185,85	118.308.963,61	15.837.412.645,09
13	DISKOP UKMTK	4.440.174.373,64	1.232.311.870,31	400.000,00	5.672.886.243,95
14	DPMPSTP	2.992.545.508,39	805.912.580,67	169.999,92	3.798.628.088,98
15	DISPORA	1.691.105.845,21	2.701.642.744,27	25.920.226,47	4.418.668.815,95
16	DISBUD	13.810.993.864,64	6.519.937.987,45	1.906.238.972,59	22.237.170.824,68
17	DPK	4.487.343.288,25	1.207.881.609,42	14.376.755,69	5.709.601.653,36
18	DKP	8.535.815.263,10	2.651.271.638,65	824.786.960,41	12.011.873.862,16
19	DISPAR	7.229.301.784,32	5.359.221.916,42	13.347.129.945,01	25.935.653.645,75
20	DPP	10.434.307.681,35	4.549.987.123,44	888.274.636,71	15.872.569.441,50
21	DPKH	4.471.536.325,15	1.207.319.878,80	92.573.554,85	5.771.429.758,80
22	DINAS PERDAGANGAN	4.779.280.955,52	26.813.175.604,83	1.507.308.435,84	33.099.764.996,19
23	SEKRETARIAT DAERAH	15.232.823.836,13	6.365.382.578,50	69.678.931,75	21.667.885.346,38
24	SEKRETARIAT DPRD	8.843.923.881,23	277.583.653,48	22.943.575,16	9.144.451.109,87
25	BAPPEDA	3.109.081.064,40	728.383.907,59	0,00	3.837.464.971,99
26	BKAD	14.366.122.507,57	4.209.205.148,76	146.982.566,05	18.722.310.222,38
27	BKPPD	3.145.272.712,50	1.674.132.237,89	10.841.851,60	4.830.246.801,99
28	INSPEKTORAT DAERAH	2.890.869.978,83	863.099.204,54	0,00	3.753.969.183,37
29	KAP. WONOSARI	1.097.541.690,96	579.644.773,11	127.170.900,00	1.804.357.364,07
30	KAP. PALIYAN	724.361.110,77	191.594.363,03	8.288.964,16	924.244.437,96
31	KAP. PANGGANG	682.683.307,56	431.200.797,65	24.292.812,46	1.138.176.917,67
32	KAP. TEPUS	646.040.667,67	326.597.892,11	6.407.499,92	979.046.059,70
33	KAP. RONGKOP	641.043.436,15	453.091.435,93	12.219.461,38	1.106.354.333,46
34	KAP. SEMANU	747.052.930,60	325.025.618,92	15.792.550,24	1.087.871.099,76
35	KAP. PONJONG	694.911.054,61	295.269.633,56	8.177.500,13	998.358.188,30
36	KAP. KARANGMOJO	710.390.535,62	773.958.752,10	9.157.874,92	1.493.507.162,64
37	KAP. PLAYEN	785.175.049,48	294.552.768,05	19.491.370,69	1.099.219.188,22
38	KAP. NGLIPAR	625.723.676,42	400.742.267,23	3.050.157,46	1.029.516.101,11
39	KAP. NGAWEN	786.660.288,55	518.326.215,59	8.333.000,00	1.313.319.504,14
40	KAP. SEMIN	801.982.690,93	489.784.487,63	19.317.487,62	1.311.084.666,18
41	KAP. PATUK	766.362.602,66	249.373.629,48	1.253.985,02	1.016.990.217,16
42	KAP. SAPTOSARI	734.365.351,99	433.637.137,43	5.341.407,46	1.173.343.896,88
43	KAP. GEDANGSARI	771.449.253,36	304.272.089,21	7.805.250,00	1.083.526.592,57
44	KAP. GIRISUBO	715.907.122,02	524.374.008,58	3.880.875,00	1.244.162.005,60
45	KAP. TANJUNGSARI	658.926.164,54	204.692.428,88	5.233.461,68	868.852.055,10



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Uraian	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Jumlah Akumulasi Penyusutan 2023
46	KAP. PURWOSARI	685.400.632,00	354.069.424,77	4.632.075,00	1.044.102.131,77
47	BAKESBANGPOL	1.106.709.561,87	400.881.179,94	16.978.236,27	1.524.568.978,08
Jumlah Akumulasi Penyusutan		663.574.944.521,88	311.589.999.955,42	881.234.186.509,06	1.856.399.130.986,36

Terdapat pula aset tetap berupa tanah, kendaraan, peralatan kantor, dan bangunan gedung yang dipinjam pakaikan pada tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Nama Aset	Peminjam	Nomor Berita Acara
1	Kendaraan Roda Empat	Kodim 0730 Gunungkidul	028/0912/BA-PP/III/2021
2	Kendaraan Roda Empat	Kodim 0730 Gunungkidul	028/0912/BA-PP/III/2021
3	Kendaraan Roda Empat	Kodim 0730 Gunungkidul	028/0912/BA-PP/III/2021
4	Kendaraan Roda Empat	BAWASLU	028/919/BA-PP/III/2021
5	Kendaraan Roda Empat	KONI Gunungkidul	028/3086/BA-PP/III/2021
6	Kendaraan Roda Empat	Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II	027/1622/BA-PP/VII/2019
7	Kendaraan Roda Empat	Pengadilan Agama Kab. Gunungkidul	028/738/BA-PP/III/2020
8	Kendaraan Roda Dua	POS Angkatan Laut Sadeng	028/02/BA.PP/IX/2019
9	Gedung Bekas SD Mulo I	Desa Mulo	028/3416/UM
10	Tanah dan Bangunan	Desa Wonosari	028/3523
11	Bangunan Gedung Bekas SD Negeri Petir III	Desa Petir	032/2481
12	Kendaraan Roda Empat	Kejaksaan Negeri Gunungkidul	028/918/BA-PP/III/2021
13	Kendaraan Roda Empat	Kejaksaan Negeri Gunungkidul	028/918/BA-PP/III/2021
14	Kendaraan Roda Empat	Kepolisian Negara Republik Indonesia DIY Resor	028/0917/BA-PP/III/2021
15	Peralatan Kantor	Komisi Pemilihan Umum	028/2041
16	Kendaraan Roda Dua	Komisi Pemilihan Umum	028/2041
17	Kendaraan Roda Empat	BAZNAS	028/3366/BA-PP/VII/2021
18	Bangunan	Desa Karangrejek	640/2765
19	Bangunan	Desa Karangrejek	640/2765
20	Kendaraan Roda Dua	Bawaslu	028/4821/BA-PP/X/2021
21	Kendaraan Roda Empat	KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL	000.1.4/02861
22	Bangunan	BAZNAS	000.2.8.2/6266 217/BAZNAS-GK/IX/2023



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ASET TETAP EKSTRAKOMPTABEL 71.024.222.606,36

Selain saldo aset tetap yang disajikan pada Neraca, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memiliki aset tetap yang nilai per unitnya di bawah minimal kapitalisasi sebagai aset tetap yang disajikan dalam neraca, dan dicatat secara ekstrakomptabel.

Saldo awal 2023 senilai Rp66.906.121.336,36 mutasi tambah 2023 sebesar Rp4.169.766.156,00 dan mutasi

kurang 2023 senilai Rp51.664.886,00 sehingga saldo akhir 2023 sebesar Rp71.024.222.606,36.

Rincian besarnya saldo awal 2023, mutasi tambah 2023, mutasi kurang 2023 dan saldo akhir 2023, sebagai berikut.

Daftar Aset Tetap Ekstrakomptabel

No	Uraian	Saldo Audited 2022 (Rp)	Mutasi Tambah 2023 (Rp)	Mutasi Kurang 2023 (Rp)	Saldo Akhir 2023 (Rp)
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	20.335.035.543,81	745.549.754,00	45.347.500,00	21.035.237.797,81
3	Gedung dan Bangunan	4.507.011.432,30	193.700.000,00	6.317.386,00	4.694.394.046,30
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	83.400.545,00	0,00	0,00	83.400.545,00
5	Aset Tetap Lainnya	41.980.673.815,25	3.230.516.402,00	0,00	45.211.190.217,25
6	KDP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	66.906.121.336,36	4.169.766.156,00	51.664.886,00	71.024.222.606,36

Adapun pengelompokan Aset Tetap Ekstrakomptabel per akun/ KIB adalah sebagai berikut.

a. Tanah 0,00

Pada tahun 2023 tidak terdapat aset tanah yang dicatat secara ekstrakomptabel, semua dicatat secara intrakomptabel dan tersaji dalam Neraca baik Laporan Keuangan SKPD maupun LKPD.

b. Peralatan dan Mesin 21.035.237.797,81

Saldo awal 2023 Peralatan dan Mesin yang tercatat secara ekstrakomptabel senilai Rp20.335.035.543,81 kemudian pada tahun 2023 terdapat mutasi tambah atas aset tetap ekstrakomptabel sebesar Rp745.549.754,00 dan mutasi kurang sebesar Rp45.347.500,00 sehingga saldo Akhir 2023 aset ekstrakomptabel peralatan dan mesin sebesar Rp21.035.237.797,81 dengan jumlah barang sebanyak 252.660 unit.

c. Gedung dan Bangunan 4.694.394.046,30

Saldo awal 2023 Gedung dan Bangunan yang tercatat secara ekstrakomptabel senilai Rp4.507.011.432,30 kemudian pada tahun 2023 terdapat mutasi tambah atas aset tetap ekstrakomptabel sebesar Rp193.700.000,00 dan mutasi kurang sebesar Rp6.317.386,00 sehingga saldo Akhir 2023 aset ekstrakomptabel gedung dan bangunan sebesar Rp4.694.394.046,30 dengan jumlah barang sebanyak 2.126 unit.

d. Jalan Irigasi dan Jaringan 83.400.545,00

Saldo awal 2023 Jalan Irigasi dan Jaringan yang tercatat secara ekstrakomptabel senilai Rp83.400.545,00 kemudian pada tahun 2023 tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang atas aset tetap ekstrakomptabel sehingga saldo Akhir 2023 aset ekstrakomptabel Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp83.400.545,00 dengan jumlah barang sebanyak 27 unit.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

e. Aset Tetap Lainnya 45.211.190.217,25
Saldo awal 2023 Aset Tetap Lainnya yang tercatat secara ekstrakomptabel senilai Rp41.980.673.815,25 kemudian pada tahun 2023 terdapat mutasi tambah atas aset tetap lainnya ekstrakomptabel sebesar Rp3.230.516.402,00 namun tidak ada mutasi kurang sehingga saldo Akhir 2023 aset ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya sebesar Rp45.211.190.217,25 dengan jumlah barang sebanyak 2.635.508 unit.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00
Pada tahun 2023 tidak terdapat aset konstruksi dalam pengerjaan yang dicatat secara ekstrakomptabel, semua dicatat secara intrakomptabel dan tersaji dalam Neraca baik Laporan Keuangan SKPD maupun LKPD.

ASET DALAM PENGUASAAN 10.640.038.843,00

Selain Saldo Aset Tetap Ekstrakomptabel diatas, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga memiliki Aset Dalam Penguasaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.640.038.843,00.

Aset dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terdapat pada OPD sebagai berikut.

1. Dinas Kesehatan

Saldo Aset Dalam Penguasaan pada Dinas Kesehatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.259.378.699,00 dengan jumlah barang sebanyak 2.346 unit.

2. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman

Saldo Aset Dalam Penguasaan pada DPUPRKP per 31 Desember 2023 sebesar Rp43.250.000,00 dengan jumlah barang sebanyak 3 unit."

3. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Saldo Aset Dalam Penguasaan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.398.970.258,00 dengan jumlah barang sebanyak 7 unit.

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga

Saldo Aset Dalam Penguasaan pada DPMKP2KB per 31 Desember 2023 sebesar Rp42.798.540,00 dengan jumlah barang sebanyak 19 unit.

5. Dinas Lingkungan Hidup

Saldo Aset Dalam Penguasaan pada DLH per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.212.439.890,00 dengan jumlah barang sebanyak 3 unit.

6. Dinas Kebudayaan/Kundha Kabudayan

Saldo Aset Dalam Penguasaan pada Dinas Kebudayaan/Kundha Kabudayan per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.396.975,00 dengan jumlah barang sebanyak 136 unit.

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Saldo Aset Dalam Penguasaan pada BPBD per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.672.804.481,00 dengan jumlah barang sebanyak 104 unit.

Terdapat 2 unit Kendaraan Bermotor Khusus berupa mobil tangki yang sebelumnya dicatat sebagai aset tetap intrakomptabel pada Peralatan dan Mesin yang kemudian direklasifikasi ke Aset dalam Penguasaan dikarenakan aset tetap tersebut masih dalam proses penyelesaian hibah ke Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dari Kementerian PUPR Ditjen Cipta Karya.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga memiliki aset yang dapat dikategorikan sebagai Properti Investasi berdasarkan Kebijakan Akuntansi Nomor 33 Tahun 2023 namun sampai dengan per 31 Desember 2023 aset tersebut masih tercatat pada klasifikasi akun aset tetap pada KIB A (Tanah) dan KIB C (Gedung dan Bangunan) serta pada akun aset lainnya, dikarenakan belum ada akun standar untuk mencatat tersendiri dengan rincian sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Daftar Aset Properti Investasi

No.	Nama Aset	SKPD	Klasifikasi	Tahun Perolehan	Harga Perolehan
1	Gedung Kesenian	DISPORA	KIB C	1980	1.430.531.712,00
2	Gedung Serba Guna Siyono	BKAD	KIB C	2013	9.529.630.892,29
3	Aula Pertemuan Tempat Wisata	DISPAR	KIB C	2013	192.895.202,10
4	Los Pada Terminal Semin	DISHUB	KIB C	2018	1.305.206.468,94
5	Kios Pada Terminal Semin	DISHUB	KIB C	2018	125.457.000,00
6	Kios Pada Terminal Semin	DISHUB	KIB C	2023	63.600.000,00
7	Kios Pada Terminal Semin	DISHUB	KIB C	2023	63.600.000,00
8	Rumah Dinas Paramedis Gedangsari I	DINKES	KIB C	1998	30.000.000,00
9	Rumah Dinas Tegalrejo	DINKES	KIB C	1991	204.000.000,00
10	Rumah Dinas Dokter Umum Gedangrejo	DINKES	KIB C	1998	50.000.000,00
11	Rumahan Dinas Ruangan pada Puskesmas Pembantu Karangmojo	DINKES	KIB C	1998	50.000.000,00
12	Rumah Dinas Puskesmas Pembantu Jatiayu	DINKES	KIB C	1998	149.860.000,00
13	Rumah Dinas Paramedis Gedangan	DINKES	KIB C	1995	17.000.000,00
14	Rumah Dinas Puskesmas Pembantu Pengkok	DINKES	KIB C	1995	50.000.000,00
15	Rumah Dinas Paramedis Ngandong	DINKES	KIB C	2001	50.000.000,00
16	Rumah Dinas Puskesmas Pembantu Bunder	DINKES	KIB C	2014	482.541.570,00
17	Rumah Dinas Puskesmas Pembantu Sidorejo 2	DINKES	KIB C	2011	129.700.000,00
18	Rumah Dinas Paramedis Karangtengah	DINKES	KIB C	2008	200.000.000,00
19	Rumah Dinas Paramedis Petoyan	DINKES	KIB C	2008	331.166.000,00
20	Rumah Dinas Paramedis Widoro	DINKES	KIB C	2002	90.000.000,00
21	Rumah Dinas Dokter Umum Widoro	DINKES	KIB C	2002	90.000.000,00
22	Rumah Dinas Dokter Gigi Petoyan	DINKES	KIB C	2009	247.886.000,00
23	Rumah Dinas Paramedis Karangtengah	DINKES	KIB C	2005	160.000.000,00
24	Ruangan Puskesmas Pembantu Petir	DINKES	KIB C	1985	112.700.000,00
25	Rumah Dinas Puskesmas Pembantu Dadapayu I	DINKES	KIB C	1984	70.000.000,00
26	Rumah Dinas Piyaman	DINKES	KIB C	1987	290.000.000,00
27	Rumah Dinas Ngemplek	DINKES	KIB C	1987	390.000.000,00
28	Rumah Dinas Kepuh	DINKES	KIB C	1986	71.721.000,00
29	Rumah Dinas Prigi	DINKES	KIB C	1983	15.000.000,00
30	Pustu Logandeng	DINKES	KIB C	1990	22.000.000,00
31	Pustu Bandung	DINKES	KIB C	1991	35.000.000,00
32	Pustu Selang	DINKES	KIB C	1987	39.000.000,00
33	Pustu Banaran	DINKES	KIB C	1993	60.000.000,00
34	Pustu Wunung	DINKES	KIB C	1998	199.392.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Nama Aset	SKPD	Klasifikasi	Tahun Perolehan	Harga Perolehan
35	Pustu Siraman	DINKES	KIB C	1994	50.000.000,00
36	Pustu Wareng	DINKES	KIB C	1994	50.000.000,00
37	Pustu Bendung	DINKES	ASET LAIN-LAIN	1991	25.000.000,00
38	Pustu Ponjong, Sumber Ponjong	DINKES	KIB C	1985	100.000.000,00
39	Rumah Dinas Kerjo II	DINKES	KIB C	2011	187.180.000,00
40	Rumah Dinas Nglegi	DINKES	KIB C	2008	201.555.000,00
41	Kios Watugupit ukuran 10,5 m2	DISPAR	KIB C	2016	204.255.325,00
42	Kios TIC Patuk ukuran 10,8 m2	DISPAR	KIB C	2017	403.068.800,00
43	Kios TIC Patuk ukuran 10,8 m2	DISPAR	KIB C	2019	820.734.117,39
44	Los Pantai Baron ukuran 6 m2	DISPAR	KIB C	1987	11.772.000,00
45	Los Pantai Baron ukuran 12 m2	DISPAR	KIB C	1987	104.640.000,00
46	Kios Pantai Baron ukuran 10 m2	DISPAR	KIB C	2003	129.566.666,70
47	Kios Pantai Baron ukuran 12 m2	DISPAR	KIB C	2003	104.640.000,00
48	Kios Pantai Baron ukuran 15 m2	DISPAR	KIB C	2005	180.924.000,00
49	Kios Pantai Baron ukuran 16 m2	DISPAR	KIB C	1987	23.544.000,00
50	Kios Pantai Baron ukuran 20 m2	DISPAR	KIB C	2017	215.562.000,00
51	Los Pantai Kukup ukuran 12 m2	DISPAR	KIB C	2008	69.433.500,00
52	Kios Pantai Kukup ukuran 16 m2	DISPAR	KIB C	2008	69.433.500,00
53	Kios Pantai Kukup ukuran 20 m2	DISPAR	KIB C	2008	69.433.500,00
54	Kios pada Gedung Serba Guna Siyono	BKAD	KIB C	2013	9.529.630.892,29
55	Kios di Sebelah Selatan RSUD Wonosari	BKAD	KIB C	2004	97.200.000,00
56	Rumah Dinas Yadara I	SETDA	KIB C	1987	251.402.030,00
57	Rumah Dinas Yadara II	SETDA	KIB C	1987	204.018.125,00
58	Rumah Dinas Yadara III	SETDA	KIB C	2016	197.291.000,00
59	Kantin pada Komplek Sekretariat Daerah	SETDA	KIB C	2017	259.656.000,00
60	Kios pada komplek Sekretariat Daerah	SETDA			
61	Tanah yang disewa pom bensin Kranon	BKAD	KIB A	1990	14.000.000,00
62	Tanah dan bangunan eks Tuti Timur	BKAD	KEMITRAAN	2000	188.750.000,00
63	Tanah eks Rumah Dinas Direktur RSUD	SETDA	KIB A	1989	20.000.000,00
64	Tanah dan bangunan eks UPT Puskesmas Saptosari	BKAD	KIB C	2012	278.000.000,00
	JUMLAH				30.408.578.301,71



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

5.3.4 DANA CADANGAN **Rp0,00**

Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tidak ada Dana Cadangan

5.3.5 ASET LAINNYA **Rp64.837.412.847,80**

Aset lainnya Tahun Anggaran 2023 terdiri dari tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud, dan aset lain-lain. Tagihan jangka panjang terdiri dari tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

Sedangkan kerugian daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi diakui ketika putusan tentang kasus tuntutan ganti rugi terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

Akun tagihan jangka panjang tidak dipunyai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, sedangkan akun aset lainnya dapat diuraikan sebagai berikut.

Daftar Aset Lainnya

Uraian	2023 (Rp)	2022 Audited (Rp)
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	188.750.000,00
Aset Tak Berwujud	55.560.198.442,08	53.304.574.284,08
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(32.629.551.495,50)	(27.621.160.070,96)
Aset Lain-lain	135.005.487.411,19	134.706.247.556,44
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(95.871.074.509,97)	(218.289.284,64)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	2.772.353.000,00	0,00
Jumlah	64.837.412.847,80	160.360.122.484,92

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga **Rp0,00**

Kemitraan dengan Pihak Ketiga terdiri dari:

Penyewaan aset kepada PT Sinar Sukses Sentosa untuk pembuatan tiwul instan dari BKAD **Rp0,00**

Total **Rp0,00**

Berdasarkan perjanjian sewa menyewa antara Pemerinta Kabupaten Gunungkidul dengan PT Sinar Sukses Sentosa Nomor 007/tiga.S/Dir/08/2022 dan Nomor 011/1219 bahwa sewa menyewa tanah dan bangunan gedung milik Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan PT Sinar Sukses Sentosa telah berakhir di tahun 2022 dan tidak diperpanjang lagi sehingga dilakukan reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap.

2. Aset Tak Berwujud **Rp55.560.198.442,08**

Aset Tak Berwujud terdiri dari hak paten dan aset tak berwujud lainnya berupa Software/Sistem Informasi Manajemen, Kajian, dan Konsultan Perencana. Rincian aset tak berwujud per SKPD per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	7.864.441.107,96	7.864.441.107,96
2	DINAS KESEHATAN	4.190.880.411,00	4.092.756.411,00
3	DPUPRKP	11.340.909.805,68	9.959.388.555,68
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	809.080.450,00	392.503.000,00
5	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	22.726.000,00	22.726.000,00
6	DPMKP2KB	39.750.000,00	0,00
7	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	1.772.131.720,00	1.718.074.720,00
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.490.683.230,00	1.399.217.015,00
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	795.000.000,00	795.000.000,00
10	DINAS PERHUBUNGAN	1.128.138.140,00	1.098.490.040,00
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.948.068.300,00	1.859.745.600,00
12	DINPERINKOP, UKM DAN NAKER	508.858.068,00	339.051.100,00
13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.223.539.675,00	1.134.875.650,00
14	DINAS KEBUDAYAAN	490.505.500,00	331.442.500,00
15	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	178.307.500,00	178.307.500,00
16	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	356.351.000,00	356.351.000,00
17	DINAS PARIWISATA	4.571.739.850,00	4.488.573.600,00
18	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	745.906.000,00	745.906.000,00
19	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	79.580.000,00	79.580.000,00
20	DINAS PERDAGANGAN	1.418.073.191,44	1.338.137.191,44
21	SEKRETARIAT DAERAH	164.102.000,00	164.102.000,00
22	SEKRETARIAT DPRD	50.254.000,00	50.254.000,00
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9.063.811.093,00	7.807.296.028,00
24	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3.669.922.600,00	3.611.832.600,00
25	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	498.637.000,00	458.954.500,00
26	INSPEKTORAT DAERAH	138.801.800,00	138.801.800,00
	JUMLAH	55.560.198.442,08	50.425.807.919,08

3. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Rp32.629.551.495,50

Penghitungan masa manfaat Aset Tak Berwujud didasarkan pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Bab XII.

Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan pada tahun Aset Tak Berwujud tersebut diperoleh berdasarkan Harga Perolehan dan masa manfaatnya setiap tahun. Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan Amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, menggunakan metode garis lurus untuk menghitung Amortisasi Aset Tak Berwujud yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tak Berwujud secara merata setiap tahun selama masa manfaat. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah melakukan Amortisasi atas Aset Tak Berwujud yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Berdasarkan masa manfaat, Aset Tak Berwujud dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tak terbatas (indefinite life) dan Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat terbatas (finite life). Untuk Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tak terbatas (indefinite life) tidak dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, sehingga yang dikelola hanya Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat terbatas (finite life). Masa manfaat Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat terbatas dapat dibatasi dari umur, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek. Adapun jenis dan masa manfaat Aset Tak Berwujud sebagaimana dalam tabel dibawah.

Metode amortisasi Aset Tak Berwujud diterapkan dengan menggunakan metode garis lurus yang dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tak Berwujud secara merata setiap tahun selama masa manfaat. Jadi perhitungannya harga perolehan dibagi masa manfaat dan diperoleh nilai amortisasi per tahun. Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan untuk setiap unit Aset Tak Berwujud yang dilakukan setiap akhir tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Aset Tak Berwujud yang seluruh nilainya telah diamortisasikan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di Neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud. Aset Tak Berwujud yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan. Ketentuan mengenai penghapusan terhadap Aset Tak Berwujud berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR MASA MANFAAT ASET TAK BERWUJUD

KODE AKUN	URAIAN	MASA MANFAAT
1.5	ASET LAINNYA	
1.5.03	ASET TIDAK BERWUJUD	
1.5.03.01	ASET TIDAK BERWUJUD	
1.5.03.01.01	ASET TIDAK BERWUJUD	
1.5.03.01.01.0001	Goodwill	
1.5.03.01.01.0002	Lisensi dan Franchise	
1.5.03.01.01.0003	Hak Cipta	
1.5.03.01.01.0004	Hak Paten	20
1.5.03.01.01.0005	Software	10
1.5.03.01.01.0006	Kajian	5
1.5.03.01.01.0007	Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	
1.5.03.01.01.0008	Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan	
1.5.03.01.01.0009	Aset Tidak Berwujud Lainnya	10

Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per SKPD per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No	SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	5.815.639.533,49	5.035.374.825,61
2	DINAS KESEHATAN	1.636.745.525,78	1.265.724.837,18
3	DPUPRKP	4.901.705.238,83	3.857.192.239,11
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	238.613.845,06	157.570.600,02
5	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11.362.999,92	9.090.399,96
6	DPMKP2KB	827.500,00	-
7	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	905.166.188,40	729.754.916,20
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.055.981.718,15	856.628.928,33
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	795.000.000,00	795.000.000,00
10	DINAS PERHUBUNGAN	883.192.046,84	718.401.898,80
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.033.043.764,76	825.289.379,84



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

12	DINPERINKOP UKM DAN NAKER	101.100.424,49	52.435.095,79
13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	919.809.280,09	844.524.890,36
14	DINAS KEBUDAYAAN	209.649.675,24	156.357.100,12
15	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	139.186.000,00	124.575.250,00
16	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	318.715.699,84	283.080.599,92
17	DINAS PARIWISATA	4.051.782.540,41	3.707.220.309,84
18	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	667.724.275,00	630.313.900,00
19	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	55.705.999,84	47.747.999,92
20	DINAS PERDAGANGAN	577.699.867,81	431.457.318,31
21	SEKRETARIAT DAERAH	118.404.999,92	106.484.999,96
22	SEKRETARIAT DPRD	25.126.999,92	20.101.599,96
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.300.579.235,22	4.380.534.551,09
24	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.504.439.016,84	2.272.410.542,12
25	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	268.385.584,65	229.564.033,48
26	INSPEKTORAT DAERAH	93.963.535,00	84.323.855,04
	JUMLAH	32.629.551.495,50	27.621.160.070,96

Sehingga Aset Tak Berwujud Netto per 31 Desember 2023 per SKPD adalah sebagai berikut :

No	SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	2.048.801.574,47	2.829.066.282,35
2	DINAS KESEHATAN	2.554.134.885,22	2.827.031.573,82
3	DPUPRKP	6.439.204.566,85	6.102.196.316,57
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	570.466.604,94	234.932.399,98
5	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11.363.000,08	13.635.600,04
6	DPMKP2KB	38.922.500,00	0,00
7	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	866.965.531,60	988.319.803,80
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.434.701.511,85	542.588.086,67
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	0,00	0,00
10	DINAS PERHUBUNGAN	244.946.093,16	380.088.141,20
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	915.024.535,24	1.034.456.220,16
12	DINPERINKOP, UKM DAN NAKER	407.757.643,51	286.616.004,21
13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	303.730.394,91	290.350.759,64
14	DINAS KEBUDAYAAN	280.855.824,76	175.085.399,88
15	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	39.121.500,00	53.732.250,00
16	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	37.635.300,16	73.270.400,08
17	DINAS PARIWISATA	519.957.309,59	781.353.290,16
18	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	78.181.725,00	115.592.100,00
19	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	23.874.000,16	31.832.000,08
20	DINAS PERDAGANGAN	840.373.323,63	906.679.873,13
21	SEKRETARIAT DAERAH	45.697.000,08	57.617.000,04
22	SEKRETARIAT DPRD	25.127.000,08	30.152.400,04
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.763.231.857,78	3.426.761.476,91
24	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.165.483.583,16	1.339.422.057,88
25	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	230.251.415,35	229.390.466,52
26	INSPEKTORAT DAERAH	44.838.265,00	54.477.944,96
	JUMLAH	22.930.646.946,58	22.804.647.848,12



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

4. Aset Lain-lain

Rp135.005.487.411,19

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga dan ATB. Diantaranya adalah piutang yang tidak tertagih dan aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dikarenakan rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan. Saldo Aset lain-lain per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	SKPD	Saldo Awal	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Saldo Akhir
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	75.027.501.651,42	-	-	75.027.501.651,42
2	DINAS KESEHATAN	16.460.313.612,37	-	-	16.460.313.612,37
3	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.357.781.745,58	-	-	5.357.781.745,58
4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.842.115,00	-	-	12.842.115,00
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	75.717.500,00	-	-	75.717.500,00
6	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	-
7	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-
8	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	10.360.520,00	-	-	10.360.520,00
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	960.016.528,70	-	-	960.016.528,70
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	855.577.466,62	-	-	855.577.466,62
11	DINAS PERHUBUNGAN	5.511.595.200,06	-	-	5.511.595.200,06
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.043.624.310,00	-	-	1.043.624.310,00
13	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH TENAGA KERJA	356.516.998,00	-	-	356.516.998,00
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	68.563.586,00	-	-	68.563.586,00
15	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	-	-	-	-
16	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	2.423.250,00	-	-	2.423.250,00
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	115.392.901,73	-	-	115.392.901,73
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.685.854.147,00	-	-	2.685.854.147,00
19	DINAS PARIWISATA	656.455.024,90	-	-	656.455.024,90
20	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	867.881.647,41	195.108.654,75	3.747.150,00	1.059.243.152,16
21	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	59.479.662,00	3.747.150,00	-	63.226.812,00
22	DINAS PERDAGANGAN	21.226.034.538,91	-	-	21.226.034.538,91
23	SEKRETARIAT DAERAH	170.571.284,00	-	4.421.700,00	166.149.584,00
24	SEKRETARIAT DPRD	177.554.575,00	-	-	177.554.575,00
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	48.740.500,00	-	-	48.740.500,00
26	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.920.596.827,41	20.139.700,00	-	1.940.736.527,41
27	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	158.711.922,00	73.700.000,00	-	232.411.922,00
28	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	-
29	KAPANEWON WONOSARI	21.451.537,00	-	-	21.451.537,00
30	KAPANEWON PALIYAN	22.814.664,11	-	-	22.814.664,11
31	KAPANEWON PANGGANG	208.186.250,00	-	-	208.186.250,00
32	KAPANEWON TEPUS	72.152.857,16	-	-	72.152.857,16
33	KAPANEWON RONGKOP	29.285.000,00	-	-	29.285.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	SKPD	Saldo Awal	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Saldo Akhir
34	KAPANEWON SEMANU	45.472.334,00	-	-	45.472.334,00
35	KAPANEWON PONJONG	20.136.875,00	-	-	20.136.875,00
36	KAPANEWON KARANGMOJO	64.777.166,66	-	-	64.777.166,66
37	KAPANEWON PLAYEN	33.217.500,00	-	-	33.217.500,00
38	KAPANEWON NGLIPAR	37.655.375,00	-	-	37.655.375,00
39	KAPANEWON NGAWEN	2.850.000,00	-	-	2.850.000,00
40	KAPANEWON SEMIN	17.286.000,00	-	-	17.286.000,00
41	KAPANEWON PATUK	67.955.250,00	781.175.957,71	781.175.957,71	67.955.250,00
42	KAPANEWON SAPTOSARI	45.283.858,29	-	-	45.283.858,29
43	KAPANEWON GEDANGSARI	3.110.000,00	-	-	3.110.000,00
44	KAPANEWON GIRISUBO	66.220.200,00	-	-	66.220.200,00
45	KAPANEWON TANJUNGSARI	63.173.400,00	-	-	63.173.400,00
46	KAPANEWON PURWOSARI	51.833.998,11	-	-	51.833.998,11
47	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.277.777,00	14.713.200,00	-	17.990.977,00
	Total	134.706.247.556,44	1.088.584.662,46	789.344.807,71	135.005.487.411,19

5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Rp95.871.074.509,97

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada tahun 2023 sebesar Rp95.871.074.509,97 merupakan Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain-Aset rusak berat/usang sebesar Rp82.768.895.856,85 dan Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain - Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah sebesar Rp13.102.178.653,12

6. Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Rp2.772.353.000,00

Dana TDF merupakan realisasi transfer dari pemerintah pusat-Dana Perimbangan yang disalurkan secara non tunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF) sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara Nontunai. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. DBH PBB	138.587.000,00
2. DBH PPh Pasal 22	2.605.720.000,00
3. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	26.061.000,00
4. DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	1.985.000,00
Jumlah	<u>2.772.353.000,00</u>

5.3.6 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Rp48.795.136.209,98

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Rp436.120.053,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga atau PFK pada tahun 2023 adalah sebesar Rp436.120.053,00 merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2. Pendapatan Diterima di Muka

Rp1.749.270.787,98

Pendapatan Diterima di Muka adalah utang atas kontribusi perjanjian penyewaan aset pemerintah daerah yang telah dibayar dimuka tetapi belum menjadi hak pemerintah daerah karena masih terdapat kewajiban untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari.

Terdapat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa sewa los dan kios pasar sebesar Rp1.494.596.218,98, BKAD berupa Sewa Tanah dan Ruangan sebesar Rp129.407.750,00 dan pada Dinas Pariwisata berupa Sewa Los dan Kios di Lokasi Obyek Wisata sebesar Rp125.266.819,00.

No	Uraian	2023	2022
1	Dinas Perdagangan (sewa los dan kios pasar)	1.494.596.218,98	1.019.387.529,40
2	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Sewa Tanah dan Ruangan)	129.407.750,00	50.473.250,00
3	Dinas Pariwisata (Sewa Los dan Kios di Lokasi Obyek Wisata)	125.266.819,00	195.950.094,00
	Jumlah	1.749.270.787,98	1.265.810.873,40

3. Utang Belanja

Rp46.279.379.968,00

Utang belanja merupakan belanja yang masih harus dibayar per tanggal 31 Desember 2023. Belanja-belanja tersebut meliputi utang belanja pegawai, utang belanja barang dan jasa, utang belanja modal dan utang belanja bagi hasil.

3.1 Utang Belanja Pegawai

Rp25.758.590.458,00

Utang Belanja Pegawai merupakan perhitungan dari belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp2.423.290.021,00 belanja tambahan penghasilan ASN bulan desember yang akan dibayarkan di tahun berikutnya sebesar Rp6.418.980.769,00, Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebesar Rp16.902.807.048,00 dan Utang belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp13.512.620,00. Sehingga saldo akhir utang belanja pegawai tahun 2023 sebesar Rp25.758.590.458,00.

No	Uraian	2023	2022
1	Belanja gaji dan tunjangan ASN	2.423.290.021,00	-
2	Belanja tambahan penghasilan ASN	6.418.980.769,00	-
3	Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	16.902.807.048,00	1.156.550.467,00
4	Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH	13.512.620,00	8.093.250,00
	Jumlah	25.758.590.458,00	1.164.643.717,00

3.2 Utang Belanja Barang dan Jasa

Rp18.405.619.573,00

Utang Belanja Barang dan Jasa merupakan beban akhir tahun yang dibayarkan pada tahun berikutnya. Saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.405.619.573,00 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	2023	2022
1	Obat obatan	-	9.775.000,00
2	Jasa tenaga administrasi	462.500,00	-
3	Telpon	7.324.392,00	7.358.185,00
4	Air	43.610.520,00	64.702.180,00
5	Listrik	1.463.715.997,00	1.332.162.302,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

6	Kawat/ Faximile/ Internet/ TV Berlangganan	5.720.700,00	618.960,00
7	Jasa Insentif Pegawai	543.387.008,00	566.029.488,00
8	Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.697.500,00	-
9	Barang dan Jasa BLUD	16.333.700.956,00	15.785.635.186,09
	Jumlah	18.405.619.573,00	17.766.281.301,09

3.3 Utang Belanja Modal

Rp196.809.900,00

Utang Belanja Modal merupakan nilai tagihan sebesar 20% terhadap pekerjaan konsultan perencana gedung yang belum dilelangkan dan tagihan sebesar 10% terhadap pekerjaan konsultan pengawas konstruksi yang belum dibayarkan oleh SKPD. Hal ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Gedung Negara paragraf 3 (biaya perencanaan teknis) dan paragraf 4 (biaya pengawasan teknis). Daftar Utang Belanja Modal per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	2023	2022
1	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung	196.809.900,00	7.425.900,00
2	Utang Belanja Modal Jalan Dan Jembatan	-	141.181.100,00
3	Utang Belanja Modal Bangunan Air	-	23.139.400,00
4	Utang Belanja Modal Jaringan Air	0,00	-
4	Utang Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	4.786.800,00
5	Utang Belanja Aset Tak Berwujud		35.420.000,00
	Jumlah	196.809.900,00	211.953.200,00

3.4 Utang Belanja Bagi Hasil

Rp1.918.360.037,00

Utang bagi hasil merupakan perhitungan dari Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp1.049.581.187,00 dan Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp868.778.850,00. Saldo per 31 desember 2023 adalah sebesar Rp1.918.360.037,00

No	Uraian	2023	2022
1	Utang Bagi Hasil Pajak Daerah	1.049.581.187,00	954.085.000,00
2	Utang Bagi Hasil Retribusi Daerah	868.778.850,00	308.700.950,00
	Jumlah	1.918.360.037,00	1.262.785.950,00

4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Rp330.365.401,00

Utang Jangka Pendek Lainnya untuk tahun 2023 merupakan Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus DAK Non Fisik BOP PAUD dan utang Bantuan Keuangan Khusus dari pemerintah Provinsi. Saldo per 31 Desember 2023 per jenis utang jangka pendek lainnya adalah sebagai berikut :

Uraian	2023	2022
Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus DAK Non Fisik BOP PAUD	2.835.000,00	-
Utang Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan	327.530.401,00	60.000,00
Jumlah	330.365.401,00	60.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

5.3.7 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG **Rp0,00**

Saldo awal Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00. Selama tahun 2023 tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang sehingga saldo akhir per 31 Desember 2023 tetap sebesar Rp0,00.

5.3.8 EKUITAS **Rp3.198.939.371.224,53**

Ekuitas Akhir pada tahun 2023 sebesar Rp3.198.939.371.224,53 berasal dari Ekuitas Awal LKPD Audited 2022, Surplus/Defisit LO, dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2023	2022
Ekuitas Awal	3.329.713.227.045,77	3.277.700.859.221,22
Surplus/Defisit - LO	(35.649.411.330,25)	59.841.994.559,63
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan	(95.124.444.490,99)	(7.829.626.735,08)
-Penyesuaian Kas dan Setara Kas	(0,58)	
-Penyesuaian Piutang dan Penyisihan Piutang	306.801.379,25	1.291.588.979,11
-Penyesuaian Persediaan	6.539.213,56	(477.589.760,15)
-Penyesuaian Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	964.084.351,58	(22.317.650.440,48)
-Penyesuaian Aset Lainnya dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(94.325.325.132,53)	(4.646.960.126,14)
-Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka	(1.534.569,44)	-
-Penyesuaian Utang Belanja	7.614.399,09	245.400,00
-Penyesuaian Penyertaan Modal	(2.082.897.052,92)	19.982.318.712,03
-Penyesuaian Pendapatan	347.402,00	-
-Penyesuaian Beban	(74.481,00)	(1.661.579.499,45)
Ekuitas Akhir	3.198.939.371.224,53	3.329.713.227.045,77



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

5.4 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut.

1. Pendapatan LO dari kegiatan operasional;
2. Beban dari kegiatan operasional ;
3. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional;
4. Pos luar biasa;
5. Surplus/defisit LO.

5.4.1 PENDAPATAN **Rp2.048.021.394.661,57**

Pendapatan LO merupakan hak Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LO per 31 Desember 2023 dibeberapa SKPD terdapat perbedaan dengan realisasi pendapatan pada LRA per 31 Desember 2023 dengan penjelasan sebagai berikut.

No	SKPD	Pendapatan-LO	Pendapatan-LRA	Selisih	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	292.358.494,00	0,00	292.358.494,00	Pendapatan Hibah
2	Dinas Kesehatan	164.256.135.813,15	138.251.232.750,15	26.004.903.063,00	Pendapatan Hibah Rp25.722.874.242,00; Penambahan PiutangRp282.023.021,00 dan Koreksi Piutang Rp5.800,00
3	DPUPRKP	6.794.041.410,00	415.616.500,00	6.378.424.910,00	Pendapatan Hibah
4	SATPOL PP	15.520.000,00	0,00	15.520.000,00	Pendapatan Hibah
5	DPMKPPKB	1.369.146.385,00	0,00	1.369.146.385,00	Pendapatan Hibah
6	DISDUKCAPIL	246.835.050,00	0,00	246.835.050,00	Pendapatan Hibah
7	Dinas Perhubungan	6.357.573.330,00	2.493.010.980,00	3.864.562.350,00	Pendapatan Hibah
8	DISKOMINFO	683.182.116,00	517.250.553,00	165.931.563,00	Penambahan Piutang 2023 Rp168.392.847,00 dan Pelunasan Piutang 2022 Rp2.461.284,00
9	DPMPTSP	1.033.405.436,86	1.044.532.436,86	(11.127.000,00)	Pelunasan Piutang 2022
10	DPK	90.158.350,00	0,00	90.158.350,00	Pendapatan Hibah
11	Dinas Pariwisata	25.270.236.255,00	25.199.552.980,00	70.683.275,00	Pendapatan Diterima Dimuka
12	DPKH	5.342.976.254,00	540.734.900,00	4.802.241.354,00	Pendapatan Hibah
13	Dinas Perdagangan	7.209.126.079,86	5.193.417.200,00	2.015.708.879,86	Pendapatan Hibah Rp2.489.383.000,00 dan Pendapatan Diterima Dimuka Rp475.208.689,58
14	Sekretariat Daerah	24.755.000,00	0,00	24.755.000,00	Pendapatan Hibah



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	SKPD	Pendapatan-LO	Pendapatan-LRA	Selisih	Keterangan
15	BKAD	1.826.642.696.057,70	1.816.451.337.866,85	10.191.358.190,85	Pendapatan Hibah Rp157.930.800,00; Penambahan Piutang 2023 Rp25.806.909.138,25 ; Pembayaran Piutang Rp22.412.218.684,45 ; Penambahan PDD 2023 Rp50.473.250,00; Pendapatan Lain-lain Rp83.391.782,00; Hasil Penjualan BMD yang direklas ke surplus/defisit non opsional Rp304.484.220,00; Koreksi Piutang Rp1.868.386.114,40; Koreksi SKP Rp8.891.049,00; Penyesuaian PDD 2022 Rp129.407.750,00 ; dan koreksi pendapatan Rp5.162.660.591,65,00.

Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Gunungkidul TA 2023 yang telah diakui sebagai penambah ekuitas selama periode TA 2023 dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kepada pihak lain adalah sebagai berikut.

Rincian Realisasi Pendapatan - LO

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	84.098.352.561,00	78.896.130.814,50	5.202.221.746,50
1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	35.224.925.990,86	30.096.131.540,59	5.128.794.450,27
1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.010.287.897,30	16.524.205.416,02	7.486.082.481,28
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	145.209.345.359,41	148.041.571.384,05	(2.832.226.024,64)
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	288.542.911.808,57	273.558.039.155,16	14.984.872.653,41
2	Pendapatan Transfer			
2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan			
2.1.1	Dana Bagi Hasil	20.705.786.000,00	29.676.900.267,00	(8.971.114.267,00)
2.1.2	Dana Alokasi Umum	912.903.769.190,00	865.880.327.665,00	47.023.441.525,00
2.1.3	Dana Alokasi Khusus-Fisik	74.024.339.759,00	141.410.401.807,00	(67.386.062.048,00)
2.1.4	Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	309.405.479.537,00	283.497.310.009,00	25.908.169.528,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1.317.039.374.486,00	1.320.464.939.748,00	(3.425.565.262,00)
2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya			
2.2.1	Dana Insentif Daerah	0,00	12.428.629.000,00	(12.428.629.000,00)
2.2.2	Dana Desa	179.933.551.000,00	144.366.117.000,00	35.567.434.000,00
2.2.3	Insentif Fiskal	5.952.497.000,00	0,00	5.952.497.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	185.886.048.000,00	156.794.746.000,00	29.091.302.000,00
2.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah			
2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil	126.546.086.838,00	119.737.599.672,00	6.808.487.166,00
2.3.2	Bantuan Keuangan	78.485.930.549,00	72.072.803.728,00	6.413.126.821,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	205.032.017.387,00	191.810.403.400,00	13.221.613.987,00
	Jumlah Pendapatan Transfer	1.707.957.439.873,00	1.669.070.089.148,00	38.887.350.725,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah			
3.1	Pendapatan Hibah	51.428.189.935,00	50.728.498.931,85	699.691.003,15
3.2	Pendapatan Lainnya	92.853.045,00	80.631.912,00	12.221.133,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah	51.521.042.980,00	50.809.130.843,85	711.912.136,15
	Jumlah Pendapatan	2.048.021.394.661,57	1.993.437.259.147,01	54.584.135.514,56



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah **Rp288.542.911.808,57**

Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Kabupaten Gunungkidul TA 2023 meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah **Rp84.098.352.561,00**

Pendapatan Pajak Daerah meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak mineral Bukan Logam dan Batuan, PBB-P2, dan BPHTB dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Pendapatan Pajak Daerah

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
a	Pajak Hotel	4.539.528.861,00	3.086.613.949,00	1.452.914.912,00
b	Pajak Restoran	13.257.843.837,00	12.155.375.689,00	1.102.468.148,00
c	Pajak Hiburan	175.601.597,00	119.333.395,00	56.268.202,00
d	Pajak Reklame	1.320.092.581,00	1.206.587.873,00	113.504.708,00
e	Pajak Penerangan Jalan	22.418.374.086,00	19.378.017.705,00	3.040.356.381,00
f	Pajak Parkir	102.168.814,00	63.004.400,00	39.164.414,00
g	Pajak Air Tanah	986.840.351,00	949.003.365,00	37.836.986,00
h	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.825.265.400,00	1.030.731.000,00	794.534.400,00
i	PBBP2	26.744.299.720,00	26.364.042.861,00	380.256.859,00
j	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	12.728.337.314,00	14.543.420.577,50	(1.815.083.263,50)
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah		84.098.352.561,00	78.896.130.814,50	5.202.221.746,50

a. Pajak Hotel..... **Rp4.539.528.861,00**

Pendapatan Pajak Hotel meliputi Pajak Hotel, Motel, Losmen, Wisma Pariwisata, Rumah Penginapan dan Rumah Kos dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Pendapatan Pajak Hotel

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Pajak Hotel	4.254.425.127,00	2.863.552.864,00	1.390.872.263,00
2	Pajak Motel	2.850.000,00	1.550.000,00	1.300.000,00
3	Pajak Losmen	263.440.484,00	218.786.085,00	44.654.399,00
4	Pajak Wisma Pariwisata	8.215.000,00	0,00	8.215.000,00
5	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	7.076.300,00	2.425.000,00	4.651.300,00
6	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	3.521.950,00	300.000,00	3.221.950,00
Jumlah Pendapatan Pajak Hotel		4.539.528.861,00	3.086.613.949,00	1.452.914.912,00

b. Pajak Restoran..... **Rp13.257.843.837,00**

Pendapatan Pajak Restoran meliputi Pajak atas Restoran, Rumah Makan, Kafetaria, Warung dan Jasa Boga/Katering dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Pendapatan Pajak Restoran

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.558.696.949,00	2.052.515.020,00	1.506.181.929,00
2	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	4.441.025.896,00	4.760.890.937,00	(319.865.041,00)
3	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	32.032.200,00	4.916.590,00	27.115.610,00
4	Pajak Warung dan Sejenisnya	424.600,00	88.081.518,00	(87.656.918,00)
5	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	5.225.664.192,00	5.248.971.624,00	(23.307.432,00)
Jumlah Pendapatan Pajak Restoran		13.257.843.837,00	12.155.375.689,00	1.102.468.148,00

c. Pajak Hiburan..... **Rp175.601.597,00**

Pendapatan Pajak Hiburan meliputi pajak atas pagelaran kesenian/musik/tari/ busana, diskotik, karaoke, klub malam, pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran serta pertandingan olahraga dengan rincian sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Rincian Pendapatan Pajak Hiburan

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	500.000,00	1.000.000,00	(500.000,00)
2	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	28.190.000,00	31.919.000,00	(3.729.000,00)
3	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	145.941.597,00	86.214.395,00	59.727.202,00
4	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	220.000,00	200.000,00	20.000,00
5	Pajak Pertandingan Olahraga	750.000,00	0,00	750.000,00
Jumlah Pendapatan Pajak Hiburan		175.601.597,00	119.333.395,00	56.268.202,00

- d. **Pajak Reklame..... Rp1.320.092.581,00**
Pendapatan Pajak Reklame meliputi reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*, reklame kain, reklame melekat/stiker, reklame *neon box*, reklame baliho, reklame bando, reklame *shopsign* dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Pendapatan Pajak Reklame

No	Uraian			
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron			
	Ketetapan	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
	1.216.468.561,00	1.205.436.698,00	976.721.727,00	228.714.971,00
2	Pajak Reklame Kain			
	Ketetapan	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
	113.773.883,00	113.773.883,00	229.761.146,00	(115.987.263,00)
3	Pajak Reklame Melekat/Stiker			
	Ketetapan	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
	882.000,00	882.000,00	105.000,00	777.000,00
Jumlah Pendapatan Pajak Reklame		1.320.092.581,00	1.206.587.873,00	112.727.708,00

Pendapatan Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron TA 2023 tidak sebesar ketetapan pajak yang telah diterbitkan karena terdapat koreksi piutang sebesar Rp11.031.863,00.

- e. **Pajak Penerangan Jalan..... Rp22.418.374.086,00**
Pendapatan Pajak Penerangan Jalan pada TA 2023 sebagai berikut.

Rincian Pendapatan Pajak Penerangan Jalan

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	22.418.374.086,00	19.378.017.705,00	3.040.356.381,00
Jumlah Pendapatan Pajak Penerangan Jalan		22.418.374.086,00	19.378.017.705,00	3.040.356.381,00

- f. **Pajak Parkir..... Rp102.168.814,00**
Pendapatan Pajak Parkir pada TA 2023 sebagai berikut.

Rincian Pendapatan Pajak Parkir

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Pajak Parkir	102.168.814,00	63.004.400,00	39.164.414,00
Jumlah Pendapatan Pajak Parkir		102.168.814,00	63.004.400,00	39.164.414,00

- g. **Pajak Air Tanah..... Rp986.840.351,00**
Pendapatan Pajak Air Bawah Tanah pada TA 2023 sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Rincian Pendapatan Pajak Air Tanah

No	Uraian			
1	Pajak Air Tanah			
	Ketetapan	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
	986.840.351,00	986.840.351,00	949.003.365,00	37.836.986,00
Jumlah Pendapatan Pajak Air Tanah		986.840.351,00	949.003.365,00	37.836.986,00

h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan..... **Rp1.825.265.400,00**

Pendapatan Pajak Mineral Bukan logam meliputi Pajak Batu Kapur, Batu Apung, Pajak Granit/Andesit, Pajak Kaolin dan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Pajak Batu Kapur	1.281.692.200,00	997.788.000,00	283.904.200,00
2	Pajak Batu Apung	0,00	40.000,00	(40.000,00)
3	Pajak Granit/Andesit	10.335.000,00	0,00	10.335.000,00
4	Pajak Kaolin	35.825.000,00	10.758.000,00	25.067.000,00
5	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	497.413.200,00	22.145.000,00	475.268.200,00
Jumlah Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		1.825.265.400,00	1.030.731.000,00	794.534.400,00

i. Pajak Bumi dan Bangunan - Pedesaan dan Perkotaan (PBB - P2)..... **Rp26.744.299.720,00**

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada TA 2023 sebagai berikut.

Rincian Pendapatan PBB P2

No	Ketetapan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
	26.744.299.720,00	26.744.299.720,00	26.364.042.861,00	380.256.859,00
Jumlah Pendapatan PBB P2		26.744.299.720,00	26.364.042.861,00	380.256.859,00

j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan..... **Rp12.728.337.314,00**

Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada TA 2023 sebagai berikut.

Rincian Pendapatan BPHTB

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Audited 2020 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	BPHTB-Pemindahan Hak	12.728.337.314,00	14.543.420.577,50	(1.815.083.263,50)
Jumlah Pendapatan BPHTB		12.728.337.314,00	14.543.420.577,50	(1.815.083.263,50)

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah..... **Rp35.224.925.990,86**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah merupakan penerimaan retribusi yang telah diterima oleh Kas Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah meliputi Penerimaan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Pendapatan Retribusi Daerah

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1.	Retribusi Jasa Umum			
a.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	516.453.900,00	546.279.730,00	(29.825.830,00)
b.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.274.771.128,00	1.239.090.802,00	35.680.326,00
c.	Retribusi Pelayanan Pasar	3.050.320.900,00	2.500.659.950,00	549.660.950,00
d.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	280.155.000,00	346.780.000,00	(66.625.000,00)
e.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	75.650.000,00	73.200.000,00	2.450.000,00
f.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	18.301.000,00	17.733.000,00	568.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
g.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	683.182.116,00	651.097.521,00	32.084.595,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Jasa Umum		5.898.834.044,00	5.374.841.003,00	523.993.041,00
2.	Retribusi Jasa Usaha			
a.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.956.907.121,86	1.924.305.084,94	32.602.036,92
b.	Retribusi Tempat Pelelangan	428.773.002,00	367.312.002,55	61.460.999,45
c.	Retribusi Terminal	50.201.800,00	45.532.000,00	4.669.800,00
d.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	17.762.500,00	16.231.250,00	1.531.250,00
e.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	25.147.470.480,00	20.609.885.749,00	4.537.584.731,00
f.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	689.704.500,00	672.614.500,00	17.090.000,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Jasa Usaha		28.290.819.403,86	23.635.880.586,49	4.654.938.817,37
3.	Retribusi Perijinan Tertentu			
a.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.729.000,00	9.528.000,00	(3.799.000,00)
b.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.029.543.543,00	1.075.881.951,10	(46.338.408,10)
Jumlah Pendapatan Retribusi Perijinan Tertentu		1.035.272.543,00	1.085.409.951,10	(50.137.408,10)
Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah		35.224.925.990,86	30.096.131.540,59	5.128.794.450,27

5.4.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum..... Rp5.898.834.044,00
Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kabupaten Gunungkidul di rincian sebagai berikut.

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp516.453.900,00**
Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan penerimaan retribusi yang telah diterima oleh Kas Daerah yang meliputi Penerimaan Retribusi Kesehatan Hewan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Retribusi Pelayanan Kesehatan

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	516.453.900,00	546.279.730,00	(29.825.830,00)
Jumlah Pendapatan Retribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan		516.453.900,00	546.279.730,00	(29.825.830,00)

- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan..... Rp1.274.771.128,00**
Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan penerimaan retribusi yang dikelola di Dinas Lingkungan Hidup dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup	1.274.771.128,00	1.239.090.802,00	35.680.326,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan		1.274.771.128,00	1.239.090.802,00	35.680.326,00

- c. Retribusi Pelayanan Pasar..... Rp3.050.320.900,00**
Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar merupakan penerimaan retribusi yang dikelola di Dinas Perdagangan dengan rincian sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Rincian Retribusi Pelayanan Pasar

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	UPT Pengelolaan Pasar Wilayah I	1.752.380.000,00	1.469.346.525,00	283.033.475,00
2	UPT Pengelolaan Pasar Wilayah II	1.297.940.900,00	1.031.313.425,00	266.627.475,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar		3.050.320.900,00	2.500.659.950,00	549.660.950,00

- d. **Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor..... Rp280.155.000,00**
Realisasi Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan penerimaan retribusi yang dikelola di Dinas Perhubungan dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Dinas Perhubungan	280.155.000,00	346.780.000,00	(66.625.000,00)
Jumlah Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		280.155.000,00	346.780.000,00	(66.625.000,00)

- e. **Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus..... Rp75.650.000,00**
Realisasi Pendapatan Retribusi Penyedia dan/atau Penyedotan Kakus merupakan penerimaan retribusi yang dikelola di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Retribusi Penyedia dan/atau Penyedotan Kakus

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	DPUPRKP	75.650.000,00	73.200.000,00	2.450.000,00
Jumlah Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus		75.650.000,00	73.200.000,00	2.450.000,00

- f. **Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang..... Rp18.301.000,00**
Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan penerimaan retribusi yang dikelola oleh Dinas Perdagangan (UPT Kemetrologian) dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	UPT Kemetrologian	18.301.000,00	17.733.000,00	568.000,00
Jumlah Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang		18.301.000,00	17.733.000,00	568.000,00

- g. **Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi..... Rp683.182.116,00**
Realisasi Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan penerimaan retribusi yang dikelola di Dinas Komunikasi dan Informasi dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	PT Daya Mitra Telekomunikasi	194.177.727,00	189.401.664,00	4.776.063,00
2	PT Epid Menara Assetco	20.657.205,00	22.854.780,00	(2.197.575,00)
3	PT Centratama Menara Indonesia	23.851.014,00	18.869.844,00	4.981.170,00
4	PT Indosat	0,00	2.168.274,00	(2.168.274,00)
5	PT Inti Bangun Sejahtera	30.707.448,00	20.452.098,00	10.255.350,00
6	PT Komet Infra Nusantara	23.528.703,00	23.528.703,00	0,00
7	PT Kopnatel jaya	5.274.180,00	5.274.180,00	0,00
8	PT Mitrayasa Sarana Informasi	10.313.952,00	10.313.952,00	0,00
9	PT Profesional Telekomunikasi	82.013.499,00	84.797.094,00	(2.783.595,00)
10	PT Solusi Menara Indonesia	28.714.980,00	28.714.980,00	0,00
11	PT Solusi Tunas Pratama	85.529.619,00	87.932.301,00	(2.402.682,00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
12	PT Telkomsel	2.461.284,00	18.108.018,00	(15.646.734,00)
13	PT Tower Bersama Group	153.478.638,00	126.082.203,00	27.396.435,00
14	PT Towerindo Konvergensi	7.618.260,00	10.108.845,00	(2.490.585,00)
15	PT XL Axiata	2.490.585,00	2.490.585,00	0,00
16	PT Sarana Inti Persada	2.402.682,00	0,00	2.402.682,00
17	PT Hutchison Tri Indonesia	9.962.340,00	0,00	9.962.340,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		683.182.116,00	651.097.521,00	32.084.595,00

5.4.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha..... Rp28.290.819.403,86

Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Kabupaten Gunungkidul di rincian sebagai berikut.

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah..... Rp1.956.907.121,86

Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan penerimaan retribusi yang dikelola di Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan BKAD dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Dinas Kesehatan	187.988.000,00	127.680.000,00	60.308.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	339.966.500,00	286.512.500,00	53.454.000,00
3	Dinas Pariwisata	105.003.275,00	55.734.703,00	49.268.572,00
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	24.281.000,00	38.373.000,00	(14.092.000,00)
5	Dinas Perdagangan	765.834.179,86	887.956.548,61	(122.122.368,75)
6	Badan Keuangan dan Aset Daerah	533.834.167,00	528.048.333,33	5.785.833,67
Jumlah Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		1.956.907.121,86	1.924.305.084,94	32.602.036,92

b. Retribusi Tempat Pelelangan..... Rp428.773.002,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan merupakan penerimaan retribusi pelelangan ikan yang dikelola di Dinas Kelautan dan Perikanan dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Retribusi Tempat Pelelangan

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	TPI Sadeng	204.394.437,50	217.933.190,05	(13.538.752,55)
2	TPI Nampu- Wedi Ombo	400.000,00	155.000,00	245.000,00
3	TPI Siung	7.555.662,50	5.373.125,00	2.182.537,50
4	TPI Ngandong - Sundak	9.185.700,00	3.822.100,00	5.363.600,00
5	TPI Drini	50.329.762,00	24.223.575,00	26.106.187,00
6	TPI Baron	84.707.700,00	51.762.837,50	32.944.862,50
7	TPI Ngrenahan	68.998.540,00	43.772.325,00	25.226.215,00
8	TPI Gesing	3.201.200,00	20.269.850,00	(17.068.650,00)
Jumlah Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan		428.773.002,00	367.312.002,55	61.460.999,45

c. Retribusi Terminal..... Rp50.201.800,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Terminal merupakan penerimaan retribusi yang dikelola di Dinas Perhubungan dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Retribusi Terminal

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Dinas Perhubungan	50.201.800,00	45.532.000,00	4.669.800,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Terminal		50.201.800,00	45.532.000,00	4.669.800,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- d. **Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila..... Rp17.762.500,00**
Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan merupakan penerimaan retribusi yang dikelola di Dinas Pariwisata dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Audited 2020 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Penginapan Kukup	17.762.500,00	16.231.250,00	1.531.250,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan		17.762.500,00	16.231.250,00	1.531.250,00

- e. **Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga..... Rp25.147.470.480,00**
Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga merupakan penerimaan retribusi yang dikelola di Dinas Pariwisata dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Pos Baron	5.970.503.000,00	5.624.247.475,00	346.255.525,00
2	Pos Ngestirejo	745.028.000,00	789.098.500,00	(44.070.500,00)
3	Pos Ngeberan	53.604.000,00	39.334.500,00	14.269.500,00
4	Pos JJLS	5.345.412.500,00	4.417.433.500,00	927.979.000,00
5	Pos Tepus	2.426.547.000,00	1.570.663.500,00	855.883.500,00
6	Pos Wediombo	733.153.500,00	518.260.500,00	214.893.000,00
7	Pos Balong	3.073.500,00	5.058.000,00	(1.984.500,00)
8	Pos Ngrenehan	556.389.000,00	414.927.000,00	141.462.000,00
9	Pos Pulegundes	1.824.256.500,00	1.569.533.000,00	254.723.500,00
10	Pos Siung	220.671.000,00	287.383.500,00	(66.712.500,00)
11	Pos Gunung Gambar	4.530.400,00	3.116.400,00	1.414.000,00
12	Gua Cerme	4.950.400,00	4.272.800,00	677.600,00
13	Pos Nglangeran	127.458.000,00	140.146.000,00	(12.688.000,00)
14	Pos Bleberan	56.156.000,00	45.880.000,00	10.276.000,00
15	Pos Kalisuci	9.913.500,00	6.808.500,00	3.105.000,00
16	Pos Bejiharjo	575.871.000,00	438.662.500,00	137.208.500,00
17	Retribusi Kios Baron	15.065.500,00	14.074.000,00	991.500,00
18	Retribusi Los Baron	13.202.200,00	13.567.200,00	(365.000,00)
19	Retribusi Kios Kukup	8.022.000,00	7.049.000,00	973.000,00
20	Retribusi Los Kukup	6.044.200,00	5.000.000,00	1.044.200,00
21	Pos Pantai Ngedan	18.315.000,00	8.271.000,00	10.044.000,00
22	Pos Watu Gupit (Giri Jati)	1.562.328.000,00	792.229.500,00	770.098.500,00
23	Pos Watu Gupit (Giri Cahyo)	1.129.869.000,00	339.030.000,00	790.839.000,00
24	Pos Banjarejo	972.011.500,00	211.489.000,00	760.522.500,00
25	Pos Sriten	9.279.000,00	15.268.500,00	(5.989.500,00)
26	Pos Retribusi Timang (Purwodadi)	47.092.500,00	16.704.000,00	30.388.500,00
27	Pos Retribusi Gesing (Girikarto)	2.206.120.500,00	3.104.010.000,00	(897.889.500,00)
28	Retribusi Kios Watu Gupit	500.000,00	404.000,00	96.000,00
30	Pos Sepanjang, Kemadang	26.163.000,00	0,00	26.163.000,00
31	Pos Pok Tunggal	223.706.000,00	0,00	223.706.000,00
33	Premi Asuransi Jasa Raharja	252.234.780,00	207.963.874,00	44.270.906,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga		25.147.470.480,00	20.609.885.749,00	4.537.584.731,00

- f. **Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah..... Rp689.704.500,00**
Realisasi Pendapatan Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah merupakan penerimaan retribusi yang dikelola di Dinas Pertanian dan Pangan serta Dinas Kelautan dan Perikanan dengan perincian sebagai berikut.

Rincian Retribusi Produk Usaha Daerah

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	590.779.500,00	583.994.500,00	6.785.000,00
2	Dinas Pertanian dan Pangan	98.925.000,00	88.620.000,00	10.305.000,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah		689.704.500,00	672.614.500,00	17.090.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- 5.4.1.1.2.3 Retribusi Perijinan Tertentu..... 1.035.272.543,00**
Realisasi Pendapatan Retribusi Perijinan Tertentu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul di rincian sebagai berikut.

- a. Retribusi Ijin Trayek..... Rp5.729.000,00**
Realisasi Pendapatan Retribusi Ijin Trayek merupakan penerimaan retribusi yang dikelola di Dinas Perhubungan dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Retribusi Ijin Trayek

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Dinas Perhubungan	5.729.000,00	9.528.000,00	(3.799.000,00)
Jumlah Retribusi Ijin Trayek		5.729.000,00	9.528.000,00	(3.799.000,00)

- b. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung..... Rp1.029.543.543,00**
Realisasi Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung merupakan penerimaan retribusi yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Retribusi Ijin Trayek

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu	1.029.543.543,00	1.075.881.951,10	(46.338.408,10)
Jumlah Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung		1.029.543.543,00	1.075.881.951,10	(46.338.408,10)

- 5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp24.010.287.897,30**
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pendapatan yang sudah menjadi hak Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang telah diakui sebagai penambah ekuitas dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kepada pihak lain dengan rincian sebagai berikut.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	BANK BPD DIY	11.251.547.690,00	12.448.509.036,00	(1.196.961.346,00)
2	PT BPR Bank Daerah Gunungkidul	7.800.130.085,34	3.740.819.843,70	4.059.310.241,64
3	Perusahaan Daerah Air Minum	4.772.415.656,24	0,00	4.772.415.656,24
4	BUKP	186.194.465,72	334.876.536,32	(148.682.070,60)
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		24.010.287.897,30	16.524.205.416,02	7.486.082.481,28

- 5.4.1.1.4 Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah..... Rp145.209.345.359,41**

Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Kerjasama daerah, Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan BLUD, Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda, serta Lain-lain PAD Sah lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	199.602.000,00	197.734.000,00	1.868.000,00
2	Hasil Kerja Sama Daerah	2.818.492.000,00	2.557.370.000,00	261.122.000,00
3	Jasa Giro	1.154.677.131,00	1.602.577.863,00	(447.900.732,00)
4	Pendapatan Bunga	1.045.305.196,62	2.614.228.817,38	(1.568.923.620,76)
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	496.192.012,40	3.082.751.049,97	(2.586.559.037,57)
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	151.208.315,00	189.080.070,00	(37.871.755,00)
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	673.799.896,00	362.329.012,00	311.470.884,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	40.067.618,86	42.575.748,58	(2.508.129,72)
9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	30.900.000,00	0,00	30.900.000,00
10	Pendapatan dari Pengembalian	253.827.618,38	160.491.731,12	93.335.887,26
11	Pendapatan dari BLUD	138.345.273.571,15	137.232.433.092,00	1.112.840.479,15
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah		145.209.345.359,41	148.041.571.384,05	(2.832.226.024,64)

5.4.1.1.4.1. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan..... **Rp199.602.000,00**

Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan penerimaan dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Penerimaan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Hasil Sewa BMD	199.602.000,00	197.734.000,00	1.868.000,00
Jumlah Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		199.602.000,00	197.734.000,00	1.868.000,00

5.4.1.1.4.2. Hasil Kerja Sama Daerah..... **Rp2.818.492.000,00**

Realisasi Hasil Kerja Sama Daerah merupakan penerimaan pendapatan dari kerjasama pemungutan MCK dan tempat khusus parkir yang dikelola Dinas Perdagangan dan Dinas Perhubungan dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Penerimaan Hasil Kerja Sama Daerah

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Dinas Perhubungan	2.132.807.000,00	2.005.907.000,00	126.900.000,00
2	Dinas Perdagangan	685.685.000,00	551.463.000,00	134.222.000,00
Jumlah Hasil Kerja Sama Daerah		2.818.492.000,00	2.557.370.000,00	261.122.000,00

5.4.1.1.4.3. Jasa Giro **Rp1.154.677.131,00**

Realisasi penerimaan jasa giro merupakan penerimaan jasa giro kas daerah dan jasa giro bendahara dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Penerimaan Jasa Giro

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.072.822.952,00	1.556.842.784,00	(484.019.832,00)
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	81.854.179,00	45.735.079,00	36.119.100,00
Jumlah Penerimaan Jasa Giro		1.154.677.131,00	1.602.577.863,00	(447.900.732,00)

5.4.1.1.4.4. Pendapatan Bunga..... **Rp1.045.305.196,62**

Realisasi penerimaan pendapatan bunga merupakan penerimaan pendapatan bunga deposito dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Pendapatan Bunga

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.045.305.196,62	2.614.228.817,38	(1.568.923.620,76)
Jumlah Pendapatan Bunga		1.045.305.196,62	2.614.228.817,38	(1.568.923.620,76)

5.4.1.1.4.5. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah..... **Rp496.192.012,40**

Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan tuntutan ganti kerugian daerah berupa Temuan Inspektorat Daerah, Inspektorat Provinsi dan BPK RI.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Rincian Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Dinas Pendidikan	16.984.816,40	1.063.345,00	15.921.471,40
2	Dinas Kesehatan	87.599.738,00	0,00	87.599.738,00
3	DPUPRKP	59.572.000,00	3.051.250.617,97	(2.991.678.617,97)
4	DINSOSPAPA	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00
5	DPTR	105.509.746,00	0,00	105.509.746,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	79.209.792,00	0,00	79.209.792,00
7	Dinas Perhubungan	44.774.000,00	0,00	44.774.000,00
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.093.200,00	0,00	3.093.200,00
9	Disperinkop, UKM&Naker	79.643.720,00	0,00	79.643.720,00
10	Dinas Pertanian dan Pangan	0,00	2.066.800,00	(2.066.800,00)
11	Kapanewon Wonosari	16.535.000,00	0,00	16.535.000,00
12	Kapanewon Paliyan	0,00	3.638.000,00	(3.638.000,00)
13	Kapanewon Panggang	0,00	4.068.750,00	(4.068.750,00)
14	Kapanewon Semanu	0,00	2.610.000,00	(2.610.000,00)
15	Kapanewon Karangmojo	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
16	Kapanewon Playen	0,00	325.000,00	(325.000,00)
17	Kapanewon Semin	0,00	8.476.711,00	(8.476.711,00)
18	Kapanewon Patuk	0,00	4.020.676,00	(4.020.676,00)
19	Kapanewon Tanjungsari	0,00	1.255.750,00	(1.255.750,00)
20	Badan Kesbangpol	0,00	3.975.400,00	(3.975.400,00)
Jumlah Penerimaan TGKD		496.192.012,40	3.082.751.049,97	(2.586.559.037,57)

5.4.1.1.4.6. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp151.208.315,00

Realisasi Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan selama TA 2023 dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Dinas Pendidikan	0,00	97.901.604,00	(97.901.604,00)
2	Dinas Kesehatan	124.355.195,00	8.776.335,00	115.578.860,00
3	DPUPRKP	0,00	54.778.858,00	(54.778.858,00)
4	DPTR	26.853.120,00	0,00	26.853.120,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	14.501.258,00	(14.501.258,00)
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	1.678.480,00	(1.678.480,00)
7	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	2.686.200,00	(2.686.200,00)
8	Sekretariat Daerah	0,00	3.905.535,00	(3.905.535,00)
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	4.851.800,00	(4.851.800,00)
Jumlah Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		151.208.315,00	189.080.070,00	(37.871.755,00)

5.4.1.1.4.7. Pendapatan Denda Pajak Rp673.799.896,00

Realisasi Pendapatan Denda Pajak merupakan Pendapatan Denda Pajak Hotel, Pendapatan Denda Pajak Restoran, Pendapatan Denda Pajak Hiburan, Pendapatan Denda Pajak Reklame, Pendapatan Denda Pajak Parkir, Pendapatan Denda Pajak Air Tanah dan Pendapatan Denda Pajak PBB, dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Pendapatan Denda Pajak

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	4.778.910,00	1.833.490,00	2.945.420,00
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	30.010.796,00	20.930.897,00	9.079.899,00
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	1.460.368,00	1.073.430,00	386.938,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	5.276.982,00	6.260.399,00	(983.417,00)
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir	271.712,00	113.300,00	158.412,00
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	748.666,00	1.234.117,00	(485.451,00)
7	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	55.033.056,00	15.499.240,00	39.533.816,00
8	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	576.219.406,00	315.384.139,00	260.835.267,00
Jumlah Pendapatan Denda Pajak		673.799.896,00	362.329.012,00	311.470.884,00

5.4.1.1.4.8. Pendapatan Denda Retribusi **Rp40.067.618,86**

Realisasi Pendapatan Denda Retribusi TA 2023 terdiri dari denda retribusi jasa umum, denda retribusi jasa usaha dan denda retribusi perizinan tertentu dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Pendapatan Denda Retribusi

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	23.921.100,00	38.996.400,00	(15.075.300,00)
2	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	12.087.545,00	2.581.560,00	9.505.985,00
3	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	4.058.973,86	997.788,58	3.061.185,28
Jumlah Pendapatan Denda Retribusi		40.067.618,86	42.575.748,58	(2.508.129,72)

5.4.1.1.4.9. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan..... **Rp30.900.000,00**

Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan pada TA 2023 berasal dari penyetoran pendapatan parkir dari beberapa pengelola parkir yang tidak bisa memenuhi kewajibannya menyetorkan pendapatan parkir sampai batas waktu yang ditentukan sehingga uang jaminan atas penyedia jasa parkir dicairkan oleh pengelola dan disetorkan ke Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Pendapatan dari Pengembalian

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	30.900.000,00	0,00	30.900.000,00
Jumlah Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		30.900.000,00	0,00	30.900.000,00

5.4.1.1.4.10. Pendapatan dari Pengembalian..... **Rp253.827.618,38**

Realisasi Pendapatan dari pengembalian pada TA 2023 berasal dari Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan dari tahun-tahun anggaran sebelumnya dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Pendapatan dari Pengembalian

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	253.827.618,38	160.491.731,12	93.335.887,26
Jumlah Pendapatan dari Pengembalian		253.827.618,38	160.491.731,12	93.335.887,26

5.4.1.1.4.11. Pendapatan BLUD..... **Rp138.345.273.571,15**

Realisasi Pendapatan dari Pendapatan BLUD berasal dari Jasa pelayanan umum di UPT. Puskesmas dan jasa layanan umum di RSUD Wonosari dan Saptosari, dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Pendapatan BLUD

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	UPT PUSKESMAS NGLIPAR I	1.281.437.644,00	927.936.470,00	353.501.174,00
2	UPT PUSKESMAS NGLIPAR II	1.334.699.901,00	989.351.195,00	345.348.706,00
3	UPT PUSK. GEDANGSARI I	1.350.754.771,00	1.214.598.183,00	136.156.588,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
4	UPT PUSK. GEDANGSARI II	1.273.838.044,00	1.148.123.930,00	125.714.114,00
5	UPT PUSKESMAS PATUK I	1.402.255.453,00	1.230.447.159,00	171.808.294,00
6	UPT PUSKESMAS PATUK II	1.107.680.044,00	811.521.142,00	296.158.902,00
7	UPT PUSKESMAS RONGKOP	2.081.457.477,00	1.865.600.025,00	215.857.452,00
8	UPT PUSKESMAS GIRISUBO	1.683.863.653,00	1.507.780.725,00	176.082.928,00
9	UPT PUSKESMAS PONJONG I	2.428.171.048,00	2.165.499.689,00	262.671.359,00
10	UPT PUSKESMAS PONJONG II	1.212.497.489,00	991.106.345,00	221.391.144,00
11	UPT PUSKESMAS WONOSARI I	2.042.406.761,00	1.775.111.215,00	267.295.546,00
12	UPT PUSKESMAS WONOSARI II	2.662.514.852,00	2.087.042.137,00	575.472.715,00
13	UPT PUSK. KARANGMOJO I	2.092.846.977,00	1.587.153.548,00	505.693.429,00
14	UPT PUSK. KARANGMOJO II	1.742.003.009,00	1.357.749.926,00	384.253.083,00
15	UPT PUSKESMAS PANGGANG I	907.819.777,00	763.135.995,00	144.683.782,00
16	UPT PUSKESMAS PANGGANG II	1.418.154.401,00	1.300.690.424,00	117.463.977,00
17	UPT PUSKESMAS PURWOSARI	1.537.461.062,00	1.381.271.407,00	156.189.655,00
18	UPT PUSKESMAS TEPUS I	1.008.567.888,00	860.482.086,00	148.085.802,00
19	UPT PUSKESMAS TEPUS II	1.589.597.207,00	1.356.768.997,00	232.828.210,00
20	UPT PUSK. TANJUNGSARI	1.864.931.777,00	1.628.060.346,00	236.871.431,00
21	UPT PUSKESMAS PALIYAN	2.043.733.603,00	1.836.950.945,00	206.782.658,00
22	UPT PUSKESMAS SAPTOSARI	2.658.700.567,00	2.440.772.473,00	217.928.094,00
23	UPT PUSKESMAS NGAWEN I	1.316.416.692,00	1.132.069.773,00	184.346.919,00
24	UPT PUSKESMAS NGAWEN II	931.204.193,00	839.107.670,00	92.096.523,00
25	UPT PUSKESMAS SEMANU I	2.179.929.201,00	1.942.742.794,00	237.186.407,00
26	UPT PUSKESMAS SEMANU II	1.595.089.213,00	1.370.979.373,00	224.109.840,00
27	UPT PUSKESMAS SEMIN I	2.238.528.240,00	1.718.687.303,00	519.840.937,00
28	UPT PUSKESMAS SEMIN II	1.704.220.662,00	1.323.348.663,00	380.871.999,00
29	UPT PUSKESMAS PLAYEN I	2.272.099.833,00	1.714.818.325,00	557.281.508,00
30	UPT PUSKESMAS PLAYEN II	1.797.924.953,00	1.549.357.892,00	248.567.061,00
31	RSUD WONOSARI	77.849.405.320,15	85.709.088.690,00	(7.859.683.369,85)
32	RSUD SAPTOSARI	9.735.061.859,00	8.705.078.247,00	1.029.983.612,00
Jumlah Pendapatan BLUD		138.345.273.571,15	137.232.433.092,00	1.112.840.479,15

5.4.1.2 Pendapatan Transfer

Rp1.707.957.439.873,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Gunungkidul TA 2023 adalah sebagai berikut.

Rincian Realisasi Pendapatan Transfer

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan			
1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)			
1.1.1	DBH PBB	997.125.000,00	7.101.843.329,00	(6.104.718.329,00)
1.1.2	DBH PPh Pasal 21	14.997.578.000,00	16.129.084.666,00	(1.131.506.666,00)
1.1.3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	952.644.000,00	2.383.539.122,00	(1.430.895.122,00)
1.1.4	DBH CHT	1.913.964.000,00	1.738.888.557,00	175.075.443,00
1.1.5	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	1.097.768,00	16.474.601,00	(15.376.833,00)
1.1.6	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	1.120.232,00	0,00	1.120.232,00
1.1.7	DBH SDA Kehutanan-PSDH	155.381.000,00	137.005.781,00	18.375.219,00
1.1.8	DBH SDA Perikanan	1.686.876.000,00	2.170.064.211,00	(483.188.211,00)
	Jumlah Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	20.705.786.000,00	29.676.900.267,00	(8.971.114.267,00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum(DAU)			
1.2.1	DAU	885.029.317.190,00	865.880.327.665,00	19.148.989.525,00
1.2.2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	27.874.452.000,00	0,00	27.874.452.000,00
	Jumlah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum(DAU)	912.903.769.190,00	865.880.327.665,00	47.023.441.525,00
1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus(DAK) Fisik			
1.3.1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.864.057.600,00	435.571.000,00	1.428.486.600,00
1.3.2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.868.196.075,00	28.815.127.950,00	(24.946.931.875,00)
1.3.3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	15.714.631.700,00	37.826.226.050,00	(22.111.594.350,00)
1.3.4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	518.915.900,00	(518.915.900,00)
1.3.5	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah	0,00	469.629.390,00	(469.629.390,00)
1.3.6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kefarmasian	0,00	3.781.530.753,00	(3.781.530.753,00)
1.3.7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	1.849.600.000,00	2.896.956.223,00	(1.047.356.223,00)
1.3.8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- KB	0,00	1.645.265.837,00	(1.645.265.837,00)
1.3.9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00	717.500.000,00	(717.500.000,00)
1.3.10	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler- Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	614.180.000,00	(614.180.000,00)
1.3.11	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan- Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	0,00	3.834.143.049,00	(3.834.143.049,00)
1.3.12	DAK Fisik-Bidang Pertanian- Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	4.200.000.000,00	11.096.074.357,00	(6.896.074.357,00)
1.3.13	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler- Jalan	0,00	8.781.305.000,00	(8.781.305.000,00)
1.3.14	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan- Jalan	14.672.623.000,00	18.938.237.000,00	(4.265.614.000,00)
1.3.15	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	4.848.410.298,00	(4.848.410.298,00)
1.3.16	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	5.340.000.000,00	(5.340.000.000,00)
1.3.17	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	7.275.810.000,00	(7.275.810.000,00)
1.3.18	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan- Lingkungan Hidup	0,00	1.134.534.000,00	(1.134.534.000,00)
1.3.19	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	2.440.985.000,00	(2.440.985.000,00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1.3.20	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	31.855.231.384,00	0,00	31.855.231.384,00
	Jumlah Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus(DAK) Fisik	74.024.339.759,00	141.410.401.807,00	(67.386.062.048,00)
1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik			
1.4.1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	72.187.176.247,00	65.565.766.560,00	6.621.409.687,00
1.4.2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4.292.500.000,00	3.775.000.000,00	517.500.000,00
1.4.3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	176.597.991.000,00	168.270.217.303,00	8.327.773.697,00
1.4.4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.399.280.385,00	1.465.270.000,00	934.010.385,00
1.4.5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	17.572.051.500,00	17.593.605.000,00	(21.553.500,00)
1.4.6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.621.780.000,00	1.078.600.000,00	543.180.000,00
1.4.7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	25.235.624.936,00	16.478.230.020,00	8.757.394.916,00
1.4.8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	6.568.164.166,00	5.494.704.100,00	1.073.460.066,00
1.4.9	DAK Non Fisik-PK2UKM	409.699.000,00	1.718.323.000,00	(1.308.624.000,00)
1.4.10	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	844.947.000,00	811.073.750,00	33.873.250,00
1.4.11	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	367.925.750,00	223.486.276,00	144.439.474,00
1.4.12	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	424.805.963,00	350.464.000,00	74.341.963,00
1.4.13	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	883.533.590,00	672.570.000,00	210.963.590,00
	Jumlah Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	309.405.479.537,00	283.497.310.009,00	25.908.169.528,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1.317.039.374.486,00	1.320.464.939.748,00	(3.425.565.262,00)
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya			
2.1	DID	0,00	12.428.629.000,00	(12.428.629.000,00)
2.2	Dana Desa	179.933.551.000,00	144.366.117.000,00	35.567.434.000,00
2.3	Insentif Fiskal	5.952.497.000,00	0,00	5.952.497.000,00
	Jumlah Dana Insentif Daerah (DID)	185.886.048.000,00	156.794.746.000,00	29.091.302.000,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah			
3.1	Pendapatan Bagi Hasil	126.546.086.838,00	119.737.599.672,00	6.808.487.166,00
3.2	Bantuan Keuangan	78.485.930.549,00	72.072.803.728,00	6.413.126.821,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	205.032.017.387,00	191.810.403.400,00	13.221.613.987,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.707.957.439.873,00	1.669.070.089.148,00	38.887.350.725,00

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah..... Rp51.521.042.980,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk Pendapatan Asli Daerah. Lain-lain Pendapatan yang Sah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada TA 2023 berasal dari Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat dan Pendapatan Lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Hibah	51.428.189.935,00	50.728.498.931,85	699.691.003,15
2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
3	Lain-lain Pendapatan	92.853.045,00	80.631.912,00	12.221.133,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	51.521.042.980,00	50.809.130.843,85	711.912.136,15



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah..... Rp51.428.189.935,00

Pendapatan Hibah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada TA 2023 dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Pendapatan Hibah

No	Nama SKPD	Sumber	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	Pihak ke Tiga, Komite, Baznas & CSR	285.089.000,00	674.691.500,00
		Kementrian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi	7.269.494,00	0,00
		Hibah APBN	0,00	833.470.000,00
		Total:	292.358.494,00	1.508.161.500,00
2	Dinas Kesehatan	UNISA DAN Stikes Surya Global	0,00	8.900.000,00
		Perpustakaan Nasional RI	0,00	50.821.833,60
		Dompot Dhuafa	0,00	227.801.606,00
		UNJAYA	0,00	845.000,00
		Kamar Dagang dan Industri	0,00	1.200.000.000,00
		PKU GAMPING	476.652,00	37.500,00
		Kinarya Putra Perkasa	0,00	404.000,00
		Universitas Diponegoro	0,00	81.600.000,00
		Kemenkes	13.839.268.850,00	455.567.888,00
		PEMDA DIY	11.814.430.663,00	6.343.260.362,00
		PEMDA BANTUL	0,00	22.000.000,00
		Bank BRI	0,00	60.000.000,00
		ITAMA RANORAYA	67.799.988,00	0,00
		PT ENSEVAL PUTERA	898.089,00	0,00
		MEGATRADING		
		Total:	25.722.874.242,00	8.451.238.189,60
3	DPUPRKP	Kementerian PUPR	3.045.178.250,00	19.996.924.801,00
		Developer Perumahan	3.333.246.660,00	2.770.004.693,00
		Total:	6.378.424.910,00	22.766.929.494,00
4	SATPOL PP	Direktorat Jenderal Bina Administrasi	15.520.000,00	0,00
5	BPBD	PEMDA DIY	0,00	713.262.000,00
6	DPMKP2KB	BKKBN	1.369.146.385,00	1.427.707.771,00
		KPU Gunungkidul	0,00	337.306.338,00
		Total:	1.369.146.385,00	1.765.014.109,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian PUPR	0,00	51.150.000,00
8	DISDUKCAPIL	BPD DIY	246.835.050,00	0,00
9	Dinas Perhubungan	Kementerian ESDM	3.864.562.350,00	3.853.751.986,00
		Kementrian Perhubungan	0,00	4.886.022.229,25
		Total:	3.864.562.350,00	8.739.774.215,25
10	DPMPTSP	BKPM/Kementrian Investasi	0,00	16.868.500,00
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpustakaan Nasional RI	90.158.350,00	210.442.199,00
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kementrian Kelautan dan Perikanan	0,00	358.025.000,00
13	DISPAR	BPD DIY	0,00	235.000.000,00
14	Dinas Pertanian dan Pangan	Kementrian Pertanian	0,00	40.650.280,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Nama SKPD	Sumber	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)
15	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PT WELGROW FEEDMILL APBD Provinsi APBN Total:	130.000.000,00 409.080.432,00 4.263.160.922,00 4.802.241.354,00	0,00 0,00 0,00 0,00
16	Dinas Perdagangan	Kementrian Perdagangan	2.489.383.000,00	2.273.832.000,00
17	Sekretariat Daerah	BPD DIY	24.755.000,00	0,00
18	BKAD	-Hibah Air minum Perkotaan PT BTN Kementrian Keuangan Direktorat Jendral BPD DIY Total:	5.974.000.000,00 0,00 157.930.800,00 0,00 6.131.930.800,00	0,00 5.599.601.000,00 182.132.445,00 179.000.000,00 5.960.733.445,00
19	KAP. WONOSARI	PEMDA DIY	0,00	8.125.000,00
20	KAP. PALIYAN	PEMDA DIY	0,00	8.125.000,00
21	KAP. PANGGANG	PEMDA DIY	0,00	8.125.000,00
22	KAP. TEPUS	PEMDA DIY	0,00	8.125.000,00
23	KAP. RONGKOP	PEMDA DIY	0,00	8.125.000,00
24	KAP. SEMANU	PEMDA DIY	0,00	8.125.000,00
25	KAP. PONJONG	PEMDA DIY	0,00	8.125.000,00
26	KAP. KARANGMOJO	PEMDA DIY	0,00	8.125.000,00
27	KAP. PLAYEN	PEMDA DIY	0,00	8.125.000,00
28	KAP. NGLIPAR	PEMDA DIY	0,00	8.125.000,00
29	KAP. NGAWEN	PEMDA DIY	0,00	8.125.000,00
30	KAP. SEMIN	PEMDA DIY	0,00	8.125.000,00
31	KAP. PATUK	PEMDA DIY	0,00	8.125.000,00
32	KAP. SAPTOSARI	PEMDA DIY	0,00	8.125.000,00
33	KAP. GEDANGSARI	PEMDA DIY	0,00	8.125.000,00
34	KAP. GIRISUBO	PEMDA DIY	0,00	8.125.000,00
35	KAP. TANJUNGSARI	PEMDA DIY	0,00	8.125.000,00
36	KAP. PURWOSARI	PEMDA DIY	0,00	8.125.000,00
Jumlah Pendapatan Hibah			51.428.189.935,00	53.237.330.931,85

5.4.1.3.2 Pendapatan Lainnya..... **Rp92.853.045,00**

Realisasi Pendapatan Lainnya Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada TA 2023 dengan rincian sebagai berikut.

Realisasi Pendapatan Lainnya

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan atas Lain-lain Pendapatan	92.853.045,00	80.631.912,00	12.221.133,00
Jumlah Pendapatan Lainnya		92.853.045,00	80.631.912,00	12.221.133,00

Pendapatan atas Lain-lain Pendapatan TA 2023 terdiri dari penerimaan dari piutang PBB-P2 tahun 1995 sampai dengan tahun 2008 yang telah dihapus sebesar Rp82.830.606,00, double pembayaran PBB sebesar Rp531.222,00, lebih bayar/kurang bayar Rp9.461.263,00 dan perbedaan pencatatan PBB Rp29.954,00.

5.4.2 BEBAN..... **Rp2.083.975.290.211,82**

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Realisasi Beban Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023 adalah penurunan manfaat ekonomi, jasa, pengeluaran dan konsumsi aset selama periode TA 2023.

Beban terdiri dari: beban operasi, beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Transfer dan Beban Tak Terduga dengan rincian sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Realisasi Beban-LO

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Beban Operasi	1.522.398.285.235,37	1.417.853.225.807,15	104.545.059.428,22
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	196.444.885.285,12	184.800.213.513,31	11.644.671.771,81
3	Beban Transfer	364.427.807.944,71	323.213.395.330,00	41.214.412.614,71
4	Beban Tak Terduga	704.311.746,62	7.402.380.018,45	(6.698.068.271,83)
Jumlah Beban		2.083.975.290.211,82	1.933.269.214.668,91	150.706.075.542,91

5.4.2.1 Beban Operasi.....

Rp1.522.398.285.235,37

Beban Operasi Pemerintah Kabupaten Kabupaten Gunungkidul TA 2023 meliputi beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial dan beban penyesuaian piutang dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Beban Operasi

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Beban Pegawai	864.370.681.629,00	821.459.464.164,00	42.911.217.465,00
2	Beban Barang dan Jasa	565.894.679.492,26	514.703.718.622,70	51.190.960.869,56
3	Beban Subsidi	269.872.500,00	1.437.202.577,00	(1.167.330.077,00)
4	Beban Hibah	72.492.986.935,00	58.885.331.885,34	13.607.655.049,66
5	Beban Bantuan Sosial	16.650.562.268,00	18.710.519.387,00	(2.059.957.119,00)
6	Beban Penyesuaian Piutang	2.719.502.411,11	2.656.989.171,11	62.513.240,00
Jumlah Beban Operasi		1.522.398.285.235,37	1.417.853.225.807,15	104.545.059.428,22

5.4.2.1.1 Beban Pegawai.....

Rp864.370.681.629,00

Beban pegawai Pemerintah Kabupaten Gunungkidul TA 2023 merupakan kompensasi terhadap pegawai yang harus dibayarkan kepada Aparatur Sipil Negara, DPRD, KDH/WKDH dan Pegawai BLUD.

Beban tersebut dibayarkan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai TA 2023 adalah sebagai berikut.

Rincian Beban Pegawai

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	556.551.025.646,00	547.770.551.775,00	8.780.473.871,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	82.654.611.141,00	67.996.277.281,00	14.658.333.860,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	200.990.374.901,00	180.102.146.478,00	20.888.228.423,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	19.661.788.489,00	19.395.002.901,00	266.785.588,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	204.489.144,00	197.546.429,00	6.942.715,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	852.000.000,00	0,00
7	Beban Pegawai BLUD	3.456.392.308,00	5.145.939.300,00	(1.689.546.992,00)
Jumlah Beban Pegawai		864.370.681.629,00	821.459.464.164,00	42.911.217.465,00

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa.....

Rp565.894.679.492,26

Beban barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Gunungkidul TA 2023 merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan, perjalanan dinas maupun pemberian uang dan/atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat. Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 per obyek beban adalah sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Rincian Beban Barang dan Jasa

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
a	Beban Barang	81.639.032.226,55	68.278.692.309,46	13.360.339.917,09
b	Beban Jasa	226.918.694.675,00	215.762.534.651,00	11.156.160.024,00
c	Beban Pemeliharaan	26.417.127.797,59	20.142.611.678,66	6.274.516.118,93
d	Beban Perjalanan Dinas	41.789.716.915,00	36.455.146.984,00	5.334.569.931,00
e	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.028.409.574,00	10.252.302.059,00	1.776.107.515,00
f	Beban Barang dan Jasa BOS	39.586.917.628,00	47.666.983.050,00	(8.080.065.422,00)
g	Beban Barang dan Jasa BLUD	137.514.780.676,12	116.145.447.890,58	21.369.332.785,54
Jumlah Beban Barang dan Jasa		565.894.679.492,26	514.703.718.622,70	51.190.960.869,56

a. Beban Barang..... **Rp81.639.032.226,55**

Beban barang Pemerintah Kabupaten Gunungkidul TA 2023 meliputi beban barang pakai habis, beban barang tidak pakai habis dan beban aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi atau beban aset *ekstrakomtable* dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Beban Barang

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Beban Barang Pakai Habis	77.550.079.690,55	68.247.192.309,46	9.302.887.381,09
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	4.395.000,00	31.500.000,00	(27.105.000,00)
3	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	4.084.557.536,00	0,00	4.084.557.536,00
Jumlah Beban Barang		81.639.032.226,55	68.278.692.309,46	13.360.339.917,09

Atas beban barang pakai habis tersebut terdapat beban persediaan ED (*Expired Date*) di Dinas Kesehatan berupa obat-obatan sebesar Rp1.490.060.169,74 dan bahan kimia sebesar Rp131.610.000,00; di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berupa obat-obatan sebesar Rp1.882.560,00 dan di Dinas Pariwisata berupa barang kuasi sebesar Rp4.330.192,00.

b. Beban Jasa..... **Rp226.918.694.675,00**

Beban Jasa Pemerintah Kabupaten Gunungkidul TA 2023 meliputi beban jasa kantor, iuran jaminan/asuransi, sewa, jasa konsultasi, beasiswa pendidikan, kursus/pelatihan dan jasa insentif dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Beban Jasa

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	162.827.072.735,00	153.684.645.269,00	9.142.427.466,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	39.914.162.423,00	43.375.408.817,00	(3.461.246.394,00)
3	Beban Sewa Tanah	330.675.000,00	253.600.000,00	77.075.000,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	8.344.519.485,00	4.785.008.150,00	3.559.511.335,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	3.343.450.500,00	2.921.380.680,00	422.069.820,00
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	1.590.425.000,00	1.533.425.000,00	57.000.000,00
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	3.473.441.355,00	1.919.994.865,00	1.553.446.490,00
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.040.717.225,00	1.580.150.590,00	(539.433.365,00)
9	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	9.000.000,00	144.250.000,00	(135.250.000,00)
10	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.526.245.336,00	3.285.514.178,00	(759.268.842,00)
11	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	1.285.366.473,00	1.124.762.492,00	160.603.981,00
12	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	1.371.875.443,00	1.154.394.610,00	217.480.833,00
13	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	861.743.700,00	0,00	861.743.700,00
Jumlah Beban Jasa		226.918.694.675,00	215.762.534.651,00	11.156.160.024,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- c. **Beban Pemeliharaan..... Rp26.417.127.797,59**
Beban Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul TA 2023 meliputi pemeliharaan aset tetap dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Beban Pemeliharaan

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	16.688.000,00	(16.688.000,00)
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.622.764.350,00	11.351.597.918,00	271.166.432,00
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.871.040.795,25	5.039.987.832,43	(1.168.947.037,18)
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.918.262.652,34	3.702.637.928,23	7.215.624.724,11
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.060.000,00	31.700.000,00	(26.640.000,00)
Jumlah Beban Pemeliharaan		26.417.127.797,59	20.142.611.678,66	6.274.516.118,93

- d. **Beban Perjalanan Dinas..... Rp41.789.716.915,00**
Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Gunungkidul TA 2023 meliputi perjalanan dinas biasa, tetap, dalam kota paket meeting dalam kota, paket meeting luar kota, perjalanan dinas bos dan perjalanan dinas luar negeri dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Beban Perjalanan Dinas

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah			
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	15.110.117.915,00	18.422.311.885,00	(3.312.193.970,00)
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	336.150.000,00	906.950.000,00	(570.800.000,00)
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	26.163.450.000,00	14.695.040.000,00	11.468.410.000,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	166.499.000,00	1.970.191.000,00	(1.803.692.000,00)
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting LuarKota	0,00	460.654.099,00	(460.654.099,00)
	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri			
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
Jumlah Beban Perjalanan Dinas		41.789.716.915,00	36.455.146.984,00	5.334.569.931,00

- e. **Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat..... Rp12.028.409.574,00**
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul TA 2023 meliputi beban uang dan jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dengan sebagai berikut.

Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.368.914.779,00	7.496.339.300,00	2.872.575.479,00
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.612.500.000,00	1.592.259.300,00	1.020.240.700,00
	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	2.477.820.779,00	2.344.480.000,00	133.340.779,00
	Beban Beasiswa	1.234.500.000,00	830.750.000,00	403.750.000,00
	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa(TKDD)	4.044.094.000,00	2.728.850.000,00	1.315.244.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
2	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.659.494.795,00	2.755.962.759,00	(1.096.467.964,00)
	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	690.344.795,00	1.856.098.590,00	(1.165.753.795,00)
	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	969.150.000,00	899.864.169,00	69.285.831,00
	Jumlah Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.028.409.574,00	10.252.302.059,00	1.776.107.515,00

- f. Beban Barang dan Jasa BOS..... Rp39.586.917.628,00**
Beban Barang dan Jasa BOS Pemerintah Kabupaten Gunungkidul TA 2023 meliputi beban barang dan jasa yang dibiayai dengan dana BOS milik Dinas Pendidikan dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Beban Barang dan Jasa BOS

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Beban Barang dan Jasa BOS	39.586.917.628,00	47.666.983.050,00	(8.080.065.422,00)
	Jumlah Beban Barang dan Jasa BOS	39.586.917.628,00	47.666.983.050,00	(8.080.065.422,00)

- g. Beban Barang dan Jasa BLUD..... Rp137.514.780.676,12**
Beban Barang dan Jasa BLUD Pemerintah Kabupaten Gunungkidul TA 2023 merupakan beban barang dan jasa yang dibiayai menggunakan dana BLUD milik Dinas Kesehatan dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Beban Barang dan Jasa BLUD

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Beban Barang dan Jasa BLUD	137.514.780.676,12	116.145.447.890,58	21.369.332.785,54
	Jumlah Beban Barang dan Jasa BLUD	137.514.780.676,12	116.145.447.890,58	21.369.332.785,54

- 5.4.2.1.3 Beban Subsidi..... Rp269.872.500,00**
Beban Subsidi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul TA 2023 merupakan Beban Subsidi kepada BUMD dan Badan Usaha Milik Swasta dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Beban Subsidi

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
a	Beban Subsidi kepada BUMN	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
b	Beban Subsidi kepada BUMD	249.872.500,00	418.222.577,00	(168.350.077,00)
c	Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	0,00	1.018.980.000,00	(1.018.980.000,00)
	Jumlah Beban Subsidi	269.872.500,00	1.437.202.577,00	(1.167.330.077,00)

- 5.4.2.1.4 Beban Hibah..... Rp72.492.986.935,00**
Beban Hibah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul TA 2023 merupakan beban hibah kepada Pemerintah, badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan dan partai politik dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Beban Hibah

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
a	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	360.102.412,34	(360.102.412,34)
b	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	71.383.974.177,00	45.288.810.680,00	26.095.163.497,00
c	Beban Hibah Dana BOS	0,00	12.127.406.035,00	(12.127.406.035,00)
d	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.109.012.758,00	1.109.012.758,00	0,00
	Jumlah Beban Hibah	72.492.986.935,00	58.885.331.885,34	13.607.655.049,66



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

5.4.2.1.5 Beban Bantuan Sosial..... Rp16.650.562.268,00

Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Gunungkidul TA 2023 meliputi bantuan sosial kepada individu, keluarga dan masyarakat dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Beban Bantuan Sosial

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
a	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	8.327.862.700,00	10.692.250.780,00	(2.364.388.080,00)
b	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	2.853.499.568,00	7.228.268.607,00	(4.374.769.039,00)
c	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	5.469.200.000,00	790.000.000,00	4.679.200.000,00
Jumlah Beban Bantuan Sosial		16.650.562.268,00	18.710.519.387,00	(2.059.957.119,00)

5.4.2.1.6 Beban Penyisihan Piutang..... Rp2.719.502.411,11

Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Gunungkidul TA 2023 meliputi penyisihan piutang pajak, retribusi, hasil pengelolaan, lain-lain PAD yang sah dan piutang transfer antar daerah dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Beban Penyisihan Piutang

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
a	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	2.488.666.314,71	2.498.052.848,40	(9.386.533,69)
	-Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.488.666.314,71	2.498.052.848,40	(9.386.533,69)
b	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	132.398.639,70	68.615.243,40	63.783.396,30
	-Dinas Komunikasi dan Informatika	94.823.896,20	5.373.803,40	89.450.092,80
	-Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	61.943.750,00	(61.943.750,00)
	-Badan Keuangan dan Aset Daerah	37.574.743,50	1.297.690,00	36.277.053,50
c	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan	91.763.063,07	81.773.105,56	9.989.957,51
	-Badan Keuangan dan Aset Daerah	91.763.063,07	81.773.105,56	9.989.957,51
d	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	5.749.900,31	4.382.399,04	1.367.501,27
	-Dinas Kesehatan	5.749.900,31	4.378.908,10	1.370.992,21
	-Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	3.490,94	(3.490,94)
e	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	924.493,32	4.165.574,71	(3.241.081,39)
	-Badan Keuangan dan Aset Daerah	924.493,32	4.165.574,71	(3.241.081,39)
Jumlah Beban Penyisihan Piutang		2.719.502.411,11	2.656.989.171,11	62.513.240,00

5.4.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi..... Rp196.444.885.285,12

Beban Penyusutan dan amortisasi meliputi penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud Pemerintah Kabupaten Gunungkidul TA 2023 dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin			
a	Beban Penyusutan Alat Besar	2.123.789.113,99	2.035.429.390,61	88.359.723,38
b	Beban Penyusutan Alat Angkutan	5.757.740.343,10	5.208.136.917,00	549.603.426,10
c	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.368.168.562,65	1.191.966.322,36	176.202.240,29
d	Beban Penyusutan Alat Pertanian	864.537.875,09	274.859.569,63	589.678.305,46



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
e	Beban Penyusutan Alat Kantor dan RumahTangga	17.657.058.795,01	17.120.135.959,96	536.922.835,05
f	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.171.179.631,23	2.633.002.784,47	538.176.846,76
g	Beban Penyusutan Alat Kedokteran danKesehatan	24.704.924.881,55	18.933.510.234,55	5.771.414.647,00
h	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	4.719.449.667,48	5.181.827.496,65	(462.377.829,17)
i	Beban Penyusutan Alat Persenjataan	257.090.690,42	234.057.267,76	23.033.422,66
j	Beban Penyusutan Komputer	18.766.083.937,57	20.003.995.006,13	(1.237.911.068,56)
k	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	954.600,00	79.550,00	875.050,00
l	Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	6.633.000,00	6.633.000,00	0,00
m	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	30.538.126,81	75.206.435,54	(44.668.308,73)
n	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	10.542.495,36	6.097.536,66	4.444.958,70
o	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	694.957.339,23	435.619.892,25	259.337.446,98
p	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	493.679.210,84	485.596.390,66	8.082.820,18
Jumlah Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		80.627.328.270,33	73.826.153.754,23	6.801.174.516,10
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan			
a	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	25.511.999.098,08	24.776.721.445,32	735.277.652,76
b	Beban Penyusutan Monumen	115.553.292,29	115.974.209,54	(420.917,25)
c	Beban Penyusutan Bangunan Menara	180.375,04	0,00	180.375,04
d	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.353.625.664,65	1.327.866.965,03	25.758.699,62
Jumlah Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		26.981.358.430,06	26.220.562.619,89	760.795.810,17
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi			
a	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	73.538.862.745,73	71.579.252.649,28	1.959.610.096,45
b	Beban Penyusutan Bangunan Air	4.190.401.809,13	3.936.733.158,65	253.668.650,48
c	Beban Penyusutan Instalasi	2.277.404.088,16	2.294.204.126,61	(16.800.038,45)
d	Beban Penyusutan Jaringan	2.437.284.625,29	2.691.903.056,25	(254.618.430,96)
Jumlah Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi		82.443.953.268,31	80.502.092.990,79	1.941.860.277,52
Jumlah Beban Penyusutan Aset Tetap		190.052.639.968,70	180.548.809.364,91	9.503.830.603,79
4	Beban Penyusutan Aset lainnya			
a	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	314.583,33	47.596.428,48	(47.281.845,15)
b	Beban Penyusutan Aset Lain-lain	1.383.539.308,55	0,00	1.383.539.308,55
Jumlah Beban Penyusutan Aset Lainnya		1.383.853.891,88	47.596.428,48	1.336.257.463,40
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud			
a	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.008.391.424,54	4.203.807.719,92	804.583.704,62
Jumlah Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud		5.008.391.424,54	4.203.807.719,92	804.583.704,62
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi		196.444.885.285,12	184.800.213.513,31	11.644.671.771,81

5.4.2.3 Beban Transfer..... Rp364.427.807.944,71

Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Gunungkidul merupakan beban yang berasal dari pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Rincian Beban Transfer

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Beban Bagi Hasil			
	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan	8.021.184.687,00	7.700.225.000,00	320.959.687,00
	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	7.402.770.650,00	6.627.859.450,00	774.911.200,00
	Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan	855.375.957,71	0,00	855.375.957,71
	Jumlah Beban Bagi Hasil	16.279.331.294,71	14.328.084.450,00	1.951.246.844,71
2	Beban Bantuan Keuangan			
	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	348.148.476.650,00	308.885.310.880,00	39.263.165.770,00
	Jumlah Beban Bantuan Keuangan	348.148.476.650,00	308.885.310.880,00	39.263.165.770,00
	Jumlah Beban Transfer	364.427.807.944,71	323.213.395.330,00	41.214.412.614,71

- 5.4.2.4 Beban Tak Terduga..... Rp704.311.746,62**
Beban Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Gunungkidul TA 2023 meliputi Beban Tak Terduga dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Tak Terduga

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Beban Tak Terduga	704.311.746,62	7.402.380.018,45	(6.698.068.271,83)
	Jumlah Beban Tak Terduga	704.311.746,62	7.402.380.018,45	(6.698.068.271,83)

- 5.4.2.4.1 Beban Tak Terduga..... Rp704.311.746,62**
Beban Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Gunungkidul TA 2023 merupakan beban untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kabupaten dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Tak Terduga

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Dinas Kesehatan	468.313.671,62	7.113.420.760,60	(6.645.107.088,98)
2	Satpol PP	0,00	8.407.000,00	(8.407.000,00)
3	Dinas Perhubungan	0,00	7.600.000,00	(7.600.000,00)
4	Dinas Pariwisata	0,00	3.036.000,00	(3.036.000,00)
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	235.998.075,00	26.657.098,00	209.340.977,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	242.890.159,85	(242.890.159,85)
7	Kapanewon Nglipar	0,00	369.000,00	(369.000,00)
	Jumlah Beban Tak Terduga	704.311.746,62	7.402.380.018,45	(6.698.068.271,83)

- 5.4.3 Surplus/Defisit dari Operasional..... (Rp35.953.895.550,25)**
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada TA 2023 mengalami defisit, merupakan selisih antara pendapatan dan beban dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Surplus/Defisit dari Operasi

PENDAPATAN	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	288.542.911.808,57	273.558.039.155,16	14.984.872.653,41
Pendapatan Transfer	1.707.957.439.873,00	1.669.070.089.148,00	38.887.350.725,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	51.521.042.980,00	50.809.130.843,85	711.912.136,15
JUMLAH PENDAPATAN	2.048.021.394.661,57	1.993.437.259.147,01	54.584.135.514,56



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BEBAN			
Beban Operasi	1.522.398.285.235,37	1.417.853.225.807,15	104.545.059.428,22
Beban Penyusutan dan Amortisasi	196.444.885.285,12	184.800.213.513,31	11.644.671.771,81
Beban Transfer	364.427.807.944,71	323.213.395.330,00	41.214.412.614,71
Beban Tak Terduga	704.311.746,62	7.402.380.018,45	(6.698.068.271,83)
JUMLAH BEBAN	2.083.975.290.211,82	1.933.269.214.668,91	150.706.075.542,91
DEFISIT DARI OPERASIONAL	(35.953.895.550,25)	60.168.044.478,10	(96.121.940.028,35)

5.4.4 Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional..... **Rp304.484.220,00**

Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada TA 2023 merupakan kenaikan atau penurunan Ekuitas yang berasal dari kegiatan non operasional diantaranya surplus/defisit penjualan Aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya dengan rincian sebagai berikut.

5.4.4.1 Surplus Non Operasional..... **Rp304.484.220,00**

Surplus Non Operasional Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada TA 2023 merupakan surplus dari penjualan aset non lancar, penyelesaian kewajiban jangka panjang dan kegiatan non operasional lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Surplus Non Operasional

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar.	304.484.220,00	1.202.608.667,00	(898.124.447,00)
	Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional	304.484.220,00	1.202.608.667,00	(898.124.447,00)

5.4.4.1.1 Surplus Penjualan/Petukaran/Pelepasan Aset Non Lancar..... **Rp304.484.220,00**

Surplus Penjualan Aset Non Lancar Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada TA 2023 merupakan penerimaan yang berasal dari selisih Nilai Buku Aset Tetap yang dijual dengan nilai pembayaran yang diterima dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Surplus Penjualan/Petukaran/Pelepasan Aset Non Lancar

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan	289.156.020,00	1.202.608.667,00	(913.452.647,00)
	Surplus Penjualan Bangunan Gedung	289.156.020,00	1.202.608.667,00	(913.452.647,00)
2	Surplus Penjualan Aset Tetap Lainnya	15.328.200,00	0,00	15.328.200,00
	Surplus Penjualan Bahan Perpustakaan	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00
	Surplus Penjualan Tanaman	13.308.200,00	0,00	13.308.200,00
	Jumlah Surplus Penjualan/Petukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	304.484.220,00	1.202.608.667,00	(898.124.447,00)

5.4.4.2 Defisit Non Operasional..... **Rp0,00**

Defisit Non Operasional Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada TA 2023 merupakan defisit dari penjualan aset non lancar, penyelesaian kewajiban jangka panjang dan kegiatan non operasional lainnya. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun ini tidak mengalami defisit non operasional.

Rincian Defisit Non Operasional

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	1.528.658.585,47	(1.528.658.585,47)
	Jumlah Defisit dari Kegiatan Non Operasional	0,00	1.528.658.585,47	(1.528.658.585,47)

5.4.4.2.1 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya..... **Rp0,00**

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pemerintah Kabupaten Gunungkidul TA 2023 merupakan selisih kurang dari kegiatan non operasional lainnya dengan rincian sebagai berikut.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Rincian Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	1.528.658.585,47	(1.528.658.585,47)
	Jumlah Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	1.528.658.585,47	(1.528.658.585,47)

5.4.5 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa**(35.649.411.330,25)**

Surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa merupakan selisih antara jumlah Surplus/Defisit dari Operasional dan Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Defisit dari Operasional	(35.953.895.550,25)	60.168.044.478,10	(96.121.940.028,35)
2	Surplus dari Kegiatan Non Operasional	304.484.220,00	(326.049.918,47)	630.534.138,47
	Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	(35.649.411.330,25)	59.841.994.559,63	(95.491.405.889,88)

5.4.6 Surplus/Defisit Laporan Operasional**(35.649.411.330,25)**

Surplus/Defisit laporan operasional Pemerintah Kabupaten Gunungkidul TA 2023 berasal dari Defisit Sebelum Pos Luar Biasa dikurangi dengan Pos Luar Biasa dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Surplus/Defisit LO

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Audited 2022 (Rp)
1	Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	(35.649.411.330,25)	59.841.994.559,63
2	Pos Luar Biasa	0,00	0,00
	Surplus/ Defisit LO	(35.649.411.330,25)	59.841.994.559,63

Defisit tersebut akan mengurangi Ekuitas Pemerintah Kabupaten Gunungkidul per 31 Desember 2023.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

5.5 PENJELASAN LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi keluar dan masuknya Kas, baik dari Aktivitas Operasi, Investasi, Pendanaan dan Transitoris serta saldo kas pada awal maupun akhir periode anggaran.

Arus Kas dalam Laporan Arus Kas dibedakan dalam 4 jenis Arus yaitu Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Arus Kas dari Aktivitas Investasi, Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan dan Arus Kas dari Aktivitas Transitoris.

5.5.1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

5.5.1.1. Arus Masuk Kas		Rp1.991.867.920.175,86
Arus masuk kas dari Aktivitas Operasi terdiri dari penerimaan :		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Penerimaan Pajak Daerah	80.211.846.865,00	77.069.733.200,50
b. Penerimaan Retribusi Daerah	35.520.370.106,00	30.236.710.833,65
c. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipi	16.354.134.672,07	16.569.133.085,04
d. Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	144.928.014.726,79	188.438.136.204,67
e. Penerimaan Dana Bagi Hasil	20.812.199.365,00	26.798.133.902,00
f. Penerimaan Dana Alokasi Umum	912.903.769.190,00	865.880.327.665,00
g. Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	74.024.339.759,00	141.410.401.807,00
h. Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	309.405.479.537,00	283.497.310.009,00
i. Penerimaan Dana Insentif Daerah	0,00	12.428.629.000,00
j. Penerimaan Dana Desa	179.933.551.000,00	144.366.117.000,00
k. Penerimaan Insentif Fiskal	5.952.497.000,00	0,00
l. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi	127.194.303.115,00	123.106.178.070,00
m. Penerimaan Bantuan Keuangan	78.485.930.549,00	72.072.803.728,00
n. Penerimaan Hibah	6.141.484.291,00	5.599.601.000,00
JUMLAH	1.991.867.920.175,86	1.987.473.215.504,86

5.5.1.2. Arus Keluar Kas		Rp1.822.984.605.079,10
Arus keluar kas dari Aktivitas Operasi terdiri dari :		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Pembayaran Pegawai	839.785.150.907,00	826.287.498.713,00
b. Pembayaran Barang dan Jasa	531.453.185.475,10	500.452.445.773,56
c. Pembayaran Subsidi	269.872.500,00	1.437.202.577,00
d. Pembayaran Belanja Hibah	71.692.177.954,00	57.152.607.491,00
e. Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	16.631.362.268,00	18.710.519.387,00
f. Pembayaran Tak Terduga	235.998.075,00	10.131.998.741,62
g. Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	362.916.857.900,00	323.080.118.430,00
JUMLAH	1.822.984.605.079,10	1.737.252.391.113,18

5.5.1.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		Rp168.883.315.096,76
(Jumlah 5.5.1.a - 5.5.1.b)		



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

5.5.2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Aktivitas Investasi adalah perolehan atau pelepasan investasi jangka panjang - (aktiva tetap + penyertaan modal pemerintah daerah)

5.5.2.1. Arus Masuk Kas **Rp304.484.220,00**

Arus masuk kas dari Aktivitas Investasi terdiri dari :

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Penjualan atas Gedung dan Bangunan	289.156.020,00	1.202.608.667,00
b. Penjualan Aset Tetap Lainnya	15.328.200,00	0,00
JUMLAH	304.484.220,00	1.202.608.667,00

5.5.2.2. Arus Keluar Kas **Rp192.916.134.671,00**

Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari Belanja Modal selama tahun 2023 dengan perincian sebagai berikut.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Perolehan Tanah	4.510.814.335,00	5.366.354.820,00
b. Perolehan Peralatan dan Mesin	42.951.484.642,00	109.055.394.711,00
c. Perolehan Gedung dan Bangunan	80.119.934.255,00	69.278.521.126,45
d. Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	40.332.789.870,00	79.328.069.800,00
e. Perolehan Aset Tetap Lainnya	10.001.111.569,00	6.114.846.943,00
f. Perolehan Aset Lainnya	0,00	55.942.100,00
g. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	15.000.000.000,00	26.167.000.000,00
JUMLAH	192.916.134.671,00	295.366.129.500,45

5.5.2.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi **(Rp192.611.650.451,00)**
(Jumlah 5.5.2.a - 5.5.2.b)

5.5.3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris dengan rincian arus masuk dan keluar kas sebagai berikut.

5.5.3.1. Arus Masuk Kas **Rp136.181.908.214,00**

Arus masuk kas dari Aktivitas Transitoris terdiri dari :

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	136.181.908.214,00	142.911.953.575,00
JUMLAH	136.181.908.214,00	142.911.953.575,00

Penerimaan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Rp136.181.908.214, terdiri dari :

No.	URAIAN	Dipotong/Dipungut (Rp)	Dipotong/Dipungut (Rp)
1.	Potongan PPh 21	33.513.255.679,00	30.435.677.130,00
2.	Potongan PPh 22	1.599.280.011,00	2.406.657.664,00
3.	Potongan PPh 23	1.530.408.520,00	1.922.407.005,00
4.	Potongan PPh 4 (2)	2.595.058.472,00	2.804.105.128,00
5.	Potongan PPN	28.920.648.581,00	36.925.148.227,00
6.	Iuran Wajib Pegawai	35.199.653.429,00	35.199.735.947,00
7.	Jaminan Kesehatan & Kematian	32.493.238.121,00	33.218.222.474,00
8.	Setoran BOP PAUD atas Rekomendasi Inspektorat Daerah	2.835.000,00	-
9.	Setoran sisa BKK ke Kas Propinsi	327.530.401,00	-
	JUMLAH	136.181.908.214,00	142.911.953.575,00

5.5.3.2. Arus Keluar Kas **Rp135.415.422.760,00**

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	135.415.422.760,00	142.911.953.575,00
JUMLAH	135.415.422.760,00	142.911.953.575,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Rp135.415.422.760,00 terdiri dari :

No.	URAIAN	Disetor (Rp)	Disetor (Rp)
1.	Potongan PPh 21	33.513.255.679,00	30.435.677.130,00
2.	Potongan PPh 22	1.599.280.011,00	2.406.657.664,00
3.	Potongan PPh 23	1.530.408.520,00	1.922.407.005,00
4.	Potongan PPh 4 (2)	2.595.058.472,00	2.804.105.128,00
5.	Potongan PPN	28.920.648.581,00	36.925.148.227,00
6.	Iuran Wajib Pegawai	34.763.533.376,00	35.199.735.947,00
7.	Jaminan Kesehatan & Kematian	32.493.238.121,00	33.218.222.474,00
8.	Setoran BOP PAUD atas Rekomendasi Inspektorat Daerah	-	-
9.	Setoran sisa BKK ke Kas Propinsi	-	-
Jumlah		135.415.422.760,00	142.911.953.575,00

5.5.4.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris **Rp766.485.454,00**

(Jumlah 5.5.3.a - 5.5.3.b)

Kenaikan/Penurunan Kas Tahun 2023 **(Rp22.961.849.900,24)**

Saldo Awal Kas **Rp100.323.429.900,58**

Saldo Akhir Kas **Rp77.361.580.000,34**

Saldo akhir kas tahun 2023 sebesar Rp77.361.580.000,34 , dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Akhir Kas di BUD	36.099.151.937,04
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD	38.665.083,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan SKPD	682.402.274,00
Saldo Akhis Kas BOS	1.047.147.692,00
Saldo Akhir Kas BLUD	35.210.068.789,72
Saldo Akhir Kas BOK Puskesmas	4.160.398.064,00
Saldo Kas Lainnya	123.746.160,00
Jumlah	77.361.579.999,76
Selisih	0,58

Terdapat selisih antara pencatatan saldo akhir kas perhitungan LAK dengan rincian kas riilnya (kas di neraca) karena SiLPA tahun sebelumnya yang ditetapkan dalam APBD (saldo awal kas) tidak mencantumkan angka di belakang koma, sehingga terdapat kurang catat saldo awal kas sebesar Rp0,58



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

5.6 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas 3.198.939.371.224,53

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos ekuitas awal; surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar; dan ekuitas akhir. Ekuitas Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tanggal laporan adalah sebagai berikut.

5.6.1 Ekuitas Awal 3.329.713.227.045,77

Ekuitas Awal Pemerintah Kabupaten Gunungkidul TA 2023 sebesar Rp3.329.713.227.045,77 dengan rincian per masing-masing perangkat daerah sebagai berikut.

Ekuitas Awal Perangkat Daerah Per 1 Januari 2023

No	Nama Perangkat Daerah	Ekuitas Awal 2023 (Rp)	Ekuitas Awal 2022 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	Dinas Pendidikan	650.981.208.297,82	618.130.825.960,85	32.850.382.336,97
2	Dinas Kesehatan	405.702.913.038,29	400.598.694.496,02	5.104.218.542,27
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	870.657.490.712,27	871.550.574.001,47	(893.083.289,20)
4	Satuan Polisi Pamong Praja	634.762.997,45	704.664.778,57	(69.901.781,12)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.366.968.493,45	8.890.364.899,85	5.476.603.593,60
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.424.219.877,73	3.422.097.422,83	2.122.454,90
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.716.324.948,51	11.223.814.878,06	(507.489.929,55)
8	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang/Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana	211.527.320.303,75	208.332.294.815,94	3.195.025.487,81
9	Dinas Lingkungan Hidup	29.383.524.972,29	24.543.671.426,17	4.839.853.546,12
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.684.411.567,56	8.965.384.693,86	(1.280.973.126,30)
11	Dinas Perhubungan	66.243.927.541,90	55.798.825.363,14	10.445.102.178,76
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.362.606.753,54	10.601.887.151,97	(239.280.398,43)
13	Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	9.331.449.428,53	11614820053,69	(2.283.370.625,16)
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.283.544.444,73	6.425.496.730,72	(141.952.285,99)
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	8.528.859.872,44	0,00	8.528.859.872,44
16	Dinas Kebudayaan/Kundha Kabudayan	154.902.190.579,59	161.096.041.577,50	(6.193.850.997,91)
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13.034.802.535,76	14.283.002.109,10	(1.248.199.573,34)
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	14.687.816.574,66	15.337.709.247,09	(649.892.672,43)
19	Dinas Pariwisata	43.910.948.374,86	46.469.414.055,41	(2.558.465.680,55)
20	Dinas Pertanian dan Pangan	26.164.942.358,58	28.990.461.719,28	(2.825.519.360,70)
21	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	10.495.693.702,49	0,00	10.495.693.702,49
22	Dinas Perdagangan	106.643.571.427,34	106.413.485.246,87	230.086.180,47



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Nama Perangkat Daerah	Ekuitas Awal 2023 (Rp)	Ekuitas Awal 2022 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
23	Sekretariat Daerah	137.242.361.610,22	136.889.131.772,78	353.229.837,44
24	Sekretariat DPRD	2.957.559.255,99	5.428.124.406,19	(2.470.565.150,20)
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.016.568.111,47	4.434.477.019,79	582.091.091,68
26	Badan Keuangan dan Aset Daerah	459.780.751.301,56	468.020.819.391,27	(8.240.068.089,71)
27	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	8.680.556.929,88	8.883.204.218,31	(202.647.288,43)
28	Inspektorat Daerah	4.142.643.039,53	4.059.683.341,10	82.959.698,43
29	Kapanewon Wonosari	4.285.929.307,53	4.352.637.628,08	(66.708.320,55)
30	Kapanewon Paliyan	927.986.558,51	905.633.544,90	22.353.013,61
31	Kapanewon Panggang	3.468.434.010,79	3.514.814.768,59	(46.380.757,80)
32	Kapanewon Tepus	1.946.194.637,61	1.966.466.672,13	(20.272.034,52)
33	Kapanewon Rongkop	1.352.674.395,51	1.361.096.186,39	(8.421.790,88)
34	Kapanewon Semanu	1.563.423.382,03	1.581.415.439,97	(17.992.057,94)
35	Kapanewon Ponjong	1.163.278.799,82	1.173.250.464,06	(9.971.664,24)
36	Kapanewon Karangmojo	2.708.707.808,20	2.788.123.955,73	(79.416.147,53)
37	Kapanewon Playen	3.180.572.990,94	3.218.204.559,77	(37.631.568,83)
38	Kapanewon Nglipar	1.147.450.443,05	1.129.059.914,91	18.390.528,14
39	Kapanewon Ngawen	957.404.783,30	967.451.482,22	(10.046.698,92)
40	Kapanewon Semin	2.335.463.155,06	2.377.075.511,05	(41.612.355,99)
41	Kapanewon Patuk	1.595.447.106,05	1.608.639.456,60	(13.192.350,55)
42	Kapanewon Saptosari	2.331.926.562,88	2.356.386.805,66	(24.460.242,78)
43	Kapanewon Gedangsari	862.424.935,24	858.236.273,43	4.188.661,81
44	Kapanewon Girisubo	3.045.988.922,29	3.090.830.211,47	(44.841.289,18)
45	Kapanewon Tanjungsari	708.160.866,11	676.661.514,77	31.499.351,34
46	Kapanewon Purwosari	948.548.060,66	938.639.078,42	9.908.982,24
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.693.271.268,00	1.727.264.975,24	(33.993.707,24)
Jumlah		3.329.713.227.045,77	3.277.700.859.221,22	52.012.367.824,55

5.6.2 Surplus/Defisit - LO..... (35.649.411.330,25)

Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Surplus/Defisit-LO Pemerintah Kabupaten Gunungkidul TA 2023 sebesar -Rp35.649.411.330,250, dengan rincian per masing-masing perangkat daerah sebagai berikut.

Surplus/Defisit LO Perangkat Daerah Per 31 Desember 2023

No	Nama Perangkat Daerah	Surplus/Defisit LO 2023 (Rp)	Surplus/Defisit LO 2022 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	Dinas Pendidikan	(682.480.752.617,13)	(670.595.914.383,91)	(11.884.838.233,22)
2	Dinas Kesehatan	(200.135.384.143,73)	(193.629.618.180,40)	(6.505.765.963,33)
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	(109.069.600.133,22)	(100.585.502.586,75)	(8.484.097.546,47)
4	Satuan Polisi Pamong Praja	(11.827.021.012,04)	(8.190.208.467,12)	(3.636.812.544,92)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(5.949.611.847,26)	(5.118.618.831,59)	(830.993.015,67)
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(13.120.485.157,73)	(11.273.643.648,52)	(1.846.841.509,21)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Nama Perangkat Daerah	Surplus/Defisit LO 2023 (Rp)	Surplus/Defisit LO 2022 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(13.871.792.434,33)	(15.773.668.011,13)	1.901.875.576,80
8	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang/Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana	(10.268.517.725,13)	(10.128.697.396,18)	(139.820.328,95)
9	Dinas Lingkungan Hidup	(12.247.943.976,68)	(10.982.715.377,22)	(1.265.228.599,46)
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(6.200.891.667,50)	(8.580.425.084,80)	2.379.533.417,30
11	Dinas Perhubungan	(16.729.000.625,93)	(10.581.934.848,59)	(6.147.065.777,34)
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	(15.295.647.608,89)	(20.821.296.677,01)	5.525.649.068,12
13	Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	(21.003.926.012,54)	(14.947.702.535,54)	(6.056.223.477,00)
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(2.552.089.888,34)	(3.699.932.778,23)	1.147.842.889,89
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	(10.518.478.087,18)	(15.364.178.096,45)	4.845.700.009,27
16	Dinas Kebudayaan/Kundha Kabudayan	(41.048.060.456,66)	(27.937.204.560,33)	(13.110.855.896,33)
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(3.884.235.694,03)	(4.552.683.686,55)	668.447.992,52
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	(4.568.816.217,68)	(6.060.765.472,12)	1.491.949.254,44
19	Dinas Pariwisata	11.930.469.085,55	7.333.611.449,89	4.596.857.635,66
20	Dinas Pertanian dan Pangan	(20.440.024.126,66)	(24.892.098.606,54)	4.452.074.479,88
21	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(4.285.727.587,90)	(10.251.305.013,27)	5.965.577.425,37
22	Dinas Perdagangan	(6.326.683.397,02)	(10.637.024.576,27)	4.310.341.179,25
23	Sekretariat Daerah	(25.200.864.476,26)	(28.650.613.656,56)	3.449.749.180,30
24	Sekretariat DPRD	(44.268.936.817,78)	(44.695.765.498,57)	426.828.680,79
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(7.192.795.432,18)	(8.762.663.552,31)	1.569.868.120,13
26	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.406.525.062.478,68	1.398.020.153.194,51	8.504.909.284,17
27	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	(88.579.716.658,75)	(7.716.975.940,43)	(80.862.740.718,32)
28	Inspektorat Daerah	(7.322.364.860,36)	(9.125.105.980,57)	1.802.741.120,21
29	Kapanewon Wonosari	(2.646.306.599,36)	(3.226.625.683,55)	580.319.084,19
30	Kapanewon Paliyan	(2.511.479.467,47)	(2.785.602.524,39)	274.123.056,92
31	Kapanewon Panggang	(2.464.866.804,00)	(3.092.711.363,80)	627.844.559,80
32	Kapanewon Tepus	(2.493.505.932,03)	(2.730.619.058,52)	237.113.126,49
33	Kapanewon Rongkop	(2.539.751.544,65)	(3.354.883.329,88)	815.131.785,23
34	Kapanewon Semanu	(2.452.611.087,18)	(3.704.869.058,94)	1.252.257.971,76
35	Kapanewon Ponjong	(2.559.897.654,56)	(3.360.202.122,24)	800.304.467,68
36	Kapanewon Karangmojo	(2.451.632.213,92)	(3.107.142.641,53)	655.510.427,61
37	Kapanewon Playen	(2.733.494.875,88)	(3.183.192.885,83)	449.698.009,95
38	Kapanewon Nglipar	(2.219.585.485,41)	(3.080.185.041,86)	860.599.556,45
39	Kapanewon Ngawen	(2.395.341.468,28)	(3.298.667.091,92)	903.325.623,64
40	Kapanewon Semin	(2.287.628.197,04)	(3.168.547.298,99)	880.919.101,95
41	Kapanewon Patuk	(3.277.986.850,84)	(2.969.430.516,55)	(308.556.334,29)
42	Kapanewon Saptosari	(2.245.894.796,66)	(3.033.878.718,78)	787.983.922,12
43	Kapanewon Gedangsari	(2.378.031.601,57)	(3.769.067.437,19)	1.391.035.835,62



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Nama Perangkat Daerah	Surplus/Defisit LO 2023 (Rp)	Surplus/Defisit LO 2022 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
44	Kapanewon Girisubo	(2.501.045.519,96)	(2.934.535.545,18)	433.490.025,22
45	Kapanewon Tanjungsari	(2.608.747.823,98)	(3.144.051.972,66)	535.304.148,68
46	Kapanewon Purwosari	(2.182.039.815,15)	(2.555.449.067,76)	373.409.252,61
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(24.765.726.493,63)	(5.455.845.278,24)	(19.309.881.215,39)
Jumlah		(35.649.411.330,25)	59.841.994.559,63	(95.491.405.889,88)

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar..... (95.124.444.490,99)

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi yang berpengaruh pada laporan keuangan periode sebelumnya.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Kabupaten Gunungkidul TA 2023 sebesar -Rp95.124.444.490,99, artinya ekuitas TA 2023 berkurang sebesar nilai tersebut, dengan rincian per masing-masing perangkat daerah sebagai berikut.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Perangkat Daerah Per 31 Desember 2023

No	Nama Perangkat Daerah	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 2023 (Rp)	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 2022 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	Dinas Pendidikan	(55.815.637.421,22)	1.090.194.218,88	(56.905.831.640,10)
2	Dinas Kesehatan	(23.715.856.300,66)	916.778.153,75	(24.632.634.454,41)
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	(2.061.153.544,25)	(29.509.128.365,45)	27.447.974.821,20
4	Satuan Polisi Pamong Praja	20.555.504,05	13.272.800,00	7.282.704,05
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(243.578.870,14)	5.826.174.380,19	(6.069.753.250,33)
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	272.708.428,42	(272.708.428,42)
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(508.201.729,00)	(871.045.839,42)	362.844.110,42
8	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang/Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana	(10.360.520,00)	4.253.174,99	(14.613.694,99)
9	Dinas Lingkungan Hidup	(44.715.983,03)	(211.795.039,66)	167.079.056,63
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(854.535.465,34)	(312.696.077,50)	(541.839.387,84)
11	Dinas Perhubungan	(3.856.327.519,80)	(182.675.791,65)	(3.673.651.728,15)
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	(1.041.163.026,00)	(48.898.529,42)	(992.264.496,58)
13	Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	(114.234.916,67)	(5.819.592.713,62)	5.705.357.796,95
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(51.436.585,36)	(1.719.752,08)	(49.716.833,28)
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	(4.216.969,00)	8.620.352.898,89	(8.624.569.867,89)
16	Dinas Kebudayaan/Kundha Kabudayan	(907.067.250,00)	(12.393.939,58)	(894.673.310,42)
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.554.151,12	(1.668.297.680,06)	1.678.851.831,18
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	(1.083.251.668,60)	(614.756.409,76)	(468.495.258,84)
19	Dinas Pariwisata	(312.736.382,46)	(647.597.777,32)	334.861.394,86



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Nama Perangkat Daerah	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 2023 (Rp)	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 2022 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
20	Dinas Pertanian dan Pangan	(856.813.858,20)	(2.866.629.873,16)	2.009.816.014,96
21	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	264.163.153,18	6.505.335.204,76	(6.241.172.051,58)
22	Dinas Perdagangan	(10.855.823.860,08)	2.211.165.280,74	(13.066.989.140,82)
23	Sekretariat Daerah	(264.892.950,76)	333.543.825,00	(598.436.775,76)
24	Sekretariat DPRD	(177.554.575,00)	(2.378.385.099,63)	2.200.830.524,63
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(48.740.500,00)	(15.294.325,01)	(33.446.174,99)
26	Badan Keuangan dan Aset Daerah	6.607.146.833,45	11.111.158.512,62	(4.504.011.679,17)
27	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	(146.211.922,00)	3.023.800,00	(149.235.722,00)
28	Inspektorat Daerah	0,00	2.848.800,00	(2.848.800,00)
29	Kapanewon Wonosari	29.806.463,00	40.648.400,00	(10.841.937,00)
30	Kapanewon Paliyan	27.443.335,89	18.328.400,00	9.114.935,89
31	Kapanewon Panggang	(32.359.450,64)	20.308.400,00	(52.667.850,64)
32	Kapanewon Tepus	(21.894.857,16)	21.478.400,00	(43.373.257,16)
33	Kapanewon Rongkop	20.973.000,00	17.348.400,00	3.624.600,00
34	Kapanewon Semanu	5.185.666,00	21.770.900,00	(16.585.234,00)
35	Kapanewon Ponjong	31.871.125,00	28.778.400,00	3.092.725,00
36	Kapanewon Karangmojo	(14.519.166,66)	29.758.400,00	(44.277.566,66)
37	Kapanewon Playen	17.040.500,00	34.798.400,00	(17.757.900,00)
38	Kapanewon Nglipar	12.602.625,00	24.626.900,00	(12.024.275,00)
39	Kapanewon Ngawen	47.408.000,00	22.738.400,00	24.669.600,00
40	Kapanewon Semin	32.972.000,00	27.778.400,00	5.193.600,00
41	Kapanewon Patuk	459.951.041,96	23.368.400,00	436.582.641,96
42	Kapanewon Saptosari	4.974.141,71	19.183.400,00	(14.209.258,29)
43	Kapanewon Gedangsari	359.824.635,79	21.298.400,00	338.526.235,79
44	Kapanewon Girisubo	(15.962.200,00)	19.858.400,00	(35.820.600,00)
45	Kapanewon Tanjungsari	(12.815.400,00)	18.238.400,00	(31.053.800,00)
46	Kapanewon Purwosari	(1.575.998,11)	7.313.400,00	(8.889.398,11)
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(3.277.777,00)	2.848.800,00	(6.126.577,00)
Jumlah		(95.124.444.490,99)	(7.829.626.735,08)	(87.294.817.755,91)

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Kabupaten Gunungkidul TA 2023 karena adanya penyesuaian-penyesuaian mengenai:

No	Uraian	Debit	Kredit	Penjelasan Penyesuaian
1	Penyesuaian Kas dan Setara Kas	3.392.659,00	1,00	Pengembalian silpa BOS 2022 ke RKUN
		17.122.866,00		Koreksi Silpa BLUD karena terdapat pengembalian santunan a.n Heru Prasetyo
				Koreksi saldo awal Kas BLUD UPT Puskesmas Patuk II



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Uraian	Debit	Kredit	Penjelasan Penyesuaian
		10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	Pemindahbukuan silpa BLUD RSUD Wonosari ke Kasda
		167.211.370,00		Pemindahbukuan Kas Donasi Covid dari BPBD ke Kasda (BKAD). Kas tersebut tahun sebelumnya belum tercatat di Silpa
		81.000,00	81.000,00	Setoran sisa SP2D RSUD Saptosari salah jurnal ke kas BLUD dan di reklas ke Kasda
			20.515.523,42	Penerimaan lain-lain yang masuk di Kasda dari TASPEN, BRI dan BSI
2	Penyesuaian Piutang dan Penyisihan Piutang		4.378.908,10	Koreksi penyisihan piutang Lain-lain PAD yang Sah Dinas Kesehatan yang tertagih
		5.800,00		Koreksi saldo awal piutang lain-lain PAD yang SAH Dinas Kesehatan
			2.461.284,00	Koreksi penyisihan Piutang Retribusi Diskominfo yang tertagih
			11.127.000,00	Koreksi penyisihan Piutang Retribusi DPMPSTSP yang tertagih
			933.980,00	Koreksi penyisihan Piutang Retribusi BKAD yang tertagih
		483.473.489,97		Koreksi saldo awal Piutang Retribusi BKAD
		14.355.515,03		Koreksi kekurangan pengakuan penyisihan Piutang Retribusi BKAD atas koreksi saldo awal piutang
			81.770.673,36	Koreksi penyisihan piutang Hasil Pemakaian Kekayaan Daerah yang Dipisahkan BKAD yang tertagih
		484.008,52		Koreksi saldo awal piutang Hasil Pemakaian Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di BKAD
			79.900,63	Koreksi saldo awal penyisihan piutang pajak reklame dan PBB-P2 BKAD
			698.248.024,03	Koreksi penyisihan piutang pajak BKAD yang tertagih
			6.899.619,00	Koreksi penyisihan piutang PBB-P2 yang piutangnya terhapus
		4.948.262,00		Koreksi saldo awal piutang PBB-P2 BKAD
			4.165.574,71	Koreksi penyisihan piutang Transfer antar Daerah BKAD yang tertagih
			3.490,94	Koreksi penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah BKAD yang tertagih



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Uraian	Debit	Kredit	Penjelasan Penyesuaian
3	Penyesuaian Persediaan	508.201.729,00	508.201.729,00	Mutasi persediaan obat dari DPMKPPKB ke Dinas Kesehatan
		904.644.000,00	904.644.000,00	Mutasi persediaan dari Dinas Kebudayaan ke 18 Kapanewon
		9.965.000,00	9.965.000,00	Mutasi persediaan dari SETDA ke DPK
			6.539.213,56	Retur persediaan awal Dinas Pariwisata atas tiket yang sudah di porporasi
		86.775.000,00	86.775.000,00	Mutasi persediaan dari SETDA ke Dinas Kesehatan
4	Penyesuaian Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		138.204.574,00	Koreksi Aset Tetap yang belum tercatat di Dinas Pendidikan
			36.655.000,00	Koreksi nilai saldo awal aset tetap di Dinas Pendidikan
			6.742.966,39	Koreksi akumulasi Penyusutan aset tetap yang dimutasi
		857.983.767,46		Koreksi akumulasi Penyusutan aset tetap dari hibah Aset barang lama di Dinkes
		79.209.792,00		Koreksi Akumulasi Penyusutan akibat penurunan nilai aset tetap di DLH
		12.600.000,04		Koreksi kurang catat Akumulasi penyusutan aset tetap di DPP
			1.350.000,00	Koreksi Aset Tetap yang belum tercatat di DPKH
			157.653.000,00	Koreksi Aset Tetap karena Peningkatan Nilai di DPP
			70.000.000,00	Koreksi Aset Tetap Belum Tercatat DPP
		4.054.175.436,51	4.054.175.436,51	Mutasi Aset Tetap antar SKPD
		1.719.945.373,05	1.719.945.373,05	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimutasi
		157.930.800,00		Koreksi akumulasi Penyusutan aset tetap dari hibah aset barang lama di BKAD
		1.908.593.000,00	1.908.593.000,00	Reklasifikasi Aset Tetap karena adanya Renovasi di Kapanewon Patuk
			468.746.332,51	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap karena adanya perubahan klasifikasi Aset Tetap di Kapanewon Patuk
			936.153.761,24	Koreksi lebih catat akumulasi penyusutan Aset Tetap DPUPRKP
			182.603.076,94	Reklas akumulasi penyusutan aset tetap ke aset rusak berat DPP
			73.700.000,00	Reklas akumulasi penyusutan aset tetap ke aset rusak berat BKPPD



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Uraian	Debit	Kredit	Penjelasan Penyesuaian
5	Penyesuaian Aset Lainnya dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	73.700.000,00		Reklas akumulasi penyusutan aset rusak berat dari aset tetap BKPPD
		182.603.076,94		Reklas akumulasi penyusutan aset rusak berat dari aset tetap DPP
		3.747.150,00	3.747.150,00	Mutasi Aset Rusak Berat dari DPP ke DPKH
			131.778.868,89	Koreksi akumulasi penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga karena perubahan kebijakan pengakuan dari Aset Lainnya ke Aset Tetap
		94.200.800.924,48		Koreksi akumulasi penyusutan aset lainnya karena tahun sebelumnya belum disusutkan
6	Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka	1.534.569,44	0,00	Koreksi saldo awal Pendapatan diterima dimuka di Dinas Perdagangan
7	Penyesuaian Utang Belanja	4.216.969,00		Koreksi saldo awal utang belanja jasa Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			11.831.368,09	Koreksi saldo awal utang belanja jasa Dinas Kesehatan
8	Penyesuaian Penyertaan Modal	5.657.675.283,65	3.574.778.230,73	Perhitungan Penyertaan Modal PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul dan PDAM Metode Ekuitas
9	Penyesuaian Pendapatan	0,00	167.211.370,00	Koreksi pencatatan pendapatan-LO atas Donasi Covid BPBD yang diakui di Tahun 2022 dan baru dilimpahkan ke Kasda Tahun 2023. Koreksi ini dikonsolidasikan dengan koreksi No 1 Penyesuaian Kas dan Setara Kas pada BKAD
		0,00	347.402,00	Koreksi pencatatan pendapatan Jasa Giro dari Kas Donasi Covid yang tahun sebelumnya sudah dicatat di pendapatan LO BPBD
10	Penyesuaian Beban	69.481,00	0,00	Koreksi pencatatan Pajak Jasa Giro dari Kas Donasi Covid yang tahun sebelumnya sudah dicatat di Beban BPBD
		5.000,00	0,00	Koreksi pencatatan Biaya Penutupan Rekening dari Kas Donasi Covid yang tahun sebelumnya sudah dicatat di Beban BPBD.
Jumlah		121.115.451.323,09	25.991.006.832,10	(95.124.444.490,99)

5.6.4 Ekuitas Akhir

3.198.939.371.224,53

Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Gunungkidul per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.198.939.371.224,53 berasal dari penjumlahan Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO, dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar TA 2023, dengan rincian sebagai berikut.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

**Ekuitas Akhir
Per 31 Desember 2023**

URAIAN	2023 (Rp)	2022 Audited (Rp)
Ekuitas Awal	3.329.713.227.045,77	3.277.700.859.221,22
Surplus/Defisit - LO	(35.649.411.330,25)	59.841.994.559,63
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(95.124.444.490,99)	(7.829.626.735,08)
Ekuitas Akhir	3.198.939.371.224,53	3.329.713.227.045,77

Adapun rincian Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Gunungkidul per masing-masing perangkat daerah sebagai berikut.

**Ekuitas Akhir
Per 31 Desember 2023**

No	Nama Perangkat Daerah	Ekuitas Akhir 2023 (Rp)	Ekuitas Akhir 2022 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	Dinas Pendidikan	570.607.464.184,47	650.981.208.297,82	(80.373.744.113,35)
2	Dinas Kesehatan	376.818.986.461,90	405.702.913.038,29	(28.883.926.576,39)
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	866.717.389.878,80	870.657.490.712,27	(3.940.100.833,47)
4	Satuan Polisi Pamong Praja	705.212.737,46	634.762.997,45	70.449.740,01
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.736.196.701,05	14.366.968.493,45	369.228.207,60
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.276.630.643,00	3.424.219.877,73	(147.589.234,73)
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.139.533.186,18	10.716.324.948,51	(576.791.762,33)
8	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang/Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana	212.995.937.225,62	211.527.320.303,75	1.468.616.921,87
9	Dinas Lingkungan Hidup	32.469.436.423,58	29.383.524.972,29	3.085.911.451,29
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.307.152.812,72	7.684.411.567,56	(1.377.258.754,84)
11	Dinas Perhubungan	64.673.578.950,51	66.243.927.541,90	(1.570.348.591,39)
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.101.926.885,65	10.362.606.753,54	(2.260.679.867,89)
13	Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	9.032.593.593,32	9.331.449.428,53	(298.855.835,21)
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.961.071.787,17	6.283.544.444,73	(322.472.657,56)
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	8.608.730.902,76	8528859872,44	79.871.030,32
16	Dinas Kebudayaan/Kundha Kabudayan	148.270.340.125,93	154.902.190.579,59	(6.631.850.453,66)
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14.009.474.211,85	13.034.802.535,76	974.671.676,09
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	13.001.847.850,38	14.687.816.574,66	(1.685.968.724,28)
19	Dinas Pariwisata	47.764.373.927,95	43.910.948.374,86	3.853.425.553,09
20	Dinas Pertanian dan Pangan	24.543.250.862,72	26.164.942.358,58	(1.621.691.495,86)
21	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	11.941.799.594,77	10495693702,49	1.446.105.892,28
22	Dinas Perdagangan	95.457.058.944,24	106.643.571.427,34	(11.186.512.483,10)
23	Sekretariat Daerah	135.536.747.011,20	137.242.361.610,22	(1.705.614.599,02)
24	Sekretariat DPRD	2.350.975.363,21	2.957.559.255,99	(606.583.892,78)
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.221.424.292,29	5.016.568.111,47	204.856.180,82

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Nama Perangkat Daerah	Ekuitas Akhir 2023 (Rp)	Ekuitas Akhir 2022 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
26	Badan Keuangan dan Aset Daerah	468.646.059.149,46	459.780.751.301,56	8.865.307.847,90
27	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	2.014.155.747,13	8.680.556.929,88	(6.666.401.182,75)
28	Inspektorat Daerah	3.859.361.348,17	4.142.643.039,53	(283.281.691,36)
29	Kapanewon Wonosari	4.140.655.828,17	4.285.929.307,53	(145.273.479,36)
30	Kapanewon Paliyan	875.565.810,93	927.986.558,51	(52.420.747,58)
31	Kapanewon Panggang	3.348.903.731,15	3.468.434.010,79	(119.530.279,64)
32	Kapanewon Tepus	1.847.262.212,42	1.946.194.637,61	(98.932.425,19)
33	Kapanewon Rongkop	1.291.069.167,86	1.352.674.395,51	(61.605.227,65)
34	Kapanewon Semanu	1.465.325.698,85	1.563.423.382,03	(98.097.683,18)
35	Kapanewon Ponjong	1.149.393.879,26	1.163.278.799,82	(13.884.920,56)
36	Kapanewon Karangmojo	2.536.765.435,62	2.708.707.808,20	(171.942.372,58)
37	Kapanewon Playen	3.129.287.138,06	3.180.572.990,94	(51.285.852,88)
38	Kapanewon Nglipar	1.136.748.133,64	1.147.450.443,05	(10.702.309,41)
39	Kapanewon Ngawen	942.610.737,02	957.404.783,30	(14.794.046,28)
40	Kapanewon Semin	2.255.619.294,02	2.335.463.155,06	(79.843.861,04)
41	Kapanewon Patuk	1.216.009.722,17	1.595.447.106,05	(379.437.383,88)
42	Kapanewon Saptosari	2.251.150.294,93	2.331.926.562,88	(80.776.267,95)
43	Kapanewon Gedangsari	1.153.605.852,71	862.424.935,24	291.180.917,47
44	Kapanewon Girisubo	2.917.087.329,33	3.045.988.922,29	(128.901.592,96)
45	Kapanewon Tanjungsari	1.033.347.268,13	708.160.866,11	325.186.402,02
46	Kapanewon Purwosari	858.167.074,40	948.548.060,66	(90.380.986,26)
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.622.085.812,37	1.693.271.268,00	(71.185.455,63)
Jumlah		3.198.939.371.224,53	3.329.713.227.045,77	(130.773.855.821,24)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BAB VI

INFORMASI TAMBAHAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN ANGGARAN 2023

Sebagaimana disyaratkan dalam Pernyataan SAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan pada Paragraf 58, maka pada bagian ini disajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan SAP lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, sebagai tambahan informasi yang belum disajikan dalam bagian laporan keuangan sebelumnya.

6.1 Dana Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah DIY

6.1.1 Dana Keistimewaan

Dana Keistimewaan pada Kabupaten Gunungkidul berasal dari Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus (BKK) dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Gunungkidul menerima BKK Dana Keistimewaan sejak TA 2018 selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan 4 (empat) urusan keistimewaan yaitu kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Tata cara pencairan BKK Dana Keistimewaan di Kabupaten Gunungkidul mengacu pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan dan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum yang ditetapkan setiap tahun anggaran.

Anggaran dan realisasi Dana Keistimewaan Kabupaten Gunungkidul selama 5 tahun terakhir disajikan dalam tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1
Anggaran dan Realisasi Dana Keistimewaan TA 2019 - 2023

No	Urusan/Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Tahun 2019	175.516.118.040,00	173.030.442.803,56	98,58%
A	Kelembagaan	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00%
B	Kebudayaan	66.379.330.340,00	65.963.562.403,56	99,37%
C	Pertanahan	2.561.891.000,00	2.242.741.400,00	87,54%
D	Tata Ruang	106.074.896.700,00	104.324.139.000,00	98,35%



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2	Tahun 2020	87.909.776.537,00	85.579.025.848,21	97,35%
a	Kelembagaan	1.213.190.900,00	1.065.057.521,00	87,79%
b	Kebudayaan	81.273.171.500,00	80.080.153.950,00	98,53%
c	Pertanahan	4.789.091.637,00	3.812.290.277,21	79,60%
d	Tata Ruang	634.322.500,00	621.524.100,00	97,98%
3	Tahun 2021	49.338.259.600,00	46.008.009.531,20	93,25%
a	Kelembagaan	1.741.551.600,00	1.583.149.931,00	90,90%
b	Kebudayaan	40.958.033.000,00	38.436.947.960,20	93,84%
c	Pertanahan	6.058.749.000,00	5.517.727.440,00	91,07%
d	Tata Ruang	579.926.000,00	470.184.200,00	81,08%
4	Tahun 2022	40.424.963.290,00	39.657.285.957,00	98,10%
a	Kelembagaan	2.602.953.600,00	2.523.924.574,00	96,96%
b	Kebudayaan	22.874.962.340,00	22.326.302.961,00	97,60%
c	Pertanahan	5.014.385.000,00	4.884.199.720,00	97,40%
d	Tata Ruang	9.932.662.350,00	9.922.858.702,00	99,90%
5	Tahun 2023	70.210.319.555,00	67.983.460.950,00	96,83%
a	Kelembagaan	5.548.706.500,00	5.324.349.774,00	95,96%
b	Kebudayaan	41.221.883.500,00	40.617.008.947,00	98,53%
c	Pertanahan	5.383.653.000,00	4.937.665.372,00	91,72%
d	Tata Ruang	18.056.076.555,00	17.104.436.857,00	94,73%
Jumlah		423.399.437.022,00	412.258.225.089,97	97,37%

Pagu Dana Keistimewaan tahun 2023 mengalami dua kali perubahan sejak ditetapkannya pada awal tahun anggaran. Dari pagu anggaran semula sebesar Rp61.739.614.300,00, mengalami penambahan menjadi Rp67.622.971.300,00 pada perubahan tahap I. Sedangkan pada perubahan tahap II pagu anggaran mengalami kenaikan menjadi Rp70.210.319.555,00.

Pada akhir triwulan IV seluruh pelaksanaan program kegiatan Dana Keistimewaan sudah selesai. Secara umum realisasi capaian keuangan (berdasarkan SPJ Fungsional) sebesar Rp67.983.460.950,00 atau setara 96,83% dan capaian fisik sebesar 99,54%. Secara rinci berikut rekapitulasi capaian per urusan per perangkat daerah tahun 2023:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Tabel 6.2

**Tabel Rekapitulasi Realisasi Capaian Keuangan dan Fisik
Pelaksanaan Dana Keistimewaan TA 2023**

Urusan/OPD	Pagu	Realisasi Keuangan				Fisik
		SP2D	(%)	SPJ Fungsional	(%)	(%)
TOTAL	70.210.319.555	69.179.107.490	98,53%	67.983.460.950	96,83%	99,54%
Kelembagaan	5.548.706.500	5.395.039.852	97,23%	5.324.349.774	95,96%	100,00%
Bagian Organisasi	866.574.000	820.773.387	94,71%	808.254.029	93,27%	100,00%
Bagian Hukum dan HAM	162.572.500	145.377.975	89,42%	143.679.146	88,38%	100,00%
Bagian Pemerintahan	47.335.000	45.020.000	95,11%	45.020.000	95,11%	100,00%
Dinas Pemberdayaan Masy. Kalurahan, P2KB	565.000.000	530.732.300	93,93%	513.288.100	90,85%	100,00%
Bappeda	950.090.000	949.944.500	99,98%	929.153.500	97,80%	100,00%
BKPPD (UPT Diklat)	530.000.000	490.381.050	92,52%	476.711.200	89,95%	100,00%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.321.035.000	1.314.405.000	99,50%	1.314.405.000	99,50%	100,00%
Kap. Tanjungsari	476.100.000	468.940.740	98,50%	468.940.740	98,50%	100,00%
Kapanewon (18)	630.000.000	629.464.900	99,92%	624.898.059	99,19%	100,00%
Pertanahan	5.383.653.000	4.955.366.398	92,04%	4.937.665.372	91,72%	100,00%
DPTR	4.760.135.000	4.359.500.252	91,58%	4.341.799.226	91,21%	100,00%
Bagian Pemerintahan	623.518.000	595.866.146	95,57%	595.866.146	95,57%	100,00%
Tata Ruang	18.056.076.555	17.991.574.080	99,64%	17.104.436.857	94,73%	98,22%
DPTR	1.891.809.940	1.860.945.240	98,37%	1.831.887.529	96,83%	100,00%
Dinas Lingkungan Hidup	5.237.300.000	5.216.631.161	99,61%	4.362.283.160	83,29%	93,87%
Dinas Perhubungan	2.297.299.000	2.294.955.500	99,90%	2.294.504.434	99,88%	100,00%
Dinas Pariwisata	6.717.851.815	6.710.411.584	99,89%	6.710.411.584	99,89%	100,00%



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Urusan/OPD	Pagu	Realisasi Keuangan				Fisik
		SP2D	(%)	SPJ Fungsional	(%)	(%)
Bappeda	250.000.000	249.976.000	99,99%	249.964.200	99,99%	100,00%
BPBD	1.422.348.800	1.419.187.595	99,78%	1.415.918.950	99,55%	100,00%
Dinas PUPRKP	239.467.000	239.467.000	100,00%	239.467.000	100,00%	100,00%
Kebudayaan	41.221.883.500	40.837.127.160	99,07%	40.617.008.947	98,53%	100,00%
Dinas Kebudayaan	32.526.256.000	32.148.842.257	98,84%	31.967.118.899	98,28%	100,00%
Dinas Sosial, P3A	150.000.000	150.000.000	100,00%	149.000.000	99,33%	100,00%
Badan Kesbangpol	303.220.000	303.220.000	100,00%	278.721.055	91,92%	100,00%
Satuan Polisi Pamong Praja	581.795.000	581.795.000	100,00%	581.794.110	100,00%	100,00%
Dinas Kesehatan	424.310.000	424.310.000	100,00%	422.170.000	99,50%	100,00%
Dinas Perdagangan	500.000.000	500.000.000	100,00%	499.998.281	100,00%	100,00%
Dinas Pariwisata	1.218.987.500	1.214.187.500	99,61%	1.210.867.527	99,33%	100,00%
Dinas Pertanian dan Pangan	521.250.000	519.217.800	99,61%	515.217.800	98,84%	100,00%
Dinas Perindustrian, KUKM dan Tenaga Kerja	2.497.315.000	2.496.814.603	99,98%	2.496.201.325	99,96%	100,00%
Dinas Komunikasi dan Informatika	700.000.000	699.990.000	100,00%	699.990.000	100,00%	100,00%
Kapanewon (18)	1.798.750.000	1.798.750.000	100,00%	1.795.929.950	99,84%	100,00%

Capaian keuangan secara keseluruhan pada akhir tahun anggaran relatif tinggi yaitu 96,83%, namun demikian capaian tersebut mengalami penurunan dibandingkan capaian akhir pada tahun anggaran 2022 yaitu sebesar 98,10%. Sedangkan capaian fisik pada akhir tahun anggaran 2023 ini sebesar 99,54% mengalami penurunan dibandingkan capaian fisik pada akhir tahun anggaran 2022 yaitu 99,91%. Satu-satunya subkegiatan yang tidak dapat terlaksana 100% yaitu Appraisal dan Pengadaan Tanah Konservasi Lokal dengan tolok ukur kinerja seluas 2 hektar hanya terrealisasi 1,731 ha (17.731 m²).



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

a.1 Urusan Kelembagaan

Program, Kegiatan dan Subkegiatan berdasarkan BA hasil perubahan kedua pada Urusan Kelembagaan meliputi 1 (satu) program, yaitu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan. Terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 8 (delapan) subkegiatan.

Capaian keuangan pada Urusan Kelembagaan pada tahun 2023 lebih baik daripada capaian tahun 2022. Capaian keuangan pada tahun 2022 sebesar 96,96% mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 97,23%. Rencana pelaksanaan program kegiatan di urusan Kelembagaan tahun 2023 tercapai 100% secara fisik.

a.2 Urusan Kebudayaan

Program, Kegiatan dan Subkegiatan berdasarkan Berita Acara hasil perubahan kedua pada Urusan Kebudayaan meliputi 1 (satu) program, yaitu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 23 subkegiatan.

Capaian keuangan pada Urusan Kebudayaan tahun 2023 lebih baik daripada capaian tahun 2022. Pada tahun 2022 sebesar 97,60% meningkat pada tahun 2023 menjadi 98,53%. Meski ada beberapa pelaksanaan kegiatan yang mundur sampai dengan akhir tahun namun secara fisik pelaksanaan kegiatan tercapai 100%.

a.3 Urusan Pertanahan

Program, Kegiatan dan Subkegiatan berdasarkan Berita Acara hasil perubahan kedua pada Urusan Pertanahan meliputi 1 (satu) program, yaitu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan. Terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) subkegiatan.

Capaian keuangan pada Urusan Pertanahan tahun 2023 lebih kecil daripada capaian tahun 2022. Pada tahun 2022 sebesar 97,40% menurun pada tahun 2023 menjadi 91,72%. Sedangkan rencana pelaksanaan program kegiatan di urusan Pertanahan ini lebih baik karena tercapai 100% secara fisik.

a.4 Urusan Tata Ruang

Program, Kegiatan dan Subkegiatan berdasarkan Berita Acara hasil perubahan kedua pada Urusan Tata Ruang meliputi 1 (satu) program, yaitu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang. Terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) subkegiatan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Capaian keuangan pada Urusan Tata Ruang tahun 2023 lebih kecil daripada capaian pada tahun 2022. Pada tahun 2022 sebesar 99,90% menurun pada tahun 2023 menjadi 94,73%. Rencana pelaksanaan program kegiatan di urusan Pertanahan ini secara fisik tidak dapat tercapai 100% disebabkan tidak terpenuhinya pengadaan tanah untuk Konservasi Lokal monyet ekor panjang (MEP). Dari 2ha lahan yang ditargetkan hanya tercapai 1,731 ha lahan. Dari 15 bidang lahan yang ditargetkan dalam pengadaan lahan hanya 9 bidang yang mencapai kesepakatan jual beli. Hal ini disebabkan tidak adanya kesepakatan harga appraisal bagi pemilik 9 (sembilan) lahan tersisa. Capaian fisik urusan Tata Ruang sebesar 92,87%.

6.1.2 Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Provinsi ke Kabupaten/Kota

Pada tahun 2023 ini Kabupaten Gunungkidul menerima Bantuan Keuangan Pemda DIY sebesar Rp10.950.000.000,00. Bantuan keuangan tersebut disalurkan kepada 2 (dua) perangkat daerah yaitu Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja dan Dinas Kesehatan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah BKK Padat Karya Infrastruktur dan Jamban Sehat untuk masyarakat miskin. Berikut rincian program/kegiatan BKK Pemda DIY beserta pagu anggaran dan realisasinya:

Tabel 6.3
Capaian Keuangan Dana Keistimewaan TA 2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			PROGRES		
		VOL.	SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	KEUANGAN		FISIK
					(Rp)	(%)	(%)
	TOTAL BKK			10.950.000.000,00	10.622.649.599,00	97,01%	100,00%
1	BKK Padat Karya Infrastruktur Lokasi : di 50 kalurahan di 17 kapanewon.	72	lokasi	10.500.000.000,00	10.172.469.599,00	96,88%	100,00%
2	Jamban Sehat untuk Masyarakat Miskin Lokasi : Kalurahan Genjahan, Sawahan, Umbulrejo Kapanewon Ponjong	150	kk	450.000.000,00	450.000.000,00	100,00%	100,00%

a. BKK Padat Karya Infrastruktur

Padat karya Infrastruktur merupakan kegiatan pengerjaan corblok jalan yang dilaksanakan di 72 lokasi, yang tersebar di 50 kalurahan di 17 kapanewon. Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi 4 tahap, dimulai pada bulan Juli-Okttober 2023. Tiap tahap/bulan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

dilaksanakan di 18 lokasi. Pelaksanaan padat karya ini sesuai dengan jumlah pekerja dibagi menjadi 2 kelompok yang berbeda, yaitu kelompok pertama pada 33 lokasi terdiri dari 52 orang dan kelompok kedua pada 39 lokasi terdiri dari 26 orang. Sehingga total tenaga kerja yang terserap sebanyak 2.730 orang. Padat karya ini dilaksanakan selama 23 Hari Orang Kerja (HOK) untuk tiap-tiap lokasi.

Sampai dengan akhir Triwulan IV pelaksanaan kegiatan padat karya infrastruktur telah menyelesaikan seluruh kegiatan fisik. Adapun tahapan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Rakor dengan lurah dan sosialisasi kepada masyarakat yang mendapatkan program Bantuan Keuangan Khusus;
- b) Pelaksanaan survey teknis di 71 Lokasi oleh rekanan dan petugas teknis dari dinas; Pelaksanaan survey 1 (satu) lagi dilaksanakan oleh rekanan (CV. Barometer Konsultan).
- c) Penyusunan RAB dan Gambar Rencana Padat Karya dilaksanakan oleh rekanan CV. Barometer Konsultan dan CV. Citra Matra Ardhitama.
- d) Penetapan Pemenang Lelang pengadaan Bahan Baku Bangunan dan alat kerja padat karya CV. Bintara Jati.
- e) Pelaporan dan penyerahan Berkas Berita Acara Serah Terima Kegiatan Padat Karya Bantuan Keuangan Khusus.

b. Jamban Sehat untuk Masyarakat Miskin

Jamban sehat untuk masyarakat miskin memiliki sasaran jumlah penerima bantuan sebanyak 150 KK. Lokasi penerima bantuan ini di Kalurahan Genjahan, Sawahan, dan Umbulrejo Kapanewon Ponjong. Sampai dengan akhir triwulan IV, kegiatan sudah selesai 100%. Kegiatan Jamban Sehat untuk masyarakat miskin yang pada awal pelaksanaannya dari 150 KK penerima terdapat 40 KK yang diusulkan perubahan disebabkan karena tidak memiliki kemampuan untuk swadaya, telah meninggal dunia tanpa hak waris, sudah memiliki jamban sehat, dan pindah domisili. Maka terbitlah SK pengganti untuk 40 warga penerima bantuan.

6.2 Data Kinerja *Mandatory Spending*

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang dengan proporsi tertentu yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

6.2.1 Bidang Pendidikan

Mandatory Spending dalam bidang Pendidikan meliputi alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).

Alokasi anggaran belanja fungsi Pendidikan terhadap belanja daerah dalam postur APBD TA 2023 Kabupaten Gunungkidul mencapai Rp722.657.126.305,00 dengan rasio terhadap total anggaran belanja daerah sebesar 35%, melebihi ketentuan yang diamanatkan. Hal ini didukung oleh adanya belanja yang bersumber dari DAK baik DAK Fisik maupun Non Fisik. Dari anggaran tersebut realisasi belanja fungsi Pendidikan mencapai Rp707.326.363.968,00 dengan rasio terhadap total realisasi belanja daerah sebesar 35%. Berikut adalah tabel komponen perhitungan anggaran dan realisasi belanja fungsi Pendidikan dalam APBD TA 2023 Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 6.4
Anggaran dan Realisasi Belanja Fungsi Pendidikan TA 2023

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran Perubahan 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	a. Belanja Bidang Pendidikan:	672.032.366.153,00	657.839.402.409,00
	1) Belanja Operasi	637.765.668.453,00	626.614.940.877,00
	a) Belanja Pegawai	526.802.714.436,00	519.654.933.190,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	70.296.573.197,00	67.504.041.102,00
	c) Belanja Hibah	40.666.380.820,00	39.455.966.585,00
	d) Belanja Bantuan Sosial		
	2) Belanja Modal	34.266.697.700,00	31.224.461.532,00
	b. Belanja Bidang Kebudayaan:	36.059.766.209,00	35.323.277.253,00
	1) Belanja Operasi	35.687.941.109,00	34.966.489.153,00
	a) Belanja Pegawai	2.058.842.009,00	1.995.775.413,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	33.206.099.100,00	32.560.505.740,00
	c) Belanja Hibah	423.000.000,00	410.208.000,00
	d) Belanja Bantuan Sosial		
	2) Belanja Modal	371.825.100,00	356.788.100,00
	c. Belanja Bidang Perpustakaan:	3.756.294.744,00	3.561.118.219,00
	1) Belanja Operasi	3.589.984.994,00	3.395.607.919,00
	a) Belanja Pegawai	1.851.332.294,00	1.818.432.242,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	1.738.652.700,00	1.577.175.677,00
	c) Belanja Hibah		
	d) Belanja Bantuan Sosial		
	2) Belanja Modal	166.309.750,00	165.510.300,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

	d. Belanja Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.808.699.199,00	10.602.566.086,50
	1) Belanja Operasi	10.223.089.199,00	10.026.058.498,50
	a) Belanja Pegawai	1.722.281.664,00	1.591.690.513,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	5.700.807.535,00	5.634.367.985,50
	c) Belanja Hibah	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00
	d) Belanja Bantuan Sosial		
	2) Belanja Modal	585.610.000,00	576.507.588,00
2	Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan	722.657.126.305,00	707.326.363.967,50
3	Total Belanja Daerah	2.070.651.923.803,00	2.000.900.739.750,10
4	Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan terhadap Belanja Daerah	35%	35 %

Dari tabel 6.4 diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi belanja fungsi pendidikan sebesar Rp657.839.402.409,00 untuk Dinas Pendidikan, sebanyak 79% digunakan untuk belanja pegawai, 10% digunakan untuk belanja barang dan jasa, 6% digunakan untuk belanja hibah, dan 5% digunakan untuk belanja modal.

Belanja fungsi pendidikan untuk Dinas Kebudayaan sebesar Rp35.323.277.253,00, sebagian besar digunakan untuk belanja barang jasa kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan (Dais). Belanja urusan bidang perpustakaan sebanyak Rp3.561.118.219,00 digunakan untuk kegiatan program pembinaan perpustakaan. Sedangkan belanja fungsi pendidikan untuk Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp10.602.566.087,00, 15% untuk belanja pegawai, 53% digunakan untuk belanja barang dan jasa, 26% digunakan untuk belanja hibah, dan 5% digunakan untuk belanja modal.

6.2.2 Bidang Kesehatan

Mandatory Spending dalam bidang kesehatan meliputi pengalokasian anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan APBD TA 2023 Kabupaten Gunungkidul mencapai Rp359.989.779.537,00 dengan rasio terhadap total anggaran belanja daerah diluar gaji ASN sebesar 24%, melebihi dari proporsi yang seharusnya. Sedangkan realisasi belanja fungsi kesehatan mencapai Rp337.079.876.987,00 dengan rasio terhadap total realisasi belanja daerah diluar gaji ASN sebesar 23%. Berikut adalah tabel komponen perhitungan anggaran dan realisasi fungsi Kesehatan dalam APBD TA 2023.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Tabel 6.5
Anggaran dan Realisasi Belanja Fungsi Kesehatan TA 2023

No .	Komponen Perhitungan	Anggaran Perubahan 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	a. Belanja pada Dinas Kesehatan:	359.989.779.537,00	337.079.876.987,01
	1) Belanja Operasi	312.952.461.382,00	295.325.588.938,01
	a) Belanja Pegawai	91.083.130.018,00	88.219.422.107,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	221.419.331.364,00	206.656.166.831,01
	c) Belanja Hibah	-	-
	d) Belanja Bantuan Sosial	450.000.000,00	450.000.000,00
	2) Belanja Modal	47.037.318.155,00	41.754.288.049,00
	3) Belanja Transfer		
	b. Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang pelaksanaan fungsi Kesehatan, antara lain:	-	-
2	Anggaran Kesehatan (a+b)	359.989.779.537,00	337.079.876.987,01
3	Total Belanja Daerah	2.070.651.923.803,00	2.000.900.739.750,10
4	Gaji ASN	564.201.484.594,00	554.127.735.625,00
5	Total Belanja Daerah Diluar Gaji ASN (3-4)	1.506.450.439.209,00	1.446.773.004.125,10
	Rasio Anggaran Kesehatan (2:5)	24%	23%

Dari tabel 6.5 di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi belanja fungsi kesehatan sebesar Rp337.079.876.987,00, porsi terbesar berada pada komponen belanja barang dan jasa yaitu sebesar Rp206.656.166.831,00. Belanja barang dan jasa terdiri dari belanja barang pakai habis yang digunakan sebagian besar untuk belanja bahan obat-obatan; belanja jasa kantor digunakan sebagian besar untuk pembayaran Tenaga Harian Lepas dan pembayaran tagihan rutin kantor; belanja iuran jaminan/asuransi digunakan untuk belanja Program Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK) ; belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagian besar digunakan untuk pemeliharaan alat angkutan dan untuk pembelian BBM; sedangkan belanja barang dan jasa BLUD sebagian besar digunakan untuk jasa pelayanan dan jasa Tenaga Harian Lepas.

Belanja bantuan sosial berupa uang sejumlah Rp450.000.000,00 digunakan untuk jambanisasi untuk 150 KK @Rp.3.000.000,00. Belanja modal sebesar Rp41.754.288.049,00 terdiri dari belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp21.938.120.854,00, peralatan dan mesin sebesar Rp18.941.200.280,00, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan Rp764.650.000,00, dan belanja modal aset tetap lainnya Rp110.316.915,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

6.2.3 Bidang Infrastruktur

Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 mengamanatkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Dalam hal prosentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), pemerintah daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya UU Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir pemerintah daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% sampai dengan TA 2027.

Belanja infrastruktur pelayanan publik adalah belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.

Alokasi anggaran belanja infrastruktur daerah TA 2023 Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp309.055.632.016,00 dengan rasio terhadap jumlah Dana Transfer Umum (DTU) yang diperhitungkan sebesar 18%, masih jauh dari proporsi yang seharusnya. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul masih bergantung kepada transfer pusat karena rendahnya penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), sehingga alokasi anggaran digunakan untuk prioritas belanja yang bersifat wajib dan mengikat. Dari anggaran yang tersedia, realisasi belanja infrastruktur mencapai Rp286.982.924.151,00 dengan rasio terhadap jumlah DTU yang diperhitungkan sebesar 18%. Berikut adalah tabel komponen perhitungan anggaran dan realisasi belanja infrastruktur daerah dalam APBD TA 2023.

Tabel 6.6
Anggaran dan Realisasi Belanja Infrastruktur

No	Komponen Perhitungan	Anggaran Perubahan 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Total Belanja Daerah Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:	2.070.651.923.803,00	2.000.900.739.750,10
	a) belanja bagi hasil	16.416.635.450,00	14.768.381.250,00
	b) bantuan keuangan	348.203.476.650,00	348.148.476.650,00
2	Jumlah a dan b	364.620.112.100,00	362.916.857.900,00
3	Selisih (1-2)	1.706.031.811.703,00	1.637.983.881.850,10
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	682.412.724.681,20	655.193.552.740,04



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Komponen Perhitungan	Anggaran Perubahan 2023	Realisasi 2023
1	a) Belanja Modal	197.955.869.546,00	177.916.134.671,00
	1) Tanah	5.415.827.500,00	4.510.814.335,00
	2) Peralatan dan mesin	45.585.234.753,00	42.951.484.642,00
	3) Bangunan dan gedung	93.986.597.141,00	80.119.934.255,00
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	42.806.483.233,00	40.332.789.870,00
	5) Aset tetap lainnya	10.161.726.919,00	10.001.111.569,00
	6) Aset lainnya	-	-
	b) Belanja pemeliharaan	25.711.219.450,00	25.160.421.633,59
2	a) Belanja Hibah	30.749.329.870,00	29.322.154.696,00
	b) Belanja Bantuan Sosial	168.000.000,00	168.000.000,00
	c) Belanja Bantuan keuangan	54.471.213.150,00	54.416.213.150,00
3	Jumlah belanja infrastruktur Daerah	309.055.632.016,00	286.982.924.150,59
4	Persentase belanja infrastruktur	18%	18%

Dari tabel 6.6 dapat dijelaskan bahwa realisasi belanja infrastruktur terdiri dari belanja modal tanah sebesar Rp4.510.814.335,00 yang digunakan untuk pengadaan tanah untuk SDN Mulusan, pengadaan tanah untuk Pembangunan rumah bagi korban bencana, dan pengadaan tanah untuk konservasi ekosistem lokal di Giritirto.

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp42.951.484.642,00 digunakan untuk belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebesar 30%, belanja modal peralatan dan mesin BOS sebesar 18%, belanja modal alat angkutan sebesar 13%, belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebesar 9%, belanja modal komputer sebesar 6%, dan 24% sisanya untuk belanja modal peralatan mesin lainnya.

Realisasi belanja modal bangunan dan gedung sebesar Rp80.119.934.255,00 digunakan untuk belanja modal bangunan gedung sebesar 96%, dan 4% sisanya digunakan untuk belanja modal gedung dan bangunan BLUD. Realisasi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp40.332.789.870,00, digunakan untuk belanja modal jalan dan jembatan sebesar 86%, belanja modal bangunan air sebesar 11%, dan 3% sisanya digunakan untuk belanja modal instalasi dan jaringan.

Realisasi belanja aset tetap lainnya sebesar Rp10.001.111.569,00, digunakan untuk belanja modal aset tetap lainnya BOS sebesar 53%, belanja modal aset tidak berwujud sebesar 45%, dan 2% sisanya digunakan untuk belanja modal bahan perpustakaan serta belanja modal aset tetap lainnya BLUD.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Realisasi belanja pemeliharaan sebesar Rp25.160.421.634,00, digunakan untuk belanja pemeliharaan peralatan mesin sebesar 44%, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, irigasi sebesar 38%, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar 15, 3% sisanya digunakan untuk belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.

Realisasi belanja hibah sebesar Rp29.322.154.696,00 dikelola oleh Dinas Pendidikan sebesar Rp2.975.148.000,00, Dinas Pertanian dan Pangan sebesar Rp2.407.180.800,00, Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.819.064.960,00, Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana sebesar Rp87.208.482,00, Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp300.378.629,00, Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.819.064.960,00, Kundha Kabudayan sebesar Rp410.000.208,00, Sekretariat Daerah sebesar Rp450.000.000,00, dan Kapanewon Tanjungsari sebesar Rp408.090.740,00.

Realisasi belanja bantuan keuangan infrastruktur sebesar Rp54.416.213.150,00 dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman sebesar Rp17.218.169.100,00, Dinas Pertanian dan Pangan sebesar Rp914.089.000,00, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp37.556.455.050,00, Dinas Pariwisata sebesar Rp30.000.000,00, Dinas Lingkungan hidup sebesar Rp39.000.000,00, dan Dinas Pendidikan sebesar Rp40.000.000,00. Belanja bantuan keuangan infrastruktur digunakan untuk pembangunan jalan dusun, rehab balai dusun, pembuatan sumur bor, dan rehab gedung PAUD.

6.2.4 Alokasi Dana Desa

Sesuai amanat UU No 6 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota wajib menganggarkan belanja Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi DAK. Kecukupan proporsi ADD seharusnya untuk Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah sebesar Rp91.921.015.836,50, dengan perhitungan sebagai berikut :

(Dana Perimbangan - DAK Fisik - DAK Non Fisik) dikalikan 10%.

Hasilnya = $(1.318.721.692.365 - 82.185.659.000 - 317.325.875.000) \times 10\% = 91.921.015.836,50$. Namun pada APBD TA 2023, ADD dianggarkan sebesar Rp112.417.212.000,00 atau mencapai 12,23% melebihi dari proporsi yang seharusnya.

6.2.5 Bidang Pengawasan

Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah maka pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2022. Total anggaran belanja daerah Kabupaten Gunungkidul TA



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2023 di atas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) sehingga alokasi anggaran pengawasan seharusnya paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Perhitungan alokasi anggaran pengawasan 0,50% dikalikan total anggaran belanja daerah sebesar Rp2.070.651.923.803,00 adalah sebesar Rp10.353.259.619,02 masih dibawah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), sedangkan yang terpasang dalam perubahan APBD Tahun 2023 adalah sebesar Rp10.309.710.521,00 atau 0,50% dari total anggaran belanja daerah sehingga masih belum memenuhi ketentuan. Anggaran pengawasan pada Inspektorat Daerah tersebut terbagi menjadi dua yaitu DPA Inspektorat Daerah sebesar Rp7.156.523.768,00 dan DPA BKPPD untuk belanja tambahan penghasilan pegawai insprektorat sebesar Rp3.153.186.753,00. Dari alokasi anggaran tersebut terealisasi belanja sebesar Rp10.459.962.021,00 atau mencapai 101% karena realisasi belanja tambahan penghasilan pegawai mencapai diatas 100%. Belum terpenuhinya anggaran pengawasan sesuai dengan ketentuan dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan di sisi lain masih terdapat kekurangan jumlah SDM pada Inspektorat Daerah jika dibandingkan dengan kebutuhan sesuai analisa jabatan dan beban kerja.

Berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 218/KPTS/2022 tentang Peta Jabatan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, disebutkan bahwa Kebutuhan ASN pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebanyak 124 sedangkan untuk existing sampai dengan Bulan Januari 2024 sebanyak 49 orang dengan perincian sebagai berikut:

NO	Jabatan	Kebutuhan	Existing	Kekurangan
1.	Pejabat Struktural	9	9	0
2.	Pelaksana	37	6	21
3.	Auditor	62	29	33
4.	P2UPD	16	5	7
	Jumlah	124	49	75

6.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pagu anggaran DAK sebesar Rp 399.240.019.099,00 yang terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp82.029.545.000,00 dan DAK Non Fisik Rp317.210.474.099,00. Berikut ini capaian keuangan maupun fisik baik untuk DAK Fisik maupun DAK Nonfisik pada tabel berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Tabel 6.7
Capaian Keuangan dan Fisik DAK Fisik dan DAK Non Fisik

NO.		ALOKASI DAK TA. 2023	REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK
			RP	%	%
	DAK FISIK	82,029,545,000.00	73,749,586,730.00	89.91%	100.00%
	DAK NONFISIK	317,210,474,099.00	309,007,774,149.00	97.41%	100.00%
	TOTAL DAK	399,240,019,099.00	382,757,360,879.00	95.87%	100.00%
	DAK FISIK	82,029,545,000.00	73,749,586,730.00	89.91%	100.00%
1	Pendidikan	24,876,654,000.00	21,360,188,745.00	85.86%	100.00%
	PAUD	2,181,225,000.00	1,863,977,220.00	85.46%	100.00%
	SD	4,639,322,000.00	3,868,196,075.00	83.38%	100.00%
	SMP	18,056,107,000.00	15,628,015,450.00	86.55%	100.00%
2	Kesehatan	37,638,767,000.00	33,516,774,984.52	89.05%	100.00%
	Pengendalian Penyakit	1,864,800,000.00	1,849,600,000.00	99.18%	100.00%
	Penguatan Sistem Kesehatan	35,773,967,000.00	31,667,174,985.00	88.52%	100.00%
3	Jalan	15,314,124,000.00	14,672,623,000.00	95.81%	100.00%
4	Pertanian	4,200,000,000.00	4,200,000,000.00	100.00%	100.00%
	Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	4,200,000,000.00	4,200,000,000.00	100.00%	100.00%
	DAK NONFISIK	317,210,474,099.00	309,007,774,149.00	97.41%	100.00%
1	Bantuan Operasional Sekolah	77,085,930,000.00	76,503,487,797.00	99.24%	100.00%
	Reguler	72,793,430,000.00	72,216,857,467.00	99.21%	100.00%
	Kinerja	4,292,500,000.00	4,286,630,330.00	99.86%	100.00%
2	Bantuan operasional penyelenggaraan PAUD	17,573,910,000.00	17,566,955,000.00	99.96%	100.00%
	Reguler	16,478,910,000.00	16,471,955,000.00	99.96%	100.00%
	Kinerja	1,095,000,000.00	1,095,000,000.00	100.00%	100.00%
3	Bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan	1,579,980,000.00	1,579,980,000.00	100.00%	100.00%
	Reguler	1,444,980,000.00	1,444,980,000.00	100.00%	100.00%
	Kinerja	135,000,000.00	135,000,000.00	100.00%	100.00%
4	Tunjuangan profesi guru	176,597,993,000.00	176,582,141,800.00	99.99%	100.00%
6	Tambahan penghasilan guru	2,757,000,000.00	2,377,590,000.00	86.24%	100.00%



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO.		ALOKASI DAK TA. 2023	REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK
			RP	%	%
7	Bantuan operasional kesehatan				
	Bantuan operasional kesehatan	7,934,230,600.00	6,247,802,241.00	78.74%	100.00%
	Bantuan operasional kesehatan puskesmas	23,436,106,499.00	18,601,502,036.00	79.37%	100.00%
	Pengawasan obat dan makanan	269,601,000.00	269,601,000.00	100.00 %	100.00%
8	Bantuan operasional keluarga berencana	6,785,506,000.00	6,278,797,885.00	92.53%	100.00%
9	Dana peningkatan kapasitas Koperasi dan UMK	410,170,000.00	410,168,038.00	100.00 %	100.00%
10	Dana pelayanan kepariwisataan	846,247,000.00	845,704,000.00	99.94%	100.00%
11	Dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak	598,000,000.00	582,853,502.00	97.47%	100.00%
12	Dana fasilitasi penanaman modal	396,500,000.00	377,497,500.00	95.21%	100.00%
13	Dana ketahanan pangan dan perikanan	939,300,000.00	783,693,350.00	83.43%	100.00%

6.3.1 DAK Fisik

a. Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan DAK Fisik terdiri dari 3 (tiga) subbidang, yaitu Subbidang Paud, Subbidang SD, dan Subbidang SMP. Total pagu anggaran untuk Bidang Pendidikan sebesar Rp24.876.654.000,00. Kegiatan fisik meliputi revitalisasi Paud, SD, dan SMP sudah selesai dilaksanakan 100% dengan capaian keuangan sebesar Rp21,360,188,745.00 atau setara dengan 85.86%. Deviasi capaian keuangan dikarenakan selisih nilai kontrak pada masing-masing pekerjaan.

b. Bidang Kesehatan

Bidang Kesehatan DAK Fisik meliputi dua subbidang kegiatan yaitu Pengendalian Penyakit dan Penguatan Sistem Kesehatan. Total pagu anggaran untuk Bidang Kesehatan sebesar Rp37.638.767.000,00. Subbidang Pengendalian Penyakit memiliki kegiatan pengadaan Alat Kimia Darah untuk 21 Puskesmas di Kabupaten Gunungkidul dengan nilai Pagu sebesar Rp 1,864,800,000.00 dan nilai kontrak sebesar Rp1,849,600,000.00. Kegiatan fisik sudah selesai 100% dengan capaian keuangan sebesar sebesar nilai kontrak atau setara dengan 99,18%.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada subbidang Penguatan Sistem Kesehatan terdapat kegiatan meliputi pengadaan Alat Kesehatan bagi 20 Puskesmas di Kabupaten Gunungkidul, Penguatan Layanan Rujukan RSUD Saptosari, Peningkatan Labkesda Menuju Standar BSL-2, dan kegiatan pendukung. Kegiatan fisik sudah selesai 100% dengan capaian keuangan sebesar Rp31.667.174.985,00 dari pagu anggaran Rp35.773.967.000,00 atau setara 88.52%.

c. Bidang Jalan

Bidang Jalan memiliki satu kegiatan yaitu Penanganan Long Segment (pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi) dengan total pagu anggaran sebesar Rp15.314.124.000,00. Terdapat empat lokasi Penanganan Long Segment yaitu:

1. Jalan Sambipitu-Tawang sepanjang 5.7 Km dengan pemenang kontrak CV. Sari Putra Prima,
2. Jalan Semanu-Karangmojo sepanjang 0.72300000021 Km dengan pemenang kontrak CV. Nasal Konstruksi,
3. Jalan Sp. Kalipentung-Nglanggeran sepanjang 4 Km dengan pemenang kontrak CV. Hidayah Putra Abadi, dan
4. Jalan Tawang-Serut sepanjang 8.2 Km dengan pemenang kontrak CV. Tirta Wening.

Kegiatan fisik pada bidang Jalan telah 100% terlaksana dengan capaian keuangan sebesar Rp14,672,623,000.00 atau setara 95.81%.

d. Bidang Pertanian

Bidang pertanian dengan total pagu anggaran sebesar Rp4.200.000.000,00 terrealisasi 100% dengan pelaksanaan pekerjaan secara swakelola. Tiga kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

1. Pembangunan sumber-sumber air dan rehabilitasi irigasi pertanian yang meliputi: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) sebanyak 5 unit (1 unit / 50 Ha) dan Pembangunan irigasi air tanah dalam sektor tanaman pangan sejumlah 8 unit,
2. Pembangunan Jalan Pertanian, meliputi Pembangunan Jalan Usaha Tani Sektor Tanaman Pangan sebanyak 4 unit yaitu di Sidorejo Kapanewon Ponjong, Bendungan Kapanewon Karangmojo, Selang Kapanewon Wonosari, dan Candirejo Kapanewon Semin memiliki ukuran panjang jalan 900m dengan lebar 2,5m, dan
3. Kegiatan penunjang sebesar Rp 155,906,000.00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

6.3.2 DAK Non Fisik

a. DAK Non Fisik Bidang Pendidikan

DAK Nonfisik Bidang Pendidikan terdiri dari 5 subbidang yaitu: Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, BOP Paud, BOP Kesetaraan, BOS SD, dan BOS SMP. Capaian keuangan dari total pagu anggaran sebesar Rp275.620.013.000 terrealisasi Rp274.610.154.597 atau setara dengan 99,63%.

b. DAK Non Fisik Bidang Kesehatan

Bidang kesehatan terbagi menjadi 3 kegiatan yaitu Bantuan Operasional Kesehatan, Bantuan Operasional Kegiatan Puskesmas, dan Pengawasan Obat dan Makanan. seluruh kegiatan telah selesai 100% dengan capaian keuangan total Rp25.118.905.277,00 dari pagu anggaran Rp31.639.938.099,00 atau setara 79,39%.

c. DAK Non Fisik Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

DAK Non Fisik Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi:

1. Operasional Balai Penyuluhan KB
2. Operasional Pelayanan KB
3. Operasional Penggerakan di Kampung KB
4. Penurunan Stunting
5. Operasional Pembinaan Program Bangga Kencana oleh Kader (PPKBD dan SUB PPKBD)
6. Dukungan Manajemen dan SIGA.

Kegiatan fisik selesai 100% dengan capaian keuangan sebesar Rp 6,278,797,885.00 dari total pagu angaran sebesar Rp6.785.506.000 atau setara 92.53%. Terdapat kendala selama proses kegiatan berlangsung yaitu pada operasional Penggerakan pelayanan MOP yaitu kesulitan mendapatkan target. Menjadi catatan kedepan untuk pelaksanaan Operasional Pelayanan KB yaitu Operasional Distribusi alokon perlu adanya penyesuaian jumlah faskes yang menjadi target distribusi.

d. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Menengah Kecil (PK2UMK)

Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Menengah Kecil memiliki pagu sebesar Rp410.170.000,00. Kegiatan terdiri dari Pelatihan dan Pendampingan perkoperasian dan kewirausahaan. Pelatihan meliputi Perkoperasian, Kewirausahaan, Manajerial, dan Diklat keterampilan teknis. Kegiatan telah selesai 100% dengan capaian keuangan sebesar Rp410.168.038,00 atau setara dengan 99.99%.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

e. Dana Pelayanan Kepariwisataaan

Dana Pelayanan Kepariwisataaan memiliki pagu sebesar Rp846.247.000,00. Terdiri dari 6 kegiatan yaitu:

1. Pelatihan Keamanan dan Keselamatan di Destinasi Wisata,
2. Pelatihan tata kelola, bisnis, dan pemasaran (termasuk digitalisasi) destinasi pariwisata,
3. Pelatihan digitalisasi: branding, pemasaran dan penjualan pada desa wisata, homestay, kuliner, souvenir, fotografi,
4. Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienitas Sajian Kuliner,
5. Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata, dan
6. Pelatihan Pemandu Caving/Susur Gua.

Masing-masing pelatihan diikuti oleh 40 orang dan telah selesai 100% dengan capaian keuangan sebesar Rp845.704.000,00 atau setara dengan 99.94%.

f. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA)

Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak terbagi menjadi dua pengampu (UPT PPA dan Bidang PPPA Dinas Sosial) dengan 3 kegiatan yaitu:

1. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp346.840.000 dan
2. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dan
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan

Total pagu anggaran sebesar Rp598.000.000,00. Seluruh kegiatan sudah selesai 100% dengan capaian keuangan sebesar Rp 582,853,502.00 atau setara 97.47%. Serapan keuangan yang kurang maksimal dikarenakan beberapa hal seperti Korban yang sudah mempunyai BPJS Kesehatan, tidak adanya korban yang membutuhkan visum et psikiatrium, dan tersisa kuota 1 orang karena tidak ada korban yang memerlukan bantuan hukum.

g. Dana Fasilitas Penanaman Modal

Dana fasilitas penanaman modal memiliki 3 kegiatan yaitu Pengawasan pelaksanaan penanaman modal, Bimbingan teknis kepada para pelaku usaha, dan Penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaku usaha dengan pagu total sebesar Rp396.500.000,00. Kegiatan sudah selesai 100% dengan capaian keuangan sebesar Rp 377,497,500.00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

h. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian terbagi menjadi dua pengampu kegiatan yaitu pada Dinas Pertanian dan Pangan dengan pagu sebesar Rp337.000.000,00 dan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp602.300.000,00.

1. Kegiatan pada Dinas Pertanian dan Pangan yaitu Bidang Hortikultura, P2L (2 KWT) dan Bidang Penyuluhan Pertanian, Biaya Operasional BPP kegiatan fisik sudah terlasana 100% .
2. Dinas Peternakan dan Kesehatan yaitu bidang Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner sudah terlaksana 100% dengan capaian keuangan sebesar Rp 460,193,350.00 (76.41%). Rendahnya capaian keuangan dikarenakan penyerapan operasional pengobatan PMK rendah yang disebabkan oleh penurunan kasus penyakit PMK dan tidak bisa digunakan untuk dialihkan ke kasus penyakit yang lain, serta operasional pelayanan kesehatan hewan terkendala oleh pelayanan yang sudah tercatat dalam PAD tidak dapat dibiayai dengan DAK Nonfisik.

6.4 Tugas Pembantuan

Berikut disampaikan upaya-upaya yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam tindak lanjut pengelolaan dan pemanfaatan pasar rakyat TP di Pasar Munggi II, Semanu:

Pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 bertempat di ruang rapat Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul, dilaksanakan kegiatan “Rapat Koordinasi penempatan pedagang pasar Munggi II”. Peserta yang hadir yaitu dari Kapanewon Semanu, Kalurahan Semanu, Dinas Perhubungan, Dinas Satpol PP, Bagian Perekonomian Setda, Bappeda, Polsek, Kormail, Ketua Paguyuban Pasar Munggi II, Ketua RT, Ketua RW, Dukuh Semanu Utara dan beberapa warga yang menyewakan pekarangan untuk berdagang.

Pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 bertempat di los Pasar Munggi II dilaksanakan sosialisasi kepada pedagang pasar sebagai upaya penataan pedagang dan juga dilakukan diskusi dengan pihak pedagang dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

- a) Relokasi pedagang bertujuan untuk penempatan pedagang di los baru Pasar Munggi II dan penataan pedagang yang berada di bahu jalan supaya arus lalu lintas lancar;
- b) Upaya relokasi pedagang pasar Munggi II akan dilaksanakan pada tanggal 16 September 2023 berkolaborasi dengan stakeholder terkait dari pihak Satpol PP, Dinas Perhubungan, Polsek, Koramil, Kapanewon, Kalurahan, Dusun, RT RW setempat;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- c) Apabila proses penataan tidak berhasil dilakukan maka akan dilakukan pemberian peluang bagi pedagang lain/masyarakat untuk menempati los yang tidak digunakan oleh pedagang yang tidak mau menempati lokasi los pasar.

Paska sosialisasi penataan pedagang pasar Munggi dilakukan dengan melakukan pemantauan di lapangan yang melibatkan pihak Dinas Perdagangan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Kapanewon, Koramil dan Polsek, kapanewon dan kalurahan, dukuh, RT RW pada setiap kliwonan pada tanggal 16 September 2023, 21 September 2023, 26 September 2023, 1 Oktober 2023 dan 6 Oktober 2023. Pelaksanaan penataan pedagang setiap Kliwonan selama 5 kali secara umum sudah dapat terlaksana dengan baik, dan ada peningkatan pedagang yang cukup signifikan menempati los pasar Munggi untuk berjualan.

Progres akhir Desember walau pada awal mula para pedagang masih menempati Los Pasar Munggi seperti saat ada penataan secara gabungan, tetapi lambat laun para pedagang kembali menempati posisi semula saat sebelum penataan walaupun masih ada beberapa pedagang yang tetap patuh menempati los pasar yang tersedia.

Namun demikian Dinas Perdagangan tetap optimis bahwa los di Pasar Munggi 2 akan segera ditempati oleh para pedagang dengan alasan :

- a. Sewa pekarangan pada warga sekitar pasar saat pembangunan pasar sudah habis;
- b. Musim hujan akan segera tiba;
- c. Perda No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2024 akan mendesak para pedagang untuk menempati los pasar yang tersedia karena di dalam Perda tersebut tidak mengenal lagi Retribusi Sewa Kios/Los tetapi hanya Retribusi Pelayan Pasar (secara harian), sehingga jika kios/los yang tidak ditempati dalam jangka waktu tertentu maka hak pemakaian kios/los akan ditarik oleh pemerintah daerah dan akan dipindahtangankan ke pedagang lain yang berminat.

6.5 Realisasi P3DN

P3DN atau Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri merupakan upaya Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor.

Laporan anggaran komitmen dan realisasi peningkatan penggunaan produksi dalam negeri (P3DN) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tanggal 31 Desember 2023 menurut data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) adalah sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Jenis	Nilai
1	Anggaran Komitmen Belanja PDN*	357.779.019.844
2	Realisasi Belanja PDN	331.483.561.697
3	Persentase PDN**	93%
* anggaran komitmen untuk belanja PDN		
** (realisasi belanja PDN (2)/anggaran belanja PDN (1))*100		

6.6 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul sebagai tim manajemen Bos tingkat Kabupaten atas 466 unit sekolah Negeri yang terdiri dari 405 SD Negeri dan 61 SMP Negeri. Tahun 2022, Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan pengalokasian dana BOS tahun berjalan. Saldo akhir BOS tahun 2022 senilai Rp967.296.835,00 untuk jenjang SD Negeri dan SMP Negeri. Sedangkan untuk jenjang swasta yang berjumlah 110 unit sekolah swasta yang terdiri dari 61 SD Swasta dan 49 SMP Swasta juga telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan pengalokasian dana BOS tahun berjalan. Saldo akhir BOS tahun 2022 senilai Rp231.373.440,00 untuk jenjang SD Swasta dan SMP Swasta.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Tahun Anggaran 2023 menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp76.479.676.247,00 yang terdiri dari BOS Reguler Rp72.187.176.247,00 dan BOS Kinerja Rp4.292.500.000,00. Adapun realisasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2023 sebesar Rp76.299.744.939,00 yang terdiri dari BOS Reguler Rp72.098.300.914,00 dan BOS Kinerja Rp 4.201.444.025,00.

Sedangkan jika dialirkan dari saldo akhir 2022 yang menjadi saldo awal 2023 sebesar Rp1.198.670.275,00 ditambah penerimaan tahun 2023 Rp76.479.676.247,00 dikurangi realisasi tahun 2023 Rp76.299.744.939,00 dikurangi pengembalian/STS di tahun 2023 Rp3.784.909,00 sehingga saldo akhir Dana BOS 2023 menjadi Rp1.374.816.674,00.

Dari total anggaran tersebut, senilai Rp13.521.748.374,00 diperuntukkan dan dikelola oleh sekolah swasta baik Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP). Jika dialirkan dari tahun sebelumnya, saldo awal sebesar Rp231.373.440,00 penerimaan tahun 2023 Rp13.290.374.934,00 dengan realisasi Rp13.193.687.142,00 (realisasi SD Swasta



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Rp7.310.511.055,00 dan SMP Swasta Rp5.883.176.087,00), dan pengembalian/STS di tahun 2023 Rp392.250,00. Adapun saldo akhir 2023 yang dikelola sekolah swasta total senilai Rp327.668.982,00 yang terdiri dari saldo SD swasta senilai Rp116.476.370,00 dan SMP swasta sebesar Rp211.192.612,00.

Dari realisasi Dana BOS Tahun Anggaran 2023, terdapat saldo kas Dana BOS tahun 2023 sebesar Rp1.374.816.674,00 yang terdiri dari Sekolah Negeri sebesar Rp1.047.147.692,00 dan sekolah swasta sebesar Rp327.668.982,00. Rincian Saldo akhir Dana BOS per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA UNIT	Penerimaan		Realisasi	Pengembalian (STS)	Saldo Akhir
		Saldo Awal	Penerimaan			
1	2	3	4	5	6	7
	BOSP REGULER					
1	SD NEGERI	255.296.742	37.304.416.579	37.430.305.287	682.272	128.725.762
2	SMP NEGERI	486.257.890	22.647.384.734	22.444.122.180	2.710.387	686.810.057
	JUMLAH SD - SMP NEGERI	741.554.632	59.951.801.313	59.874.427.467	3.392.659	815.535.819
1	SD SWASTA	67.242.385	6.800.755.078	6.797.761.469	391.867	69.844.127
2	SMP SWASTA	50.082.986	5.434.619.856	5.426.111.978	383	58.590.481
	JUMLAH SD - SMP SWASTA	117.325.371	12.235.374.934	12.223.873.447	392.250	128.434.608
	JUMLAH NEGERI + SWASTA	858.880.003	72.187.176.247	72.098.300.914	3.784.909	943.970.427
	BOSP KINERJA			-		
1	SD NEGERI	142.894.322	2.582.500.000	2.604.220.928		121.173.394
2	SMP NEGERI	82.847.881	655.000.000	627.409.402		110.438.479
	JUMLAH SD - SMP NEGERI	225.742.203	3.237.500.000	3.231.630.330		231.611.873
1	SD SWASTA	64.381.829	495.000.000	512.749.586		46.632.243
2	SMP SWASTA	49.666.240	560.000.000	457.064.109		152.602.131
	JUMLAH SD - SMP SWASTA	114.048.069	1.055.000.000	969.813.695	-	199.234.374
	JUMLAH NEGERI + SWASTA	339.790.272	4.292.500.000	4.201.444.025	-	430.846.247
	TOTAL	1.198.670.275	76.479.676.247	76.299.744.939	3.784.909	1.374.816.674



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Adapun daftar saldo kas Dana BOS per 31 Desember 2023 pada sekolah negeri senilai Rp1.047.147.692,00 dengan rincian sebagai berikut :

Daftar Rincian Saldo Kas Dana Bos Sekolah Negeri Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023

BOSP REGULER

NO	NPSN	NAMA UNIT	Saldo Akhir
1	2	3	4
I		JENJANG SD NEGERI KAB. GUNUNGKIDUL	
I		KAPANEWON GIRISUBO	
1	20402247	SD Balong	255.890
2	20402388	SD Jepitu I	360.000
3	20401859	SD Nglindur	-
4	20401763	SD Rongkop	3.000
5	20401804	SD Tileng I	265.812
6	20401803	SD Tileng II	51.960
7	20401902	SD Pucung	188.000
8	20401813	SD Songbanyu I	242.410
9	20401812	SD Songbanyu II	200.000
10	20402384	SD Kandri	239.730
11	20402246	SD Balong III	102.519
12	20402386	SD Jepitu III	428.800
13	20401802	SD Tileng III	2.850.000
14	20402062	SD Wotawati	68.124
15	20402404	SD Joho	68.750
16	20402473	SD Gabugan	240.000
I		KAPANEWON KARANGMOJO	
1	20402378	SD Karangmojo IV	64.510
2	20402380	SD Karangmojo II	424.207
3	20402377	SD Karangmojo V	64.845
4	20401882	SD Ngawis	49.910
5	20401863	SD Ngagel	52.000
6	20402379	SD Karangmojo III	1.503.511
7	20402381	SD Karangmojo I	247.380
8	20402537	SD Gedangan	523.580
9	20402539	SD Gedangan I	74.460
10	20401922	SD Pangkah	134.604
11	20402439	SD Karangwetan	2.500
12	20402506	SD Candi II	73.609
13	20402507	SD Candi I	346.328



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

14	20402504	SD Candi Baru I	69.595
15	20402503	SD Candi Baru II	253.001
16	20401815	SD Sokoliman	385.880
17	20402366	SD Karanganom I	41.980
18	20402365	SD Karanganom II	165.948
19	20402085	SD Wiladeg	1.132.619
20	20402204	SD Bendungan II	134.320
21	20402203	SD Bendungan III	147.530
22	20402205	SD Bendungan I	630.260
23	20402531	SD Grogol I	67.222
24	20402530	SD Grogol IV	2.558.913
25	20402547	SD Gelaran I	223.800
26	20402559	SD Gelaran II	1.139.850
27	20402198	SD Banyubening III	35.410
28	20402212	SD Banyubening I	31.500
29	20402558	SD Gelaran III	171.120
30	20401914	SD Pengkol	99.900
31	20401818	SD Slametan	96.920
32	20402361	SD Karangduwet I	283.523
33	20402372	SD Karangduwet III	105.765
34	20402397	SD Jetis	7.397.895
I		KAPANEWON PALIYAN	
1	20401856	SD Paliyan II	34.160
2	20401854	SD Paliyan IV	333.858
3	20401857	SD Paliyan I	1.090
4	20401853	SD Paliyan V	256.520
5	20402517	SD Giring	22.960
6	20401855	SD Paliyan III	533.515
7	20401915	SD Pelemgede	53.680
8	20401936	SD Trowono I	322.236
9	20402362	SD Karangasem	143.872
10	20401867	SD Mulusan	34.040
11	20401817	SD Sodo	923.376
12	20401852	SD Pampang I	53.260
13	20401851	SD Pampang II	32.720
14	20407346	SD Karangmojo II	136.088
I		KAPANEWON PANGGANG	
1	20407322	SD Panggang III	973.895
2	20401836	SD Panggang II	184.065
3	20402197	SD Banyumeneng	2.834.612



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

4	20402202	SD Bibal	236.634
5	20402410	SD Legundi I	143.918
6	20402518	SD Girimulyo	15.695
7	20402083	SD Wiloso II	130
8	20402084	SD Wiloso I	1.138.000
9	20402514	SD Girisekar	582.930
10	20402519	SD Girikarto	8.000
11	20401782	SD Sawah	465.610
12	20401849	SD Panggang I	7.862.100
13	20402420	SD Legundi II	7.160
14	20401916	SD Pejaten	49.580
15	20401781	SD Sawah III	252.960
16	20402513	SD Girisuko	360.000
17	20401798	SD Temuireng II	126.400
18	20402072	SD Turunan	373.336
19	20401839	SD Pacar	101.950
20	20401797	SD Temuireng I	94.030
I		KAPANEWON PATUK	
1	20402489	SD Bunder I	268.018
2	20402488	SD Bunder II	13.400
3	20402487	SD Bunder III	950
4	20401736	SD Sendangsari	34.657
5	20401874	SD Nglegi I	9.200
6	20401861	SD Nglegi II	150.960
7	20402418	SD Klepu	37.630
8	20401805	SD Terbah II	84.020
9	20401753	SD Sidomulyo	9.000
10	20401921	SD Panjatan	7.500
11	20402194	SD Baran	45.500
12	20402190	SD Beji	48.920
13	20401806	SD Terbah I	112.000
14	20402210	SD Belang	170.000
15	20401920	SD Patuk I	7.524
16	20401919	SD Patuk II	66.000
17	20402463	SD Doga	8.810
18	20401823	SD Sokasari	15.000
19	20401844	SD Ngoro-oro	8.400
20	20401883	SD Nglanggeran	327.960
21	20401913	SD Pengkok	153.660
22	20402070	SD Waduk	515.486



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

I		KAPANEWON PLAYEN	
1	20401912	SD Playen I	462.030
2	20401896	SD Playen VI	-
3	20401910	SD Playen IV	1.640
4	20401842	SD Ngunut	740
5	20401911	SD Playen III	2.300
6	20402496	SD Bleberan	1.982.055
7	20401778	SD Sawahan	248.100
8	20402466	SD Dengok II	119.795
9	20401821	SD Siyono I	260
10	20402426	SD Mendongan	116.920
11	20401819	SD Siyono III	274.344
12	20402075	SD Weroharjo	69.502
13	20402421	SD Logandeng	60.625
14	20401894	SD Plembon	147.520
15	20402482	SD Gading Asri	125.000
16	20402467	SD Dengok I	112.015
17	20401860	SD Ngleri	1.530
18	20401786	SD Teguhan	61.075
19	20402245	SD Banaran I	86.788
20	20402240	SD Banaran III	78.500
21	20402549	SD Getas I	12.700
22	20402548	SD Getas II	47.840
23	20402081	SD Wonolagi	25.473
24	20401897	SD Playen V	5.782
25	20402492	SD Bulu	109.140
26	20401893	SD Plembutan I Playen	27.540
27	20401892	SD Plembutan Asri	122.580
28	20402196	SD Banyusoco I	20.780
29	20402195	SD Banyusoco II	25.935
I		KAPANEWON PONJONG	
1	20401735	SD Sendang	232.013
2	20407394	SD Sawahan	65.160
3	20401776	SD Sawur	14.760
4	20402191	SD Bedoyo	252
5	20401811	SD Tambakromo I	91.695
6	20401810	SD Tambakromo II	8.040
7	20401809	SD Tambakromo III	184.540
8	20402389	SD Jatisari	126.434
9	20401825	SD Surodadi I	206.400
10	20402454	SD Kenteng I	30.912



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

11	20402453	SD Kenteng II	494.678
12	20402417	SD Klumpit	271.339
13	20402363	SD Karangasem	226.470
14	20401791	SD Tegalrejo	62.868
15	20401785	SD Trengguno	112.698
16	20401787	SD Tegalrejo Baru	174.514
17	20402215	SD Asemblulang	94.459
18	20401865	SD Ngabean	28.220
19	20401826	SD Surubendo	393.587
20	20401840	SD Nongkosepet	456.947
21	20402522	SD Gombang I	72
22	20402532	SD Gombang II	1.570
23	20401887	SD Ponjong I	332.320
24	20401899	SD Ponjong IV	1.027.428
25	20402428	SD Mendak	676.580
26	20402071	SD Umbulrejo	106.303
27	20401886	SD Ponjong II	2.740
28	20401898	SD Ponjong III	198.920
29	20402556	SD Genjahan II	423.914
30	20401829	SD Sumbergiri	97.500
31	20402554	SD Genjahan Baru	11.500
32	20401824	SD Surodadi II	81.880
33	20401827	SD Sunggingan	473.000
I		KAPANEWON RONGKOP	
1	20402494	SD Bohol	560.920
2	20401848	SD Pakel I	30.000
3	20401858	SD Pakel II	403.128
4	20402493	SD Botodayakan	282.748
5	20402049	SD Yuyang	9.144
6	20401923	SD Petir I	827.210
7	20401924	SD Petir II	168.725
8	20401904	SD Pucanganom I	14.670
9	20401903	SD Pucanganom II	849.199
10	20402193	SD Baran I	344.790
11	20402449	SD Kerdonmiri I	634.515
12	20402192	SD Baran II	189.970
13	20402448	SD Kerdonmiri II	334.515
14	20402438	SD Karangwuni I	112.392
15	20402429	SD Melikan	291.260
16	20402452	SD Kenteng Rongkop	1.460.000
17	20402214	SD Banombo	250.000



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

18	20402437	SD Karangwuni II	5.460
19	20402414	SD Kropak	179.091
20	20402498	SD Cabe	29.190
21	20402455	SD Kendal	3.008
I		KAPANEWON TEPUS	
1	20407389	SD Tepus I Tepus	489.900
2	20407391	SD Sumberwungu II	80.000
3	20402213	SD Bantalwatu	214.300
4	20402524	SD Gupakan II	58.505
5	20402516	SD Giripanggung	215.856
6	20402238	SD Banjarsari	733.603
7	20401828	SD Sumberwungu I	145.164
8	20401891	SD Ploso	496.400
9	20402086	SD Widoro	4.036.888
10	20402525	SD Gupakan I	344.070
11	20401754	SD Sidoharjo	545.834
12	20401835	SD Puleireng	1.901.630
13	20402359	SD Bintaos	482.140
14	20401900	SD Pudak	5.560.994
15	20407393	SD Purwodadi	113.324
16	20402209	SD Belik	39.800
17	20402551	SD Gesing	34.010
18	20402415	SD Kropak	788.460
19	20401769	SD Purwodadi I	974.000
20	20407392	SD Tepus IV	60
I		KAPANEWON GEDANGSARI	
1	20401906	SD Prengguk I	40.300
2	20401905	SD Prengguk II	193.500
3	20401788	SD Tegalrejo	675.200
4	20401808	SD Tengkluk	70.000
5	20402523	SD Gupit	301.120
6	20402508	SD Candi	247.830
7	20402538	SD Gedangan I	17.000
8	20402536	SD Gedangan II	226.000
9	20402460	SD Hargomulyo I	148.200
10	20402408	SD Hargomulyo II	25.550
11	20401873	SD Ngalang-alang Ombo	132.320
12	20401755	SD Serut	181.500
13	20407424	SD Serut Baru	16.000
14	20402069	SD Watugajah	829.795



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

15	20402423	SD Mertelu	16.412
16	20402422	SD Mertelu Baru	121.500
17	20402510	SD Guyangan	1.053.877
18	20401862	SD Ngalang I	218.865
19	20401872	SD Ngalang II	344.718
20	20402364	SD Karanganyar	61.230
21	20402497	SD Buyutan	243.088
22	20401772	SD Sampang	229.060
23	20402446	SD Kedung Bolong	20.200
24	20401889	SD Pondok	1.059.660
I		KAPANEWON NGAWEN	
1	20402208	SD Bendo	272
2	20402471	SD Daguran	19.410
3	20402067	SD Watusigar I	240
4	20402066	SD Watusigar II	7.600
5	20402535	SD Ngawen I	773.380
6	20402545	SD Ngawen II	-
7	20402544	SD Ngawen III	15.000
8	20401847	SD Pagerjurang	17.450
9	20402477	SD Ngampon	11.155
10	20401768	SD Purwareja	-
11	20402402	SD Jurangjero	-
12	20402529	SD Gunung Gambar	-
13	20401762	SD Sambeng I	176.000
14	20401761	SD Sambeng II	-
15	20401800	SD Tobong	167
16	20401771	SD Sambirejo	4.400
17	20402543	SD Ngawen IV	22.148
18	20402211	SD Beji	318.698
19	20401794	SD Tancep I	599.592
20	20401793	SD Tancep II	600
I		KAPANEWON NGLIPAR	
1	20402552	SD Gentungan	1.095.336
2	20401747	SD Sendowo I	776.700
3	20402435	SD Katongan II	25.764
4	20402481	SD Gajasari	305.480
5	20401846	SD Ngkipar I	235.640
6	20401845	SD Nglipar II	289.060
7	20402411	SD Kwarasan	313.830
8	20401830	SD Sumberjo	160.150



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

9	20401752	SD Sigerung	84.960
10	20409767	SD Natah	293.244
11	20402553	SD Gentungan III	18.060
12	20401931	SD Pilangrejo	66.920
13	20401745	SD Sendowo III	84.988
14	20402511	SD Glompong	43.926
15	20401738	SD Sendowo II	4.056.845
16	20402445	SD Karangsari	230.880
17	20407411	SD Katongan III	128.076
18	20402419	SD Klayar	1.003.060
19	20402505	SD Candi III	66.652
20	20402436	SD Katongan I	47.200
I		KAPANEWON PURWOSARI	
1	20402534	SD Giriasih	1.600
2	20407409	SD Nanas	2.808
3	20401932	SD Petoyan II	44.620
4	20401933	SD Petoyan I	3.215
5	20402515	SD Giripurwo	257.008
6	20402512	SD Giritirto	7.140
7	20402432	SD Klampok	20.000
8	20402376	SD Karangnongko I	900
9	20402374	SD Karangnongko III	5.624
10	20402441	SD Karangtengah II	13.780
11	20402442	SD Karangtengah I	15.000
12	20402533	SD Giricahyo	358.975
13	20402375	SD Karangnongko II	18.000
I		KAPANEWON SAPTOSARI	
1	20402406	SD Jetis I	270.170
2	20402087	SD Trowono II	620.130
3	20401925	SD Planjan II	45.605
4	20402451	SD Kepek I	1.371.180
5	20402450	SD Kepek II	984.910
6	20401871	SD Monggol II	131.950
7	20401901	SD Pucung	617.640
8	20402074	SD Trowono III	206.260
9	20401926	SD Planjan I	238.665
10	20401884	SD Monggol I	508.700
11	20402369	SD Kanigoro I	806.074
12	20402368	SD Kanigoro II	257.440
13	20402546	SD Gedangklutuk	848.904



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

14	20402521	SD Ngloro	703.578
15	20401779	SD Sawah	986.860
16	20402189	SD Bibis	116.178
17	20402405	SD Jetis II	515.530
18	20402416	SD Krambilsawit	4.067.086
I		KAPANEWON SEMANU	
1	20401877	SD Ngeposari	104.960
2	20401876	SD Ngeposari II	148.806
3	20402403	SD Jragum	80
4	20402073	SD Tunggak nongko	70
5	20401759	SD Semanu	15.116
6	20401758	SD Semanu III	1.740
7	20401744	SD Semanu IV	562.335
8	20401908	SD Pragak	135.655
9	20402409	SD Mijahan I	14.510
10	20402139	SD Mijahan II	24.570
11	20402413	SD Kuwon	1.270
12	20402407	SD Jetis	57.252
13	20402528	SD Gunungkunir I	737.378
14	20402527	SD Gunungkunir II	109.345
15	20402500	SD Cuwelo I	32.875
16	20402499	SD Cuwelo II	35.667
17	20402390	SD Jati	73.785
18	20401895	SD Plebengan	529.757
19	20402470	SD Dayakan II	538.030
20	20401879	SD Ngenep	52.886
21	20401822	SD Srepeng	2.360
22	20402412	SD Kwangen	164.790
23	20402485	SD Dadapayu I	1.000
24	20401837	SD Pacarejo II	129.000
25	20402484	SD Dadapayu II	544.150
26	20402526	SD Gunungsari	169.830
27	20402465	SD Dengok	51.160
28	20401841	SD Nitikan	11.470
29	20402393	SD Jasem	91.505
30	20402065	SD Wediwutah	1.050
I		KAPANEWON SEMIN	
1	20401742	SD Semin II	1.368.345
2	20401831	SD Sumberejo	15.660
3	20402490	SD Bulurejo II	1.200



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

4	20401743	SD Semin I	69.080
5	20401917	SD Payaman II	14.400
6	20402443	SD Karang Sari	446.928
7	20401741	SD Semin III	55.486
8	20401764	SD Rejosari III	2.823.132
9	20402434	SD Keringan	1.300
10	20401765	SD Rejosari II	1.186.720
11	20401864	SD Ngadipiro	279.172
12	20401832	SD Sumber	8.856
13	20402502	SD Candirejo I	600
14	20401878	SD Ngentak	1.000
15	20402076	SD Widoro	30.333
16	20402431	SD Logantung I	14.400
17	20402430	SD Logantung II	236.580
18	20402206	SD Bendung II	76.000
19	20401907	SD Prebutan	106.000
20	20401796	SD Tambran I	21.267
21	20401795	SD Tambran II	590
22	20402207	SD Bendung I	3.900
23	20407426	SD Klampok	3.000
24	20401880	SD Ngepoh	6.640
25	20401774	SD Sedono	183.700
26	20402491	SD Bulurejo I	23.400
I		KAPANEWON TANJUNGSARI	
1	20401767	SD Rejosari	348.530
2	20402382	SD Kemadang	363.500
3	20402370	SD Kanigoro	54.350
4	20402541	SD Gebang	3.000
5	20402458	SD Kemiri I	300
6	20401850	SD Panggang	280
7	20402392	SD Jaten	180.390
8	20402457	SD Kemiri II	20.630
9	20401875	SD Ngestiharjo	19.412
10	20402239	SD Banjarharjo	1.760
11	20402461	SD Gatak	357.203
12	20402395	SD Hargosari	300
13	20402427	SD Mendang	21.220
14	20402425	SD Mentel I	175.854
15	20402424	SD Mentel II	17.100



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

I		KAPANEWON WONOSARI	
1	20402459	SD Karangrejek II	594.725
2	20402063	SD Wonosari VI	162
3	20401930	SD Piyaman I	48.672
4	20402079	SD Wonosari II	617.250
5	20402077	SD Wonosari IV	998
6	20402080	SD Wonosari I	377.311
7	20402440	SD Karangtengah III	22.500
8	20407402	SD Karangtengah Baru	42.043
9	20401929	SD Piyaman II	4.583
10	20402474	SD Gari III	292
11	20402396	SD Jeruksari	16.065
12	20401928	SD Piyaman III	53.231
13	20402078	SD Baru	7.183
14	20402472	SD Duwet	73.031
15	20402394	SD Jambe	966
16	20401816	SD Soka	6.710
17	20402476	SD Gari I	260
18	20402237	SD Baleharjo	8.255
19	20402385	SD Kamal	69.183
20	20402400	SD Kajar	101.676
21	20402367	SD Karangtengah IV	104.407
22	20401756	SD Seneng	28.080
23	20401750	SD Siraman I	148.116
24	20401749	SD Siraman II	112.008
25	20401748	SD Siraman III	244.252
26	20402360	SD Karangrejek I	417.795
27	20401869	SD Mulo II	14.461
28	20401868	SD Mulo Baru	534.898
29	20401760	SD Selang	275
30	20401751	SD Singkar	1.656
SALDO AKHIR			128.725.762
I		JENJANG SMP NEGERI KAB. GUNUNGKIDUL	
1	20402003	SMP 1 GIRISUBO	19.865.240
2	20401996	SMP 2 GIRISUBO	3.493.885
3	20407377	SMP 3 GIRISUBO	138.874
4	20401950	SMP 1 PALIYAN	39.239.940
5	20402036	SMP 2 PALIYAN	12.815.338
6	20401937	SMP 1 PANGGANG	23.824.199
7	20402035	SMP 2 PANGGANG	1.686.331
8	20402013	SMP 3 PANGGANG	163.500



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

9	20407385	SMP 4 PANGGANG	1.170.030
10	20407374	SMP 5 PANGGANG	348.060
11	20402004	SMP 1 PLAYEN	6.547.680
12	20402007	SMP 2 PLAYEN	2.318.018
13	20402009	SMP 3 PLAYEN	4.563.290
14	20401988	SMP 4 PLAYEN	15.602.666
15	20402023	SMP 1 PURWOSARI	7.512.200
16	20404242	SMP 2 PURWOSARI	4.419.219
17	20402002	SMP 1 RONGKOP	7.954.816
18	69790722	SMP 2 RONGKOP	276.741
19	20402021	SMP 1 SAPTOSARI	6.396.418
20	20402032	SMP 2 SAPTOSARI	26.551.320
21	20407351	SMP 3 SAPTOSARI	-
22	20401993	SMP 1 TANJUNGSARI	4.230.988
23	20401997	SMP 2 TANJUNGSARI	12.533.787
24	20401966	SMP 3 TANJUNGSARI	10.837.474
25	20402018	SMP 1 TEPUS	13.291.940
26	20402029	SMP 2 TEPUS	8.124.217
27	20402010	SMP 3 TEPUS	10.153.656
28	20401954	SMP 1 GEDANGSARI	48.113.162
29	20402016	SMP 2 GEDANGSARI	38.657.057
30	20407350	SMP 3 GEDANGSARI	20.373.123
31	20401953	SMP 1 KARANGMOJO	5.014.913
32	20402008	SMP 2 KARANGMOJO	34.236.807
33	20402015	SMP 3 KARANGMOJO	8.777.292
34	20401952	SMP 1 NGAWEN	6.980.360
35	20402027	SMP 3 NGAWEN	1.320.496
36	20401991	SMP 4 NGAWEN	3.167.370
37	20407376	SMP 5 NGAWEN	565.003
38	20401951	SMP 1 NGLIPAR	16.247.152
39	20402026	SMP 2 NGLIPAR	3.355.078
40	20402014	SMP 3 NGLIPAR	1.664.801
41	20407375	SMP 4 NGLIPAR	288.956
42	20407349	SMP 1 PATUK	38.190.033
43	20402022	SMP 2 PATUK	16.874.966
44	20402033	SMP 3 PATUK	2.397.275
45	20401989	SMP 4 PATUK	31.803.082
46	20407330	SMP 5 PATUK	1.268.060
47	20402024	SMP 1 PONJONG	5.691.494
48	20402034	SMP 2 PONJONG	3.816.470
49	20402011	SMP 3 PONJONG	67.587.800
50	20401987	SMP 4 PONJONG	664.314



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

51	20402020	SMP 1 SEMANU	18.649.095
52	20402031	SMP 2 SEMANU	19.838.820
53	20401995	SMP 3 SEMANU	7.347.874
54	20402019	SMP 1 SEMIN	4.008.600
55	20402030	SMP 2 SEMIN	1.525.850
56	20401994	SMP 3 SEMIN	1.103.064
57	20407379	SMP 4 SEMIN	45.200
58	20402017	SMP 1 WONOSARI	1.465.518
59	20402028	SMP 2 WONOSARI	22.457.440
60	20401992	SMP 3 WONOSARI	7.020.152
61	20401998	SMP 4 WONOSARI	2.233.553
SALDO AKHIR			686.810.057
SALDO AKHIR BOSP REGULER			815.535.819

BOS KINERJA

		JENJANG SD NEGERI KAB GUNUNGKIDUL	
I		KAPANEWON GIRISUBO	
1	20401859	SD Nglindur	27.544.700
2	20401813	SD Songbanyu I	-
3	20402404	SD Joho	80.000
4	20402386	SD Jepitu III	-
I		KAPANEWON KARANGMOJO	
1	20402380	SD Karangmojo II	-
2	20402379	SD Karangmojo III	-
3	20401815	SD Sokoliman	2.514.400
4	20402366	SD Karangnom I	-
5	20402503	SD Candi Baru II	51.000
I		KAPANEWON PANGGANG	
1	20402410	SD Legundi I	-
2	20402514	SD Girisekar	70.289
3	20401839	SD Pacar	-
4	20402202	SD Bibal	-
I		KAPANEWON PONJONG	
1	20401826	SD Surubendo	20.590
2	20402532	SD Gombang II	-
3	20401899	SD Ponjong IV	190.343
4	20401886	SD Ponjong II	-
5	20401865	SD Ngabean	-
6	20402389	SD Jatisari	-



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

7	20402454	SD Kenteng I	3.360.000
8	20407394	SD Sawahan	-
9	20402522	SD Gombang I	-
I		KAPANEWON RONGKOP	
1	20402438	SD Karangwuni I	-
2	20402494	SD Bohol	-
I		KAPANEWON TEPUS	
1	20401900	SD Pudak	20.723.454
2	20402213	SD Bantalwatu	843.400
3	20402524	SD Gupakan II	-
I		KAPANEWON GEDANGSARI	
1	20402508	SD Candi	410.010
2	20402510	SD Guyangan	483.900
3	20402446	SD Kedung Bolong	-
4	20402497	SD Buyutan	4.029.900
5	20401788	SD Tegalrejo	-
6	20401862	SD Ngalang I	13.156.700
I		KAPANEWON NGAWEN	
1	20401793	SD Tancep II	-
2	20402477	SD Ngampon	-
I		KAPANEWON NGLIPAR	
1	20402435	SD Katongan II	-
2	20402436	SD Katongan I	20
3	20401747	SD Sendowo I	-
I		KAPANEWON PURWOSARI	
1	20401932	SD Petoyan II	6.335.000
2	20402533	SD Giricahyo	1.375.000
3	20402376	SD Karangnongko I	3.175.000
4	20402441	SD Karangtengah II	1.492.800
5	20402442	SD Karangtengah I	338.700
6	20402512	SD Giritirto	396.000
7	20402432	SD Klampok	-
8	20402515	SD Giripurwo	1.014.300
I		KAPANEWON SAPTOSARI	
1	20401901	SD Pucung	99.000



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2	20401884	SD Monggol I	48.000
3	20402405	SD Jetis II	78.100
4	20402521	SD Ngloro	788.200
5	20401925	SD Planjan II	184.400
6	20402416	SD Krambilsawit	5.965.000
7	20402450	SD Kepek II	582.425
I		KAPANEWON SEMANU	
1	20401908	SD Pragak	-
2	20401822	SD Srepeng	-
3	20402465	SD Dengok	-
4	20402470	SD Dayakan II	-
5	20401877	SD Ngeposari	-
6	20402526	SD Gunungsari	-
7	20402412	SD Kwangen	-
8	20401758	SD Semanu III	-
9	20401759	SD Semanu	-
I		KAPANEWON SEMIN	
1	20401764	SD Rejosari III	170.000
2	20401796	SD Tambran I	-
3	20401774	SD Sedono	-
4	20401831	SD Sumberejo	-
5	20402076	SD Widoro	1.270.000
I		KAPANEWON TANJUNGSARI	
1	20402382	SD Kemadang	308.866
2	20402461	SD Gatak	-
I		KAPANEWON WONOSARI	
1	20402079	SD Wonosari II	4.309.227
2	20402080	SD Wonosari I	-
3	20402237	SD Baleharjo	1.600
4	20402440	SD Karangtengah III	1.640.000
5	20402078	SD Baru	-
6	20402385	SD Kamal	919.500
7	20401751	SD Singkar	-
8	20401868	SD Mulo Baru	-
I		KAPANEWON PALIYAN	
1	20401851	SD Pampang II	-
2	20401853	SD Paliyan V	-



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

3	20401855	SD Paliyan III	6.192.600
4	20402517	SD Giring	666.000
5	20401817	SD Sodo	2.608.400
I		KAPANEWON PLAYEN	
1	20402075	SD Weroharjo	1.400.300
2	20401786	SD Teguhan	5.600
3	20402467	SD Dengok I	1.974.000
4	20402492	SD Bulu	291.170
5	20402466	SD Dengok II	-
6	20401894	SD Plembon	-
7	20401842	SD Ngunut	-
8	20402081	SD Wonolagi	-
9	20401860	SD Ngleri	-
I		KAPANEWON PATUK	
1	20401736	SD Sendangsari	1.879.500
2	20401920	SD Patuk I	-
3	20401753	SD Sidomulyo	-
4	20402488	SD Bunder II	2.186.000
SALDO AKHIR			121.173.394
I		JENJANG SMP NEGERI KAB GUNUNGKIDUL	
1	20402003	SMP 1 GIRISUBO	16.236.500
2	20402007	SMP 2 PLAYEN	50.200
3	20402023	SMP 1 PURWOSARI	118.000
4	69790722	SMP 2 RONGKOP	-
5	20401966	SMP 3 TANJUNGSARI	39.640.300
6	20402018	SMP 1 TEPUS	-
7	20402029	SMP 2 TEPUS	258.000
8	20402016	SMP 2 GEDANGSARI	1.080.000
9	20407350	SMP 3 GEDANGSARI	6.707.161
10	20401953	SMP 1 KARANGMOJO	-
11	20407376	SMP 5 NGAWEN	-
12	20402014	SMP 3 NGLIPAR	15.608.600
13	20401989	SMP 4 PATUK	7.360.074
14	20407330	SMP 5 PATUK	12.927.200
15	20402017	SMP 1 WONOSARI	-
16	20402028	SMP 2 WONOSARI	-
17	20401998	SMP 4 WONOSARI	10.452.444
SALDO AKHIR			110.438.479
SALDO AKHIR BOSP KINERJA			231.611.873
SALDO AKHIR BOSP REGULER + KINERJA – NEGERI			1.047.147.692



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Adapun daftar saldo kas Dana BOS per 31 Desember 2023 pada sekolah swasta senilai Rp327.668.982,00 dengan rincian sebagai berikut:

Daftar Rincian Saldo Kas Dana Bos Sekolah Swasta Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023

BOSP REGULER

I		JENJANG SD SWASTA KAB. GUNUNGKIDUL	
1	69859397	SD IT Bina Insani Panggang	322.600
2	20401783	SD Sanjaya Giring	83.000
3	20402142	SD Muhammadiyah Grogol	74.320
4	20402154	SD Muhammadiyah Mulusan II	121.480
5	20402155	SD Muhammadiyah Mulusan I	321.996
6	20402158	SD Muhammadiyah Karangduwet	765.390
7	20407430	SD Ki Ageng Giring	3.046.000
8	20402144	SD Muhammadiyah Dloko	230.570
9	20402248	SD Muhammadiyah Purwodadi	100.800
10	20402143	SD Muhammadiyah Gebang	-
11	20402146	SD Muhammadiyah Dawung	-
12	20402150	SD Muhammadiyah Bedoyo	-
13	20402157	SD Muhammadiyah Kuwon	592.350
14	20402179	SD Kanisius Trengguno	889.695
15	20402218	SD Muhammadiyah Wonodoyo	116.025
16	20402147	SD Muhammadiyah Branjang	805.300
17	20402231	SD Muhammadiyah Sumberjo	570.200
18	69758276	SD IT Permata Bangsa	933.179
19	20402148	SD Muhammadiyah Bogor	28.116.660
20	20402149	SD Muhammadiyah Beji	111.500
21	20402182	SD Veritas Bogor	900.000
22	20402183	SD Kanisius Beji	47.630
23	20402185	SD Kanisius Bandung I	48.140
24	20409850	SDII Waladun Sholihun	-
25	20402168	SD Bopkri Karangawen	195.000
26	20402151	SD Muhammadiyah Jelok	18.610
27	20402164	SD Kanisius Wonosari	68.945
28	20402232	SD Muhammadiyah Sukorejo	10.000
29	20402153	SD Muhammadiyah Pilangrejo	30.550
30	20402159	SD Muhammadiyah Kwarasan	1.267.270
31	20402162	SD Muhammadiyah Kedungpoh	-
32	20402176	SD Bopkri Planjan	246.925
33	20407384	SD IT Al I'tisham	4.690
34	20402156	SD Muhammadiyah Lemahbang	-



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

35	20402160	SD Muhammadiyah Kutugan	85.480
36	20402219	SD Muhammadiyah Widoro	1.327.400
37	20402235	SD Muhammadiyah Sidorejo	379.972
38	20402141	SD Muhammadiyah Jarah	3.243.500
39	20402161	SD Muhammadiyah Kemadang	144.420
40	20407405	SD Muhammadiyah Jrakah	-
41	20402140	SD Muhammadiyah Piyaman	7.685
42	20402152	SD Muhammadiyah Karangtengah	71.473
43	20402165	SD Kanisius Wonosari II	1.277.566
44	20402170	SD Al Mujahidin	17.784
45	20402180	SD Kanisius Pulutan	88.950
46	20402186	SD Bopkri Wonosari II	47.104
47	20402217	SD Muhammadiyah Wonosari	52.465
48	20402230	SD Muhammadiyah Wareng	-
49	20402233	SD Muhammadiyah Siraman	232.865
50	20407403	SD IT Tunas Mulia	4.069.621
51	69978057	SD Al Ahzar Wonosari	12.639.207
52	69986820	SD Muh. Unggulan Ashidiq Ngawen	-
53	69988097	SD IT Dian Insani	4.400.000
54	70000523	SD Muhammadiyah Ngepung	-
55	70006378	SD Alam Almaria Islamic Boarding School Karangmojo	287.700
56	70005499	SD Muhammadiyah Unggulan Al-Fatih Patuk	710.000
57	70007479	SD Islam Terpadu Ibnu Abbas V Nglipar	180.000
58	70003930	SD Muhammadiyah Bs Al Muttaqin	151.200
59	70024066	SD Muhammadiyah Unggulan Al-Falah Girisubo	285.100
60	70031166	SD IT Al- Asror Gedangsari	50.000
61	70032368	SD Quran Unggulan Al - Itisham Playen	55.810
SALDO AKHIR			69.844.127
II		JENJANG SMP SWASTA KAB. GUNUNGKIDUL	
1	20407331	SMP TAMAN DEWASA SONGBANYU	-
2	20401974	SMP MUHAMMADIYAH 1 PALIYAN	112.260
3	20401980	SMP MUHAMMADIYAH 2 PALIYAN	472.060
4	20401972	SMP BINA MUDA PANGGANG	302.154
5	20401979	SMP MUHAMMADIYAH PANGGANG	1.730.434
6	20401976	SMP MUHAMMADIYAH PLAYEN	7.000
7	69786845	SMP MUHAMMADIYAH AL MUJAHIDIN	278.740
8	20401949	SMP PGRI PLAYEN	28.600
9	20401957	SMP TAMAN DEWASA PLAYEN	21.390
10	20407354	SMP MUHAMMADIYAH SAPTOSARI	716.080
11	20407329	SMP PGRI SAPTOSARI	36.600
12	20401984	SMP MUHAMMADIYAH TANJUNGSARI	8.420.959
13	20407352	SMP MUHAMMADIYAH 1 TEPUS	1.827.370



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

14	20401961	SMP MUHAMMADIYAH 2 TEPUS	-
15	20407324	SMP SANJAYA TEPUS	-
16	20401985	SMP BHINA KARYA RONGKOP	2.002.370
17	20401960	SMP MUHAMMADIYAH RONGKOP	91.494
18	20401947	SMP MUHAMMADIYAH 1 GEDANGSARI	1.060.610
19	20401973	SMP MUHAMMADIYAH 2 GEDANGSARI	3.618.580
20	20404239	SMP ALHIKMAH KARANGMOJO	283.414
21	20401968	SMP EKA KAPTI KARANGMOJO	753.500
22	20401963	SMP MARGOLUHUR KARANGMOJO	-
23	20401944	SMP PEMBANGUNAN KARANGMOJO	2.510.617
24	20401959	SMP SANJAYA NGAWEN	1.404.515
25	69790718	SMP IT DARRUL MAGHFIROH	7
26	20401977	SMP MUHAMMADIYAH 1 NGLIPAR	1.061.400
27	20401981	SMP MUHAMMADIYAH 2 NGLIPAR	1.201.096
28	20401975	SMP MUHAMMADIYAH PONJONG	1.505.428
29	20401942	SMP PEMBANGUNAN PONJONG	65.291
30	20401940	SMP PERSATUAN PONJONG	14.640
31	20401956	SMP TAMAN DEWASA PONJONG	1.795.876
32	20407353	SMP MUHAMMADIYAH SEMANU	570.110
33	20401939	SMP PERSIAPAN SEMANU	2.595.720
34	20401938	SMP PGRI SEMANU	3.602.926
35	20401970	SMP BOPKRI SEMIN	-
36	20401967	SMP GOTONG ROYONG SEMIN	-
37	20401946	SMP MUHAMMADIYAH SEMIN	362.000
38	20401978	SMP MUHAMMADIYAH SIDOREJO SEMIN	75.000
39	20401941	SMP PEMBANGUNAN SEMIN	66.095
40	69873978	SMP AL ISLAM WONOSARI	388.000
41	20401969	SMP BOPKRI WONOSARI	862.774
42	69873951	SMP IT TUNAS MULIA	3.450.000
43	20401965	SMP KANISIUS WONOSARI	10.572.656
44	20401983	SMP MUHAMMADIYAH 1 WONOSARI	969.032
45	20407328	SMP MUHAMMADIYAH 2 WONOSARI	110.856
46	69970603	SMP ISLAM AL AZHAR 38 WONOSARI	1.363.000
47	69970604	SMP BAITUL QURAN PONJONG	2.279.827
48	70004939	SMP MUHAMMADIYAH UNGGULAN ASHIDIQ	-
49	70012772	SMP TQS ASSALAAM TEPUS	-
SALDO AKHIR			58.590.481
SALDO AKHIR BOSP REGULER			128.434.608

BOSP KINERJA

I		JENJANG SD SWASTA KAB. GUNUNGKIDUL	-
1	20402150	SD Muhammadiyah Bedoyo	-
2	69758276	SD IT Permata Bangsa	61.197



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

3	20407430	SD Ki Ageng Giring	-
4	20402148	SD Muhammadiyah Bogor	4.314.450
5	20402182	SD Veritas Bogor	-
6	20402183	SD Kanisius Beji	3.000
7	20402185	SD Kanisius Bandung I	-
8	20402170	SD Al Mujahidin	7.395.216
9	20402186	SD Bopkri Wonosari II	12.000
10	20407403	SD IT Tunas Mulia	2.125.000
11	69978057	SD Al Ahzar Wonosari	12.213.380
12	20402165	SD Kanisius Wonosari II	675.000
13	20402180	SD Kanisius Pulutan	-
14	20402217	SD Muhammadiyah Wonosari	15.000
15	20402233	SD Muhammadiyah Siraman	16.410.000
16	20402235	SD Muhammadiyah Sidorejo	-
17	20402164	SD Kanisius Wonosari	2.095.000
18	20402161	SD Muhammadiyah Kemadang	-
19	20402151	SD Muhammadiyah Jelok	1.313.000
20	20402143	SD Muhammadiyah Gebang	-
SALDO AKHIR			46.632.243
II		JENJANG SMP SWASTA KAB. GUNUNGKIDUL	
1	20401974	SMP MUHAMMADIYAH 1 PALIYAN	21.141.500
2	20401980	SMP MUHAMMADIYAH 2 PALIYAN	22.986.500
3	20401976	SMP MUHAMMADIYAH PLAYEN	1.900.000
4	69786845	SMP MUHAMMADIYAH AL MUJAHIDIN	-
5	20401984	SMP MUHAMMADIYAH TANJUNGSARI	31.432.400
6	20401961	SMP MUHAMMADIYAH 2 TEPUS	-
7	20401977	SMP MUHAMMADIYAH 1 NGLIPAR	1.097.400
8	20401975	SMP MUHAMMADIYAH PONJONG	1.708.700
9	20407353	SMP MUHAMMADIYAH SEMANU	19.902.400
10	20401938	SMP PGRI SEMANU	3.745.891
11	20401978	SMP MUHAMMADIYAH SIDOREJO SEMIN	31.210.000
12	69873951	SMP IT TUNAS MULIA	15.361.340
13	69970603	SMP ISLAM AL AZHAR 38 WONOSARI	2.116.000
SALDO AKHIR			152.602.131
SALDO AKHIR BOSP KINERJA			199.234.374
SALDO AKHIR BOSP REGULER + KINERJA - SWASTA			327.668.982



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Secara ringkas saldo kas dana BOS per 31 Desember 2023 yang ada di Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut :

SEKOLAH NEGERI				
	REGULER	815.535.819	466	Sekolah
	KINERJA	231.611.873	112	Sekolah
	TOTAL SEKOLAH NEGERI	1.047.147.692		
SEKOLAH SWASTA				
	REGULER	128.434.608	110	Sekolah
	KINERJA	199.234.374	33	Sekolah
	TOTAL SEKOLAH SWASTA	327.668.982		
	TOTAL	1.374.816.674		



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BAB VII P E N U T U P

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023. Laporan keuangan ini merupakan gambaran secara menyeluruh tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023 secara lengkap terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan beserta lampiran-lampirannya yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023 yang kami sajikan masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, dengan maksud untuk penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk periode yang akan datang, dan semoga Allah S.W.T selalu memberikan petunjuk-Nya. Amin.


Bupati Gunungkidul,
[Signature]
Sunaryanta